



Pemerintah
Kabupaten Kolaka

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka

Tahun 2025 - 2029





Pemerintah
Kabupaten Kolaka

**Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 3
Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kolaka
Tahun 2025-2029**



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka menengah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025–2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kolaka.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun

2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
12. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.
13. Arah kebijakan adalah kerangka kerja lima tahunan yang dijabarkan setiap tahun sebagai landasan dalam perumusan Program Prioritas Pembangunan.
14. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading/ Penjabaran kinerja.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD Provinsi.

BAB III SISTEMATIKA DAN ISI

Pasal 4

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
- c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah; dan
- e. Bab V Penutup.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA-PD dan RKPD selama tahun 2025-2029.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
 - b. Capaian target indikator kinerja daerah;
 - c. Efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - d. Efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Pasal 8

- (1) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:
 - a. Pemantauan; dan
 - b. Supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
 - a. RKPD dengan RPJMD; dan
 - b. Renja-PD dengan Renstra-PD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja-PD berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA-PD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.
- (2) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan RKPD dan Perubahan Renstra-PD.
- (5) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra-PD dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Penyesuaian muatan Renstra-PD sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran, program, yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Target indikator outcome dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra-PD per tahun digunakan sebagai ukuran capaian kinerja.
- (2) Penyesuaian target outcome dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi;
 - b. kondisi strategis daerah; atau
 - c. fiskal daerah.
- (3) Penyesuaian target outcome dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja-PD dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra-PD dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

RPJMD Kabupaten Kolaka berlaku Tahun 2025-2029.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 2 September 2025
BUPATI KOLAKA,

ttd,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 2 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd,

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 9/41/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



Suhartini,SH.,M.AP
Nip.197208261993112001

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025-2029

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.	6
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.	7
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.	8
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RTRW Kabupaten Kolaka	8
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kolaka	9
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.4.1 Maksud	9
1.4.2 Tujuan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	13
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	13
2.1.1 Aspek Geografi.....	13
2.1.2 Demografi	40
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	51
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	82
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum	106
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	117
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024.....	118
2.2.2 Neraca Daerah.....	141
2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030	153
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	167

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	167
2.3.2 Isu Strategis	188
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN .	241
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	241
3.1.1 Visi Daerah.....	241
3.1.2 Misi Daerah	243
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Daerah	249
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	253
3.2.1 Strategi.....	253
3.2.2 Arah Kebijakan	287
3.2.3 Program Prioritas Daerah.....	292
3.2.4 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025- 2029 terhadap Program Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029.....	327
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	330
4.1 Program Perangkat Daerah.....	330
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	380
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	380
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) 381	
4.2.3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045.....	403
BAB V PENUTUP.....	410
5.1 Kaidah Pelaksanaan	410
5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.....	411
5.1.2 Sinergi Pendanaan Pembangunan.....	411
5.1.3 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Nasional	412
5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	413
5.2.1 Pengendalian Perencanaan	413
5.2.2 Pengendalian Pelaksanaan.....	413
5.2.3 Evaluasi	414
5.3 Kesimpulan	414

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Administrasi Kabupaten Kolaka.....	15
Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kabupaten Kolaka dirinci Menurut Kecamatan.....	16
Tabel 2. 3 Karakteristik Bentang Alam (KBA) Kabupaten Kolaka.....	17
Tabel 2. 4 Karakteristik Vegetasi Alami Kabupaten Kolaka.....	18
Tabel 2. 5 Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kolaka	21
Tabel 2. 6 Status Daya Dukung Air Kabupaten Kolaka	24
Tabel 2. 7 Volume sampah dan penanganan sampah di Kabupaten Kolaka (m ³)	31
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka Perkecamatan Berdasarkan Jiwa Tahun 2020-2024.....	42
Tabel 2. 9 Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kolaka Tahun 2020- 2024	43
Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kolaka Menurut Kelompok Umur Tahun 2024.....	45
Tabel 2. 11 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029	48
Tabel 2. 12 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 2. 13 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024	59
Tabel 2. 14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2023.....	65
Tabel 2. 15 SDM Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2023.....	66
Tabel 2. 16 Tabel capaian indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kolaka.....	67
Tabel 2. 17 Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya Serta Situs Budaya Kabupaten Kolaka	74
Tabel 2. 18 IPG dan IDG Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023	76
Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2023.....	77
Tabel 2. 20 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	89
Tabel 2. 21 PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tanpa Pertambangan Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	90
Tabel 2. 22 Penyediaan Fasilitas TIK di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023.....	92

Tabel 2. 23 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023	96
Tabel 2. 24 Jumlah Jembatan di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023.....	98
Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Sarana Sumber Air Minum Terlindung.....	100
Tabel 2. 26 Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023.....	114
Tabel 2. 27 Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	120
Tabel 2. 28 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	122
Tabel 2. 29 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	124
Tabel 2. 30 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	132
Tabel 2. 31 Rincian Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	135
Tabel 2. 32 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	139
Tabel 2. 33 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	143
Tabel 2. 34 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030.....	155
Tabel 2. 35 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030.....	158
Tabel 2. 36 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030.....	162
Tabel 2. 37 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030	165
Tabel 2. 38 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor	167
Tabel 2. 39 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029	172
Tabel 2. 40 <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	195
Tabel 2. 41 Perumusan Isu Strategis Daerah	228
 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.....	 250
Tabel 3. 2 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.....	253

Tabel 3. 3 <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029 untuk Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang Berkaitan dengan Kabupaten Kolaka	254
Tabel 3. 4 Arah pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kolaka dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	266
Tabel 3. 5 Lokus Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kolaka	267
Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.....	287
Tabel 3. 7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029	296
Tabel 3. 8 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025- 2029 terhadap Program Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029	327
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah.....	331
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.....	380
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.....	381
Tabel 4. 4 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045.....	404

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar dokumen Perencanaan	6
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kolaka.....	14
Gambar 2. 2 Peta Tipe Vegetasi Alami Kabupaten Kolaka	19
Gambar 2. 3 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.....	27
Gambar 2. 4 Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2020-2024	28
Gambar 2. 5 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka	29
Gambar 2. 6 Capaian IKU, IKL, dan IKA Kabupaten Kolaka	29
Gambar 2. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	32
Gambar 2. 8 Histori Gempa Bumi di Kabupaten Kolaka Tahun 1990 – 2023	34
Gambar 2. 9 Peta Risiko Banjir Kabupaten Kolaka	35
Gambar 2. 10 Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Kolaka	36
Gambar 2. 11 Intensitas Emisi GRK Kabupaten Kolaka (Ton CO2e) Tahun 2020-2024.....	38
Gambar 2. 12 Emisi GRK Kabupaten Kolaka (Ton CO2e) menurut Sektor Tahun 2020-2024.....	39
Gambar 2. 13 Kuadran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim	40
Gambar 2. 14 Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)	41
Gambar 2. 15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	44
Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2024	45
Gambar 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.....	47
Gambar 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 (ribu jiwa).....	50
Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	52
Gambar 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	53
Gambar 2. 21 PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	54
Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	56

Gambar 2. 23 Indeks Gini Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	57
Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	58
Gambar 2. 25 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024	61
Gambar 2. 26 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023.....	62
Gambar 2. 27 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023.....	63
Gambar 2. 28 Prevalensi Stunting Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023.....	64
Gambar 2. 29 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 2. 30 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.....	70
Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2024	72
Gambar 2. 32 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	75
Gambar 2. 33 Capaian IKG Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	77
Gambar 2. 34 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2020-2023	79
Gambar 2. 35 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2020-2023	80
Gambar 2. 36 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023	81
Gambar 2. 37 Grafik Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2024	82
Gambar 2. 38 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan tahun 2024	83
Gambar 2. 39 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	85
Gambar 2. 40 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	86
Gambar 2. 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	88
Gambar 2. 42 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	94
Gambar 2. 43 Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Kolaka	96
Gambar 2. 44 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Kolaka	97

Gambar 2. 45 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum di Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023	99
Gambar 2. 46 Produksi dan Pemanfaatan Air Bersih PDAM Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	100
Gambar 2. 47 Jumlah Pelanggan PDAM Kategori Rumah Tangga di Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023	101
Gambar 2. 48 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	102
Gambar 2. 49 Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023	104
Gambar 2. 50 Grafik Inflasi Kabupaten Kolaka mengacu pada inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara	105
Gambar 2. 51 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	107
Gambar 2. 52 Nilai SAKIP Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	108
Gambar 2. 53 Indeks SPBE Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023 ...	110
Gambar 2. 54 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	112
Gambar 2. 55 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kolaka Tahun 2022-2024.....	113
Gambar 2.56 Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Sultra, dan Kabupaten Kolaka Tahun 2023.....	116
Gambar 2. 57 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024 (%).....	127
Gambar 2. 58 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	129
Gambar 2. 59 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	130
Gambar 2. 60 Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024 (%).....	133
Gambar 2. 61 Rasio Likuiditas Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	147
Gambar 2. 62 Rasio Solvabilitas Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.....	149
Gambar 2. 63 Rasio Aktivitas Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023	151
Gambar 2. 64 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kolaka.....	223
Gambar 2. 65 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kolaka.....	224

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah telah memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih mandiri serta mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat setempat. Salah satu aspek yang mengalami penguatan adalah perumusan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam menetapkan kebijakan strategis, mengelola sumber daya, serta mengimplementasikan program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif, efektif, dan inovatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing wilayah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 258 ayat (2) mengamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangan, karakteristik, serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya bersifat mandiri, tetapi juga harus selaras dengan kebijakan nasional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan.

Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemilihan kepala daerah serentak yang ditindaklanjuti dengan pelantikan kepala daerah baru pada tanggal 20 Februari Tahun 2025 Kabupaten Kolaka yakni H. Amri, S. STP, M.Si sebagai Bupati dan H. Husmaluddin dan sebagai Wakil Bupati untuk periode 2025-2029 perlu direspon dengan penyusunan dokumen RPJMD sebagai arahan pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun kedepan yang akan menjadi pedoman utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD harus disusun secara terarah, sistematis, dan berbasis data agar mampu mencerminkan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah terpilih, sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Lebih dari itu, RPJMD Kabupaten Kolaka merupakan bagian integral sebagai pelaksanaan periode pertama RPJPD dalam mewujudkan Visi Kolaka 2045 Kolaka sebagai Daerah Perjuangan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman pembangunan jangka menengah, tetapi juga memastikan kesinambungan dan keterpaduan kebijakan dalam skala yang lebih luas, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Secara substansi, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu, RPJMD juga merinci program prioritas perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lebih lanjut, penyusunan RPJMD juga

memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, yang berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. KLHS RPJMD berperan dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari pembangunan, serta menyusun langkah-langkah antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan kompensasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

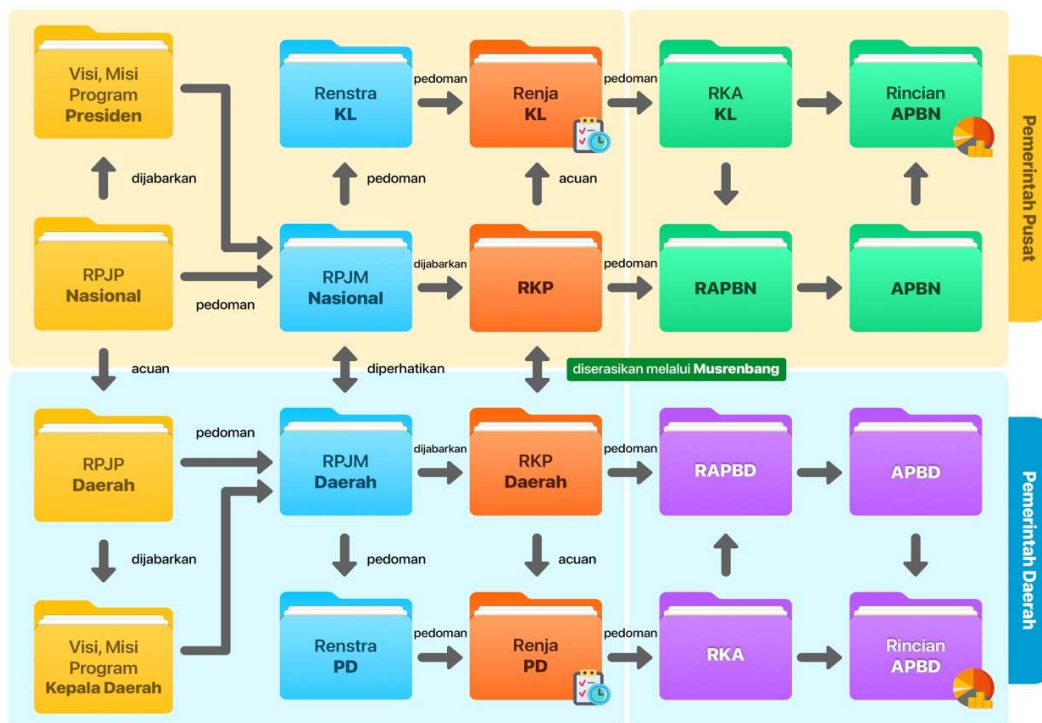
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 11);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. SPPN memiliki tujuan berupa mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin terciptanya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. SPPN dengan demikian menjadi landasan untuk perencanaan yang terintegrasi dan saling bersinergi.



Gambar 1. 1 Hubungan Antardokumen Perencanaan

Dokumen RPJMD dengan demikian harus memiliki keterkaitan dan membangun sinergi antar perencanaan berjangka maupun dengan perencanaan pemerintah pusat dan provinsi. Penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2025 ini memiliki momentum sebagai modalitas bagi sinergi antardokumen, karena antara perencanaan pusat dan daerah memiliki awal periode yang sama. Substansi yang ditelaah dari setiap dokumen perencanaan agar terdapat keterkaitan dengan dokumen RPJMD sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMN 2025 – 2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2029 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional/ provinsi dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pembangunan Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2045 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Renstra perangkat daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Dokumen RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan APBD setiap tahun selama lima tahun.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RTRW Kabupaten Kolaka

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023 – 2042 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2042. Dokumen RTRW dipedomani dengan maksud untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kolaka

Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan program. Dokumen KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka 2025 - 2029 adalah untuk menghasilkan pijakan penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka 2025 - 2029 yang disiapkan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik yang memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan isu strategis daerah, serta rekomendasi.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka 2025 – 2029, yaitu:

1. Mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data dan informasi yang relevan dan penting terkait gambaran umum kondisi daerah baik pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah serta Aspek Pelayanan Umum;
2. Menelaah, menyajikan dan menyajikan hasil evaluasi rencana pembangunan lima tahunan (RPJMD) untuk memberikan

gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana tahunan (RKPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun;

3. Menyajikan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan tujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pendanaan pembangunan daerah;
4. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan Urusan;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kolaka 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kolaka beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Di samping itu, Bab II juga menyajikan gambaran keuangan daerah yang menjelaskan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029; serta rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang narasi penjelasan mengenai visi dan misi daerah selama lima tahun ke depan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penerjemahan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikatornya. Dalam Bab III juga dimuat penjelasan mengenai strategi, arah kebijakan, serta program-program prioritas daerah dalam menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi tentang daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

dalam mencapai kinerja pembangunan daerah beserta target dan pagu indikatif. Bab ini juga memuat target pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang tercermin dalam indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab V memuat tentang kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya

pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Bab ini memiliki arti penting dalam memberikan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan agar program dan kebijakan yang telah dirancang berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Esensi dari aspek geografi memuat informasi keruangan yang mewakilkan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya maupun interaksi antar wilayah. Informasi yang dimuat dalam aspek geografi menekankan bagaimana karakteristik biofisik wilayah memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial dalam skala ruang. Aspek demografi merupakan aspek sosial kependudukan yang memuat informasi distribusi, struktur, dan komposisi penduduk dalam suatu wilayah. Berikut diuraikan deskripsi aspek geografi dan aspek demografi di Kabupaten Kolaka.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Gagasan aspek geografi menguraikan karakteristik keruangan suatu wilayah memengaruhi sosial budaya masyarakat dan kekuatan interaksi wilayah yang terwujud dalam skala ruang. Aspek geografi Kabupaten Kolaka diwakilkan melalui informasi lokasi wilayah, penggunaan lahan, topografi, dan klimatologi. Informasi keruangan tersebut dimanfaatkan sebagai input dalam menganalisis potensi pengembangan wilayah dan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Kolaka merupakan daerah administrasi dari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cakupan wilayah meliputi wilayah daratan dan kepulauan. Wilayah daratan Kabupaten Kolaka mencakup 296.973 Ha termasuk 14 pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang Teluk Bone.

Tabel 2. 1 Pembagian Administrasi Kabupaten Kolaka

Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Total Desa dan Kelurahan
Watubangga	Watubangga	11	3	14
Tanggetada	Anaiwoi	13	1	14
Pomalaa	Taonggoni	8	4	12
Wundulako	Wundulako	6	5	11
Baula	Baula	9	1	10
Kolaka	Lamakato	0	7	7
Latambaga	Mangolo	0	7	7
Wolo	Wolo	12	2	14
Samaturu	Tosiba	17	2	19
Toari	Toari	9	1	10
Polinggona	Polinggona	6	1	7
Iwoimendaa	Iwoimendaa	10	0	10
Kabupaten Kolaka		100	35	135

Sumber: BPS Kab. Kolaka, 2024

Menurut data profil administrasi Kabupaten Kolaka, terdapat tiga kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Samaturu, Kecamatan Watubangga, Kecamatan Tanggeta dan Kecamatan Wolo. Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga merupakan daerah dengan jumlah kelurahan terbanyak, namun tidak terdapat administrasi desa dalam wilayahnya. Sedangkan dari total wilayah desa dan kelurahan, Kecamatan Wolo dan Kecamatan Samaturu adalah daerah dengan total administrasi desa dan kelurahan terbanyak.

Sementara dari aspek luas wilayah, daerah dengan jumlah desa terbanyak merupakan daerah dengan cakupan luas wilayah terbesar atau di atas 10 persen luasan, di antaranya yaitu Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, dan Kecamatan Watubangga. Sedangkan kecamatan dengan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Baula dan Kecamatan Toari dengan persentase luas wilayah berkisar 3 persen. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil wilayah yang baru termamfaatkan karena sebagian besar wilayah Kabupaten Kolaka diliputi kawasan hutan.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kabupaten Kolaka dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas	
	Area (Ha)	Persentase
Watubangga	35.197,0	11,90
Tanggetada	23.770,0	8,03
Pomalaa	24.390,0	8,24
Wundulako	17.261,0	5,83
Baula	10.790,0	3,65
Kolaka	13.445,0	4,54
Latambaga	22.446,0	7,59
Wolo	39.503,0	13,35
Samaturu	65.908,0	22,28
Toari	10.537,0	3,56
Polinggona	12.402,0	4,19
Iwoimendaa	20.222,0	6,83
Kabupaten Kolaka	296.073,0	100

Sumber: RTRW Kab. Kolaka Tahun 2023-2042

Seluruh kecamatan di Kabupaten Kolaka telah terhubung dengan pusat pemerintahan kabupaten melalui jalur darat berupa jalan arteri dan jalan kolektor. Konektivitas melalui jalur darat membantu membangun keterhubungan antar kecamatan supaya memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Terdapat beberapa kecamatan yang dilalui jalur arteri yang menghubungkan antar kabupaten, di antaranya yaitu Kecamatan Iwoimendaa, Kecamatan Wolo, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Latambaga, dan Kecamatan Kolaka. Secara keruangan, akses interaksi antar wilayah Kabupaten Kolaka lebih dekat dengan Kabupaten Kolaka Timur. Akses interaksi dihubungkan melalui jalur arteri yang menghubungkan secara langsung antara pusat kegiatan di Kabupaten Kolaka dengan pusat kegiatan Kabupaten Kolaka Timur.

Kabupaten Kolaka memiliki peran strategis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan skala regional dengan kabupaten sekitarnya, terutama dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan konektivitas wilayah. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya pertambangan nikel, Kolaka berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi melalui industri pertambangan dan pengolahan mineral yang mendukung hilirisasi. Sektor pertanian dan perikanan juga menjadi andalan ekonomi Kabupaten Kolaka. Produksi

kakao mencapai 15.000 ton dan produksi perikanan tangkap mencapai 10.000 ton pada tahun 2023, menunjukkan potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan ekspor daerah.

Selain itu, posisi geografis Kolaka yang berada di jalur perdagangan antara Kota Kendari dan wilayah barat Sulawesi menjadikannya sebagai pusat distribusi barang dan jasa yang memperkuat hubungan ekonomi dengan kabupaten tetangga seperti Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan Konawe. Infrastruktur transportasi, seperti Pelabuhan Kolaka yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan, turut meningkatkan mobilitas dan perdagangan antarwilayah, mempercepat arus barang serta jasa.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan data spasial bentang alam, diketahui bahwa wilayah Kabupaten Kolaka memiliki 12 tipe bentang alam yang didominasi oleh Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik, sebagian kecil perbukitan vulkanik bermaterial beku luar.

Tabel 2. 3 Karakteristik Bentang Alam (KBA) Kabupaten Kolaka

No.	Ekoregion
1	Danau
2	Dataran Fluvial
3	Dataran organik/koral
4	Dataran Marine
5	Dataran Struktural
6	Dataran Vulkanik
7	Pegunungan Struktural
8	Pegunungan Vulkanik
9	Perbukitan Denudasional
10	Perbukitan Solusional/kart
11	Perbukitan Struktural
12	Perbukitan Vulkanik

Sumber: D3TLH Kabupaten Kolaka, 2018

Wujud vegetasi merupakan cerminan fisiognomi (penampakan luar) dari interaksi antara tumbuhan, hewan dan lingkungannya (Webb & Tracey 1994 dalam Laporan D3TLH Kolaka, 2018). Untuk mengenal tipe-tipe ekosistem dapat digunakan berbagai ciri, tetapi ciri-ciri vegetasi

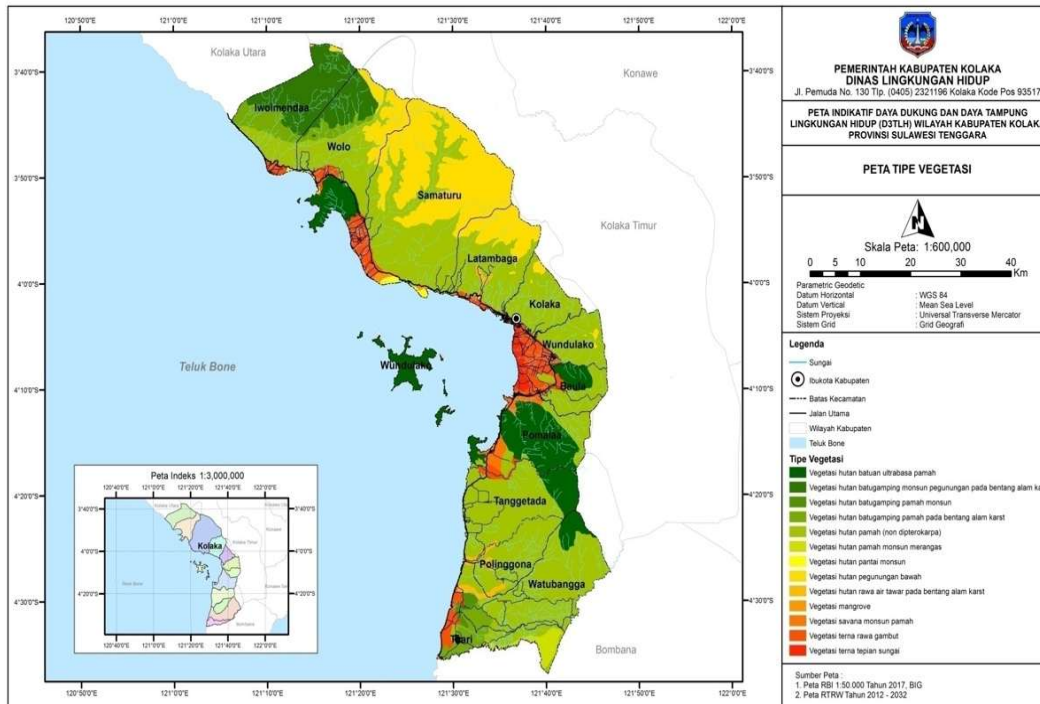
(komunitas tumbuhan) adalah yang paling mudah digunakan. Dengan demikian tipe vegetasi dapat digunakan sebagai pengganti dan wakil dari ekosistem karena kehidupan sebagian besar hewan bergantung kepada vegetasi, dan juga karena vegetasi lebih mudah dikenal dan diteliti.

Tabel 2. 4 Karakteristik Vegetasi Alami Kabupaten Kolaka

No	Tipe Vegetasi Alami
1.	Vegetasi Lahan Kering Pamah
2.	Vegetasi Lahan Pamah
3.	Vegetasi Monsun Lahan Kering Pamah
4.	Vegetasi Air Tawar
5.	Vegetasi Monsun Rawa Air Tawar
6.	Vegetasi Rawa Air Tawar Pamah
7.	Vegetasi Monsun Air Masin
8.	Vegetasi Monsun Air Masin Pamah
9.	Vegetasi Monsun Lahan Pamah
10.	Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah
11.	Vegetasi Lahan Kering Pamah
12.	Vegetasi Lahan Pamah
13.	Vegetasi Pegunungan Atas
14.	Vegetasi Pegunungan Bawah
15.	Vegetasi Solusional /Kart Pegunungan Bawah
16.	Vegetasi Monsun Solusional/Karst Pegunungan
17.	Vegetasi Monsun Solusional/Karst Lahan Pamah

Sumber: D3TLH Kabupaten Kolaka, 2018

Tipe vegetasi alami yang dominan di Kabupaten Kolaka adalah Hutan pamah (non diptrokarpa) dan Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst.



Gambar 2. 2 Peta Tipe Vegetasi Alami Kabupaten Kolaka

Sumber: D3TLH Kabupaten Kolaka, 2018

Vegetasi alami adalah mosaik komunitas tumbuhan dalam landscape yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Vegetasi alami beradaptasi dengan lingkungannya dan karena itu ada dalam keharmonisan dengan unsur-unsur lain dari landscape. Vegetasi alami bukan hanya merupakan sebuah komponen dari keanekaragaman hayati yang menyediakan sumberdaya alam, tetapi juga mempunyai peran penting dalam segi hidrologi dan perbaikan iklim. Dengan demikian luasan, kualitas dan keanekaragaman vegetasi alami setiap landscape perlu dikonservasi secara maksimal. Tanpa pengetahuan dan informasi yang memadai, hendaknya sumberdaya alam tidak dilepas begitu saja dalam upaya untuk membantu manusia memanfaatkan lingkungan.

Struktur, komposisi spesies dan sebaran geografi vegetasi ditentukan oleh factor lingkungan, terutama iklim dan tanah. Hubungan antara vegetasi dan tanah sangat erat sehingga dapat dianggap sebagai

suatu seutuhan. Lingkungan tumbuhan adalah semua faktor (terutama suhu, air, kimia dan fisik) yang mempengaruhinya, yang disebut “habitat”.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu daerah mencakup kebutuhan dan ketersediaan pangan dan air sebagai komponen pokok penopang kehidupan. Daya dukung diketahui dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk hidup layak. Daya dukung pangan dan air berguna untuk mengetahui kecenderungan kondisi maupun perubahan kecukupan pangan dan air di masa mendatang. Alternatif skenario dan rekomendasi D3TLH dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kolaka dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan D3TLH (pangan, air, kehati dan jasa ekosistem lainnya) terhadap jumlah penduduk Kabupaten Kolaka. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan; mutu hidup; dan kesejahteraan masyarakat.

1. Daya Dukung Pangan

Status daya dukungan pangan Kabupaten Kolaka tahun 2022 secara agregat berada pada kategori Belum Melampaui, artinya ketersediaan pangan masih lebih tinggi dibanding kebutuhan pangan masyarakat. Terdapat 3 kecamatan yang terlampaui, atau ketersediaan pangannya sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakatnya, yakni Kecamatan Pomala, Kolaka, dan Latambaga. Status daya dukung pangan pada tahun 2025 dan 2030 sesuai hasil proyeksi daya dukung pangan menunjukkan bahwa daya dukung pangan Kabupaten Kolaka secara agregat berada pada kategori Terlampaui, hanya 4 kecamatan yang statusnya belum terlampaui, yakni Kecamatan Watubangga, Toari, Polinggona, dan Wundulako.

Tabel 2. 5 Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kolaka

No	Kelurahan	Daya Dukung Pangan Tahun 2022				Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025				Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2030			
		Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Ambang Batas Penduduk	Selisih Ambang Batas Penduduk	Status Daya Dukung Pangan	Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Ambang Batas Penduduk	Selisih Ambang Batas Penduduk	Status Daya Dukung Pangan	Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Ambang Batas Penduduk	Selisih Ambang Batas Penduduk	Status Daya Dukung Pangan
1	Watubangga	26.271.006.346	34.929	19.071	Belum Terlampaui	10.427.305.281	13.287	3.302	Belum Terlampaui	10.427.305.281	4.499	9.564	Belum Terlampaui
2	Tanggetada	28.341.337.890	38.183	23.353	Belum Terlampaui	47.311.988.683	60.289	(43.311)	Terlampaui	47.311.988.683	72.277	(56.275)	Terlampaui
3	Toari	9.582.498.697	12.478	3.254	Belum Terlampaui	1.286.755.845	1.640	8.432	Belum Terlampaui	1.286.755.845	286	7.878	Belum Terlampaui
4	Polinggona	21.178.923.163	28.627	22.022	Belum Terlampaui	1.604.344.765	2.044	3.603	Belum Terlampaui	1.604.344.765	315	3.050	Belum Terlampaui
5	Pomala	21.580.672.701	30.163	(2.427)	Terlampaui	61.129.542.871	77.897	(44.296)	Terlampaui	61.129.542.871	111.149	(82.037)	Terlampaui
6	Wundulako	16.782.557.979	23.373	955	Belum Terlampaui	10.271.103.417	13.088	10.866	Belum Terlampaui	10.271.103.417	5.929	16.942	Belum Terlampaui
7	Baula	13.462.818.026	19.040	5.801	Belum Terlampaui	36.637.386.555	46.587	(33.273)	Terlampaui	36.637.386.555	79.386	(66.130)	Terlampaui
8	Kolaka	13.104.304.452	19.155	(22.703)	Terlampaui	100.935.365.189	128.621	(86.229)	Terlampaui	100.935.365.189	422.527	(386.500)	Terlampaui
9	Latambaga	20.444.073.316	30.091	(2.702)	Terlampaui	36.152.819.224	46.069	(12.400)	Terlampaui	36.152.819.224	48.463	(18.377)	Terlampaui
10	Wolo	49.628.244.941	72.055	49.768	Belum Terlampaui	29.577.764.249	37.691	(15.495)	Terlampaui	29.577.764.249	25.365	(4.189)	Terlampaui
11	Samaturu	49.889.313.047	73.299	44.853	Belum Terlampaui	53.531.331.392	68.215	(40.972)	Terlampaui	53.531.331.392	47.421	(21.262)	Terlampaui
12	Iwoimendaa	19.314.314.772	27.481	19.351	Belum Terlampaui	2.426.007.771	3.091	5.540	Belum Terlampaui	2.426.007.771	539	7.239	Belum Terlampaui
Kab Kolaka		289.580.065.330	408.874	160.596	Belum Terlampaui	391.291.715.242	498.519	(244.233)	Terlampaui	391.291.715.242	818.156	(590.097)	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Hasil proyeksi status daya dukung pangan di Kabupaten Kolaka hingga tahun 2030 menunjukkan 9 kecamatan berstatus "Terlampau", disarankan untuk meningkatkan kapasitas daya dukung pangan melalui pengembangan pertanian *regenerative*, pertanian adaptif, dan pembangunan pertanian berbasis rendah karbon. Kabupaten Kolaka memiliki garis pantai yang panjang, maka pengembangan akuakultur, tambak, dan *blue seafood* lestari sangat diperlukan untuk mendukung sistem ketahanan pangan berkelanjutan.

Pertanian regeneratif adalah pertanian yang berprinsip meningkatkan kualitas lahan pertanian dengan rehabilitasi dan revitalisasi seluruh ekosistem, seperti tanah dan air. Pertanian regeneratif menitik beratkan pada manajemen air, penggunaan pupuk, dan mempertahankan keragaman biologis untuk menciptakan lahan pertanian yang sehat, sehingga dapat meningkatkan kadar karbon dan biomassa tanaman yang ditangkap akan lebih banyak, kualitas produk pertanian meningkat dan harga jual bertambah. Sebagai contoh pertanian *regenerative* bisa diterapkan pada pertanian lahan kering dan peternakan sapi.

Pertanian adaptif adalah pengembangan pertanian yang bisa beradaptasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, misalnya sumberdaya lahan dan air yang semakin terbatas, adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu, munculnya iklim ekstrim serta terjadinya pergeseran pola musim dan curah hujan telah menjadi ancaman bagi upaya peningkatan produksi pertanian. Untuk menghadapi tantangan seperti fenomena di atas, maka pengembangan pertanian adaptif sangat relevan diterapkan.

Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan pertanian rendah karbon misalnya pengelolaan sawah menggunakan *minimum tillage*, penggunaan pupuk organik dan biogas untuk menyerap emisi GRK, perbaikan system pengolahan tanah, termasuk pengembangan pangan

local yang menghasilkan emisi GRK yang lebih rendah dibandingkan dengan pangan dari luar.

2. Daya Dukung Air

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama manusia dan memiliki hubungan dengan ekosistem selain pangan. Manusia memerlukan air bersih untuk minum, memasak, membersihkan diri, dan berbagai keperluan sehari-hari lainnya. Secara alami, sumber air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti sungai dan danau, serta dari air tanah. Secara keseluruhan di Kabupaten Kolaka, lahan yang mampu menyediakan air dapat diklasifikasikan menjadi berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Tabel 2. 6 Status Daya Dukung Air Kabupaten Kolaka

No	Kelurahan	Daya Dukung Air Tahun 2022		Daya Dukung Air Tahun 2025				Daya Dukung Air Tahun 2030			
		Ketersediaan Air (m3/tahun)	Status Daya Dukung Air	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Ambang Batas Penduduk	Selisih Ambang Batas Penduduk	Status Daya Dukung	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Ambang Batas Penduduk	Selisih Ambang Batas Penduduk	Status Daya Dukung
1	Watubangga	110.876.414	Belum Terlampaui	42.251.053	24.090	7.501	Belum Terlampaui	8.462.554	4.995	(9.068)	Terlampaui
2	Tanggetada	115.992.763	Belum Terlampaui	52.240.084	29.943	12.965	Belum Terlampaui	13.823.738	8.188	(7.814)	Terlampaui
3	Toari	40.582.883	Belum Terlampaui	16.021.956	8.396	(1.676)	Terlampaui	3.404.107	1.874	(6.290)	Terlampaui
4	Polinggona	89.295.636	Belum Terlampaui	49.928.390	30.513	24.865	Belum Terlampaui	18.947.115	11.782	8.417	Belum Terlampaui
5	Pomala	83.381.433	Belum Terlampaui	31.791.201	9.490	(24.111)	Terlampaui	6.373.377	(1.016)	(30.129)	Terlampaui
6	Wundulako	67.592.696	Belum Terlampaui	24.024.139	9.331	(14.624)	Terlampaui	4.284.445	826	(22.045)	Terlampaui
7	Baula	53.939.475	Belum Terlampaui	23.472.253	12.424	(990)	Terlampaui	5.865.453	3.249	(10.007)	Terlampaui
8	Kolaka	54.305.889	Belum Terlampaui	21.243.502	(8.715)	(51.107)	Terlampaui	4.444.860	(22.111)	(58 138)	Terlampaui
9	Latambaga	87.888.417	Belum Terlampaui	33.723.102	5.965	(27.704)	Terlampaui	6.832.621	(9.510)	(39.596)	Terlampaui
10	Wolo	221.517.748	Belum Terlampaui	112.515.097	65.476	43.280	Belum Terlampaui	36.381.554	21.382	206	Belum Terlampaui
11	Samaturu	217.431.482	Belum Terlampaui	79.082.498	44.694	17.452	Belum Terlampaui	14.655.826	8.241	17.919	Terlampaui
12	Iwoimendaa	85.080.860	Belum Terlampaui	31.098.595	15.674	7.043	Belum Terlampaui	5.811.063	239	(7.539)	Terlampaui
Kab Kolaka		1.227.885.696	Belum Terlampaui	517.391.870	247.281	(7.106)	Terlampaui	129.286.713	28.139	(105.946)	Terlampaui

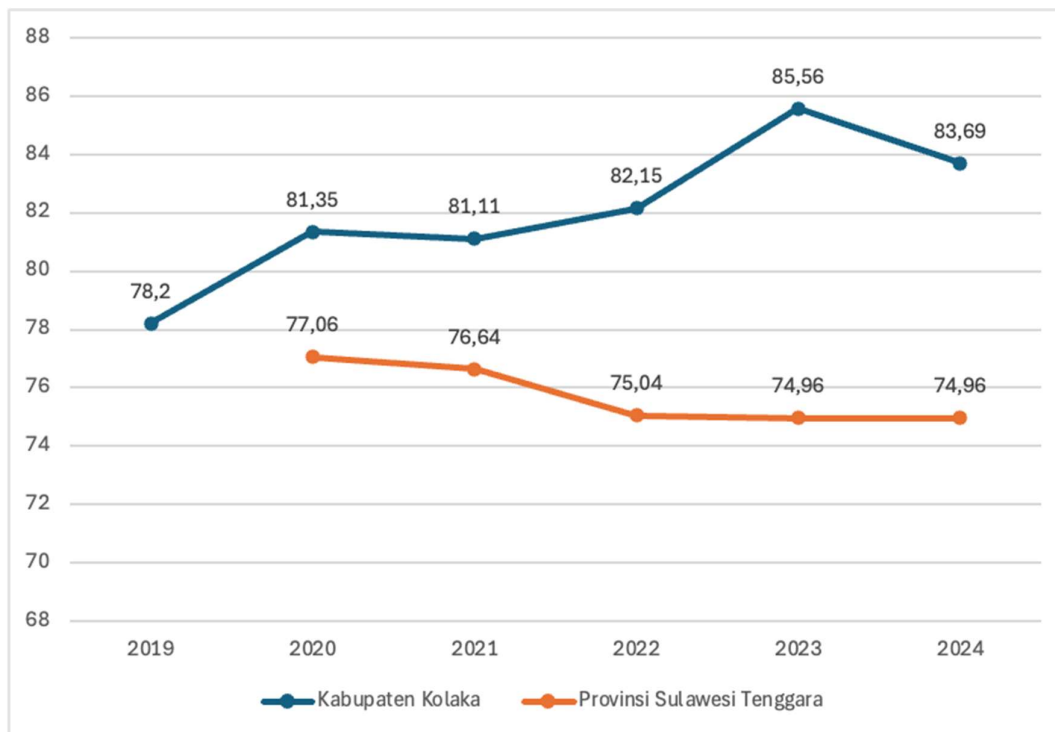
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Status daya dukung air tahun 2022 Kabupaten Kolaka secara agregat berada dalam status **Belum Melampaui**. Proyeksi daya dukung air Kabupaten Kolaka pada Tahun 2025 dan 2030 menunjukkan bahwa daya dukung air berada pada status **Terlampau**. Terdapat 6 (enam) kecamatan kondisi status daya dukung air **terlampau** pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2030 hanya kecamatan Polinggana dan Wolo yang berada pada status **Belum Melampaui**. Sehingga untuk mengantisipasi dampak luas dari kondisi ini maka skenario kebijakan yang disarankan adalah: mengkonservasi daerah-daerah tangkapan air terutama pada DAS yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka dan mengembangkan Kerjasama dengan Kabupaten yang berbatasan khususnya dalam konservasi DAS yang berlintasan misalnya dengan Kabupaten Bombana pada pengelolaan DAS Toari, dan kabupaten lainnya. Kebijakan selanjutnya adalah rehabilitasi dan restorasi lahan kritis, sempadan sungai. Selanjutnya meningkatkan kapasitas penyediaan dan penyimpanan air.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor untuk mendukung capaian kinerja kualitas sumber daya manusia dan menjadi faktor penopang bagi kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka. Ketahanan pangan umumnya dinilai menggunakan indikator indeks ketahanan pangan. Indikator ini memiliki tiga dimensi, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Berikut adalah skor indeks ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka tahun 2019 hingga 2024.



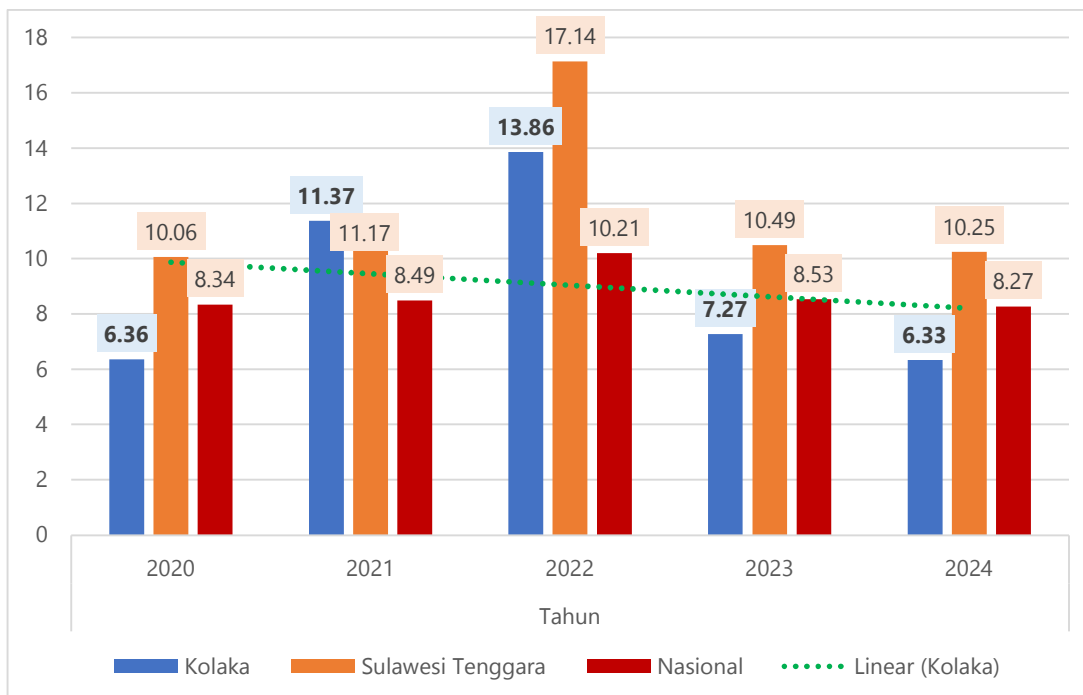
Gambar 2. 3 Capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kolaka

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Berdasarkan gambar tersebut, capaian ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka jauh berada di atas ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pasokan pangan di Kabupaten Kolaka masih terjaga.

2. Prevalensi Ketidacukupan Pangan

IKP Kabupaten Kolaka sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sampai dengan 2023, namun kembali menurun pada tahun 2024. Fluktuasi IKP di Kabupaten Kolaka selaras dengan fluktuasi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan masyarakat Kolaka.



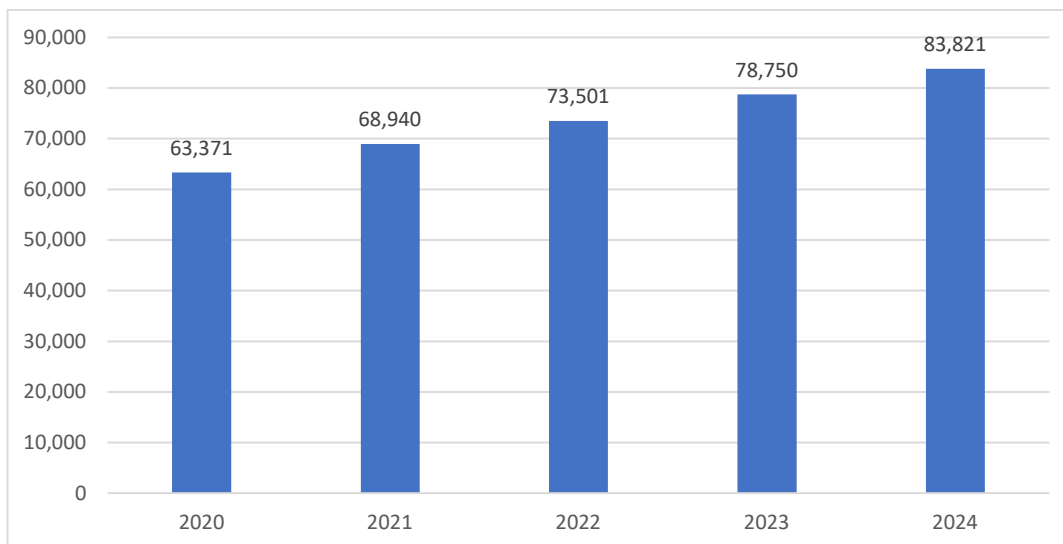
Gambar 2. 3 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Sumber: BPS Nasional tahun 2020-2024

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Kolaka selama periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren yang menurun, hal tersebut menunjukkan kondisi yang baik untuk kecukupan pangan masyarakat Kolaka. Upaya pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat telah dilakukan dengan baik.

3. Akses terhadap Jaringan Listrik

Infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Kolaka dilayani oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kolaka dengan pasokan listrik dari Gardu Induk Kolaka dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mampu menghasilkan daya sebesar 16 MW dari daya terpasang sebesar 20 MW. Jumlah pelanggan listrik Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan selama 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 4 Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka, 2025

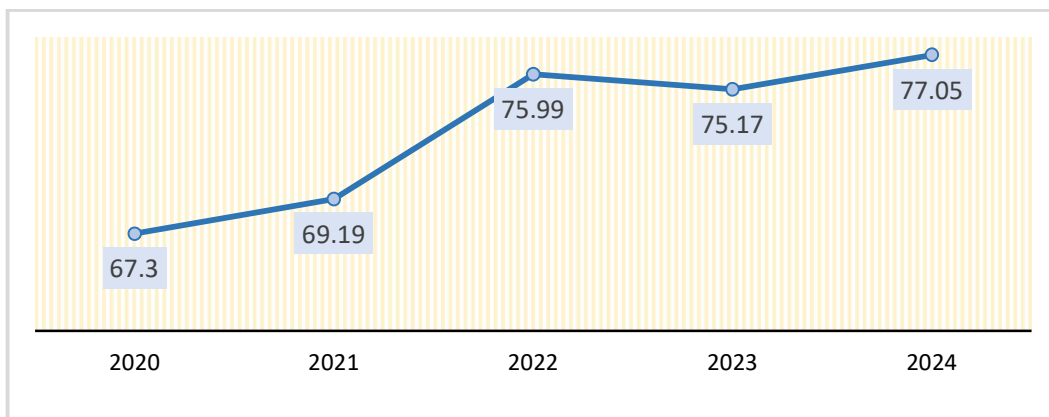
Pelanggan PLN di Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,25 persen per tahun. Adapun untuk pelanggan PDAM di Kabupaten Kolaka, paling banyak terdapat di Kecamatan Kolaka, dengan jumlah pelanggan sebanyak 4.671. Peningkatan jumlah pelanggan ini mengindikasikan semakin meningkatnya akses terhadap kelistrikan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup memiliki peran sebagai regulator fungsi dan jasa ekosistem dalam hal ini sebagai penyedia sumber daya alam. Pembangunan perlu diselaraskan dengan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kontinuitas fungsi dan jasa ekosistem berjalan secara optimal. Indikator yang menyatakan ukuran keserasian tersebut dapat diukur melalui indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan persentase sampah tertangani.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

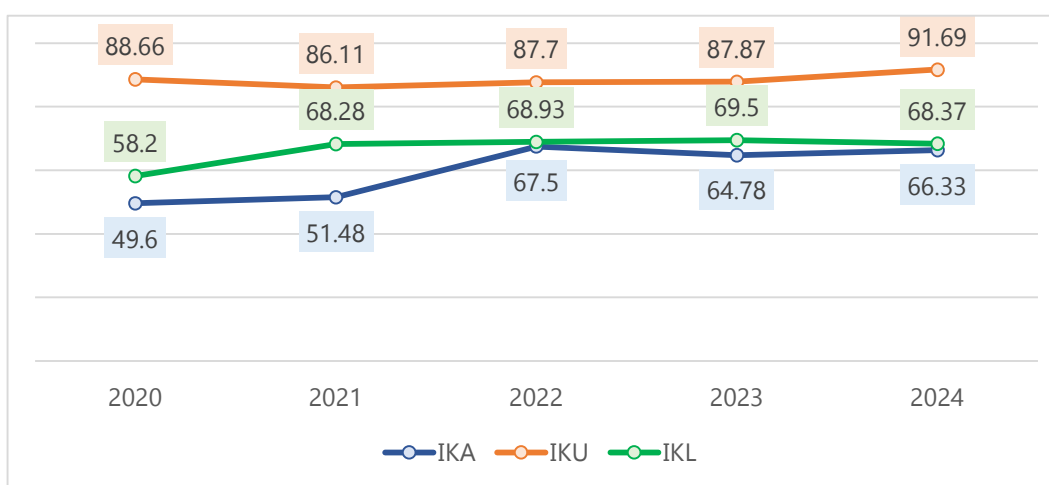
IKLH adalah indikator yang menyatakan kualitas suatu lingkungan yang diukur melalui komponen udara, tutupan lahan, dan air. Capaian IKLH yang tinggi mewakili keselarasan pembangunan daerah dengan kelestarian lingkungan. Berikut ini merupakan capaian IKLH di Kabupaten Kolaka.



Gambar 2. 5 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, 2025

Capaian IKLH berhasil meningkat 14,48 persen atau setara 9,75 poin dari tahun 2020 hingga 2024. Lonjakan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu meningkat 6,8 poin dari capaian tahun 2021, berpengaruh signifikan dalam perbaikan status lingkungan hidup yang semula berkategori sedang menjadi kategori baik. Hal ini menandakan upaya pemulihan lingkungan hidup berjalan secara optimal. Namun demikian perlu menjadi catatan bersama bahwa IKLH merupakan agregat dari hasil indeks kualitas komponen lingkungan hidup lainnya. Maka perlu dianalisis lanjut dinamika capaian pada masing-masing capaian IKA, IKU, dan IKL.



Gambar 2. 6 Capaian IKU, IKL, dan IKA Kabupaten Kolaka

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, 2025

Capaian IKU menunjukkan kategori baik, namun tren capaiannya mengalami fluktuasi. Capaian IKA mencapai 66,33 mengindikasikan kualitas air dalam kondisi Sedang atau tingkat pencemaran air tergolong masih ringan. Namun capaian IKA mengalami penurunan cukup signifikan yaitu 2,72 poin pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa factor seperti pencemaran air Sungai di muara dan pembuangan limbah ke Sungai. Sementara itu, capaian IKU menggambarkan kondisi kualitas udara yang baik dengan capaian 91,69 pada tahun 2024. Capaian IKU mengalami penurunan cukup besar di tahun 2021 sebesar 2,55 poin, akibat beberapa factor seperti pengaruh kandungan padatan dan gas cemar di udara oleh aktivitas industri dan transportasi. Capaian IKL menunjukkan kualitas tutupan lahan hijau Kabupaten Kolaka dalam kondisi Sedang, terdapat beberapa pembukaan lahan di Sebagian Lokasi, namun tutupan lahan hijau perbukitan tetap berkontribusi dengan baik sebagai Kawasan lindung. Capaian IKL termutakhir sebesar 68,37 poin atau bergeser turun 1,13 poin dibandingkan capaian tahun 2023. Penurunan ini berdampak terhadap pengurangan vegetasi permukaan, sehingga penyelenggaraan rehabilitasi dan perlindungan kawasan hijau harus lebih ditingkatkan di Kabupaten Kolaka. Mengingat Kabupaten Kolaka merupakan wilayah dengan aktivitas pertambangan cukup intensif, maka perlindungan kawasan hijau merupakan fondasi penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dalam rangka pembangunan ekonomi rendah karbon.

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Sampah merupakan residu dari kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berbentuk padatan dan tidak lagi memiliki fungsi. Sementara limbah didefinisikan sebagai residu cair yang telah mengalami perubahan kandungan kimia dari proses akhir kegiatan manusia. Timbulan sampah maupun limbah umumnya memiliki dampak buruk bagi lingkungan karena adanya perubahan secara fisik maupun kimiawi. Sampah dan limbah harus dikelola dengan

tepat untuk mencegah timbulnya pencemaran pada lingkungan. Tingkat pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka diukur dengan penanganan sampah sebagai berikut ini.

Tabel 2. 7 Volume sampah dan penanganan sampah di Kabupaten Kolaka (m³)

Uraian	Volume (m ³)			
	2020	2021	2022	2023
Volume sampah	18.802,25	16.538,44	16.000,28	16.087,95
Volume sampah yang ditangani	16.349,45	15.814,39	14.204,10	14.408,90
Volume sampah yang belum ditangani	2.452,80	724,05	1.796,18	1.679,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, 2023

Timbulan sampah di Kabupaten Kolaka mengalami penurunan volume setiap tahunnya, penurunan tertinggi mencapai 12,04 persen pada tahun 2021, namun terjadi sedikit peningkatan volume di tahun 2023, yaitu sekitar 0,55 persen atau 87,67 m³. Meskipun volume sampah mencapai 16.087,95 ton, Kabupaten Kolaka berhasil mengurangi jumlah timbulan hingga 2.714,3 ton atau setara 14,43 persen sejak tahun 2020.

Capaian pengelolaan sampah terlihat dari volume sampah yang berhasil ditangani mencapai 14.408,9 m³ pada tahun 2023, namun capaiannya menurun cukup besar 10,18 persen pada tahun 2022. Penanganan sampah di Kabupaten Kolaka cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun, menandakan upaya penanganan sampah menghadapi tantangan dalam efektivitas pengelolaan baik pengumpulan, pengangkutan maupun pengolahan di fasilitas pengelolaan sampah. Penanganan sampah secara terpadu dan menyeluruh merupakan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam target kegiatan prioritas RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah menargetkan persentase sampah yang dikelola mencapai 100 persen di tahun 2029, artinya sampah yang ditimbulkan seluruhnya akan dikelola pada tempat pengelolaan sampah akhir. Capaian Kabupaten Kolaka yang belum sepenuhnya mengelola timbulan sampah menjadi perhatian utama untuk meningkatkan pengelolaan yang terintegrasi dan terstandar.

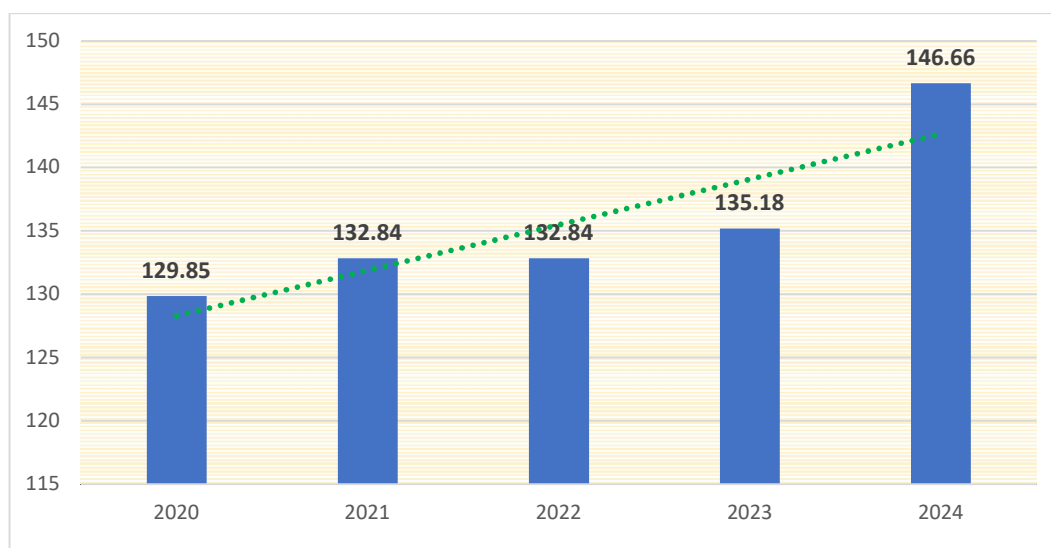
2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Kebencanaan

Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam, sehingga mengakibatkan kehilangan, kerugian, dan korban jiwa. Bahaya bencana selalu melekat pada suatu daerah sebagai konsekuensi dari karakteristik wilayah seperti faktor geologis, letak dan posisi wilayah. Berikut ini merupakan capaian kinerja yang menggambarkan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka.

a. Indeks Risiko Bencana

Potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana dinilai dengan indeks risiko bencana (IRBI) dengan komponen utama kerentanan, bahaya, dan kapasitas daerah dalam menangani peristiwa bencana. Berikut ini merupakan apaian IRBI di Kabupaten Kolaka dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: INARISK BNPB, 2025

Capaian kinerja IRBI menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan IRB tertinggi tercatat 11,48 poin pada tahun

2024. Tren yang terus meningkat menandakan risiko bencana yang masih tinggi mengancam daerah serta kapasitas daerah dalam menangani kebencanaan masih belum optimal. Dalam hal ini tidak hanya kesiapsiagaan Masyarakat, namun juga meliputi kajian dokumen kebencanaan, kebijakan terkait kebencanaan, hingga mitigasi struktural dan non struktural perlu terus ditingkatkan. Konsep manajemen kebencanaan merupakan siklus berulang yang terdiri dari pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Peningkatan kapasitas diharapkan dalam menjangkau ketiga fase tersebut, supaya seluruh aspek penanganan dapat seminimal mungkin menimbulkan dampak terhadap daerah.

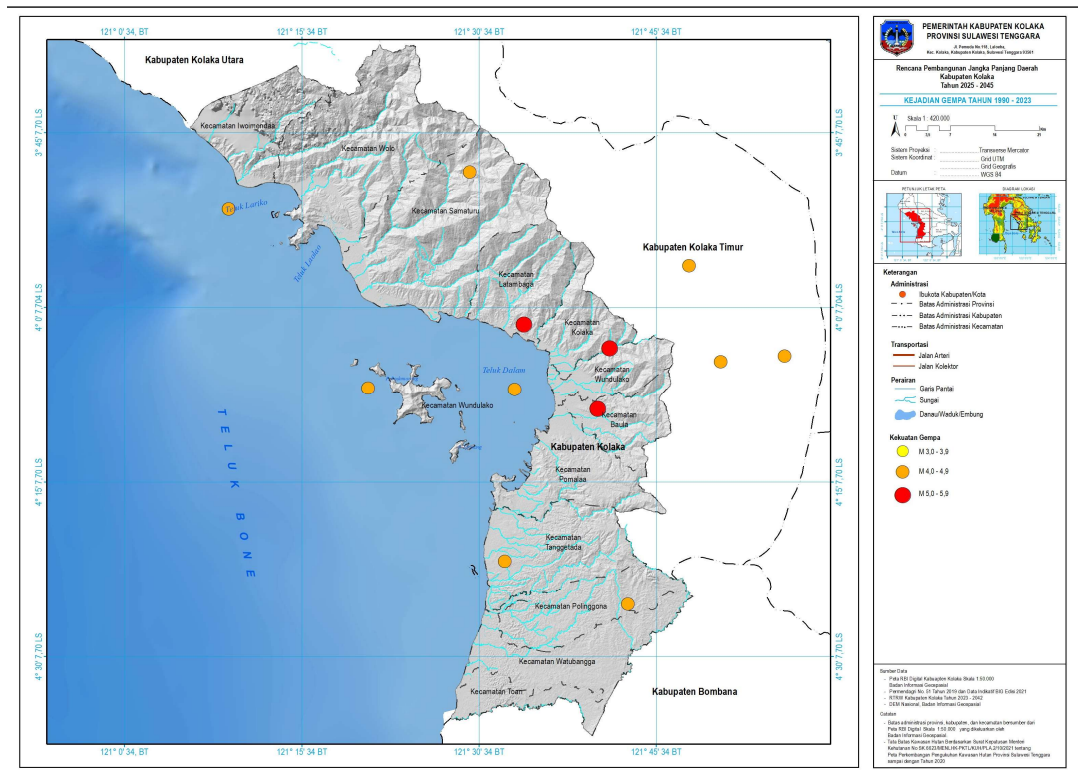
b. Bahaya Bencana

Bencana alam didefinisikan sebagai sebuah peristiwa yang disebabkan oleh proses alam dan menimbulkan kerugian material, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Bahaya bencana alam melekat pada suatu wilayah sebagai konsekuensi atas karakteristik fisik wilayah seperti keberadaan sesar, zona subduksi, dan kemiringan lereng. Suatu bahaya akan menjadi risiko jika kapasitas ekonomi, pengetahuan masyarakat, maupun infrastruktur fisik tergolong tidak mampu meningkatkan ketahanan terhadap kejadian bencana. Uraian mengenai risiko bencana di Kabupaten Kolaka dideskripsikan berdasarkan tatanan keruangan tingkat risiko dan karakter kebencanaannya sebagai berikut ini.

1) Gempa Bumi

Kehadiran Sesar Kolaka menjadi ancaman bahaya peristiwa gempa bumi di Kabupaten Kolaka. Sesar Kolaka tergolong ke dalam sesar aktif yang berpotensi menimbulkan tenaga gempa paling sedikit pada skala 4 skala richter (SR). Sesar Kolaka terbentuk oleh tenaga tektonik di bawah bebatuan keras sehingga mengakibatkan patahnya batuan dan menciptakan segmen patahan atau zona sesar. Sesar Kolaka melewati tiga kecamatan di Kabupaten Kolaka yaitu Kecamatan Baula, Kecamatan

Wundulako, dan Kecamatan Kolaka. Histori Gempa Bumi di Kabupaten Kolaka Tahun 1990 – 2023 ditampilkan pada gambar 2.4.



Gambar 2. 8 Histori Gempa Bumi di Kabupaten Kolaka Tahun 1990 – 2023

Sumber: <https://earthquake.usgs.gov/>

Data kejadian gempa bumi mengungkap bahwa dalam tiga puluh tahun terakhir telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan megnitudo 3,8 hingga 5,5 Skala Richter (SR). Sejarah gempa berkekuatan di atas 5 SR terjadi pada lokasi keberadaan Sesar Kolaka. Tingkat risiko yang dapat ditimbulkan dari bencana gempa tektonik oleh Sesar Kolaka diperkirakan sangat besar dikarenakan melewati pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kolaka yang mana populasi penduduknya tinggi dan infrastrukturnya telah terbangun.

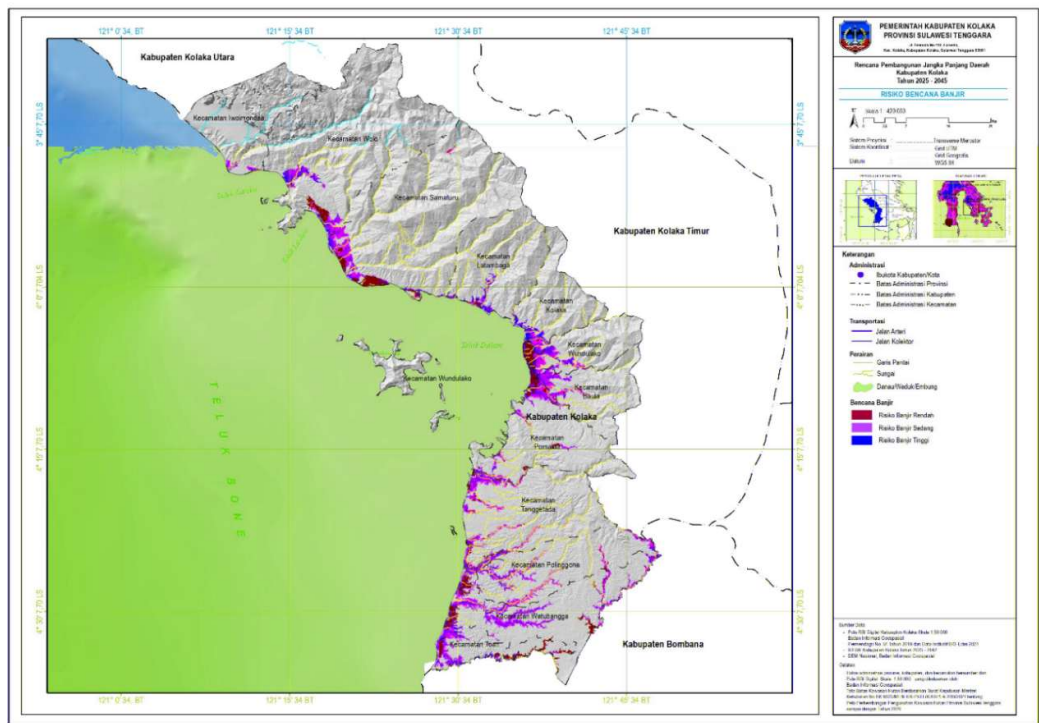
2) Tsunami

Tsunami didefinisikan sebagai peristiwa gelombang air laut berkekuatan besar dengan ketinggian mencapai lebih dari 30 meter yang disebabkan oleh pergerakan lempeng atau sesar bawah laut, erupsi

gunung api, ataupun longsor tebing laut. Bahaya tsunami di Kabupaten Kolaka berkaitan dengan bencana gempa bumi. Umumnya peristiwa gempa bumi diikuti oleh peristiwa tsunami jika pusat energi berada dekat atau pada perairan lautan. Bahaya tsunami pada Kabupaten Kolaka berlokasi pada sepanjang perairan laut Teluk Bone dengan tingkat kerawanan terpusat sepanjang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Energi gelombang air laut diperkirakan semakin besar di sepanjang daratan Teluk Bone yang dipengaruhi oleh bentuk perairan teluk yang berpotensi mengumpulkan energi dalam jumlah besar sebagaimana yang terjadi pada Kota Palu.

3) Banjir

Banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai ke area daratan sepanjang bantaran sungai atau bentangalam fluvial. Bahaya bencana banjir umumnya berlokasi di sepanjang bantaran sungai dengan topografi datar dan kemiringan lereng landai. Berikut Gambar 2.8 Peta Resiko Banjir Kabupaten Kolaka.



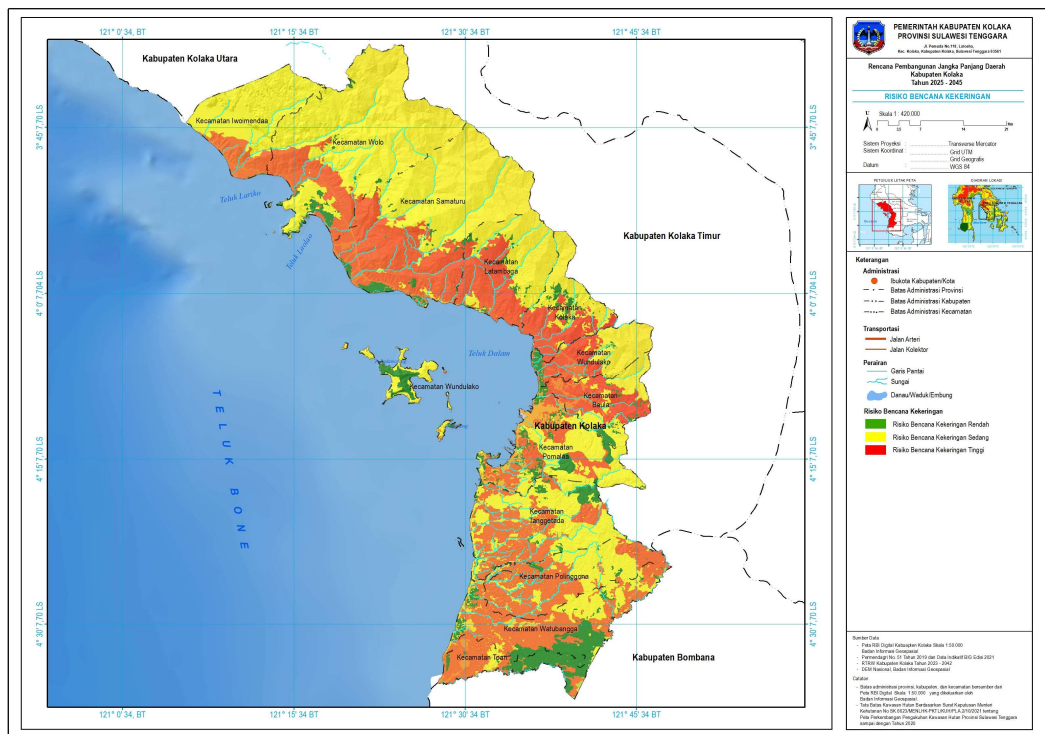
Gambar 2. 9 Peta Risiko Banjir Kabupaten Kolaka

Sumber: RTRW Kab.Kolaka Tahun 2023-2042

Risiko bencana banjir di Kabupaten Kolaka cenderung semakin tinggi pada area yang berasosiasi dengan aliran sungai besar seperti Sungai Oke-Oke dan Sungai Wolulu. Daerah dengan risiko banjir sedang hingga tinggi cenderung berada pada topografi datar dan landai. Lokasi banjir dengan risiko tinggi menurut data BNPB adalah Kecamatan Samaturu, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Baula, Kecamatan Watubangga, dan Kecamatan Toari.

4) Kekeringan

Kekeringan didefinisikan sebagai suatu kondisi dengan ketersediaan air yang berkurang karena dipengaruhi faktor hidrometeorologis atau faktor karakteristik lahan. Kekeringan di wilayah Indonesia umumnya terjadi pada musim kemarau. Pergantian musim di Indonesia dipengaruhi oleh anomali pergerakan arus udara di antaranya fenomena El-Nino dan Angin Muson. Kekeringan semakin diperparah dengan akses terhadap sumber air bersih yang semakin sulit karena belum meratanya sarana maupun prasarana air baku.



Gambar 2. 10 Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Kolaka

Sumber: RTRW Kab.Kolaka Tahun 2023-2042

Pengkajian risiko kekeringan oleh BNPB menyatakan kekeringan di Kabupaten Kolaka dipengaruhi oleh faktor meteorologi dan kemampuan lahan dalam menyimpan cadangan air. Risiko kekeringan berkategori tinggi tersebar di sepanjang bagian tengah dan hilir DAS yang umumnya merupakan lereng terjal berbatuan beku dan campuran karbonat. Lereng bermaterial batuan beku luar sulit menangkap limpasan permukaan secara maksimal, karakteristik tersebut meningkatkan risiko kekeringan pada saat musim kemarau. Sebagian wilayah hilir DAS yang bermaterial batuan karbonat juga sulit menyimpan air permukaan dan memperparah kondisi kekeringan lahan pada saat musim kemarau. Wilayah yang berisiko kekeringan di Kabupaten Kolaka membutuhkan penanganan yang tepat dalam memenuhi sumber air baku pada musim kemarau berlangsung. Konsep pemanenan air hujan melalui waduk atau kolam penampungan dapat diadopsi sebagai bentuk mitigasi struktural bencana kekeringan.

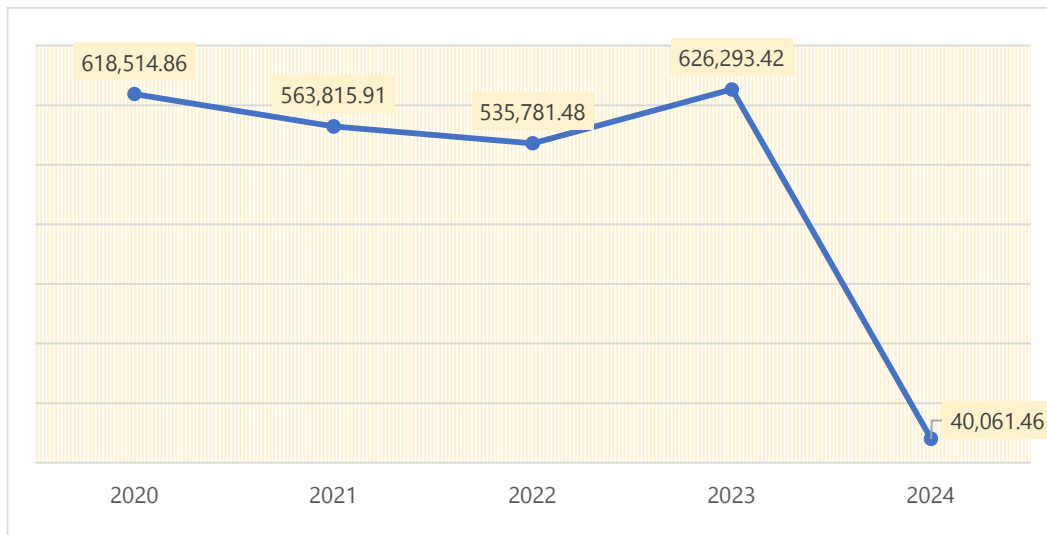
2. Ketahanan Perubahan Iklim

Perubahan iklim didefinisikan sebagai pergeseran pola variabilitas iklim dari kondisi rata-rata dalam kurun waktu yang lama, umumnya dalam 30 tahun. Isu perubahan iklim menjadi agenda penting secara nasional, sebagai negara kepulauan, dampak perubahan iklim akan menjadi kendala dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama meningkatkan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologis di masa mendatang. Upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim adalah memantau dan mengevaluasi capaian emisi GRK dalam pembangunan baik di level nasional maupun daerah. Berikut ini merupakan capaian kinerja ketahanan perubahan iklim di Kabupaten Kolaka.

a. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Gas rumah kaca (GRK) merupakan kumpulan gas-gas pada kolom atmosfer yang bersifat merangkap panas dari proses radiasi termal sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi dan berdampak terhadap pergeseran pola iklim global. Pelepasan atau emisi GRK

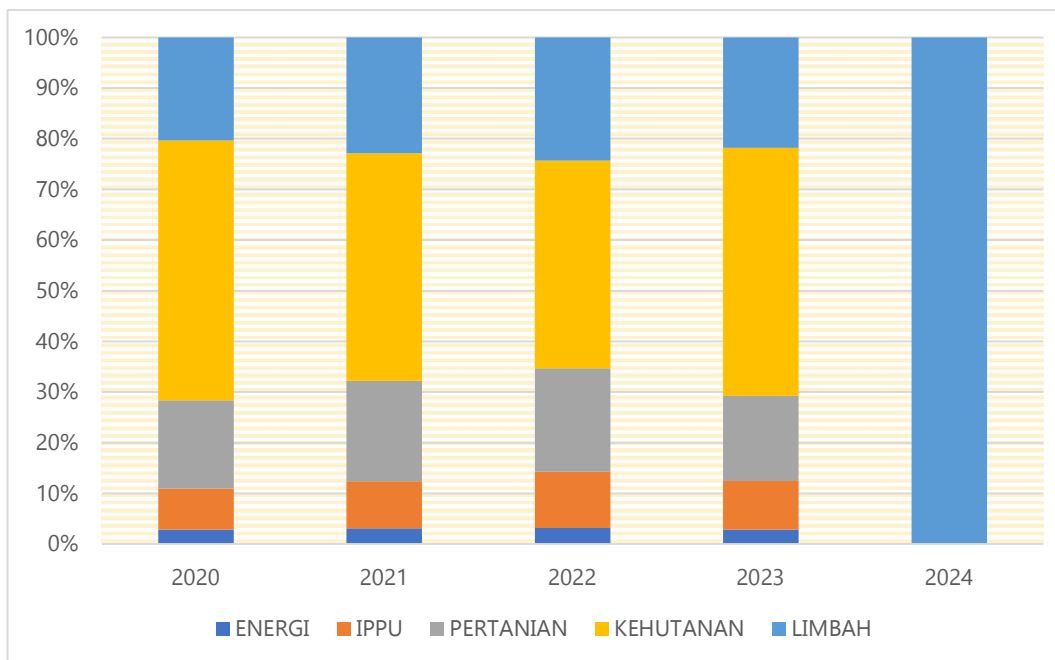
bersumber dari lima sektor utama yaitu energi, IPPU, pertanian, kehutanan (lahan), dan limbah (KLHK, 2023). Target Indonesia yang berambisi mencapai pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang dalam dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTSCCR) 2050, yang kemudian diterjemahkan dalam target *enhanced* NDC dengan mereduksi emisi GRK sebesar 31,89 persen melalui pembiayaan mandiri dan 43,20 persen melalui bantuan pihak lain pada tahun 2030. Menjembatani hal tersebut, pengukuran intensitas emisi GRK merupakan kegiatan wajib dalam merealisasikan pembangunan rendah karbon (PRK) secara nasional termasuk di Kabupaten Kolaka.



Gambar 2. 11 Intensitas Emisi GRK Kabupaten Kolaka (Ton CO₂e) Tahun 2020-2024

Sumber: Sign Smart KLHK, 2025

Emisi GRK Kabupaten Kolaka dalam lima tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Penurunan emisi terbesar mencapai 94,78 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, terjadi peningkatan 14,63 persen pada tahun 2023, hal ini perlu menjadi catatan bersama karena menandakan adanya sektor yang menyumbang emisi lebih tinggi di tahun tersebut.



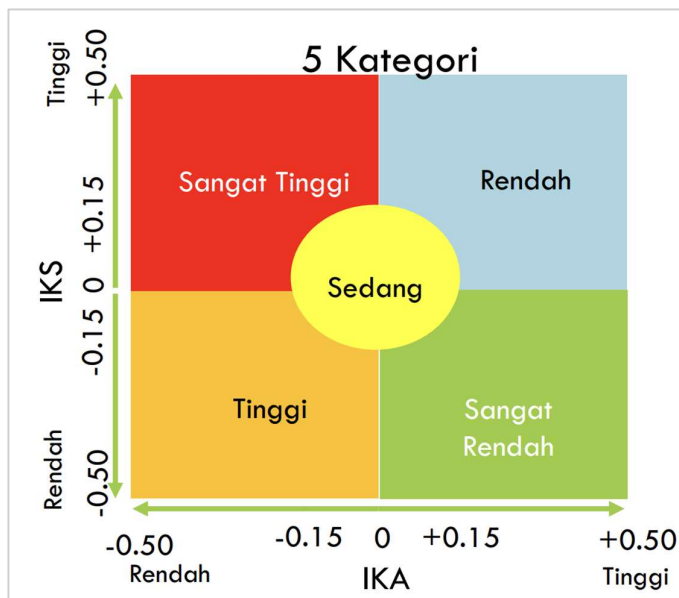
Gambar 2. 12 Emisi GRK Kabupaten Kolaka (Ton CO₂e) menurut Sektor Tahun 2020-2024

Sumber: Sign Smart KLHK, 2025

Besaran emisi yang dilepaskan oleh sektor kehutanan merupakan jumlah tertinggi dengan rata-rata emisi 47 persen dalam lima tahun terakhir. Catatan tersebut mengindikasikan adanya penurunan tutupan tegakan hutan. Tegakan hutan merupakan biomasa atas permukaan yang berfungsi ekologis sebagai penyerap dan penyimpan karbon, pengurangan luasannya berdampak terhadap pelepasan simpanan karbon ke udara. Sektor pertanian dan limbah merupakan penyumbang emisi kedua setelah sektor kehutanan dengan rata-rata emisi mencapai 20 persen setiap tahunnya. Penggunaan pupuk ramah lingkungan dan pengurangan limbah dari sumbernya merupakan upaya yang perlu digerakkan secara luas untuk mengurangi emisi dari kedua sektor tersebut di Kabupaten Kolaka. Aspek lain yang harus diperhatikan untuk menyeimbangkan emisi GRK adalah dengan meningkatkan dan memperluas penyerap karbon, dalam hal ini adalah tegakan hutan, mangrove, dan lahan basah. Oleh karenanya diperlukan perluasan rehabilitasi lahan kritis dan perlindungan kawasan hutan yang bertanggungjawab dan terukur.

b. Kerentanan Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlanjutan pembangunan daerah karena dampaknya yang meningkatkan kerentanan daerah terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Dalam penilaiannya, KLHK mengukur indeks kapasitas adaptif dan indeks keterpaparan dan sensitivitas untuk menilai bagaimana karakteristik daerah terhadap kerentanan perubahan iklim.



Gambar 2. 13 Kuadran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim

Sumber: SIDIK KLHK, 2024

Berdasarkan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup, indeks kapasitas adaptif Kabupaten Kolaka adalah 0,57 yakni berpredikat tinggi. Kemudian indeks keterpaparan dan sensitivitas bernilai 0,59 poin dan berpredikat tinggi. Dengan demikian, indeks kerentanan perubahan iklim Kabupaten Kolaka berada pada kuadran kategori rendah.

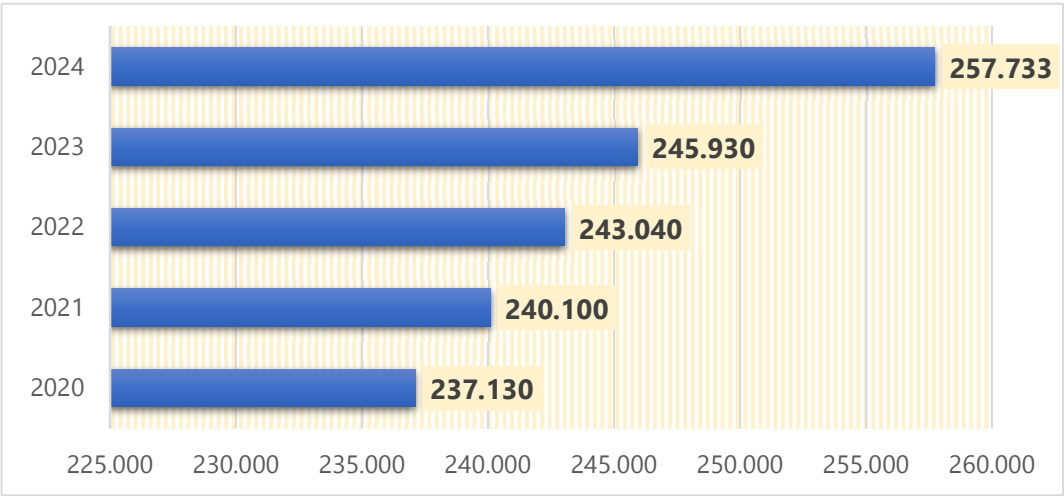
2.1.2 Demografi

Kondisi demografi merujuk pada karakteristik populasi dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup berbagai aspek seperti jumlah, struktur, distribusi, dan dinamika penduduk. Ini meliputi faktor-faktor

seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi, yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan demografi dalam cakupan statistik populasi dan demografis, termasuk topik seperti demografi, statistik vital, struktur, dan pertumbuhan. Data kependudukan memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, mengingat masyarakat merupakan aktor sekaligus penerima manfaat pembangunan. Pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan difokuskan pada peningkatan kapasitas, kualitas, serta perluasan akses terhadap hasil-hasil pembangunan, sehingga struktur dan komposisi penduduk digunakan sebagai dasar untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Aspek demografi di Kabupaten Kolaka diuraikan dengan jumlah penduduk, struktur penduduk, dan distribusi penduduk.

2.1.2.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk

Data jumlah penduduk menyajikan informasi terkait jumlah populasi yang bermukim pada suatu daerah. Jumlah penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi, sehingga jumlah penduduk akan berubah seiring waktu. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Kolaka



Gambar 2. 14 Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024 (Ribuan Jiwa)
Sumber: Kolaka Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka menunjukkan tren positif selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Kolaka memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,11 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 4,06 persen. Berikut persebaran penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Kolaka.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka Perkecamatan Berdasarkan Jiwa Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Watubangga	15.740	15.990	16.391	16.008	16.538
Tanggetada	15.600	15.852	16.170	16.762	17.660
Toari	9.690	9.842	10.321	10.001	10365
Polinggona	5.890	5.985	7.010	6.015	6.110
Pomalaa	31.670	32.177	32.746	33.319	35.067
Wundulako	21.930	22.281	22.178	22.962	23.909
Baula	12.160	12.349	12.594	13.603	14.091
Kolaka	40.200	40.836	41.885	41.406	42.971
Latambaga	31.440	31.944	31.850	32.149	33.294
Wolo	20.480	20.806	24.865	21.690	22.885
Samaturu	24.900	25.297	20.683	25.504	26.355
Iwoimendaa	7.880	8.007	8.259	8.261	8.488
Kabupaten Kolaka	237.590	241.366	246.137	247.680	257.733

Sumber : Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2025

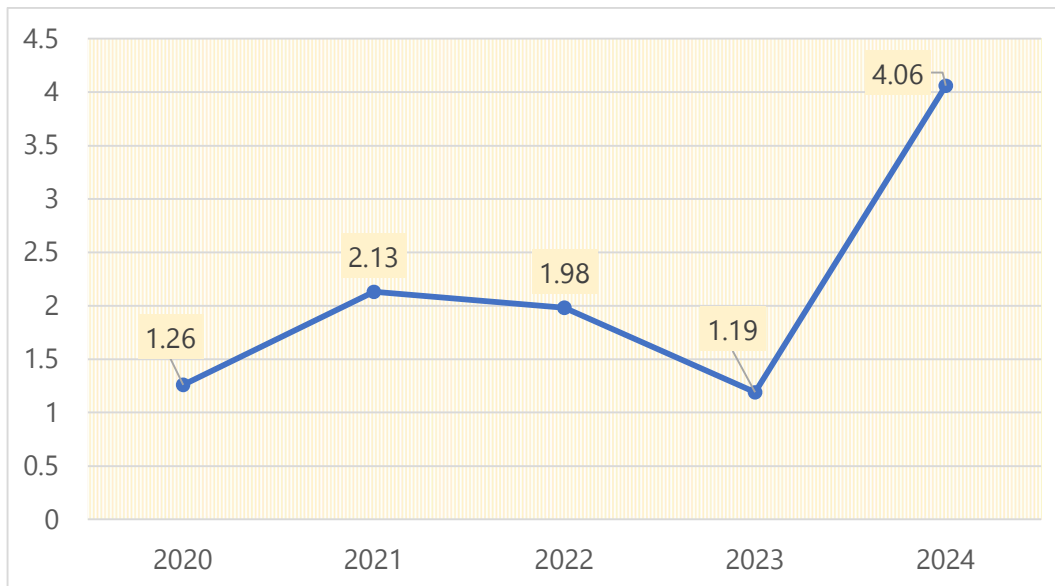
Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kolaka adalah Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Pomalaa. Tingginya jumlah penduduk di kedua kecamatan ini dipengaruhi oleh arus migrasi. Kecamatan Pomalaa berkembang dari sektor industri pertambangan yang turut mempengaruhi arus migrasi pekerja. Pelabuhan yang terletak di Kecamatan Kolaka merupakan penghubung Kabupaten Kolaka dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang menggerakkan arus perpindahan penduduk.

Tabel 2. 9 Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kolaka Tahun 2020- 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Watubangga	6,62	6,62	6,66	6,46	6,42
Tanggetada	6,57	6,57	6,57	6,77	6,85
Toari	4,08	4,08	4,19	4,04	4,02
Polinggona	2,48	2,48	2,85	2,43	2,37
Pomalaa	13,33	13,33	13,3	13,45	13,61
Wundulako	9,23	9,23	9,01	9,27	9,28
Baula	5,12	5,12	5,12	5,49	5,47
Kolaka	16,92	16,92	17,02	16,72	16,67
Latambaga	13,23	13,23	12,94	12,98	12,92
Wolo	8,62	8,62	10,1	8,76	8,88
Samaturu	10,48	10,48	8,4	10,3	10,23
Iwoimendaa	3,32	3,32	3,36	3,34	3,29
Kabupaten Kolaka	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2025

Dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kolaka berdampak pada distribusi persentase penduduk secara keruangan. Distribusi keruangan penduduk di Kabupaten Kolaka direpresentasikan oleh persentase penduduk pada masing-masing kecamatan. Daerah dengan persentase penduduk tertinggi pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Latambaga, dan Kecamatan Samaturu. Kecamatan Kolaka merupakan ibukota Kabupaten Kolaka, persentase penduduk umumnya berpusat pada ibukota kabupaten yang berperan dalam melayani kegiatan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun jasa dan perdagangan.



Gambar 2. 15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber : Kolaka Dalam Angka 2025

Dinamika jumlah penduduk diukur berdasarkan tingkat laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kolaka menyatakan persentase pertambahan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk selama 2020-2023 berada diatas 1 hingga tahun 2024 meningkat sebesar 4,06 persen. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arus migrasi, angka kelahiran, dan angka kematian.

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

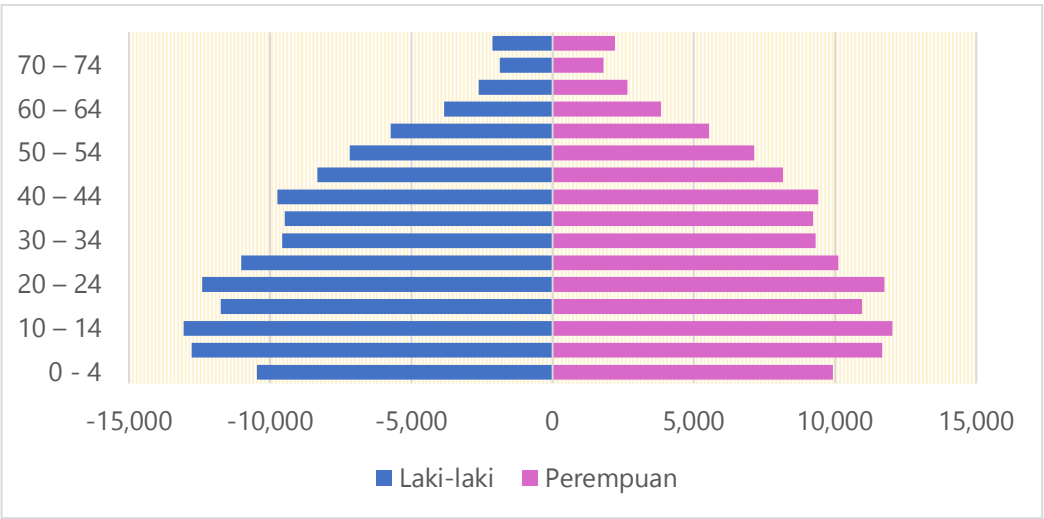
Struktur penduduk di Kabupaten Kolaka mencerminkan susunan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Analisis struktur penduduk ini penting untuk memahami kebutuhan dasar yang berbeda antar kelompok usia, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Selain itu, pengelompokan berdasarkan jenis kelamin membantu dalam perencanaan pembangunan yang adil, dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kolaka Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (ribu jiwa)		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0 - 4	10.467	9.930	20.397
5 - 9	12.787	11.675	24.462
10 - 14	13.076	12.023	25.099
15 - 19	11.749	10.950	22.699
20 - 24	12.407	11.744	24.151
25 - 29	11.026	10.117	21.143
30 - 34	9.580	9.305	18.885
35 - 39	9.491	9.226	18.717
40 - 44	9.744	9.401	19.145
45 - 49	8.330	8.155	16.485
50 - 54	7.195	7.131	14.326
55 - 59	5.732	5.543	11.275
60 - 64	3.842	3.832	7.674
65 - 69	2.620	2.648	5.268
70 - 74	1.873	1.795	3.668
75 +	2.134	2.205	4.339
Jumlah	132.053	125.680	257.733

Sumber : Kabupaten olaka Dalam Angka 2025

Komposisi penduduk Kabupaten Kolaka tahun 2024 lebih didominasi laki-laki sebesar 132.053 jiwa. Namun komposisi penduduk laki-laki dan perempuan masih dapat dikatakan seimbang.



Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2024

Sumber : Kolaka Dalam Angka 2025

Piramida penduduk Kabupaten Kolaka tahun 2024 berbentuk piramida ekspansif atau piramida muda. Hal tersebut menandakan bahwa struktur penduduk di Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk kelompok usia 10-14 tahun dan kelompok usia 5-9 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk tergolong tinggi. Piramida penduduk ini menjelaskan bahwa rasio ketergantungan penduduk muda dan penduduk tua relatif tinggi.

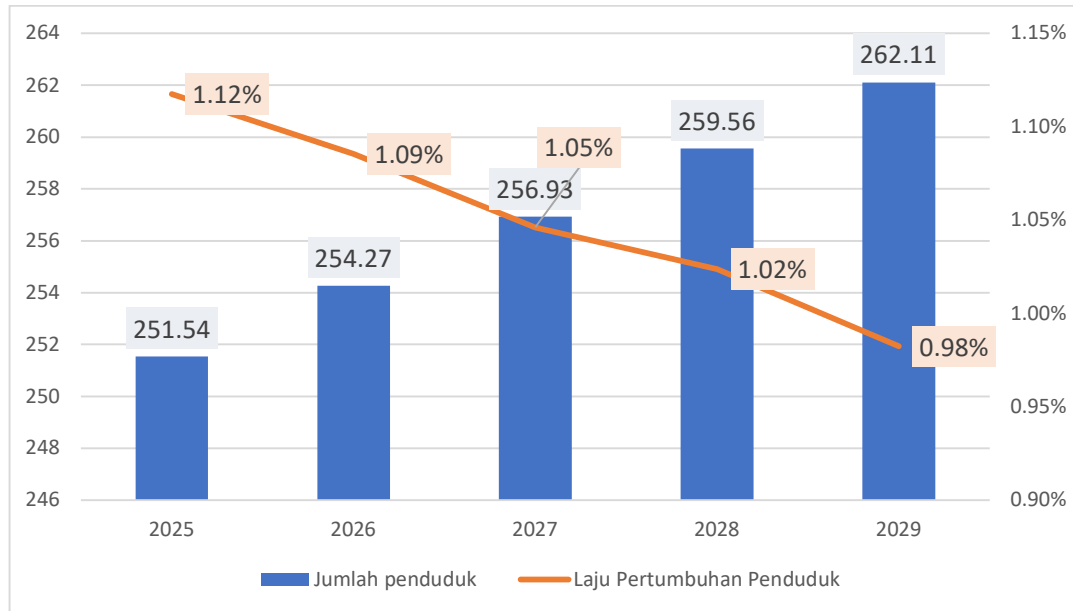
2.1.2.3 Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi Kabupaten Kolaka dilakukan dengan mengacu pada hasil proyeksi penduduk Kabupaten/Kota untuk tahun 2020-2035 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS didasarkan pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang selanjutnya disebut sebagai *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi tersebut menerapkan metode komponen Kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020. Proyeksi demografi Kabupaten Kolaka difokuskan untuk menganalisis perkembangan jumlah penduduk serta melakukan analisis penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur. Adapun hasil proyeksi kependudukan Kabupaten Kolaka dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan

penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Berikut hasil proyeksi demografi Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (Berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020), diolah

Hasil proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka selama tahun 2025-2029. Namun, terjadi penurunan dari segi laju pertumbuhan penduduk hingga 0,98 persen. Proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk meningkat hingga 10,57 ribu jiwa hingga 262,11 ribu jiwa pada tahun 2029. Hasil proyeksi tersebut tetap mempertimbangkan *total fertility rate* (TFR) yang bernilai 2,25 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi Kabupaten Kolaka selama tahun 2025-2029 cenderung mengalami pertumbuhan. TFR menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya secara rata-rata. Besaran TFR menjelaskan bahwa rata-rata perempuan di Kabupaten Kolaka diharapkan melahirkan dua orang anak yang dapat meneruskan keturunan. Peningkatan jumlah penduduk tersebut memberikan peluang baru bagi Kabupaten Kolaka,

seperti peningkatan konsumsi dan tenaga kerja yang lebih besar. Namun disisi lain, juga menimbulkan tantangan seperti kepadatan penduduk, kebutuhan yang semakin besar, dan permintaan terhadap sumber daya alam yang meningkat.

2. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting dilakukan karena dapat memberikan informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia 15-64, sedangkan penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentang usia 0-14 dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang berusia 65-ke atas. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, perlu dianalisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Kabupaten Kolaka.

Tabel 2. 11 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Ribu Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	21,58	21,51	21,44	21,39	21,35
5-9	22,67	22,36	22,06	21,80	21,59
10-14	23,11	23,15	23,15	23,10	22,96
15-19	22,52	22,70	22,82	22,89	22,95
20-24	20,70	20,91	21,21	21,55	21,87
25-29	20,14	20,11	20,05	20,01	20,02
30-34	19,54	19,65	19,74	19,81	19,85
35-39	18,49	18,64	18,83	19,04	19,22
40-44	18,19	18,22	18,2	18,17	18,18
45-49	16,69	17,07	17,40	17,66	17,83
50-54	13,94	14,41	14,91	15,40	15,87
55-59	11,33	11,74	12,15	12,57	12,99
60-64	8,70	9,10	9,48	9,86	10,24

Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Ribu Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
65-69	5,94	6,27	6,64	7,04	7,44
70-74	4,09	4,26	4,41	4,57	4,76
75+	3,92	4,17	4,44	4,72	5,00
Kabupaten Kolaka	251,54	254,27	256,93	259,56	262,11

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (Berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020), diolah

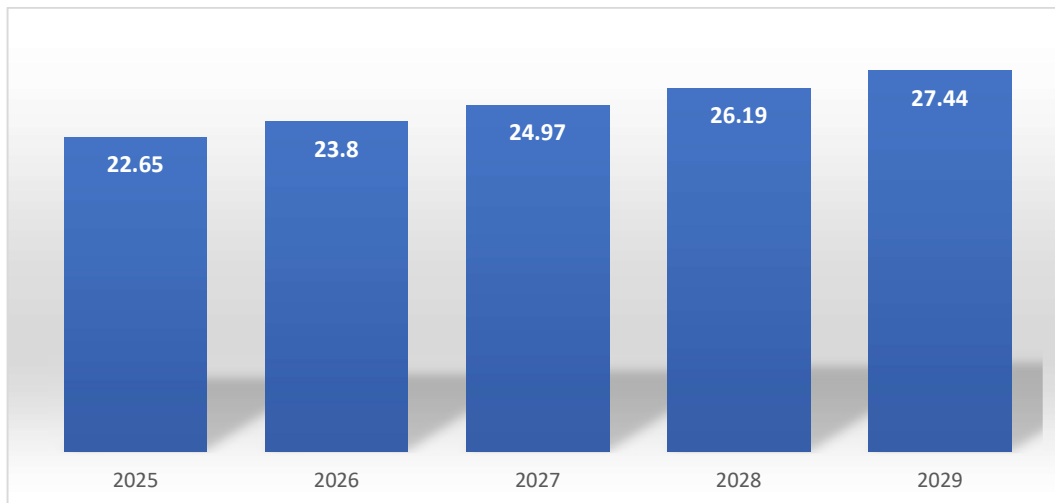
Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kolaka berdasarkan kelompok usia dalam ribuan jiwa dari tahun 2025 hingga 2029. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan total jumlah penduduk Kabupaten Kolaka dari 251,54 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 262,11 ribu jiwa pada tahun 2029. Namun, dinamika pertumbuhan tidak merata di seluruh kelompok usia. Kelompok usia muda (0-14 tahun) cenderung mengalami penurunan jumlah penduduk secara bertahap. Sementara itu, kelompok usia produktif awal (15-39 tahun) menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan sedikit meningkat pada beberapa kelompok usia dan relatif stabil pada kelompok usia lainnya.

Pergeseran yang lebih signifikan terlihat pada kelompok usia dewasa akhir dan lansia (40 tahun ke atas). Hampir seluruh kelompok usia di atas 40 tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk selama periode proyeksi. Peningkatan yang cukup menonjol terjadi pada kelompok usia 60-64 tahun, 65-69 tahun, 70-74 tahun, dan terutama kelompok usia 75+ tahun yang menunjukkan pertumbuhan paling pesat. Pola ini mengindikasikan adanya tren penuaan penduduk di Kabupaten Kolaka, di mana proporsi penduduk usia lanjut semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam proyeksi ini.

3. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Penduduk lanjut usia merujuk pada individu yang berumur 60 tahun ke atas. Proyeksi jumlah penduduk lanjut usia ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai jumlah mereka di Kabupaten Kolaka serta untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan demografis. Pertumbuhan populasi lanjut usia terutama dipengaruhi oleh peningkatan harapan hidup dan penurunan

angka kelahiran. Berikut ini adalah proyeksi penduduk lanjut usia di Kabupaten Kolaka untuk periode tahun 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 (ribu jiwa)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (Berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020), diolah

Proyeksi jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Kolaka selama tahun 2025-2029 cenderung mengalami pertumbuhan. Proyeksi jumlah penduduk lanjut usia Kabupaten Kolaka mengalami penambahan sejumlah 4,79 ribu jiwa. Penambahan jumlah penduduk dalam kelompok usia ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi penduduk lanjut usia.

4. Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan jumlah penduduk dalam usia kerja dengan penduduk yang berada di luar usia kerja. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total penduduk berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk berusia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan berfungsi untuk mengukur beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dalam mendukung kehidupan penduduk yang belum produktif maupun yang sudah tidak produktif. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar pula beban yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif, dan sebaliknya.

Tabel 2. 12 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0—14	26,78	26,37	25,97	25,56	25,16
15-64	67,67	67,82	67,96	68,11	68,25
65+	5,55	5,81	6,07	6,33	6,59
Angka Ketergantungan	47,776	47,458	47,141	46,826	46,512

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (Berdasarkan Hasil Long Form Sensus

Penduduk 2020), diolah

Proyeksi rasio ketergantungan di Kabupaten Kolaka menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan tercatat sebesar 47,77 persen dan diperkirakan menurun menjadi 46,51 persen pada tahun 2029, dengan penurunan sebesar 1,26 persen. Hal ini berarti pada tahun 2025, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus mendukung sekitar 47 orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, dan kondisi ini diperkirakan tetap relatif sama hingga tahun 2029. Penurunan rasio ketergantungan mengindikasikan bahwa secara relatif, beban tanggungan kelompok usia produktif terhadap kelompok usia muda dan lansia semakin berkurang.

Selain itu, rasio ketergantungan yang rendah juga dapat meningkatkan kemajuan daerah seperti potensi peningkatan produktivitas ekonomi, potensi peningkatan pendapatan per kapita, serta potensi Pembangunan sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, Kabupaten Kolaka memiliki peluang bonus demografi antara tahun 2025 hingga 2029 yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan daerah menuju kemajuan dan kesejahteraan.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan capaian indikator yang terkait kondisi kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Budaya di Kabupaten Kolaka. Beberapa indikator Kesejahteraan ekonomi tersebut meliputi PDRB per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini, sedangkan indikator Kesejahteraan Sosial Budaya meliputi tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran

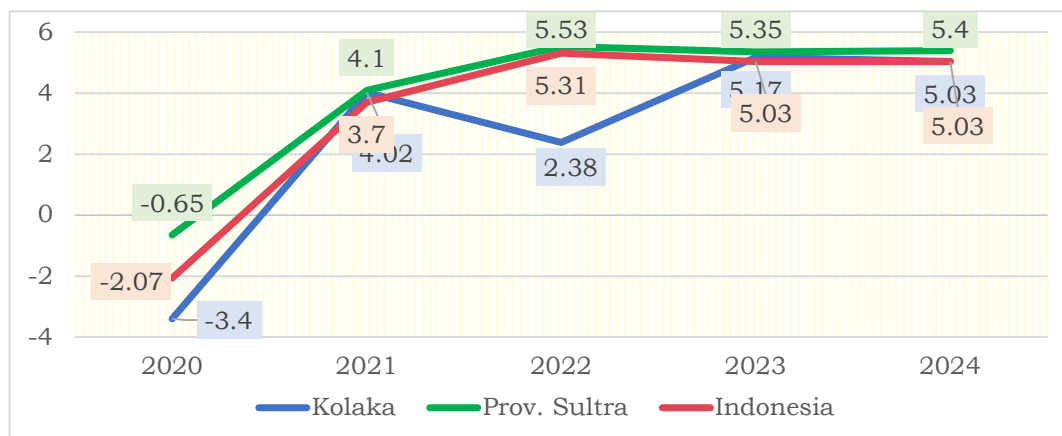
Terbuka (TPT). Berikut ini merupakan deskripsi yang lebih rinci mengenai capaian indikator makro pada aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kolaka.

2.1.3.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi adalah suatu kondisi di mana individu atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara memadai, memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup, dan mampu menikmati kualitas hidup yang baik. Kesejahteraan ekonomi mencakup berbagai aspek, seperti Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, dan Gini Ratio.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator ekonomi makro yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pembangunan suatu wilayah dalam periode tertentu. LPE diukur dalam bentuk persentase dan menggambarkan perubahan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. LPE dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut gambaran LPE Kabupaten Kolaka periode tahun 2020-2024.



Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

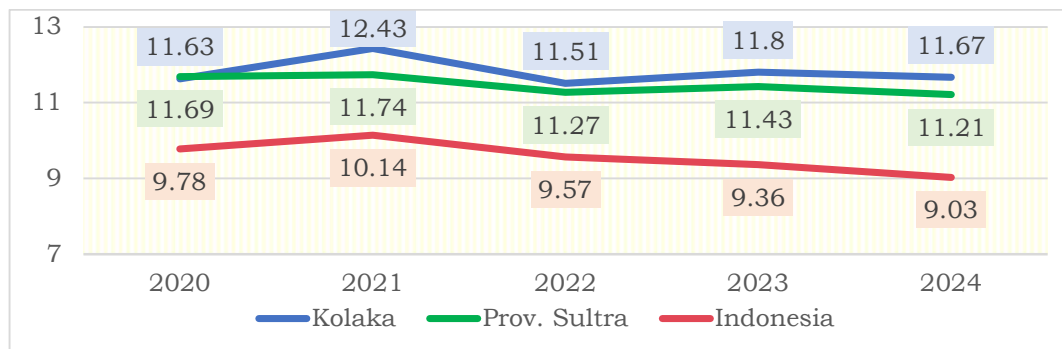
Sumber : BPS Kolaka, 2025; BPS Sulawesi Tenggara, 2025; BPS RI, 2025

Catatan: LPE Kabupaten Kolaka Tahun 2024 merupakan data Triwulan III

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka memiliki tren fluktuatif dan kemudian cenderung stabil pada tahun 2023 hingga 2024 triwulan ke III. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka dan nasional lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka kembali menurun pada tahun 2022 yang disebabkan karena menurunnya pembentukan modal, lebih khusus modal bangunan. Kemudian pertumbuhane ekonomi Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan menjadi 5,17 pada tahun 2023 dan turun sebesar 0,14 persen pada tahun 2024 menjadi 5,03. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka masih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

2. Tingkat Kemiskinan

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dinilai sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut data kemiskinan di Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.



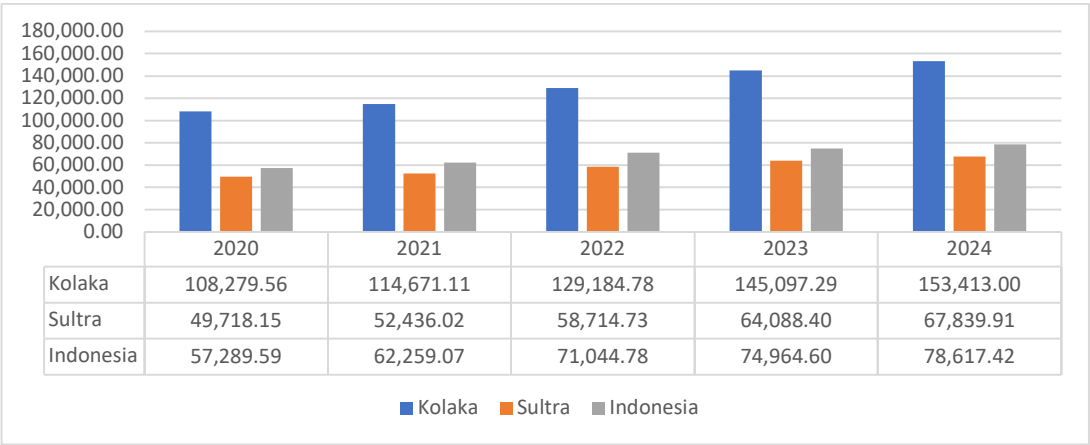
Gambar 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka, 2025; BPS Sulawesi Tenggara, 2025; BPS RI, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kolaka lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan kemudian turun 0,92 persen menjadi 11,51 persen pada tahun 2022. Rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Kolaka lebih tinggi 0,46 persen dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara lebih rendah dibandingkan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Kolaka belum dilaksanakan secara optimal.

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro yang dihitung dengan membagi total pendapatan ekonomi suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Di tingkat daerah di Indonesia, pendapatan per kapita biasanya direpresentasikan melalui proksi PDRB per kapita, yaitu hasil pembagian antara nilai PDRB dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data makro yang mencerminkan nilai tambah ekonomi daerah dalam periode tertentu, yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Berikut PDRB per kapita Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.



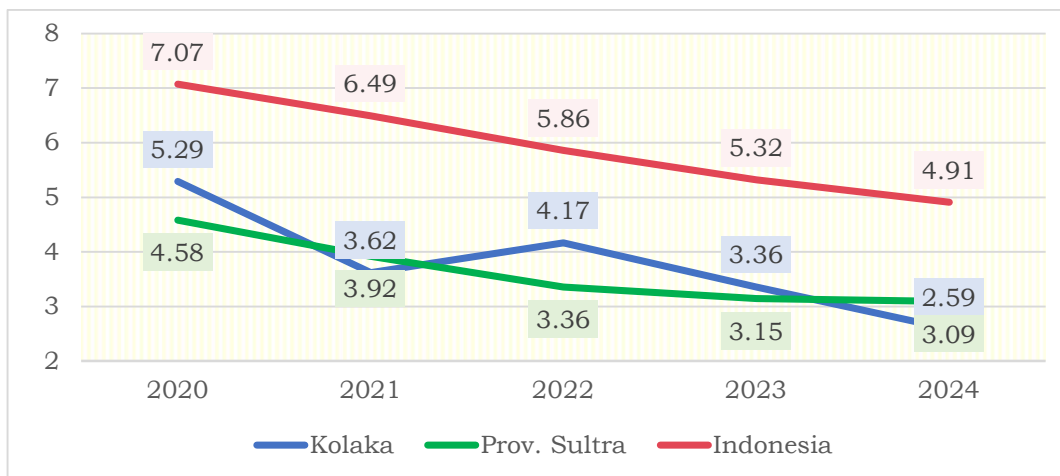
Gambar 2. 21 PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, BPS Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Kolaka, 2025

PDRB Per Kapita Kabupaten Kolaka memiliki tren meningkat hingga mencapai 153.413 (ribu rupiah) pada tahun 2024 atau naik sebesar 45.133,44 (ribu rupiah) dari tahun 2020. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Peningkatan PDRB per kapita tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan produksi nikel. Peningkatan produksi nikel berkontribusi langsung pada pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kolaka. Kenaikan PDRB per kapita yang terjadi dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tiap penduduk Kabupaten Kolaka memberikan nilai tambah perekonomian lebih tinggi sehingga hasil yang diterima oleh penduduk juga lebih tinggi dibandingkan level Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT biasanya digunakan untuk mengetahui angkatan kerja yang belum atau tidak bekerja di suatu daerah. Semakin tinggi TPT, maka semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah TPT suatu daerah mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat wilayah yang semakin baik dengan asumsi masyarakat yang terserap dalam pasar kerja daerah memiliki tingkat pengupahan yang sesuai dengan regulasi pengupahan daerah yang berlaku. Berikut tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.



Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

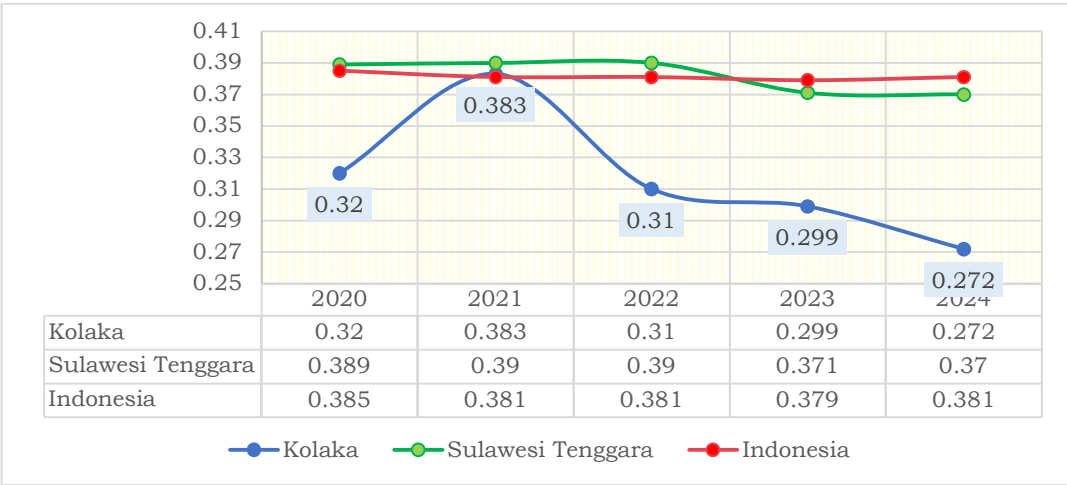
Sumber: BPS, 2025

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kolaka memiliki tren fluktuatif selama tahun 2020-2024. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,67 persen menjadi 3,62 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa para pencari kerja belum dapat berkompetisi secara optimal dalam dunia kerja dikarenakan kurangnya keterampilan pencari kerja. Namun, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,17 dan turun lagi menjadi 2,59 pada tahun 2024. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kolaka masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan lebih rendah dibandingkan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya upaya untuk mendukung penciptaan lapangan pekerjaan di sektor unggulan seperti industri dan pertanian.

5. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 1 hingga 0. Skor Indeks Gini 0 menunjukkan bahwa penduduk di suatu daerah memiliki distribusi pendapatan yang merata. Dengan kata lain, setiap penduduk di daerah tersebut memiliki pendapatan sama. Sebaliknya, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan

sempurna atau satu orang menguasai seluruh sumber pendapatan. Indeks Gini semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan semakin tinggi di suatu daerah. Indeks Gini perlu diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Berikut indeks gini Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.



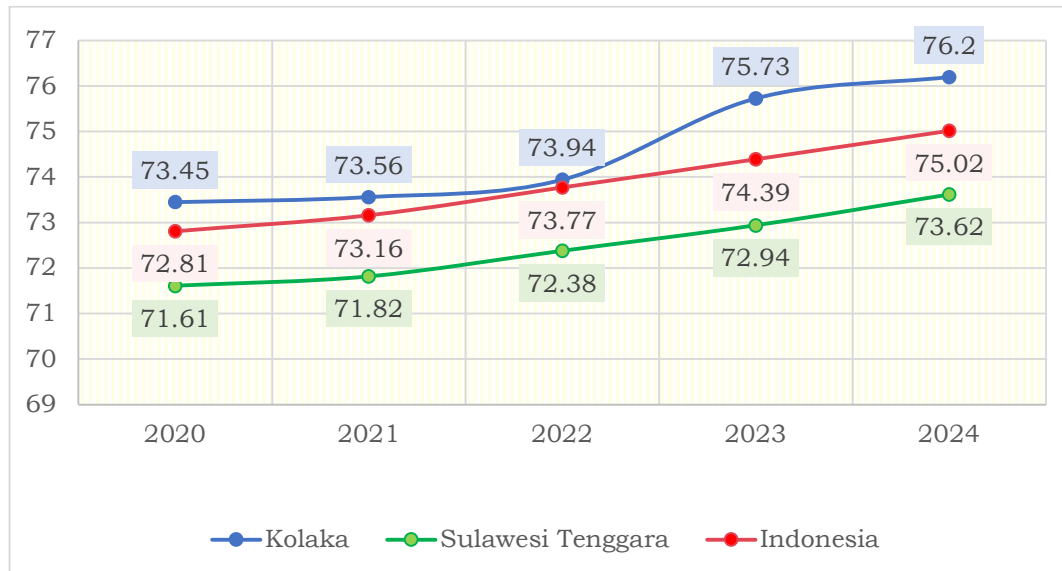
Gambar 2. 23 Indeks Gini Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Indeks gini Kabupaten Kolaka memiliki tren cenderung menurun dari tahun 2021 hingga 2024. Indeks gini tertinggi terjadi pada tahun 2021 selaras dengan meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Rata-rata indeks gini Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024 sebesar 0,31 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi tenggara sebesar 0,382 dan nasional sebesar 0,381. Hal ini mengindikasikan bahwa indeks gini di Kabupaten Kolaka lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Kolaka yang menjelaskan adanya penurunan ketimpangan ekonomi secara umum. Penurunan indeks gini selama tiga tahun perlu dilanjutkan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan pembangunan manusia di

suatu wilayah. IPM dihitung pada tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi IPM ini dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. Berikut indeks pembangunan manusia Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.



Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024 menunjukkan tren cenderung meningkat. 2,75 poin menjadi 76,2 poin dengan pertumbuhan sebesar 3,74 persen dibandingkan tahun 2020. IPM Kabupaten Kolaka lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Di tingkat provinsi, IPM meningkat sebesar 2,01 poin dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,80 persen, sedangkan di tingkat nasional, kenaikan IPM tercatat sebesar 2,21 poin dengan pertumbuhan 3,04 persen. Walaupun capaian IPM Kabupaten Kolaka lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional, masih terdapat tantangan seperti kemiskinan dan pengangguran masih perlu diatasi untuk mencapai IPM yang lebih tinggi. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.2 Kesehatan Untuk Semua

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tingkat Kabupaten/ Kota meliputi :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- Pelayanan kesehatan balita.
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus .
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis.
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Beberapa capaian SPM Kesehatan Kabupaten Kolaka sejak Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024

N O	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	CAPAIAN 2020	CAPAIA N 2021	CAPAIA N 2022	CAPAIA N 2023	CAPAIA N 2024
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	76,0	82,0	70,0	56,5	69,0
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,0	86,0	86,0	67,7	83,0
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,0	100,0	100,0	67,7	82,0
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,0	100	100	100,0	83,0
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,0	100	100	23,8	93,0

N O	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	CAPAIAN 2020	CAPAIA N 2021	CAPAIA N 2022	CAPAIA N 2023	CAPAIA N 2024
6	Persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,0	100	100	59,2	95,0
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,0	100	100	82,4	85,0
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,0	100,0	100	100,0	89,0
9	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	36,00	100	60
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100

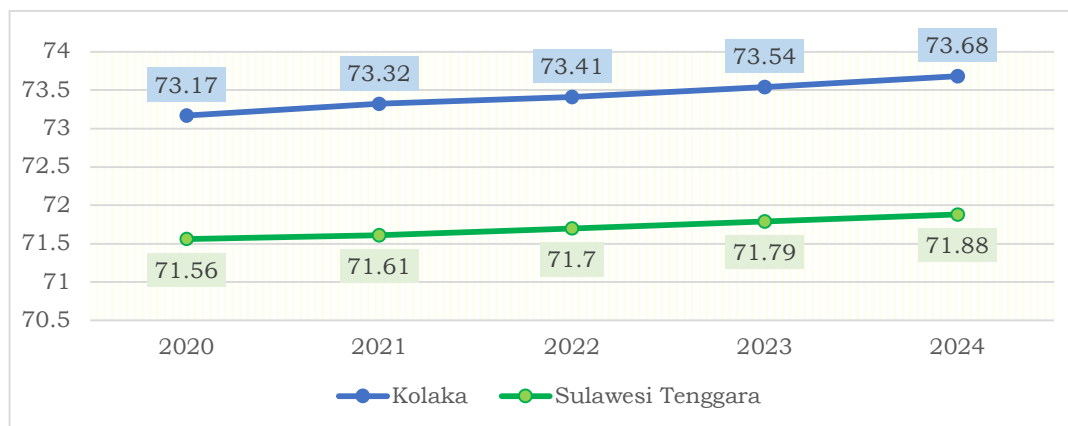
Sumber: LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Tahun 2025

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Berikut beberapa capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka.

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang pada suatu usia tertentu, biasanya saat lahir. UHH merupakan indikator untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah. Semakin tinggi usia harapan hidup, semakin baik derajat

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kolaka.



Gambar 2. 25 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2025

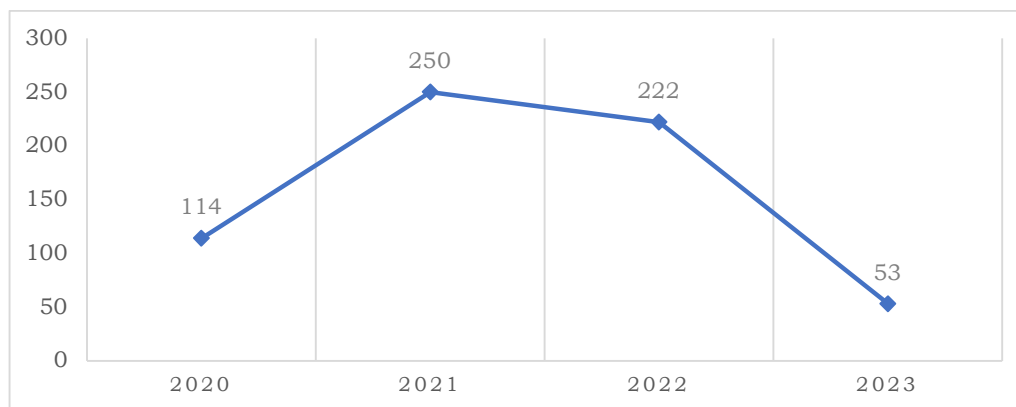
Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kolaka menunjukkan trend yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian UHH Kabupaten Kolaka meningkat sebesar 0,51 poin dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,17 persen per tahun. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka berjalan cukup baik, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. UHH dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah yang memadai. Pada tahun 2024, capaian UHH Kabupaten Kolaka sebesar 73,68. Artinya, bayi yang baru lahir di tahun 2024 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 73,68 tahun.

Selama periode 2020-2024, capaian UHH Kabupaten Kolaka selalu berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka berjalan lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Kolaka lebih tinggi 1,8 poin dibanding rata-

rata Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai masing-masing 73,68 dan 71,88. Tingginya selisih tersebut patut dipertahankan dan bisa lebih ditingkatkan pada periode pembangunan berikutnya.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian perempuan akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKI digunakan sebagai tolak ukur penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu pada suatu wilayah. Berikut capaian AKI Kabupaten Kolaka.



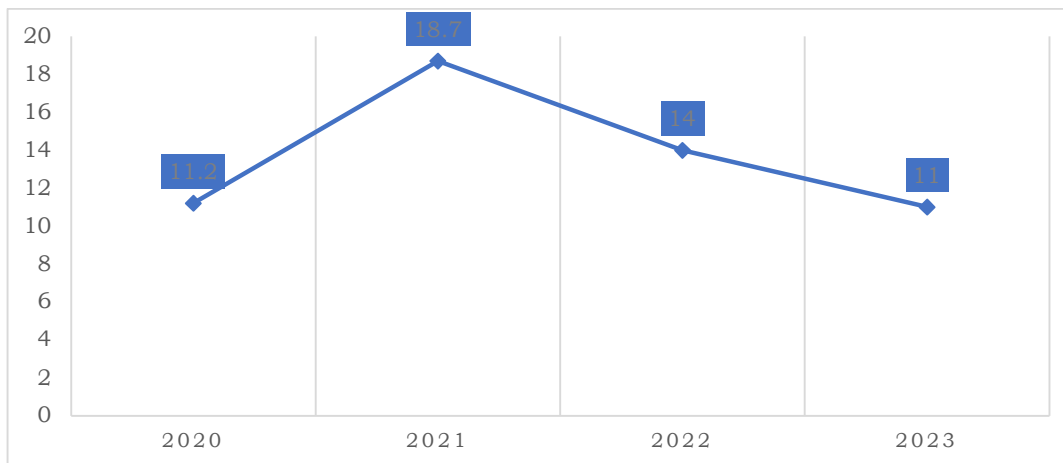
Gambar 2. 26 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2025

Selama periode 2020-2023, capaian angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Kolaka memiliki trend fluktuatif. Capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 250 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut kemudian turun cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 53 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Kolaka tahun 2023, program pemeriksaan ibu hamil oleh dokter spesialis kandungan yang turun langsung ke puskesmas menjadi salah satu pendorong menurunnya kasus karena dapat mendeteksi lebih dini ibu hamil yang berisiko tinggi. Pada tahun 2023, kematian ibu terjadi di Kecamatan Samatur dan Kecamatan Pomalaa. Salah satu tantangan pada daerah tersebut yakni sebagian masyarakat bermukim di wilayah perbukitan dengan akses yang cukup sulit, sehingga menghambat proses pemeriksaan dan penanganan ibu hamil.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum usia tepat satu tahun, dihitung per 1.000 kelahiran hidup. AKB menjadi indikator kesehatan masyarakat yang sangat penting karena mencerminkan berbagai faktor seperti gizi ibu hamil, kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), serta kondisi sosial ekonomi lingkungan. Berikut capaian AKB Kabupaten Kolaka.



Gambar 2. 27 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023

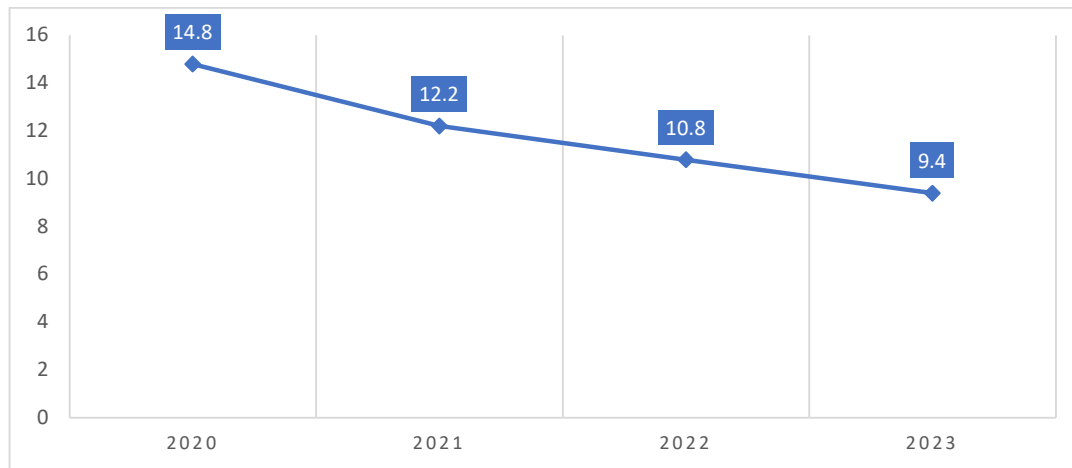
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2025

Selama periode 2020-2023, capaian AKB Kabupaten Kolaka cukup fluktuatif dan cenderung turun. Pada tahun 2023, AKB Kabupaten Kolaka 11 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut tergolong rendah, namun tetap perlu ditekan hingga zero kasus. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Kolaka 2023, penyebab kematian pada balita diantaranya BBLR, Prematuritas, dan beberapa penyebab lain-lain. Dengan demikian, upaya penurunan kematian bayi masih perlu ditingkatkan pada periode berikutnya.

4. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (di bawah usia lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Stunting bukan hanya masalah tinggi badan,

tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif dan motorik anak. Berikut prevalensi stunting Kabupaten Kolaka.



Gambar 2. 28 Prevalensi Stunting Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2025

Selama periode 2020-2023, prevalensi stunting Kabupaten Kolaka menurut data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) memiliki trend menurun. Selama periode tersebut prevalensi stunting berhasil turun 5,4 persen. Kondisi ini menunjukkan intervensi penurunan stunting melalui penerapan program lintas sektor, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta dukungan aktif dari pemerintah daerah dan kader posyandu berjalan cukup baik. Namun demikian, upaya tersebut tetap perlu ditingkatkan sehingga capaian stunting bisa ditekan ke angka optimal atau 0 kasus. Penyebab stunting di Kabupaten Kolaka diantaranya masih adanya kekurangan gizi kronis pada ibu hamil dan balita, pola asuh yang belum optimal, akses sanitasi dan air bersih yang masih kurang, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, intervensi dari hulu ke hilir serta kerjasama lintas sektor dalam penanganan stunting masih perlu dioptimalkan.

5. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan tempat atau sarana, termasuk alat-alat, yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Berikut daftar fasilitas kesehatan di Kabupaten Kolaka.

Tabel 2. 14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	3
2	Rumah Sakit Khusus	1
3	Puskesmas Rawat Inap	13
4	Puskesmas Non Rawat Inap	1
5	Puskesmas Keliling	14
6	Puskesmas Pembantu	37
7	Klinik Pratama	11
8	Klinik Utama	3
9	Praktik Mandiri Dokter	9
10	Praktik Mandiri Dokter Gigi	1
11	Praktik Mandiri Bidan	4
12	Praktik Mandiri Perawat	7
13	Laboratorium Kesehatan	1
14	Apotek	48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2025

Secara umum, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kolaka cukup memadai. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, pustu, klinik, apotek, laboratorium, hingga praktik mandiri dokter sudah tersedia dan cukup dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, upaya peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, inovasi layanan kesehatan, serta integrasi dan digitaliasi layanan kesehatan perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah..

6. SDM Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah semua orang yang bekerja aktif di bidang kesehatan dan terlibat dalam upaya dan manajemen kesehatan. SDMK mencakup tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berikut SDM Kesehatan di Kabupaten Kolaka.

Tabel 2. 15 SDM Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2023

No	SDM Kesehatan	Rasio per 100.000 Penduduk
1	Dokter Spesialis	9
2	Dokter Umum	21
3	Dokter Gigi	5
4	Perawat	229
5	Bidan	129
6	Kesehatan Masyarakat	94
7	Kesehatan Lingkungan	11
8	Gizi	17
9	Ahli Laboratorium Medik	25
10	Teknik Biomedik Lainnya	7
11	Keterapian Fisika	3
12	Keteknisian Medis	9
13	Teknis Kefarmasian	7
14	Apotek	19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2025

Secara umum, jumlah SDM kesehatan di Kabupaten Kolaka cukup memadai. Mulai dari tenaga medis seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi, serta tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, farmasi, dan sebagainya sudah tersedia di Kabupaten Kolaka. Namun demikian, upaya peningkatan jumlah, distribusi, dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dari pemenuhan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk juga perlu diperhatikan untuk menunjang kualitas layanan yang diberikan.

2.1.3.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, Pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/ Kota meliputi :

- A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- B. Pendidikan Dasar SD dan SMP.
- C. Pendidikan Kesetaraan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, Pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/ Kota meliputi:

- A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- B. Pendidikan Dasar SD dan SMP.
- C. Pendidikan Kesetaraan.

Berikut ini capaian dan target indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kolaka tahun 2023.

Tabel 2. 16 Tabel capaian indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kolaka

Indikator	Jenjang	Capaian 2023
A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	47.91
A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	62.11
A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	39.04
A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	58.80
B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	62.71

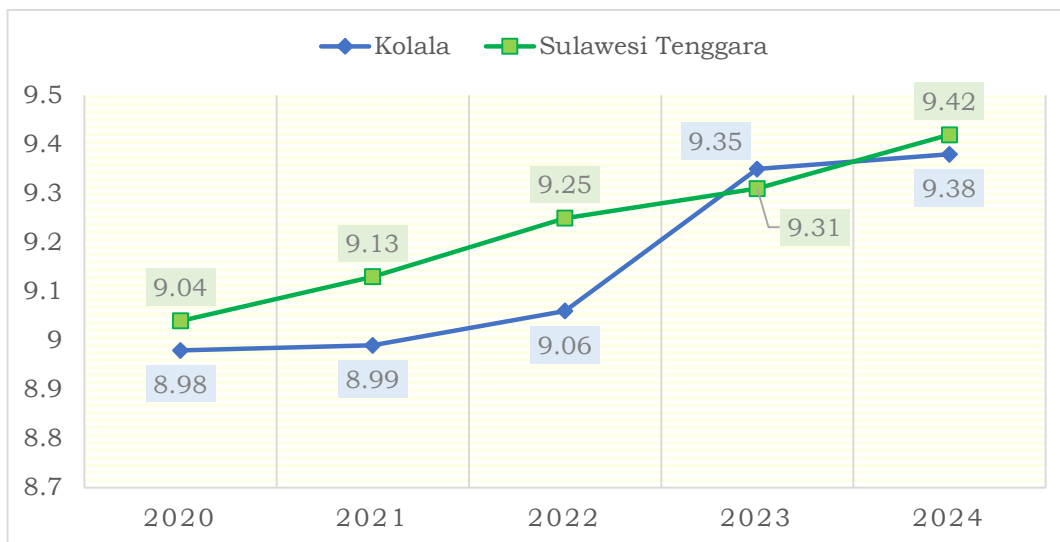
Indikator	Jenjang	Capaian 2023
B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	97.82
B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	12.81
B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	67.39
C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	65.01
D.10 Iklim Inklusivitas	SD	52.87
D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	57.68
D.4 Iklim Keamanan	SD	70.68
D.4 Iklim Keamanan	SMP	70.21
D.8 Iklim Kebinekaan	SD	71.86
D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	74.47

Sumber: Dinas Dikbud Kab. Kolaka 2024

Pendidikan merupakan aspek yang cukup berpengaruh terhadap terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Kedua indikator tersebut menjadi salah satu komponen pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi capaian RLS dan HLS mencerminkan semakin tinggi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal baik ditingkat dasar, menengah hingga tinggi.

1. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Pendidikan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Berikut capaian RLS dan HLS Kabupaten Kolaka.



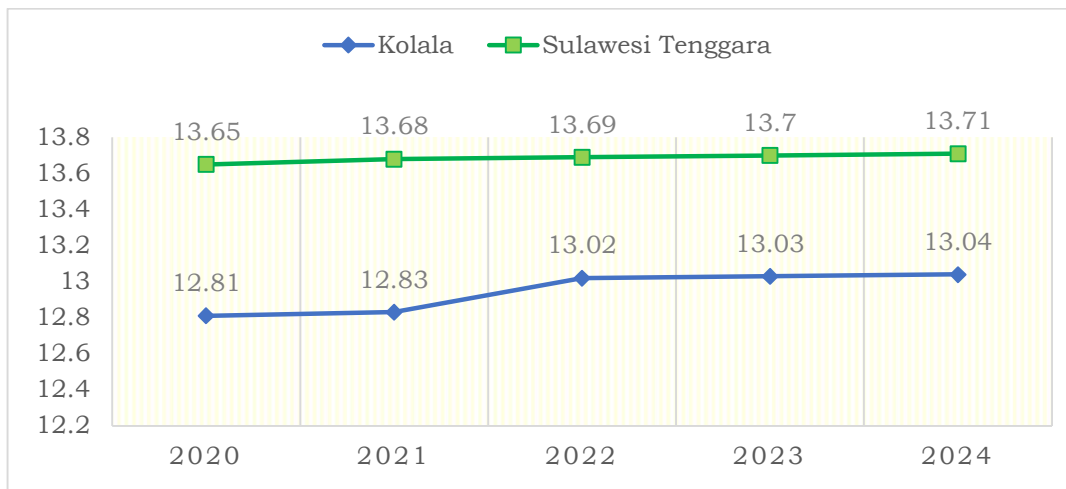
Gambar 2. 29 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh pendidikan formal. Selama periode 2020-2024, capaian RLS Kabupaten Kolaka menunjukkan trend yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian RLS Kabupaten Kolaka meningkat sebesar 0,4 poin dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,1 persen per tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 yakni dari 9,06 menjadi 9,35. Kenaikan RLS mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan formal, sehingga diharapkan memiliki tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik. Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Kolaka 9,38. Artinya, rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Kolaka telah menempuh pendidikan formal selama 9,38 tahun atau setara kelas 3 SMP. Dengan demikian, rata-rata pendidikan yang ditempuh masih pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), sehingga pemerintah perlu mendorong akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selama periode 2020-2024, capaian RLS Kabupaten Kolaka berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali pada tahun 2023. Meskipun masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara, namun dilihat dari tingkat kenaikan RLS masih lebih tinggi Kabupaten Kolaka. Selama periode lima tahun terakhir, RLS Provinsi Sulawesi Tenggara

mengalami kenaikan 0,38 poin dengan rata-rata kenaikan 1,04 persen per tahun, sedangkan RLS Kabupaten Kolaka mengalami kenaikan 0,40 poin dengan rata-rata kenaikan 1,10 persen per tahun. Dengan demikian, perlu upaya percepatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada periode mendatang, sehingga dapat sejajar bahkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 2. 30 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025

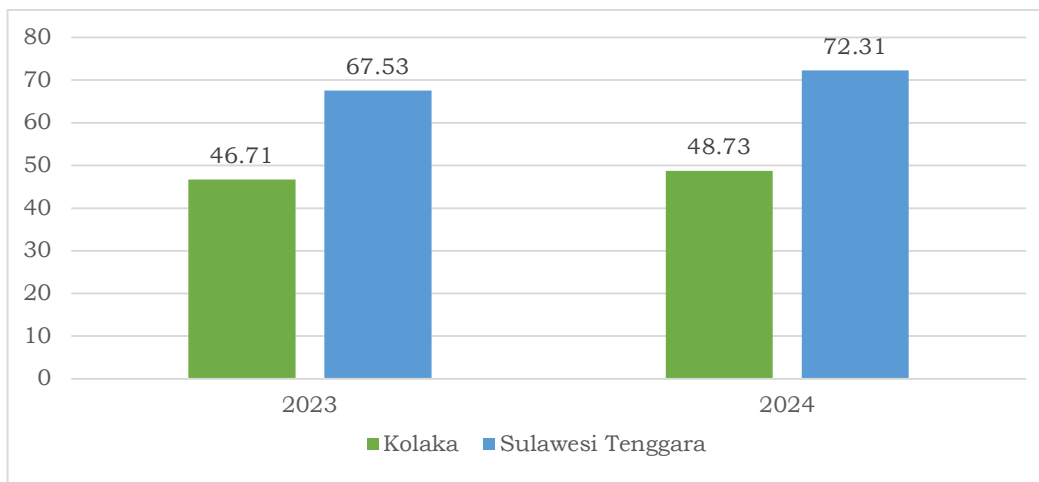
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan perkiraan jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu disuatu wilayah. Selama periode 2020-2024, capaian harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Kolaka menunjukkan trend yang meningkat, namun cenderung melambat. Selama lima tahun terakhir, HLS Kabupaten Kolaka naik 0,23 poin dengan rata-rata kenaikan 0,45 persen per tahun. Kenaikan HLS mengindikasikan bahwa peluang untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi semakin besar. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Kolaka sebesar 13,04. Artinya, anak-anak di Kabupaten Kolaka diproyeksikan dapat menempuh pendidikan hingga 13,04 tahun atau setara kelas 3 SMA. Hal tersebut mencerminkan akses pendidikan yang cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat pendidikan tinggi secara luas.

Selama periode 2020-2024, capaian HLS Kabupaten Kolaka masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Kolaka lebih rendah 0,67 poin. Namun, secara capaian angka sama yakni pada kisaran angka 13. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Kolaka 13,04 dan Provinsi Sulawesi Tenggara 13,71. Artinya, keduanya memiliki peluang menempuh pendidikan hingga pada jenjang kelas 3 SMA. Dengan demikian, diperlukan upaya percepatan peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang disusun oleh Perpustakaan Nasional untuk mengukur sejauh mana literasi masyarakat berkembang di suatu wilayah. Nilai IPLM dihitung berdasarkan dua unsur utama, yakni Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang diperoleh dari data sekunder, dan Aspek Masyarakat (AM) yang berkaitan dengan partisipasi dalam pengembangan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran seumur hidup.

UPLM mencakup tujuh komponen, yaitu: pemerataan akses layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi buku, jumlah tenaga perpustakaan yang memadai, tingkat kunjungan harian masyarakat, jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, serta jumlah anggota perpustakaan. Data berikut menunjukkan hasil capaian IPLM di Kabupaten Kolaka untuk tahun 2022 dan 2023.



Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2024

Sumber: Perpustnas, 2025

IPLM Kabupaten Kolaka mengalami tren yang meningkat selama periode 2023 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan tingkat kegemaran membaca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hal ini menjadi salah satu kondisi yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna melahirkan SDM Kabupaten Kolaka yang berdaya saing. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka dalam rangka meningkatkan budaya literasi masyarakat, diantaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.1.3.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Salah satu indikator yang mencerminkan perlindungan yakni cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Kolaka menerapkan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Kebijakan tersebut diantaranya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan. Peraturan

ini mewajibkan setiap orang atau perusahaan yang mengajukan perizinan di Kabupaten Kolaka untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian peraturan terbaru yakni Peraturan Bupati Kolaka Nomor 14 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kolaka. Peraturan tersebut mencakup ruang lingkup kepesertaan, penetapan iuran, kewajiban dan hak peserta, sanksi administratif, serta pembinaan dan pengawasan. Berbagai kebijakan yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Kolaka mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang memadai.

2.1.3.5 Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju

Kondisi kebudayaan di Kabupaten Kolaka dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator utama, seperti jumlah fasilitas seni dan budaya yang tersedia, frekuensi penyelenggaraan kegiatan seni, serta jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terus dilestarikan. Upaya dalam bidang kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, serta mempertahankan warisan budaya daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk nyata dalam pelestarian kebudayaan daerah, pemerintah berencana membangun museum budaya. Pembangunan ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai budaya yang berkembang di Bumi Mekongga serta memperkuat identitas daerah. Selain itu, museum ini juga menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek budaya dengan sektor pendidikan dan keagamaan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan pembangunan sosial masyarakat. Berikut ini adalah data mengenai jumlah penyelenggaraan kegiatan seni budaya serta situs budaya yang telah dilestarikan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 17 Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya Serta Situs Budaya Kabupaten Kolaka

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7	7	7	7	7
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	19	19	20	22	22
3	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	235	235	235	301	301

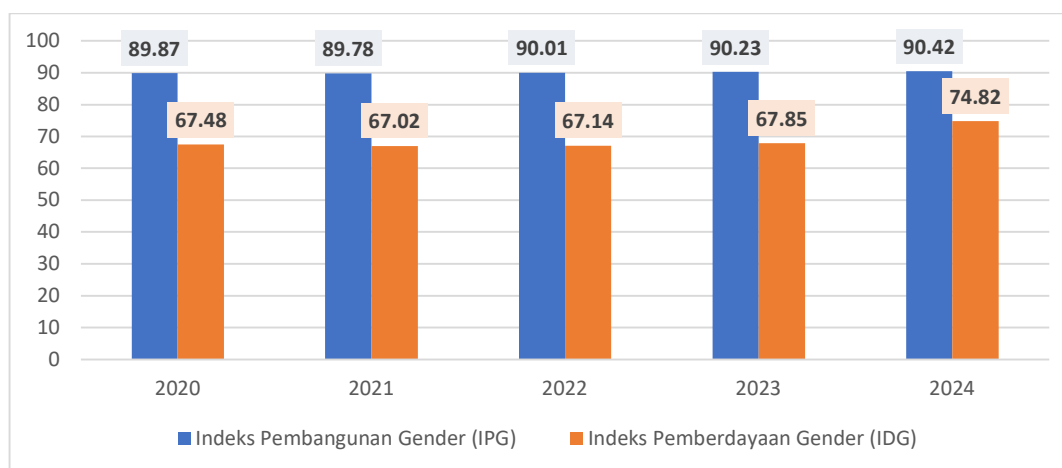
Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Kolaka secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga 2023, yakni sebanyak 7 kali per tahun. Sementara itu, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami peningkatan dari 19 unit pada tahun 2019-2020 menjadi 20 unit pada 2021, kemudian bertambah lagi menjadi 22 unit pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Dari tahun 2019 hingga 2021, jumlahnya tetap di angka 235, namun pada tahun 2022 mengalami lonjakan menjadi 301 dan tetap bertahan pada angka tersebut di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya dalam pelestarian warisan budaya di Kabupaten Kolaka, baik melalui penyediaan sarana maupun perlindungan terhadap objek-objek bersejarah.

2.1.3.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan bidang sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan sosial budaya meliputi beberapa urusan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah. Berikut beberapa capaian pembangunan sosial budaya di Kabupaten Kolaka.

1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Secara umum, pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui peningkatan peran perempuan dalam segala bidang dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Beberapa indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di antaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut capaian IPG dan IDG Kabupaten Kolaka tahun 2019-2023 ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2. 32 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Selama periode 2020-2024, capaian IPG Kabupaten Kolaka cukup tinggi yakni mencapai angka 90,42. Namun demikian, capaian tersebut belum dikatakan optimal karena belum mendekati angka 100. IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

Hal tersebut berkorelasi dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini untuk mengukur tingkat keberdayaan perempuan yang dilihat dari tiga aspek yaitu partisipasi perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Capaian IDG Kabupaten Kolaka tahun 2020 masih cukup rendah. Pada tahun 2024, IDG Kabupaten Kolaka sudah mengalami peningkatan sebesar 74,82. Berikut IDG ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 18 IPG dan IDG Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023

No	Uraian Kegiatan	Volume Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,77	89,87	89,78	90,01	90,23
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,98	67,48	67,02	67,14	67,85

Sumber: Dinas PPPA Kab. Kolaka, 2024

Tabel tersebut menunjukkan Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2019 sebesar 89,77% meningkat menjadi 90,23% pada tahun 2023, Presentase peran perempuan di lembaga pemerintahan dari tahun 2019 sebesar 3,78% turun menjadi 1,56% pada tahun 2023, capaian ini belum memenuhi target sebesar 30%. Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan tren positif dari 63,98% di tahun 2019 menjadi 67,85% di tahun 2023, sementara TPAK Perempuan tahun 2019 sebesar 70,45% mengalami penurunan menjadi 65,22% pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena masih adanya paradigma lembaga/ Perusahaan terhadap kemampuan SDM tenaga kerja perempuan.

Kabupaten/ Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan

untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan pada tabel berikut.

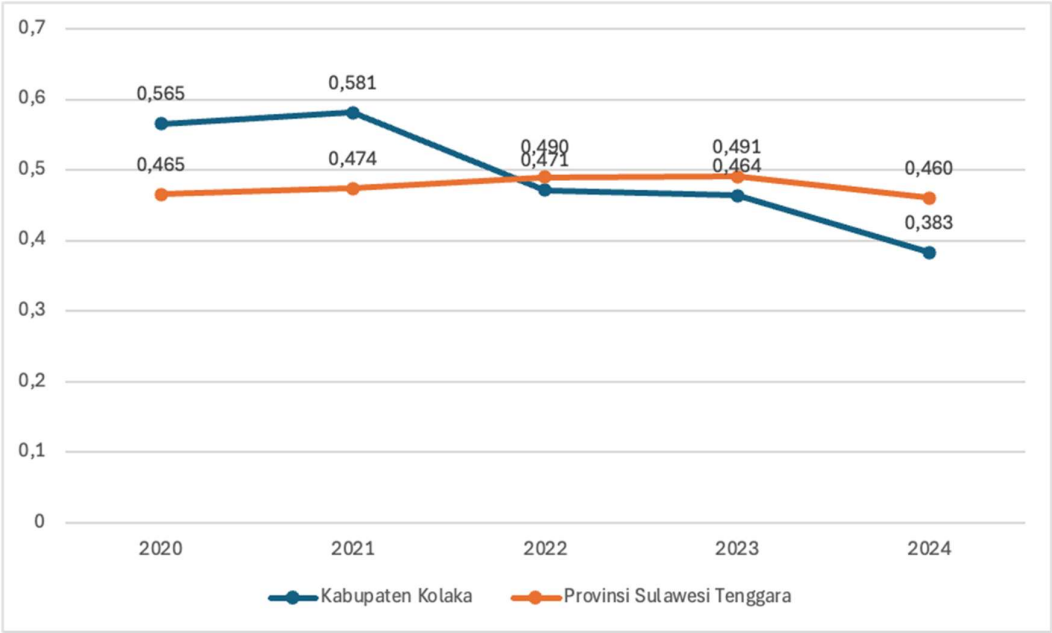
Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2023

No	Uraian Kegiatan	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	Pratama	Madya	Madya
2	Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	-	Madya

Sumber: Dinas PPPA Kab. Kolaka, 2024

2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan gender dalam suatu wilayah. IKG mengukur ketidakadilan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar dari 0 (ketimpangan sempurna) hingga 1 (ketimpangan total). Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada gambar berikut.



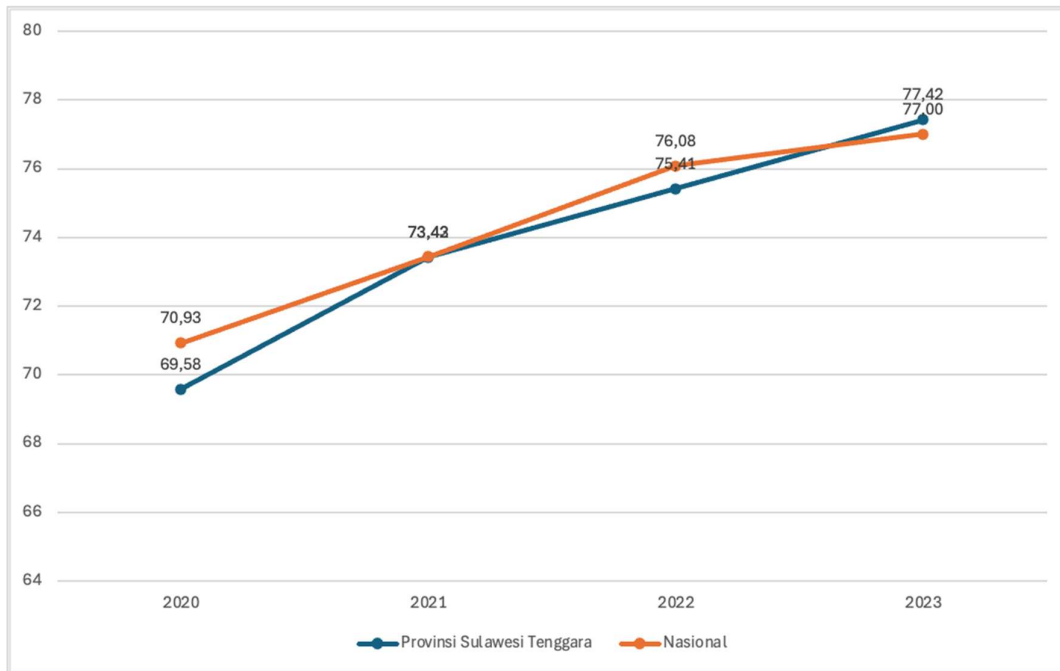
Gambar 2. 33 Capaian IKG Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021-2025

Selama periode 2020-2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kolaka mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Kolaka masih dalam tren menuju angka 0. Pada tahun 2024 kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Kolaka berada lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Ketimpangan gender rendah apabila mendekati angka 0. Upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Kolaka masih perlu dioptimalkan pada periode pembangunan berikutnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah intervensi lebih lanjut pada masing-masing dimensi IKG seperti peningkatan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan pasar tenaga kerja. Dari 3 dimensi tersebut terdapat 5 indikator yang diukur yakni persentase perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, angka fertilitas remaja, persentase laki-laki/perempuan dalam parlemen, persentase laki-laki/perempuan berpendidikan minimal SMA, dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki/perempuan.

3. Indeks Kualitas Keluarga

Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2016, 2019, dan 2020-2021 dengan jumlah dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Namun, perhitungan tersebut baru sampai pada level provinsi. Oleh karena itu, capaian rata-rata kualitas keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu proksi yang digunakan untuk melihat gambaran kualitas keluarga di Kabupaten Kolaka. Selama periode 2020-2023, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami tren yang meningkat, bahkan pada tahun 2023 berada di atas IKK nasional. Pada tahun 2023, indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 77,42. Capaian tersebut lebih tinggi 0,42 poin dibanding rata-rata nasional sebesar 77,00.



Gambar 2. 34 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2020-2023

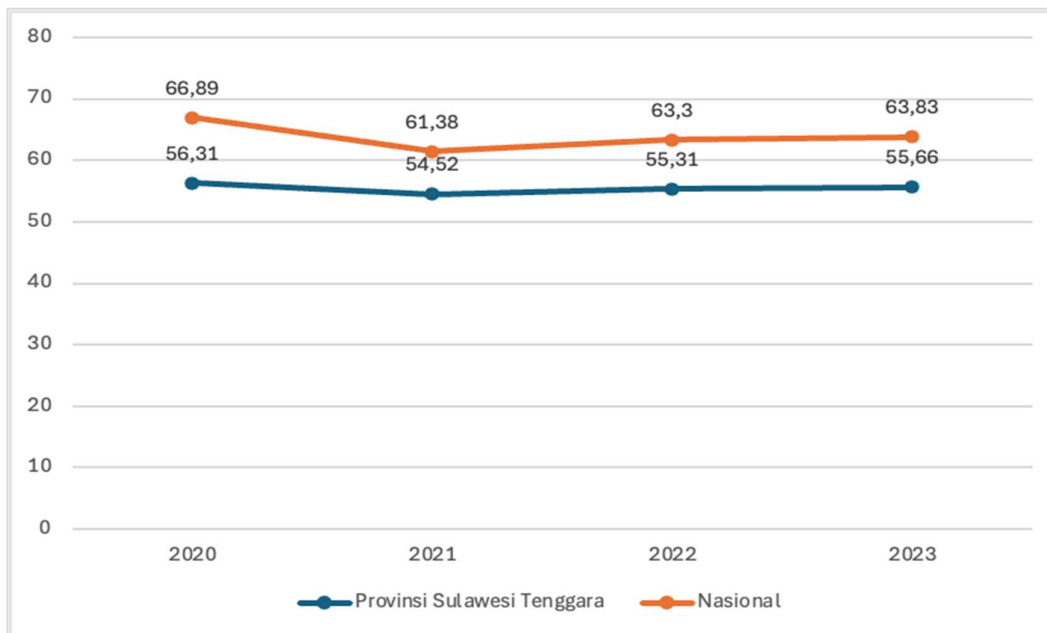
Sumber: Kementerian PPA, 2021-2024

Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata kualitas keluarga di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk dalam hal ini Kabupaten Kolaka sudah berada pada kondisi yang relatif baik. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas keluarga tetap perlu ditingkatkan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dapat dilakukan melalui pemenuhan dimensi keluarga berkualitas seperti aspek legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

4. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran untuk menilai capaian pembangunan perlindungan anak, yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA mengukur pemenuhan hak-hak dasar anak, sedangkan IPKA mengukur perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. IPA Kabupaten Kolaka diukur menggunakan proksi dari

Provinsi Sulawesi Tenggara yang disandingkan dengan angka rata-rata nasional.



Gambar 2. 35 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2020-2023

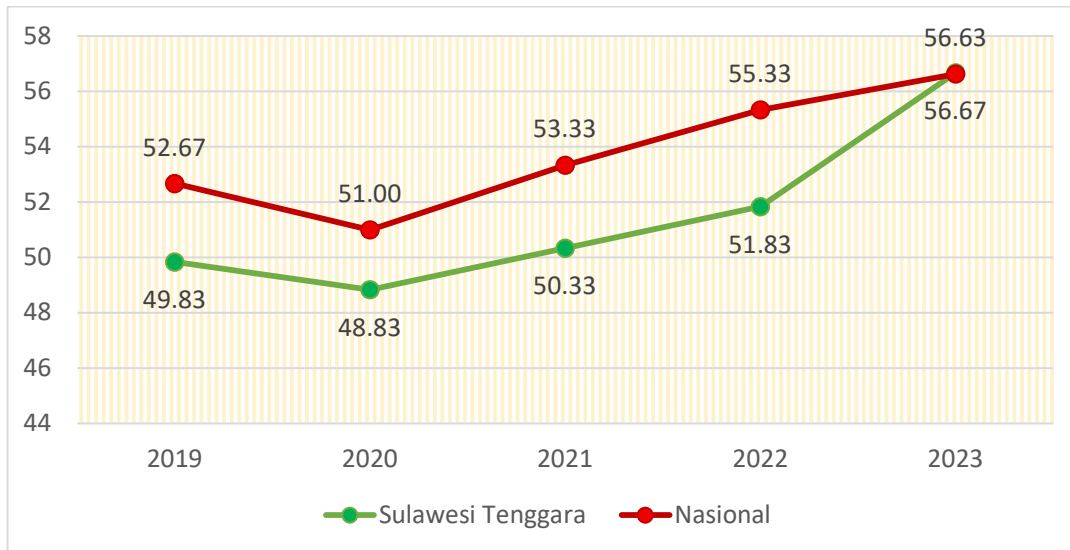
Sumber: Kementerian PPA, 2021-2024

Selama periode 2020-2023, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami tren yang cenderung stagnan, hanya mengalami sedikit peningkatan. IPA Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada di bawah IPA Nasional. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu perhatian dalam pembangunan daerah, sehingga dampak positif pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Kolaka pada khususnya.

5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen dalam mengukur upaya pembangunan pemuda dari sektor ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Capaian IPP mencerminkan status pembangunan berdasar domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi. Namun, perhitungan

tersebut baru sampai pada level provinsi belum sampai kabupaten/kota. Untuk itu, capaian indeks pembangunan pemuda (IPP) Kabupaten Kolaka menggunakan proxy capaian IKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut capaian indeks pembangunan pemuda (IPP) Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 2. 36 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2025

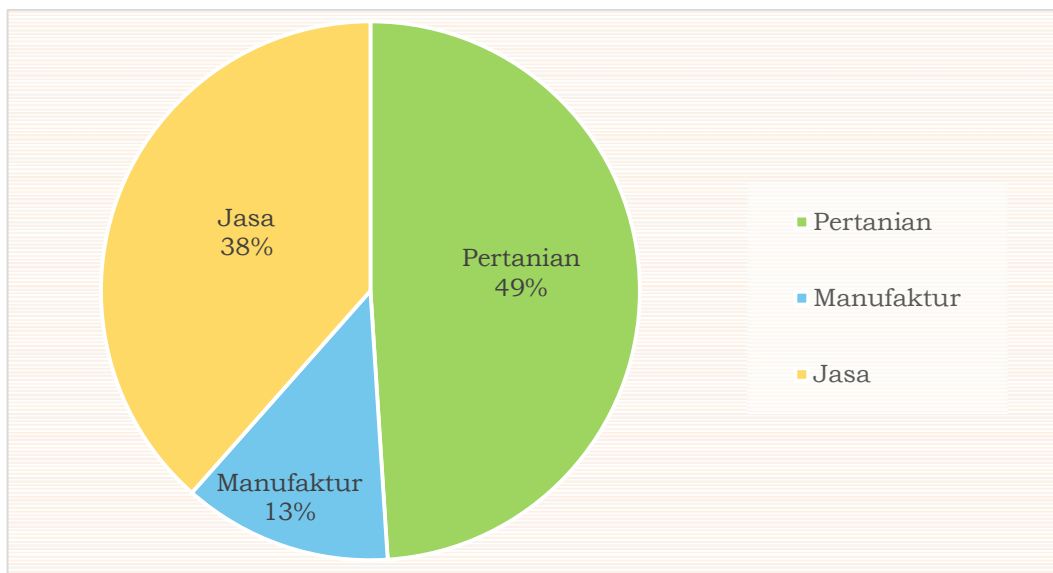
Selama periode 2019-2023, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang meningkat. Selama lima tahun tersebut, capaian IPP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan sebesar 6,84 poin. Namun, Meskipun mengalami peningkatan, capaian IPP Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada dibawah rata-rata Nasional. Baru pada tahun 2023, capaian IPP Sulawesi Tenggara mampu melewati rata-rata nasional yaitu berada pada angka 56,67. Dengan demikian, kemajuan pembangunan pemuda di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah relatif mengalami perbaikan, namun masih perlu ditingkatkan. Adapun upaya yang bisa dialukan diantaranya peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan kesetaraan gender.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah memuat informasi mengenai kondisi ekonomi daerah, iklim investasi, kondisi infrastruktur wilayah, dan sumber daya manusia. Beberapa unsur tersebut memiliki keterkaitan dalam upaya meningkatkan daya saing Kabupaten Kolaka. Penjelasan lebih rinci mengenai kondisi aspek daya saing Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut

2.1.4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing pada kondisi SDM dapat dilihat dari profil tenaga kerja dan rasio ketergantungan. Profil tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Berikut kondisi yang menggambarkan daya saing SDM di Kabupaten Kolaka.



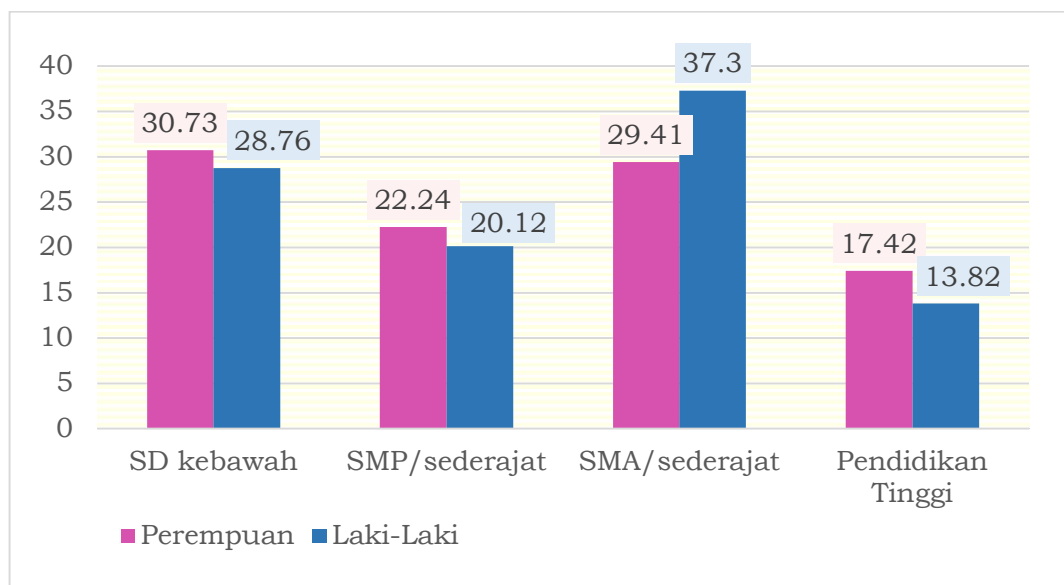
Gambar 2. 37 Grafik Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Kolaka 2024, BPS Kolaka 2025

Berdasarkan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Kolaka bekerja di sektor pertanian sebesar 49 persen, kemudian disusul pada sektor jasa 38 persen dan sektor manufaktur 13 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor

pertanian dalam artian luas masih menjadi sektor dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2024, hampir separuh penduduk Kabupaten Kolaka bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sektor terbesar kedua dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kolaka yakni sektor jasa sebesar 38 persen. Tingginya penyerapan pada sektor jasa disebabkan karena semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi/gaya hidup. Perekonomian yang meningkat mendorong permintaan layanan jasa seperti perdagangan, perbankan, transportasi, ritel, hiburan, restoran, dan jasa profesional, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sedangkan sektor terakhir yang menyerap tenaga kerja yakni sektor manufaktur sebesar 13 persen. Sektor manufaktur di Kabupaten Kolaka terutama pada Industri Mikro dan Kecil memainkan peran penting dalam perekonomian daerah.



Gambar 2. 38 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan tahun 2024

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Kolaka 2024, BPS Kabupaten Kolaka 2025

Berdasarkan data persentase penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan terlihat bahwa mayoritas penduduk yang bekerja memiliki pendidikan SMA/ sederajat dengan 29,41 persen

perempuan dan 37,3 persen laki-laki. Kelompok dengan pendidikan SD kebawah juga cukup besar yakni 30,73 persen perempuan dan 28,76 persen laki-laki. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi memiliki persentase terendah yakni 17,42 persen perempuan dan 13,82 persen laki-laki.

Dengan demikian, mayoritas tenaga kerja masih memiliki pendidikan menengah ke bawah yang mengindikasikan sebagian besar pekerjaan tidak memerlukan keterampilan tinggi atau berasal dari sektor informal. Selain itu, rendahnya pekerja dengan pendidikan tinggi menunjukkan peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi masih terbatas atau banyak lulusan yang bekerja diluar daerah. Sedangkan dilihat dari terlihat bahwa pekerja perempuan dengan pendidikan tinggi lebih banyak terserap sebagai tenaga kerja dibanding laki-laki. Namun sebaliknya, pekerja laki-laki dengan pendidikan dasar hingga menengah atas lebih banyak terserap dibanding pekerja perempuan. Hal ini menunjukkan perempuan berpendidikan tinggi lebih cenderung masuk ke pasar kerja dibanding laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama.

2.1.4.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Kolaka akan dijelaskan melalui beberapa indikator makro seperti pertumbuhan PDRB, struktur perekonomian, dan tingkat inflasi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan masyarakat dalam memberikan nilai tambah terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki. Struktur perekonomian menunjukkan seberapa besar pengaruh lapangan usaha terhadap perekonomian daerah. Adapun tingkat inflasi digunakan untuk menunjukkan pergerakan harga komoditas yang dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar yang pada dasarnya juga dipengaruhi oleh daya beli konsumen.

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Agenda hilirisasi merupakan salah satu fokus utama untuk meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah. Rasio PDRB dari industri pengolahan berfungsi sebagai indikator untuk

menilai seberapa besar kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dengan total PDRB daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut, yang menunjukkan bahwa industri pengolahan memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya rasio PDRB industri pengolah menjelaskan bahwa sektor industri pengolahan berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Berikut rasio PDRB industry pengolahan Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.



Gambar 2. 39 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kolaka, 2025

PDRB industri pengolahan Kabupaten Kolaka tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren pertumbuhan negatif. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar minus 8,23 persen atau turun dari Rp2.473,53 miliar menjadi Rp2.269,94 miliar. Penurunan PDRB ini diikuti dengan penurunan distribusi sebesar 1,52 persen menjadi 6,36 persen. Rendahnya rasio PDRB industri pengolahan disebabkan karena adanya ketergantungan pada sektor pertanian, dan sektor pertambangan. Potensi PDRB industri pengolahan Kabupaten Kolaka sangat besar dan

dapat memberikan peluang besar pada perekonomian daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Kolaka diperlukan upaya tambahan dalam meningkatkan investasi, inovasi teknologi, dan peningkatan daya saing industri pengolahan di daerah.

2. Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman

Rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman merupakan salah satu komponen dalam perhitungan total PDRB suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan nilai produksi dari lapangan usaha akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total PDRB. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam kaitannya dengan industri pariwisata dan jasa kuliner. Berikut rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.



Gambar 2. 40 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

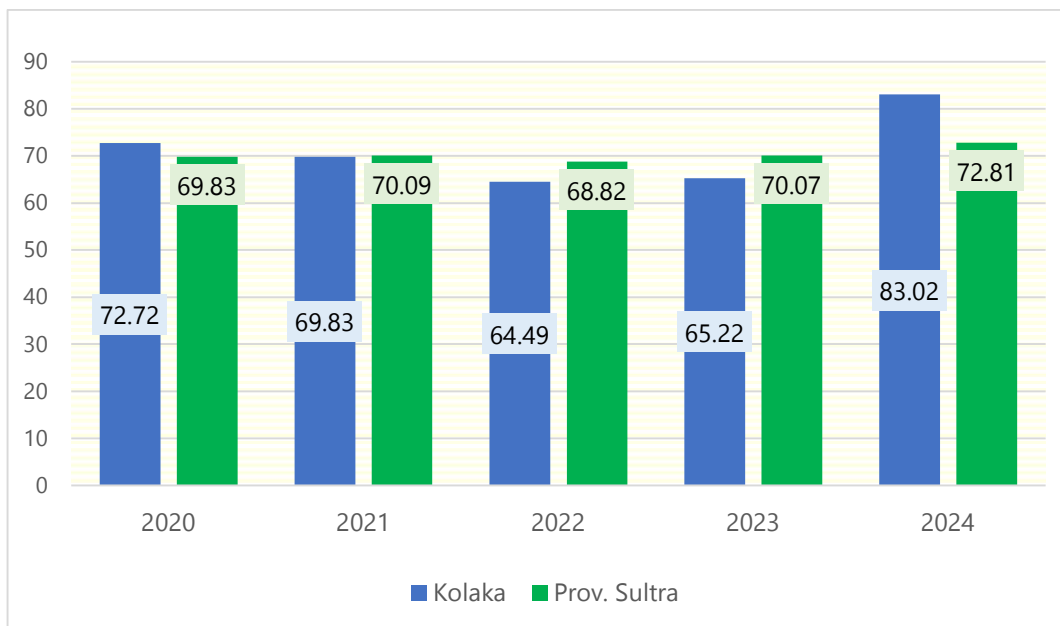
Sumber: BPS Kolaka, 2025

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kabupaten Kolaka menunjukkan besaran yang cenderung sama selama tahun 2020-2024. Pertumbuhan PDRB akomodasi makan dan minum selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada

tahun 2022 sebesar 11,82 persen atau meningkat dari Rp90,09 miliar menjadi Rp100,74 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi COVID-19, yang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan permintaan terhadap layanan akomodasi serta makanan. Selain itu, adanya peningkatan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan fasilitas akomodasi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Secara keseluruhan, lapangan usaha akomodasi makan minum menunjukkan pemulihan yang konsisten dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Diperlukan strategi penguatan sektor pariwisata, pengembangan usaha kuliner lokal, serta kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan investasi di industri ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik melalui pekerjaan maupun pencarian pekerjaan. TPAK dihitung sebagai persentase jumlah angkatan kerja (yang mencakup mereka yang bekerja dan pengangguran) terhadap total penduduk usia kerja, yaitu individu berusia 15 tahun ke atas. Tinggi rendahnya TPAK dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan tuntutan ekonomi. Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.



Gambar 2. 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kolaka memiliki tren yang cenderung menurun selama tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, TPAK mengalami peningkatan sebesar 17,8 persen menjadi 83,02 persen. Rata-rata TPAK Kabupaten Kolaka sebesar 71,05 lebih tinggi 0,73 persen dari rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan TPAK di Kabupaten Kolaka mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek ketenagakerjaan. Salah satu faktor pendorong peningkatan ini adalah adanya investasi di sektor industri dan pertambangan, khususnya nikel, yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Tingginya TPAK menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk produktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebaliknya, rendahnya TPAK dapat mencerminkan adanya masalah struktural dalam perekonomian, seperti kurangnya lapangan kerja atau tingginya jumlah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, seperti pelajar atau mereka yang mengurus rumah tangga.

4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui IID, pemerintah daerah dapat memperoleh peringkat berdasarkan inovasi yang dilakukan, yang selanjutnya dapat memicu kompetisi positif antar daerah dalam meningkatkan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, IID juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses inovasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Berikut Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024.

Tabel 2. 20 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kolaka	60	31,30	42,28	38,33	46,51
Predikat	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Sulawesi Tenggara	982	25,26	41,6	32,85	51,36
Predikat	Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif

Sumber: Kemendagri, 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren fluktuatif yang cenderung meningkat. Pada tahun 2022, nilai yang dicapai adalah 42,28 kemudian meningkat menjadi 46,51 pada tahun 2024. Terjadi penurunan sebesar 3,95 poin pada tahun 2023 menjadi 38,33 sebelum akhirnya meningkat hingga 46,51. Meskipun sempat terjadi penurunan, secara umum Kabupaten Kolaka tetap dalam predikat “Inovatif” selama tahun 2020-2024. Kenaikan skor Indeks Inovasi Daerah mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mendorong pengembangan serta penerapan inovasi di berbagai bidang, termasuk

tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah. Pada tahun 2024, peningkatan ini terlihat cukup signifikan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu konsistensi dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan inovasi daerah agar pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, Kabupaten Kolaka dapat lebih kompetitif dalam pembangunan berbasis inovasi serta kesejahteraan yang lebih efektif dan efisien.

2.1.4.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor non-tambang merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan, PDRB sektor non-tambang tidak sepenuhnya dapat menggantikan indikator ekonomi hijau karena pendekatan ekonomi hijau mencakup aspek lingkungan, sosial, dan efisiensi sumber daya yang lebih luas. Namun, mengingat hingga saat ini indikator ekonomi hijau di tingkat kabupaten masih belum tersedia, PDRB sektor non-tambang sering digunakan sebagai proxy atau ukuran alternatif dalam menilai perkembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Penggunaan PDRB sektor non-tambang sebagai indikator sementara diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai pergeseran ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel 2. 21 PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tanpa Pertambangan Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,77	13,87	13,93	13,31	12,83
Industri Pengolahan	8,8	8,68	7,88	6,36	5,81
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,1	0,09	0,08	0,06	0,06
Konstruksi	8,31	9,34	8,54	8,05	7,36

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,01	9,61	9,89	9,09	9,13
Transportasi dan Pergudangan	1,94	1,86	1,91	1,89	1,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31
Informasi dan Komunikasi	0,67	0,62	0,59	0,55	0,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,7	1,55	1,47	1,4
Real Estat	0,73	0,71	0,66	0,58	0,57
Jasa Perusahaan	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,27	2,1	1,85	1,7	1,86
Jasa Pendidikan	1,68	1,66	1,54	1,43	1,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,41	0,38	0,34	0,33
Jasa Lainnya	0,81	0,79	0,73	0,67	0,66
Produk Domestik Regional Bruto	50,58	51,88	49,96	45,92	44,2

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka, 2025

PDRB tanpa pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kolaka mengalami penurunan sebesar 6,38 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan kontribusi beberapa sektor, seperti pertanian mengalami penurunan 0,94 persen, konstruksi mengalami penurunan sebesar 0,95 persen, industri pengolahan mengalami penurunan 2,99 persen. Penurunan kontribusi PDRB juga dialami oleh sektor lain, seperti transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dan berbagai sektor lainnya. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka. Produktivitas dan kapasitas pemasaran masing-masing sektor unggulan dan potensial di luar pertambangan harus ditingkatkan dengan dukungan peningkatan kualitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia agar

kontribusi PDRB di masing-masing sektor dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

2.1.4.4 Transformasi Digital

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Adanya kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya mengubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, sehingga mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, pariwisata, pelayanan publik, dan sektor swasta. Perkembangan transformasi digital di Kabupaten Kolaka diukur melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang meliputi aspek infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Dalam hal Indeks Pembangunan TIK di Kabupaten Kolaka belum dapat diukur, maka dilakukan pendekatan dengan melihat aspek infrastruktur TIK yang dilihat dari penyediaan fasilitas TIK. Gambaran penyediaan fasilitas TIK di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Penyediaan Fasilitas TIK di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
OPD yang berjaringan internet	Jumlah OPD/%	30 *(88%)	32 *(94%)	33 *(97%)	34 *(100%)	34 *(100%)
Kecamatan yang tersambung internet	Kecamatan	11 *(92%)	11 *(92%)	11 *(92%)	11 *(92%)	12 *(100%)
Covered Desa Internet	%	88%	88%	88%	88%	88%

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Masyarakat yang komplain terhadap layanan publik	%	18	18	18	10	14
SIM Aplikasi	Jumlah Aplikasi	22	24	26	98	107

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka, 2024

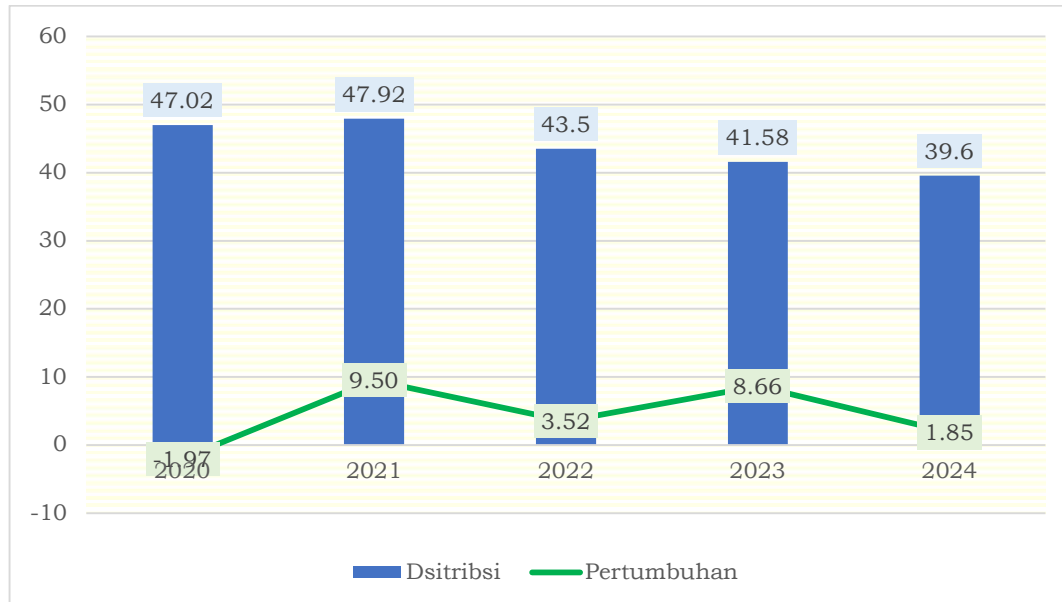
Berdasarkan data tersebut, layanan infrastruktur TIK masih belum menjangkau seluruh desa di Kabupaten Kolaka, meskipun layanan internet telah tersedia di seluruh kecamatan. Penggunaan TIK dalam pelayanan publik juga masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari persentase masyarakat yang komplain terhadap layanan publik yang cenderung menurun.

2.1.4.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kondisi perekonomian yang optimal memerlukan hubungan yang kuat antara pasar domestik dengan eksternal, dalam hal ini pasar global. Era globalisasi menghasilkan banyak potensi ekonomi baru dengan membuka peluang pasar bagi pelaku-pelaku ekonomi lokal dan domestik. Bagian ini akan melihat kondisi keterkaitan antara perekonomian lokal dengan perekonomian global melalui data pembentukan modal tetap bruto.

Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah salah satu data dalam PDRB menurut pengeluaran yang mengukur nilai pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi untuk membeli barang modal yang akan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Dalam kata lain, PMTB merupakan ukuran untuk melihat tingkat pengeluaran suatu daerah dalam tujuan untuk penanaman modal kembali untuk menjalankan suatu aktivitas ekonomi. Tingginya PMTB suatu daerah mengindikasikan berkembangnya aktivitas perekonomian tersebut, yang digambarkan sebagai tingkat masyarakat untuk menginvestasikan kembali hasil produksi ekonomi mereka di tahun bersangkutan untuk menjalankan usaha di tahun mendatang. Hal ini dapat mengindikasikan kondisi pasar yang baik yang dapat menjadi gambaran bagaimana pasar

ekonomi lokal berkembang dan memiliki akses yang tidak hanya terbatas dalam daerah tersebut. Berikut data Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kolaka 2020-2024.



Gambar 2. 42 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka, 2025

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kolaka memiliki tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 9,50 persen dari Rp12.047,41 miliar menjadi Rp13.192,45 miliar. Kontraksi pertumbuhan terjadi hingga tahun 2024 menjadi 1,85 persen atau turun sebesar 7,65 persen dari tahun 2021. Kontribusi PTMB terhadap PDRB memiliki tren yang cenderung turun dari 47,02 persen pada tahun 2020 menjadi 39,6 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa terjadi pelemahan investasi di Kabupaten Kolaka. Distribusi PTMB menunjukkan bahwa proporsi modal tetap bruto dalam PDRB juga terus mengalami penurunan, yang mengindikasikan menguatnya sektor lain seperti pengeluaran pemerintah maupun konsumsi rumah tangga.

2.1.4.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas infrastruktur wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah dapat diwujudkan melalui semakin berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Kolaka yang memiliki kawasan pertambangan nikel secara tidak langsung telah memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut tentunya juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang menggerakkan roda perekonomian.

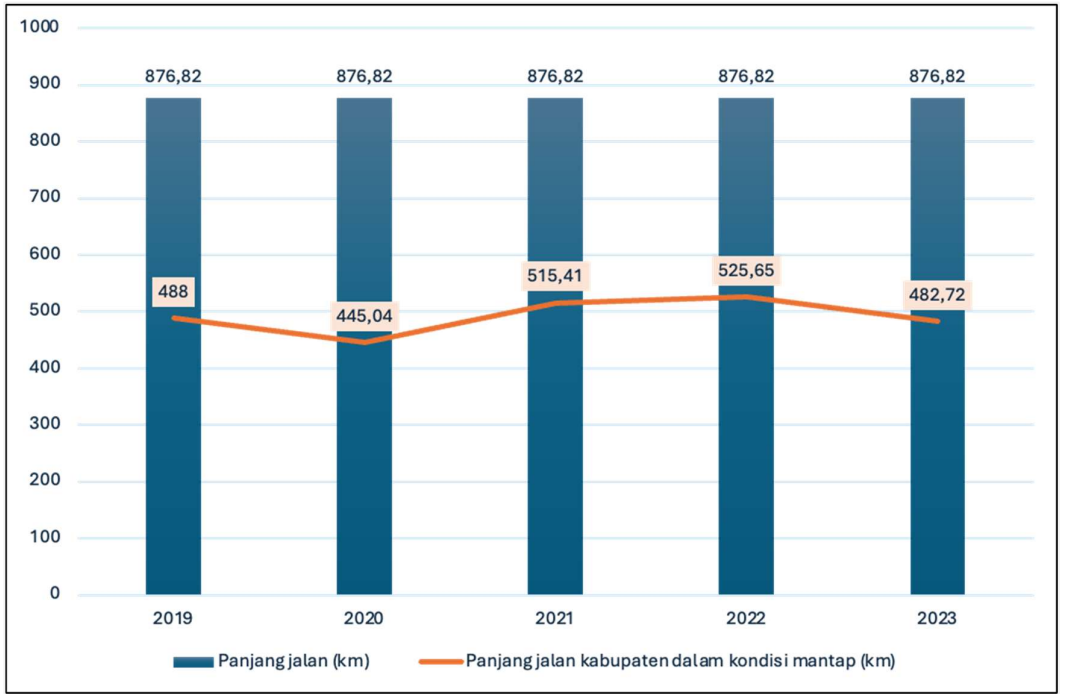
Gambaran infrastruktur di Kabupaten Kolaka dilihat dari kondisi pelayanan pemenuhan akses jalan dan jembatan, pengelolaan air irigasi, pemenuhan pelayanan ruang terbuka hijau, pemenuhan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman, akses terhadap air bersih, dan akses terhadap sanitasi.

1. Kondisi Jaringan Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan mantap di Kabupaten Kolaka dalam kurun waktu tahun 2019 - 2023 cukup fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka, kondisi jalan mantap hingga tahun 2023 berada di angka 55,05% atau sekitar 482,72 km. Penurunan persentase kemantapan jalan kabupaten disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kebijakan penilaian kemantapan jalan dari pemerintah pusat yang berubah dan mengakibatkan kinerja jalan mantap di wilayah Kabupaten Kolaka harus melakukan penyesuaian. Penambahan indikator penilaian kemantapan jalan kabupaten dari lima indikator menjadi empat indikator merupakan strategi dari pemerintah pusat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja jalan

Penambahan indikator kemantapan jalan yang menyebabkan berubahnya persentase kemantapan jalan kabupaten tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena masih tersisa 44,95% atau 304,09 km jalan kabupaten yang berada dalam kondisi rusak

(ringan dan berat). Untuk membuat kemantapan jalan terus meningkat harus sejalan dengan alokasi biaya pemeliharaan rutin jalan. Panjang jalan dengan kondisi mantap di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 43 Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Kolaka

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2024

Secara terperinci kondisi infrastruktur jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

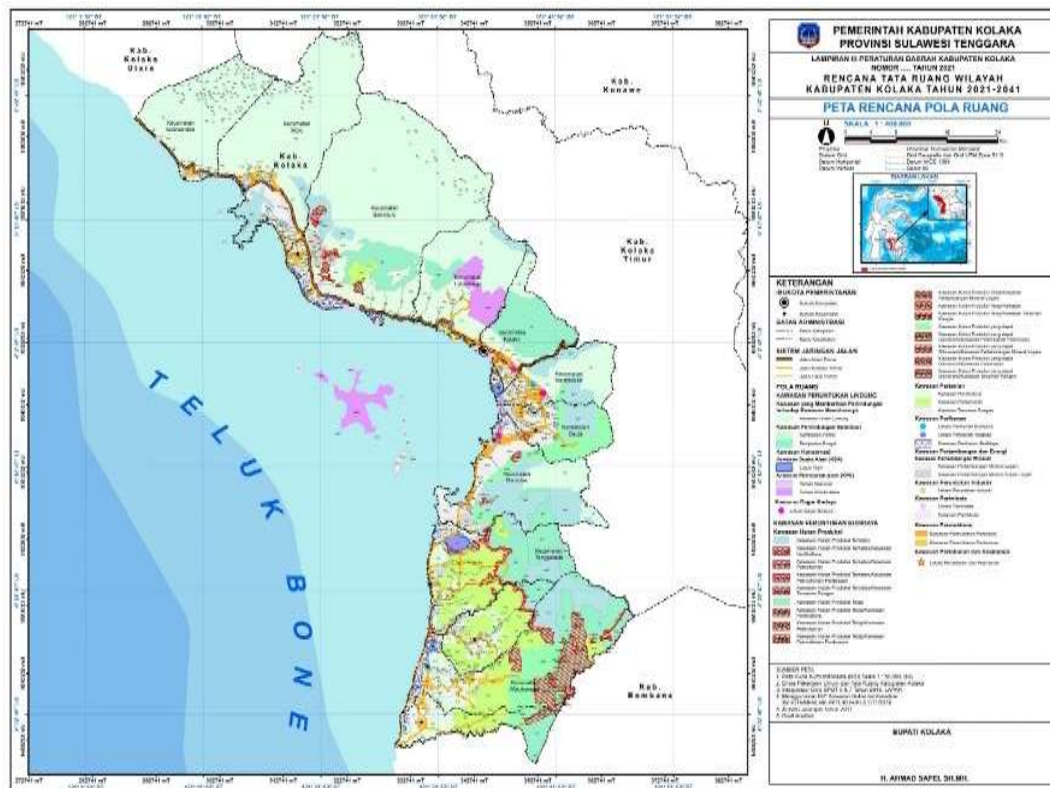
Tabel 2. 23 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan (km)	876,82	876,82	876,82	876,82	876,82
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	488,00 *(55,65%)	445,04 *(60,75%)	515,41 * (58,78%)	525,65 *(59,95%)	482,72 *(55,05%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	197,3 *(22,50%)	235,79 *(26,89%)	220,48 *(25,14%)	446,46 *(50,92%)	446,46 *(50,92%)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (km)	290,7 *(33,15%)	209,25 *(23,86%)	294,93 *(33,64%)	36,26 *(4,14%)	36,26 *(4,14%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (km)	254,1 *(28,98%)	199,64 *(22,77%)	327,00 *(37,29%)	300,97 *(34,33%)	300,97 *(34,33%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (km)	134,7 *(15,36%)	232,142 *(26,47%)	34,4 *(3,92%)	93,12 *(10,62%)	93,12 *(10,62%)
Panjang Jalan Nasional (km)	139,8	139,8	139,8	139,8	160,17
Panjang jalan Provinsi (km)	18	18	18	18	68,7

Keterangan: (*) Persentase capaian kondisi jalan
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2024

Adapun Peta jaringan jalan Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 44 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Kolaka

Sumber: RTRW Kabupaten Kolaka 2023-2042

Kondisi infrastruktur jembatan di Kabupaten Kolaka selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 kondisinya relatif stagnan. Jumlah jembatan yang rusak berat masih cukup banyak, hal ini disebabkan karena anggaran untuk perbaikan jembatan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sumber pendanaan yang lain selain Dana Alokasi Umum sangat terbatas, sehingga penanganan jembatan setiap tahunnya lebih difokuskan pada lokasi-lokasi yang sangat prioritas dan mendukung secara langsung kegiatan ekonomi masyarakat. Secara lengkap jumlah jembatan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut

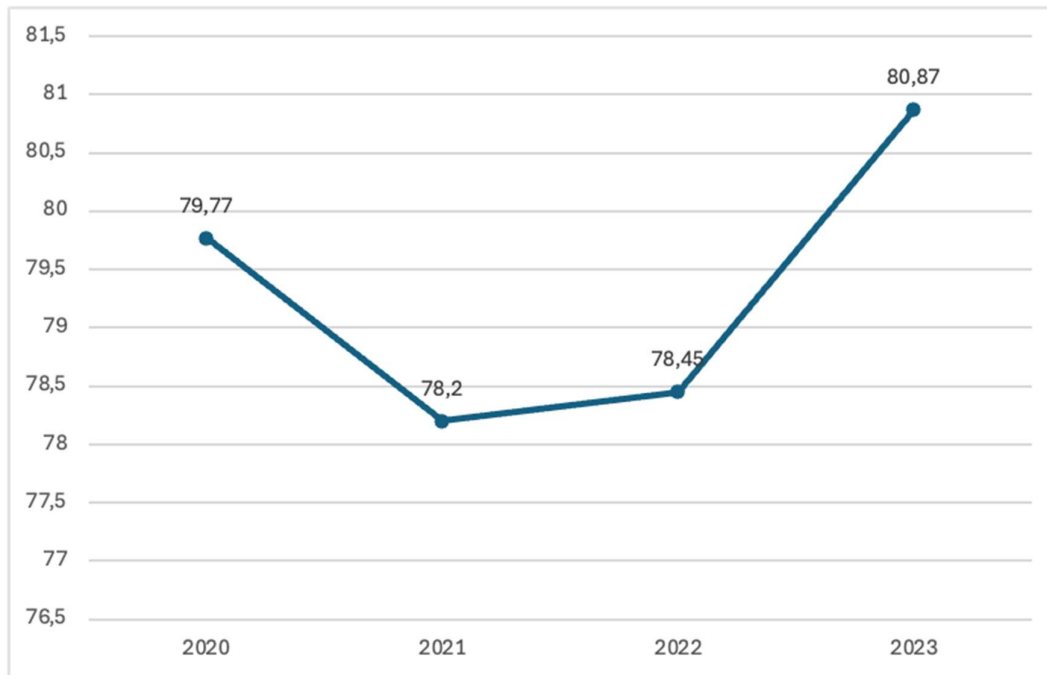
Tabel 2. 24 Jumlah Jembatan di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jembatan Kondisi baik (unit)	150	153	155	157	157
Jembatan Kondisi sedang (unit)	23	23	23	23	23
Jembatan Kondisi rusak ringan (unit)	32	29	27	24	24
Jembatan Kondisi rusak berat (unit)	40	40	40	41	41
Total Jumlah Jembatan (unit)	245	245	245	245	245
Persentase Jembatan Kondisi Baik (%)	61.22	62.44	63.26	64.08	64.08
Persentase Jembatan Kondisi Sedang (%)	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
Persentase Kondisi Rusak Ringan (%)	13,06	11.84	11.02	9,79	9,79
Persentase Kondisi Rusak Berat (%)	16,34	16,34	16,34	16,75	16,75

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2024

2. Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak

Akses terhadap air minum menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan masyarakat dapat hidup dengan sehat. Secara umum, akses rumah tangga terhadap air bersih di Kabupaten Kolaka masih perlu untuk ditingkatkan. Adapun kondisi mengenai akses air bersih di Kabupaten Kolaka dapat dijelaskan melalui gambar berikut



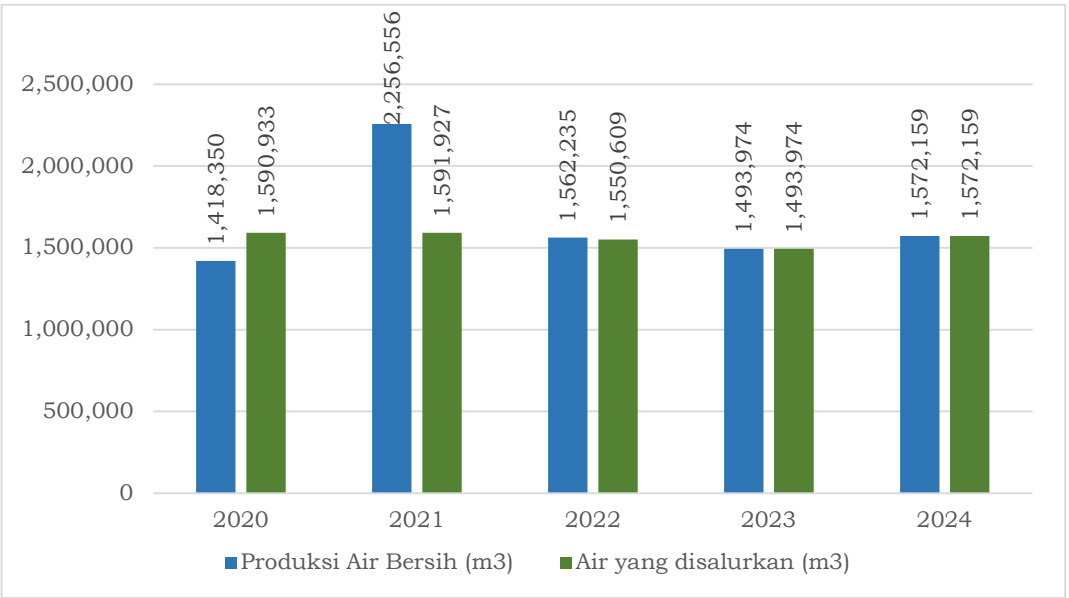
Gambar 2. 45 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum di Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2024

Capaian akses terhadap air minum layak di Kabupaten Kolaka mengalami kecenderungan yang fluktuatif, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hingga tahun 2023, akses terhadap air minum layak kembali mengalami kenaikan sebesar 80,87 persen. Sebagai indikator layanan dasar, RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki sasaran untuk meningkatkan rumah tangga yang terlayani air minum aman, dengan *baseline* mencapai 11,80 persen pada tahun 2020 ditargetkan secara ambisius meningkat menjadi 43 persen di tahun 2029. Mencerminkan upaya serius pemerintah dalam pemenuhan akses air minum yang layak bagi masyarakat.

Layanan infrastruktur air minum layak dan aman dengan jaringan perpipaan di Kabupaten Kolaka tergolong masih sangat rendah. Untuk capaian indikator air minum layak dan aman dengan jaringan perpipaan di luar wilayah layanan PDAM baru sekitar 6,83% atau 5.258 Rumah Tangga, sementara capaian indikator air minum layak bukan jaringan perpipaan berada di angka 57,09% atau sekitar 49.918 Rumah Tangga,

dan sebanyak 36,08% rumah tangga yang belum terlayani atau sekitar 27.576 Rumah Tangga.



Gambar 2. 46 Produksi dan Pemanfaatan Air Bersih PDAM Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka, 2025

Produksi air bersih bersumber dari PDAM menunjukkan fluktuasi. Produksi tertinggi pada tahun 2021, lalu menurun drastis 30,70 persen di tahun 2022 yang diikuti dengan penurunan jumlah air yang disalurkan hingga 2,59 persen. Produksi air bersih PDAM dalam tiga tahun terakhir berkisar 1,5 juta m³ dengan jumlah air yang disalurkan memenuhi kebutuhan baik secara domestik maupun kebutuhan industri.

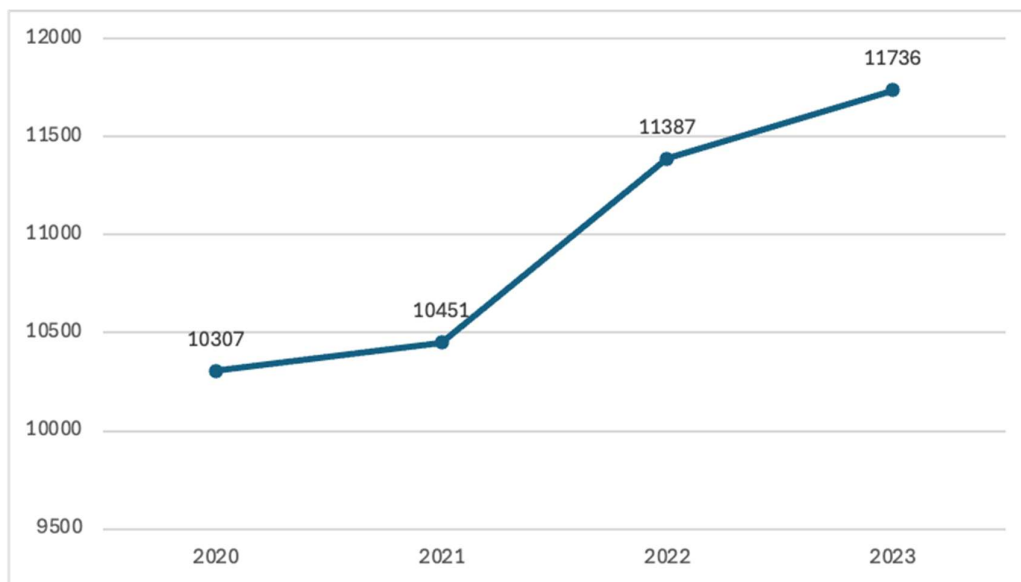
Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Sarana Sumber Air Minum Terlindungi

Tahun	Sumur Pompa	Sumur Terlindungi	Mata Air Terlindungi	Perpipaan
2020	24.821	18.640	4.540	46.740
2021	82.201	19.331	5.471	45.180
2022	55.436	18.731	4.890	107.960
2023	80.381	22.770	4.890	54.664

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka, 2025

Sedangkan pada aspek sarana sumber air minum terlindungi, hanya sebagian penduduk Kabupaten Kolaka yang terlayani. Data termutakhir menunjukkan sebagian besar penduduk memperoleh suplai air minum bersumber dari sumur pompa dan jaringan perpipaan. Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan mata air terlindungi.

Berdasarkan data tersebut, capaian indikator air minum layak dan aman dengan jaringan perpipaan di luar wilayah layanan PDAM masih sangat rendah, sehingga masih perlu intervensi anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan target air minum layak dan aman dengan jaringan perpipaan. Pemenuhan air minum layak dan aman dengan jaringan perpipaan untuk wilayah perkotaan dan beberapa wilayah ibukota kecamatan seperti Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Latambaga, dan Kecamatan Wundulako dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

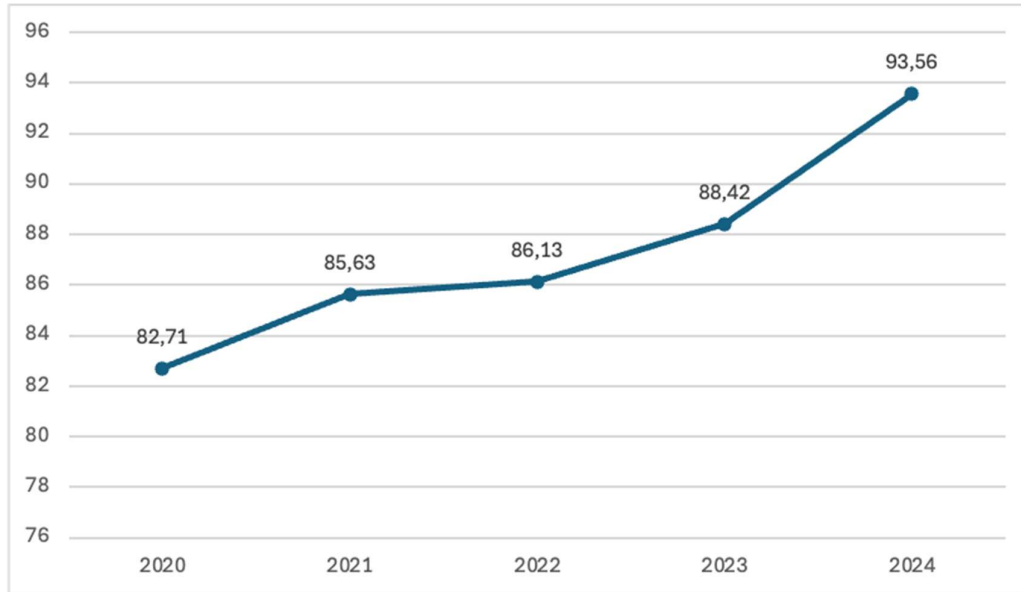


Gambar 2. 47 Jumlah Pelanggan PDAM Kategori Rumah Tangga di Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023

Sumber : PDAM Kabupaten Kolaka, 2024

Jumlah pelanggan PDAM kategori rumah tangga di Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun karena infrastruktur sarana air minum yang dimiliki oleh PDAM khususnya jaringan perpipaannya sudah banyak yang mengalami kebocoran. Selain

itu intake SPAM IKK Baula perlu dilakukan rehabilitasi akibat dampak banjir beberapa waktu yang lalu. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah layanan PDAM tidak berfungsi. Data dari PDAM pada tahun 2023 terdapat 4.439 SR yang tidak berfungsi dari 11.736 SR.



Gambar 2. 48 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2024

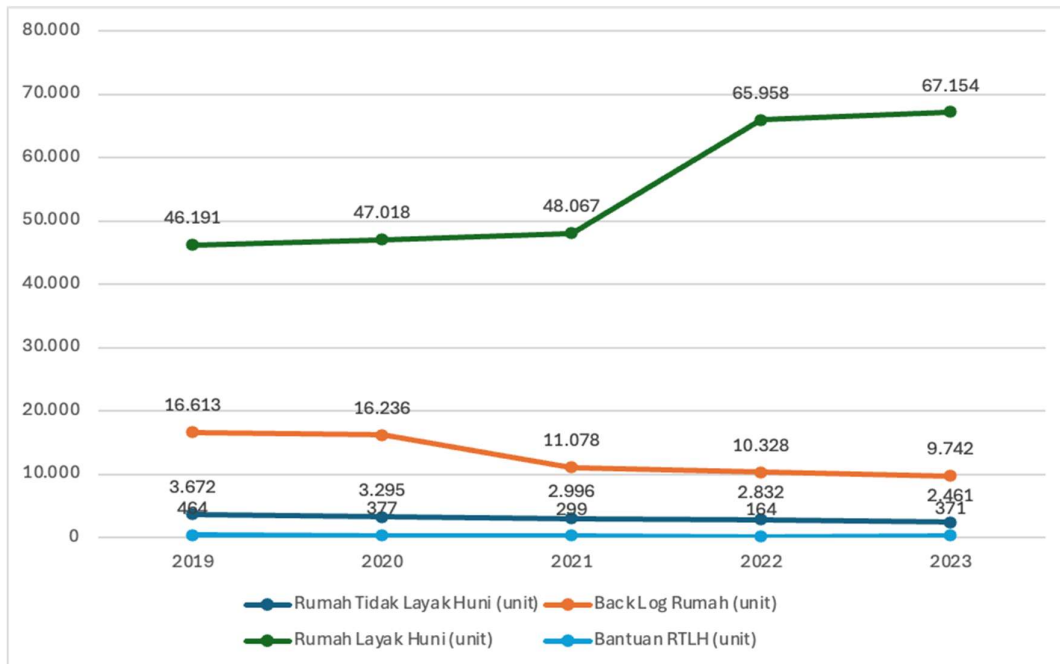
Ketersediaan sanitasi layak dan aman juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mengurangi risiko penyakit dan mengurangi angka prevalensi kasus stunting. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, persentase rumah tangga berakses sanitasi terus mengalami peningkatan. Capaian akses sanitasi layak cukup tinggi, namun saat ini Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR terkait urusan sanitasi dan air minum harus masuk dalam kategori layak dan aman. Akses sanitasi yang aman merupakan sasaran yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan capaian yang baru berhasil memenuhi 10,21 persen pada tahun 2023, ditargetkan meningkat menjadi 30 persen di tahun 2029. Dengan demikian, Kabupaten Kolaka turut ambil peran dalam pemenuhan sanitasi aman yang ditargetkan dalam RPJMN melalui pemenuhan layanan sanitasi secara merata dalam perencanaan jangka menengah ini.

3. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Pembangunan prasarana dasar permukiman pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan menyediakan pelayanan dasar. Kebutuhan perumahan di Kabupaten Kolaka diperkirakan akan bertambah dari tahun ke tahun karena pertumbuhan penduduk dan seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi wilayah yang menjadi salah satu basis pertambangan.

Data backlog pada tahun 2015 di Kabupaten Kolaka menunjukkan jumlah sebesar 22.925 unit, dengan penanganan backlog dari tahun 2015-2022 sebesar 13.586 unit. Penanganan backlog pada tahun 2023 sebesar 403 unit, sehingga kondisi kebutuhan rumah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka tersisa sebesar 9.339 unit pada tahun 2023. Kondisi rumah tidak layak huni pada tahun 2015 sebanyak 5.689 unit, yang telah tertangani sampai dengan tahun 2023 sejumlah 3.228 unit, dengan penanganan tahun 2023 sebesar 371 unit, sehingga RTLH tahun 2023 tersisa sebanyak 2.461 unit.

Berdasarkan SK Kumuh tahun 2019, luas kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga sebesar 105,23 Ha dan yang telah tertangani sampai dengan tahun 2020 sebanyak 76,73 Ha. Adanya perubahan SK Kumuh baru berimplikasi pada perubahan luasan kawasan kumuh. Berdasarkan SK Kumuh tahun 2022, luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 211,81 Ha. Beberapa kegiatan serta intervensi telah dilakukan untuk pengurangan kawasan kumuh, sehingga luas kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2023 tersisa sebesar 36,83 Ha. Kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 49 Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PKP Kabupaten Kolaka, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Kolaka terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mendukung peningkatan daya saing infrastruktur daerah yang berkaitan dengan aspek perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan target yang diupayakan pemerintah untuk dicapai pada RPJMN Tahun 2025-2029, dengan *baseline* 769.078 unit pada tahun 2024 ditargetkan bertambah menjadi 3 juta pada tahun 2029. Termasuk didalamnya ditargetkan untuk meningkatkan kualitas hunian rumah tangga dengan target pembangunan mencapai 30.700 unit di tahun 2029, kemudian sejumlah 250.000 unit ditingkatkan kualitasnya hingga tahun 2029, dan pemenuhan PSU secara lengkap hingga 15.000 unit pada tahun 2029. Target ambisiun ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk meningkatkan akses RLH bagi masyarakat, demikian target capaian Kabupaten Kolaka di RPJMD Tahun 2025-2029 turut mendukung upaya

pemerintah dalam meningkatkan akses layanan dasar permukiman secara merata.

2.1.4.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti tingkat inflasi. Data inflasi di Kabupaten Kolaka belum tersedia secara series dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Sementara data inflasi Kabupaten Kolaka menggunakan data inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum. Berikut adalah data inflasi Kabupaten Kolaka yang mengacu pada data inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 2. 50. Grafik Inflasi Kabupaten Kolaka mengacu pada inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025.

Inflasi mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung naik sebesar 0,6 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Fluktuasi inflasi ini berhubungan dengan berbagai factor seperti fluktuasi harga pangan, energi dan transportasi, kebijakan pemerintah, permintaan konsumsi

Masyarakat, gangguan distribusi dan infrastruktur dan berbagai faktor eksternal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi di tingkat global. Inflasi dapat dijaga dengan melibatkan kolaborasi dan kerjasama berbagai stakeholders. Inflasi harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi menjadi semakin kuat dan berkualitas.

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum

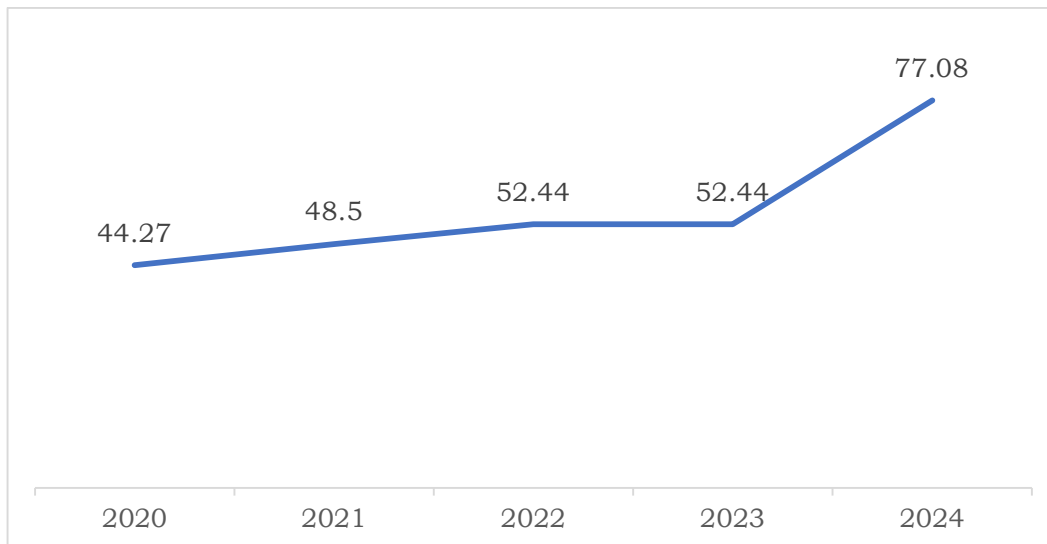
Aspek pelayanan umum memuat informasi mengenai capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Kolaka yang meliputi:

2.1.5.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta responsif mencerminkan pengelolaan sektor publik yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam menilai kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kolaka, diperlukan analisis terhadap berbagai capaian indikator tata kelola, sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator untuk mengukur efektivitas implementasi reformasi birokrasi di suatu daerah. Indeks ini dirilis setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan berlandaskan tiga sasaran utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas layanan publik, (2) peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan, serta (3) penguatan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya aparatur yang lebih optimal. Berikut data capaian IRB Kabupaten Kolaka tahun 2020-2025.



Gambar 2. 51 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: LPPD Kabupaten Kolaka, 2024

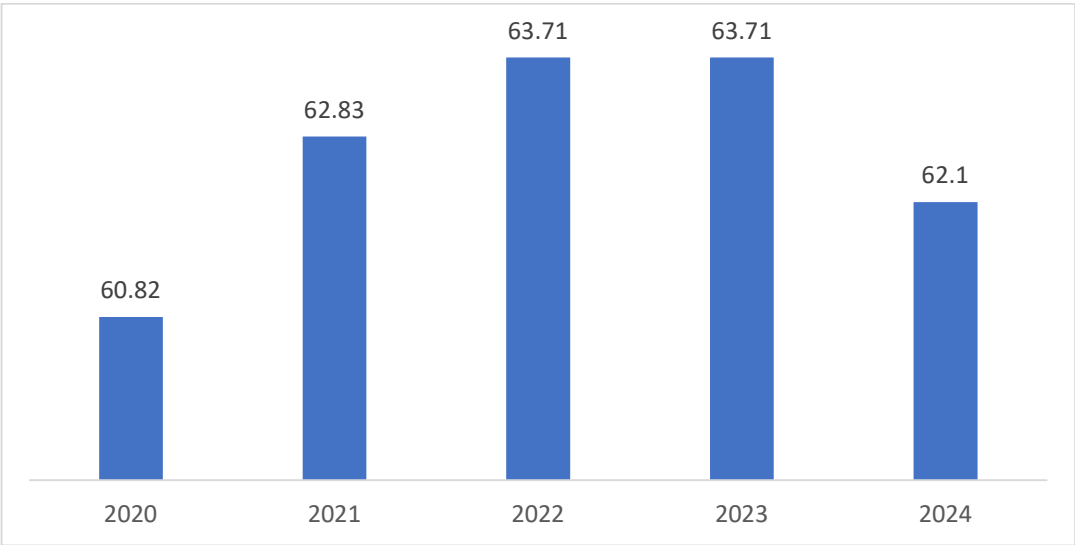
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kolaka Tahun dalam lima tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik, sebesar 32,81 poin dari 44,27 dengan predikat **C** pada tahun 2020 menjadi 77,08 pada tahun 2024 dengan predikat **BB**. Meskipun beberapa aspek reformasi telah berjalan, efektivitas tata kelola pemerintahan, optimalisasi layanan publik, serta penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan. Faktor seperti keterbatasan integrasi sistem tata kelola, kapabilitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik turut berkontribusi terhadap stagnasi ini. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah, sehingga berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas birokrasi secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan peringkat IRB, diperlukan strategi yang lebih progresif, seperti penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berbasis kebutuhan, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penyempurnaan mekanisme evaluasi kinerja berbasis hasil. Selain itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, harus diperkuat guna memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berjalan secara

administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Kolaka.

2. Nilai SAKIP Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud tanggung jawab instansi pemerintah dalam melaporkan pencapaian dan kendala program secara terukur kepada pemangku kepentingan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berfungsi sebagai mekanisme yang terstruktur dalam menetapkan, mengukur, dan melaporkan kinerja guna meningkatkan transparansi serta efektivitas tata kelola pemerintahan. SAKIP berorientasi pada hasil dengan mencakup tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pencapaian target kinerja. Perkembangan akuntabilitas kinerja Kabupaten Kolaka dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.



Gambar 2. 52 Nilai SAKIP Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: Bappelitbangda Kab. Kolaka, diolah, 2025.

Berdasarkan data capaian Nilai SAKIP Kabupaten Kolaka dalam lima tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan nilai SAKIP Daerah hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, Nilai SAKIP Kabupaten Kolaka tercatat sebesar 60,82 dengan predikat B yang kemudian mengalami peningkatan sebesar 6.11 poin tetap dengan predikat B dengan skor 63,711 pada tahun 2023. Peningkatan nilai SAKIP ini

menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2023, terjadi penurunan nilai SAKIP menjadi sebesar 62,1 tetapi pada tahun 2024 dengan predikat yang sama yaitu B.

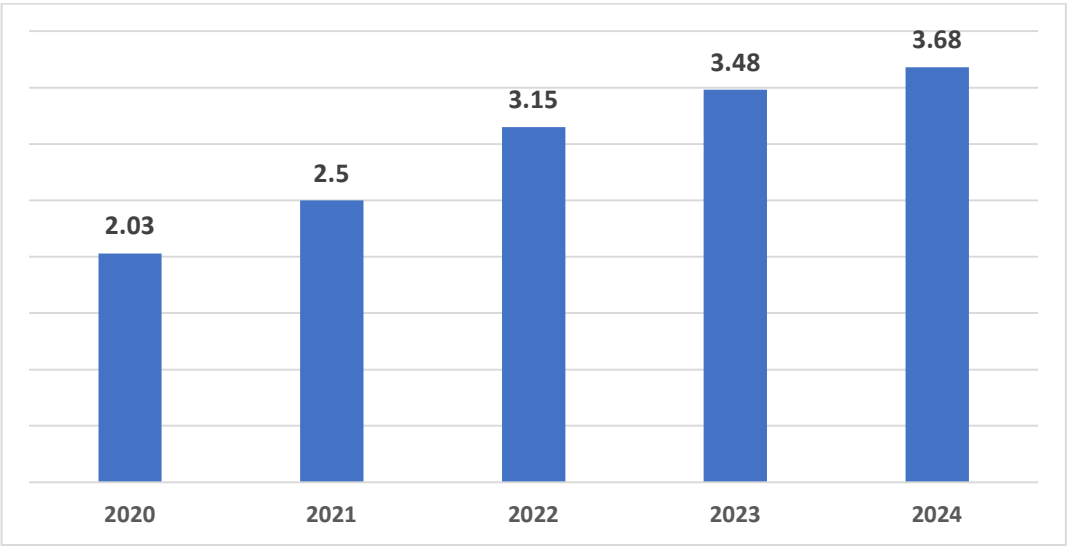
Meskipun terdapat peningkatan yang konsisten, laju peningkatan yang relatif moderat mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penerapan sistem akuntabilitas yang lebih optimal. Untuk mendorong peningkatan yang lebih signifikan, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang masih menjadi kendala dalam pencapaian akuntabilitas kinerja yang lebih optimal. Salah satu tantangan utama terletak pada inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan kesenjangan antara target kinerja dan realisasi capaian. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme SAKIP, sehingga proses pengukuran dan pelaporan kinerja masih menghadapi hambatan dari aspek validitas data dan konsistensi evaluasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti optimalisasi peran Inspektorat Daerah dalam memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap prinsip manajemen kinerja yang transparan dan berbasis data. Selain itu, penguatan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil perlu ditekankan melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan strategis dan evaluasi yang lebih tajam. Dengan pendekatan ini, peningkatan skor SAKIP yang lebih signifikan dapat segera tercapai dalam periode perencanaan lima tahun ke depan.

3. Indeks SPBE

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ketentuan mengenai SPBE diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam rangka memastikan implementasi SPBE berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di setiap instansi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan penerapan SPBE melalui Indeks SPBE, yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) implementasi sistem tersebut di instansi pemerintah. Berikut Indeks SPBE Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024:



Gambar 2. 53 Indeks SPBE Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023

Sumber: Bappelitbangda Kab. Kolaka, diolah, 2025.

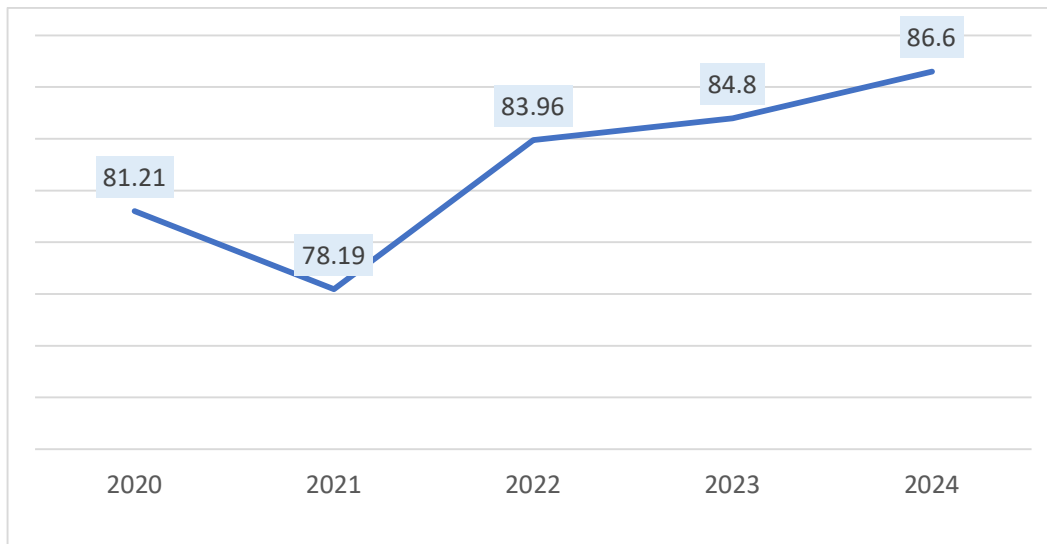
Dalam periode 2020–2024, Indeks SPBE Kabupaten Kolaka menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari **2,03** dengan predikat **cukup** pada tahun 2020 menjadi **3,48** dengan predikat **sangat baik** pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik dari segi tata kelola, layanan publik digital, maupun arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi yang mendukungnya. Kenaikan skor yang konsisten setiap tahunnya mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melakukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan teknologi dan sistem digital untuk meningkatkan

kinerja tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan publik.

Walaupun menunjukkan peningkatan yang signifikan, capaian Indeks SPBE sebesar 3,68 menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE Kabupaten Kolaka belum mencapai kategori optimal. Tantangan utama yang dihadapi dalam peningkatan kematangan SPBE adalah penguatan integrasi sistem antar-perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi, serta penyempurnaan kebijakan terkait keamanan dan perlindungan data. Untuk mempercepat peningkatan Indeks SPBE dan implementasinya ke seluruh lini tata kelola daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu mengakselerasi implementasi layanan berbasis digital yang lebih inklusif, memastikan interoperabilitas antar-sistem yang digunakan oleh berbagai instansi, serta memperkuat arsitektur dan komitmen seluruh pemangku kebijakan terhadap digitalisasi di seluruh sektor pelayanan publik.

4. Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan publik. Adapun IKM Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut ini.



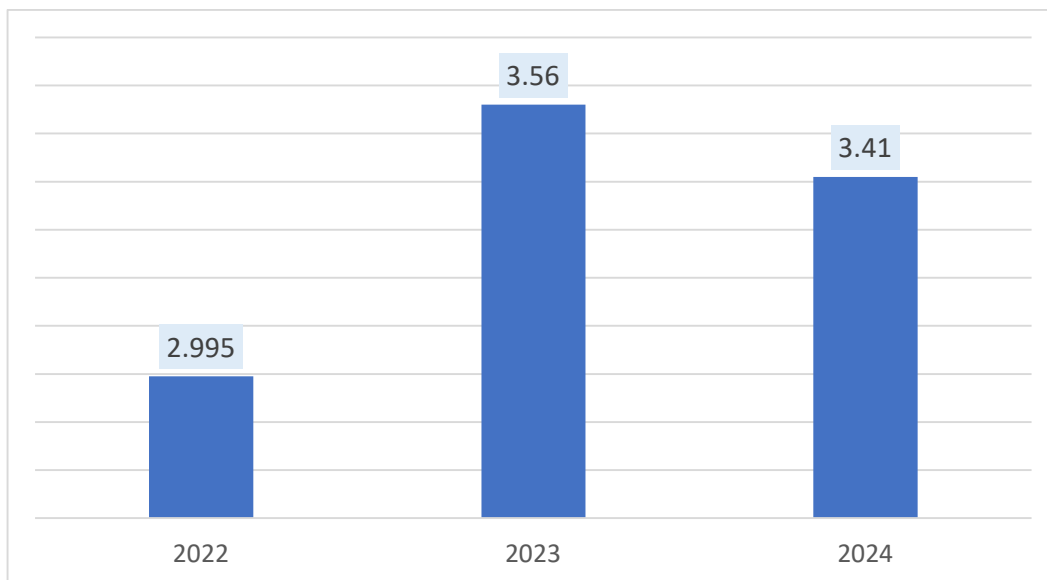
Gambar 2. 54 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: LPPD, 2025

Selama 4 tahun terakhir, nilai IKM cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,77 poin menjadi 83,96 dengan predikat **B**. Kondisi ini menunjukkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kolaka terus berbenah menjadi lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah; dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Kolaka. IPP digunakan sebagai alat evaluasi dan pembanding untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, dan konsultasi pengaduan. Berikut capaian IPP Kabupaten Kolaka pada tahun 2022-2024:



Gambar 2. 55 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kolaka Tahun 2022-2024

Sumber: KemenPAN-RB 2025, diolah

Selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks Pelayanan Publik cenderung mengalami fluktuasi. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,56 poin menjadi 3,56 tetapi kemudian turun sebesar 0,15 poin pada tahun 2024. Kondisi ini perlu untuk ditingkatkan secara terus menerus, agar kinerja penyelenggaraan pelayanan publik semakin berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi merupakan aspek yang menggambarkan kondusifitas daerah. Aspek ini dinilai dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum dan indeks demokrasi daerah. Berikut pencapaian Indikator tersebut di Kabupaten Kolaka:

1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum

Salah satu indikator proxy yang digunakan untuk mengukur dan menilai indeks ketentraman dan ketertiban umum adalah indikator kegiatan penanganan konflik sosial, kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP, Patroli Penyakit Masyarakat, Pelaksanaan kegiatan FKUB, dan Pengendalian Kebakaran. Berikut capaian indikator proxy

ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Kolaka tahun 2019 hingga 2023:

Tabel 2. 26 Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Penanganan konflik sosial	15	18	13	7	1	54
Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	1	1	1	1	6
Patroli Penyakit Masyarakat	576	588	786	583	668	3201
Operasi Penertiban dan Keamanan	5	56	18	20	48	147
Pelaksanaan Kegiatan FKUB	2	1	3	1	1	8
Pengendalian Kebakaran	48	24	20	12	59	163

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Kolaka, 2025, diolah

Capaian indikator ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Kolaka dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup variatif di berbagai aspek. Salah satu tren yang paling mencolok adalah penurunan drastis dalam penanganan konflik sosial, dari 15 kasus pada 2019 menjadi hanya 1 kasus pada 2023. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan dalam mencegah eskalasi konflik, yang kemungkinan besar didukung oleh peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor serta optimalisasi deteksi dini. Namun, angka ini juga dapat mencerminkan pergeseran pola konflik yang semakin bersifat laten atau tidak dilaporkan secara formal. Selain itu, jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP relatif stagnan dengan hanya satu kegiatan per tahun sejak 2020, yang menunjukkan bahwa upaya preventif dalam membangun stabilitas sosial masih terbatas dan mungkin perlu diperkuat.

Di sisi lain, patroli penyakit masyarakat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 sebanyak 786 kegiatan, sebelum menurun kembali ke angka 668 pada tahun

2023. Tren ini menunjukkan respons aktif pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum, meskipun variabilitas tahunan mengindikasikan adanya faktor eksternal seperti perubahan prioritas kebijakan atau keterbatasan sumber daya. Sementara itu, operasi penertiban dan keamanan mengalami peningkatan signifikan pada 2020 dengan 56 operasi, yang kemungkinan besar terkait dengan penegakan aturan selama masa pandemi COVID-19. Namun, setelah mengalami penurunan pada 2021 dan 2022, jumlah operasi kembali meningkat menjadi 48 pada 2023, yang mengindikasikan adanya dorongan untuk kembali menegakkan ketertiban pasca-pandemi.

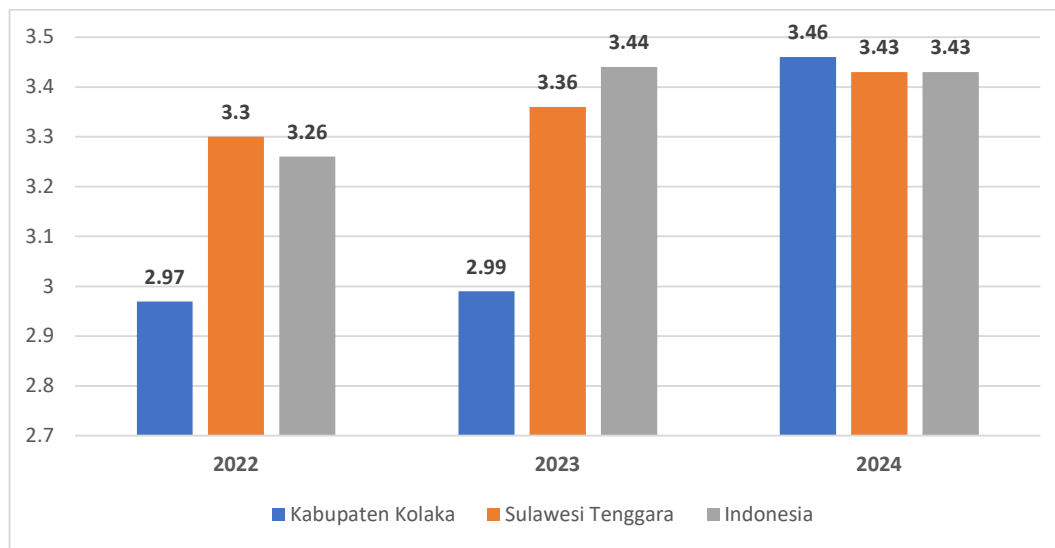
2. Pengendalian Kebakaran

Indikator pengendalian kebakaran menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan penurunan signifikan dari 48 kejadian pada 2019 menjadi hanya 12 pada 2022, sebelum melonjak kembali ke 59 pada 2023. Kenaikan ini dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kebakaran, termasuk kesiapan infrastruktur pemadam kebakaran serta efektivitas sistem peringatan dini. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tetap rendah dan tidak mengalami perkembangan signifikan, yang berpotensi menjadi celah dalam strategi pencegahan konflik berbasis harmoni sosial. Secara keseluruhan, meskipun ada tren positif dalam pengurangan konflik terbuka dan peningkatan respons keamanan, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif dalam membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan.

2.1.5.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan Pembangunan daerah. Daya saing dikaitkan dengan masalah produktivitas. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara. Dalam konteks daerah atau dalam hal ini Kabupaten Kolaka dapat dilihat dari Indeks

Daya Saing Daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk serta layanan yang dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek yang mempengaruhi daya saing, termasuk infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan efisiensi pasar. Berikut skor IDSD Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kolaka.



Gambar 2.56 Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi Sultra, dan Kabupaten Kolaka Tahun 2023

Sumber: BRIN, 2025

Skor IDSD Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 sebesar 3,46, berada di bawah skor Provinsi Sulawesi Tenggara (3,43) dan nasional (3,43). Perbedaan ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Kolaka masih memerlukan peningkatan agar sejajar dengan daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kondisi ini mencerminkan tantangan pada berbagai komponen. Dari sisi Lingkungan Pendukung, keterbatasan infrastruktur transportasi dan utilitas dasar, serta adopsi TIK yang belum optimal, menghambat konektivitas dan efisiensi layanan publik. Selain itu, aspek institusi, seperti transparansi dan stabilitas ekonomi makro, perlu diperkuat guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Pada aspek Sumber Daya Manusia, rendahnya daya saing Kolaka dapat dikaitkan dengan tantangan dalam kesehatan dan keterampilan tenaga kerja. Kurangnya tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri membatasi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan vokasi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi yang lebih berkualitas. Di sektor Pasar dan Ekosistem Inovasi, persaingan pasar yang kurang dinamis, fleksibilitas tenaga kerja yang terbatas, serta rendahnya kapabilitas inovasi menghambat perkembangan ekonomi daerah.

Untuk mengejar ketertinggalan ini, strategi peningkatan daya saing Kolaka perlu difokuskan pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta pemberian insentif bagi investasi di sektor-sektor strategis. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Kolaka dapat meningkatkan daya saingnya secara bertahap sehingga mampu bersaing dengan daerah lain baik di tingkat provinsi maupun nasional.

2.1.5.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sub bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi Realisasi APBD lima tahun terakhir dan proyeksi Keuangan Daerah periode RPJMD 2025-2029.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka periode 2020–2024 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar untuk proyeksi keuangan daerah. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka dapat dilakukan dengan

mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu, yang sedang berjalan, maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Kolaka selama periode 2020–2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 27 Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117.416.199.330,69	122.696.856.082,32	170.930.087.482,76	178.729.431.301,06	189.281.002.127,89
1.2	Pendapatan Transfer	1.054.626.514.158,00	1.148.676.998.393,00	1.130.986.758.245,00	1.547.760.408.663,00	1.591.658.483.097,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.612.692.447,00	41.310.551.668,00	3.578.475.189,00	4.613.024.050,00	2.468.308.569,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.217.655.405.935,69	1.312.684.406.143,32	1.305.495.320.916,76	1.731.102.864.014,06	1.783.407.793.793,89
2.	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi	790.501.069.517,00	777.870.443.892,00	828.211.788.895,00	1.021.386.041.148,00	1.133.332.525.669,00
2.2	Belanja Modal	295.114.675.180,00	311.207.025.933,00	254.741.829.381,00	582.166.364.331,00	441.435.975.349,00
2.3	Belanja Tak Terduga	22.993.974.165,00	12.543.680.861,00	17.532.691.668,00	9.280.163.000,00	13.329.208.652,48
2.4	Belanja Transfer	136.738.677.270,00	162.301.099.100,00	146.210.773.906,00	179.331.724.019,00	206.288.431.716,00
	JUMLAH BELANJA	1.245.348.396.132,00	1.263.922.249.786,00	1.246.697.083.850,00	1.792.164.292.498,00	1.794.386.141.386,48
	Surplus/(Defisit)	(27.692.990.196,31)	48.762.156.357,32	58.798.237.066,76	(61.061.428.483,94)	(10.978.347.592,59)
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	44.751.216.305,37	13.489.660.309,06	62.228.158.309,38	117.924.781.588,14	41.321.079.392,20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.568.565.800,00	0,00	3.000.000.000,00	15.548.449.112,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.182.650.505,37	13.489.660.309,06	59.228.158.309,38	102.376.332.476,14	36.321.079.392,20
	SILPA	13.489.660.309,06	62.251.816.666,38	118.026.395.376,14	41.314.903.992,20	25.342.731.799,61

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

Berdasarkan data laporan realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp1,21 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,78 triliun pada tahun 2024. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana pendapatan melonjak menjadi Rp1,73 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,30 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah juga mengalami tren peningkatan dari Rp1,24 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,79 triliun pada tahun 2024. Meskipun demikian, pola surplus dan defisit anggaran menunjukkan dinamika yang cukup variatif. Pada tahun 2020 dan 2023, terjadi defisit masing-masing sebesar Rp27,69 miliar dan Rp61,06 miliar. Sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat surplus sebesar Rp48,76 miliar dan Rp58,79 miliar.

Pembiayaan netto yang diperoleh setiap tahunnya berperan dalam menutupi defisit atau mendukung surplus anggaran. Pada tahun 2023, pembiayaan netto mencapai angka tertinggi sebesar Rp102,37 miliar, yang menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber pembiayaan untuk menjaga keseimbangan anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) juga mengalami tren naik-turun, di mana angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp118,02 miliar, sedangkan tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi Rp25,34 miliar. Penurunan SiLPA ini dapat mengindikasikan efisiensi dalam penggunaan anggaran atau peningkatan realisasi belanja daerah.

Secara keseluruhan, tren keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan belanja yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Namun, fluktuasi dalam surplus dan defisit anggaran menunjukkan perlunya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih optimal untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diantaranya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 28 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)
2020	1.320.689.584.985	1.217.655.405.936	92,20
2021	1.334.565.745.518	1.312.684.406.143	98,36
2022	1.269.196.136.658	1.305.495.320.917	102,86
2023	1.784.137.607.736	1.731.102.864.014	97,03
2024	1.822.816.091.181	1.783.407.793.794	97,84
RATA-RATA			97,66

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tingkat realisasi pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Rata-rata tingkat realisasi pendapatan

selama lima tahun terakhir mencapai 97,66 persen, yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai 92,20 persen dari target yang direncanakan, menunjukkan sedikit kendala dalam pencapaian target tersebut sebagai dampak yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan dengan tingkat realisasi sebesar 98,36 persen. Pada tahun 2022, pencapaian realisasi pendapatan bahkan melebihi target, mencapai 102,86 persen karena adanya tambahan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat yang masuk atau diterima di akhir tahun setelah target Perubahan APBD telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, tingkat realisasi kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 97,03 persen, dan pada tahun 2024 tingkat realisasi tercatat sebesar 97,84 persen. Meskipun demikian, capaian ini masih berada dalam kategori baik dan menunjukkan stabilitas dalam kinerja pendapatan daerah. Konsistensi dalam pencapaian target pendapatan daerah menjadi indikator bahwa perencanaan keuangan dan strategi pengelolaan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka cukup efektif.

Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dalam realisasi pendapatan, terutama untuk memastikan bahwa tren positif dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah daerah juga perlu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan lain guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Rincian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2020-2024 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117.416.199.330,69	122.696.856.082,32	170.930.087.482,76	178.729.431.301,06	189.281.002.127,89
1.1.1	Pajak Daerah	35.574.740.549,00	38.509.672.372,00	64.328.590.824,00	52.666.975.678,00	57.558.374.839,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.530.822.704,00	7.142.476.395,00	5.043.488.138,00	9.744.469.200,00	98.294.418.472,64
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.479.604.880,00	17.192.467.184,00	23.017.285.287,00	21.126.996.062,00	18.709.427.717,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	62.831.031.197,69	59.852.240.131,32	78.540.723.233,76	95.190.990.361,06	14.718.781.099,25
1.2	Pendapatan Transfer	1.054.626.514.158,00	1.148.676.998.393,00	1.130.986.758.245,00	1.547.760.408.663,00	1.591.658.483.097,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.018.439.915.893,00	1.104.221.501.980,00	1.085.083.874.375,00	1.493.366.407.686,00	1.536.391.522.610,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	21.963.278.017,00	41.986.404.333,00	39.472.693.081,00	41.879.157.386,00	41.873.517.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	100.000.490.298,00	157.618.317.011,00	232.537.222.137,00	575.967.661.085,00	585.333.977.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	550.288.497.000,00	542.631.257.000,00	541.840.335.237,00	561.623.351.000,00	630.676.354.676,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	121.963.175.258,00	158.780.567.406,00	82.475.231.628,00	96.275.014.605,00	50.296.492.225,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	83.241.564.720,00	83.042.043.630,00	104.425.596.892,00	120.365.150.505,00	119.334.967.709,00
1.2.1.6	Dana Desa	86.092.838.600,00	86.061.696.600,00	77.772.799.400,00	81.488.233.105,00	82.561.568.000,00
1.2.1.7	Dana Insentif	54.890.072.000,00	34.101.216.000,00	6.559.996.000,00	15.767.840.000,00	26.314.646.000,00
1.2.2	Transfer antar – daerah	36.186.598.265,00	44.455.496.413,00	45.902.883.870,00	54.394.000.977,00	55.266.960.487,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.186.598.265,00	42.455.496.413,00	45.902.883.870,00	54.394.000.977,00	55.266.960.487,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	2.000.000.000,00			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.612.692.447,00	41.310.551.668,00	3.578.475.189,00	4.613.024.050,00	2.468.308.569,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	45.612.692.447,00	5.847.593.668,00	3.578.475.189,00	4.613.024.050,00	2.468.308.569,00

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		35.462.958.000,00			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.217.655.405.935,69	1.312.684.406.143,32	1.305.495.320.916,76	1.731.102.864.014,06	1.783.407.793.793,89

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

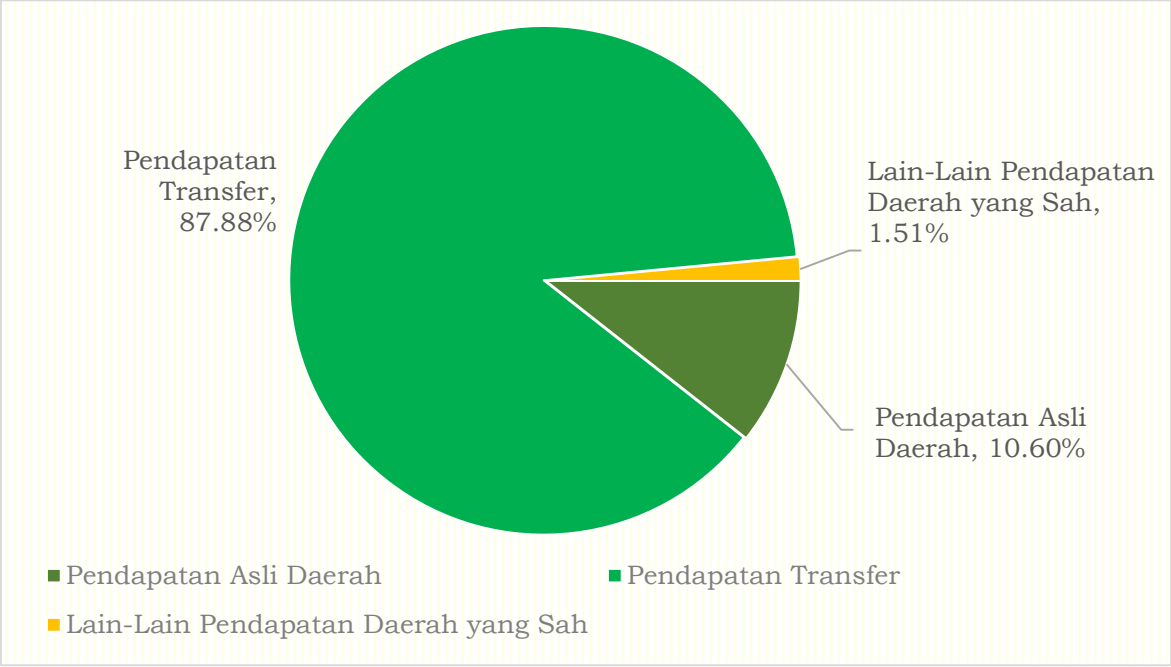
Berdasarkan data realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2020–2024, terjadi tren peningkatan pendapatan daerah. Pada 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,22 triliun dan meningkat bertahap hingga mencapai Rp1,78 triliun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun sumber lainnya.

PAD mengalami peningkatan signifikan dari Rp117,42 miliar pada 2020 menjadi Rp189,29 miliar pada 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal melalui pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset. Sementara itu, pendapatan transfer tetap menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, dengan kontribusi yang meningkat dari Rp1,05 triliun pada 2020 menjadi Rp1,59 triliun pada 2024. Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi, meskipun terdapat upaya peningkatan PAD.

Di sisi lain, pendapatan lain-lain yang sah mengalami fluktuasi tajam, terutama pada 2022 yang hanya mencapai Rp3,58 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, terjadi sedikit peningkatan Rp4,61 miliar pada 2023 dan kembali turun menjadi Rp2,47 miliar pada 2024. Penurunan signifikan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebabnya, baik dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah, perubahan regulasi, maupun faktor ekonomi lainnya.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kolaka mencerminkan optimalisasi sumber pendapatan, khususnya dari PAD dan pendapatan transfer. Namun, diperlukan strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan kemandirian fiskal, seperti memperkuat sektor-sektor yang dapat meningkatkan kontribusi PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal yang lebih stabil dalam jangka panjang.

Berdasarkan data kontribusi masing-masing sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Kolaka dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer selama periode tersebut mencapai 87,88 persen, menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat atau provinsi. Persentase ini mengalami sedikit fluktuasi, dengan nilai tertinggi sebesar 89,41 persen pada tahun 2023 dan nilai terendah sebesar 86,61 persen pada tahun 2020.



Gambar 2. 57 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

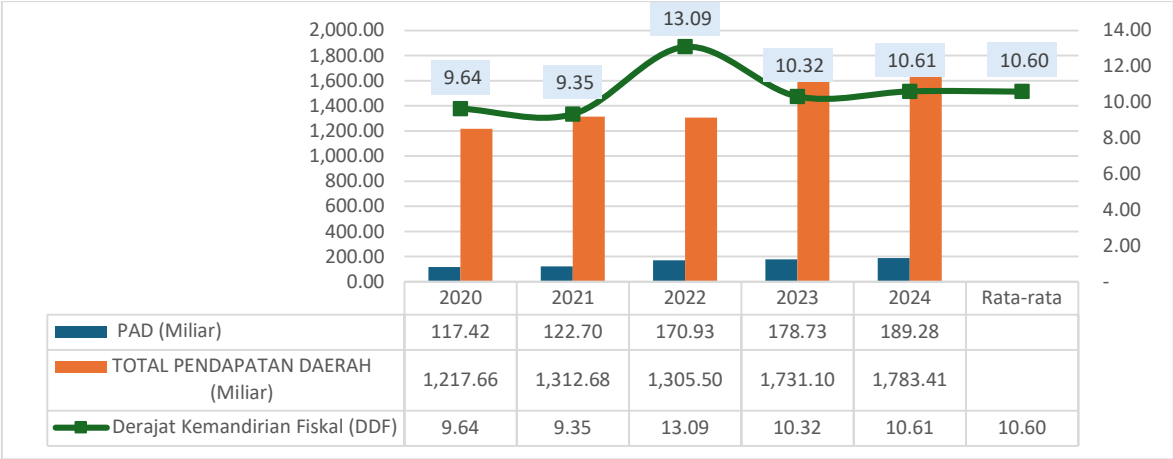
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mencapai 10,60 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana kontribusi PAD mencapai 13,09 persen, meskipun kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menggali potensi lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, kontribusinya masih mencapai 3,75 persen, namun terus menurun hingga hanya menyumbang 0,14 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2024. Penurunan drastis ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utama, baik dari segi perubahan kebijakan, regulasi, maupun faktor eksternal lainnya.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dalam kontribusi PAD, dominasi pendapatan transfer masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih optimal dalam meningkatkan PAD melalui penguatan sektor-sektor potensial, inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah, serta kebijakan fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah.

Untuk melihat tingkat kemandirian atau derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan tingkat ketergantungan Kabupaten Kolaka dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan rasio ketergantungan (RK) menggambarkan tingkat kemandirian dan ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang ($RK \leq 10,00$); (2) Kurang ($10,00 < RK \leq 20,00$); (3) Sedang ($20,00 < RK \leq 30,00$); (4) Cukup Baik ($30,00 < RK \leq 40,00$); (5) Baik ($40,00 < RK \leq 50,00$); dan (6) Sangat Baik ($RK > 50,00$). Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Kabupaten Kolaka 2020-2024.



Gambar 2. 58 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

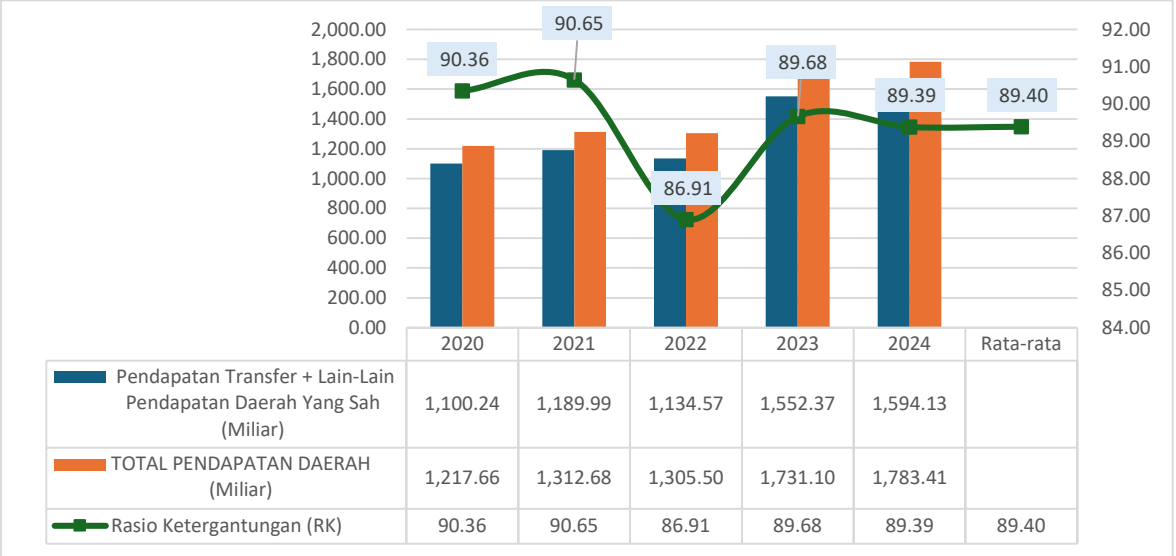
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, derajat kemandirian fiskal (DDF) Kabupaten Kolaka selama periode 2020-2024 tergolong dalam kategori "kurang" ($10,00 < DDF \leq 20,00$), dengan rata-rata 10,60. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kolaka masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi untuk membiayai kebutuhannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencukupi. Ketergantungan fiskal yang tinggi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya basis ekonomi lokal, kurangnya inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kabupaten Kolaka perlu mengoptimalkan penerimaan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengelolaan aset daerah, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar anggaran dapat digunakan lebih produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini

dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah ($RK \leq 10,00$); (2) Rendah ($10,00 < RK \leq 20,00$); (3) Sedang ($20,00 < RK \leq 30,00$); (4) Cukup Tinggi ($30,00 < RK \leq 40,00$); (5) Tinggi ($40,00 < RK \leq 50,00$); dan (6) Sangat Tinggi ($RK > 50,00$). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Kolaka 2020-2024.



Gambar 2. 59 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal Kabupaten Kolaka selama periode 2020-2024 tergolong sangat tinggi ($RK > 50,00$), dengan rata-rata 89,40. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 89 persen pendanaan pembangunan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas.

Tingginya ketergantungan fiskal mencerminkan rendahnya kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya sektor ekonomi produktif, kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, serta minimnya inovasi dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Ketergantungan yang berlebihan ini juga berisiko terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi alokasi dana untuk daerah.

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan ini, Kabupaten Kolaka perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan PAD. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, penguatan sektor ekonomi lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Kolaka dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal.

2.2.1.2 Belanja Daerah

Selain dari sisi sumber pendapatan, realisasi pelaksanaan APBD juga dapat dilihat pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan.

Secara umum komponen belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek
- 2) Belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
- 3) Belanja Tidak Terduga.
- 4) Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2. 30 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)
2020	1.362.657.747.967	1.245.348.396.132	91,39
2021	1.348.055.405.827	1.263.922.249.786	93,76
2022	1.328.447.953.324	1.246.697.083.850	93,85
2023	1.886.615.554.000	1.792.164.292.498	94,99
2024	1.859.130.995.173	1.794.386.141.386	96,52
RATA-RATA			94,10

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

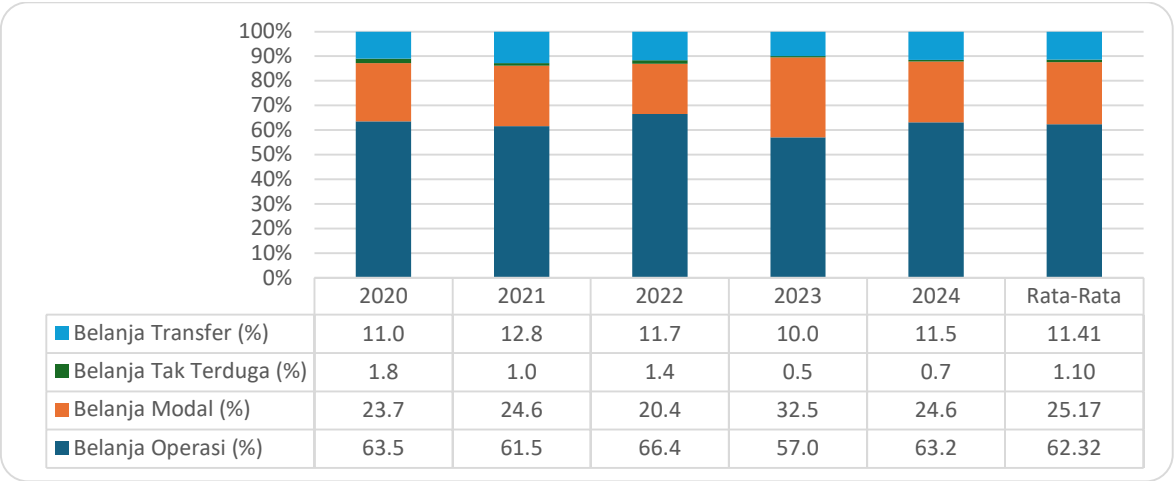
Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka pada periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tingkat realisasi belanja daerah menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, realisasi belanja mencapai Rp1.245,35 miliar atau 91,39 persen dari target yang ditetapkan. Persentase realisasi ini terus mengalami peningkatan, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar 96,52 persen dari total anggaran Rp1.859,13 miliar. Secara rata-rata, tingkat realisasi belanja dalam lima tahun terakhir mencapai 94,10 persen.

Peningkatan tingkat realisasi belanja mencerminkan efektivitas dalam penyerapan anggaran serta perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi program yang didanai APBD. Namun, masih terdapat selisih antara anggaran yang direncanakan dan belanja yang terealisasi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti efisiensi pengelolaan anggaran, kendala administratif, atau perubahan dalam prioritas belanja daerah.

Pada tahun 2023, terdapat lonjakan signifikan dalam anggaran belanja dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp1.328,45 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1.886,62 miliar. Kenaikan ini diikuti oleh peningkatan realisasi belanja yang mencapai Rp1.792,16 miliar atau 94,99 persen dari total anggaran. Hal serupa terjadi pada tahun 2024, di mana meskipun anggaran sedikit menurun menjadi Rp1.859,13 miliar, tingkat

realisasi meningkat menjadi 96,52 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode analisis.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Namun, untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi. Selain itu, diperlukan strategi pengelolaan belanja yang lebih adaptif agar alokasi anggaran dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2. 60 Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

Berdasarkan data kontribusi masing-masing komponen belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka dari tahun 2020 hingga 2024, belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,32 persen terhadap total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran daerah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah dan Bantuan Sosial.

Sementara itu, belanja modal memiliki rata-rata kontribusi sebesar 25,17 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan hingga 20,43 persen pada tahun 2022, alokasi belanja modal meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 32,48 persen. Hal ini mencerminkan adanya

peningkatan investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Belanja tak terduga, yang dialokasikan untuk keperluan mendesak seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya, memiliki porsi yang relatif kecil dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi hanya 1,10 persen. Fluktuasi dalam belanja tak terduga dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa alokasi anggaran ini bersifat situasional dan bergantung pada kondisi yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah.

Adapun belanja transfer, yang mencakup transfer ke desa dan entitas lainnya, memiliki rata-rata kontribusi sebesar 11,41 persen. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, belanja transfer tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Kabupaten Kolaka menunjukkan fokus utama pada belanja operasi, diikuti oleh belanja modal sebagai instrumen investasi daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan alokasi belanja, terutama dengan memperkuat porsi belanja modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Rincian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2020-2024 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2. 31 Rincian Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi	790.501.069.517,00	777.870.443.892,00	828.211.788.895,00	1.021.386.041.148,00	1.133.332.525.669,00
2.1.1	Belanja Pegawai	419.363.507.149,00	425.154.354.873,00	419.640.278.519,00	434.780.912.749,00	525.215.063.650,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	356.898.841.118,00	336.344.942.019,00	390.188.186.676,00	540.814.591.099,00	528.830.505.091,00
2.1.3	Belanja Hibah	12.644.721.250,00	14.368.678.000,00	16.949.323.700,00	35.076.687.300,00	73.868.956.928,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.594.000.000,00	2.002.469.000,00	1.434.000.000,00	10.713.850.000,00	5.418.000.000,00
2.2	Belanja Modal	295.114.675.180,00	311.207.025.933,00	254.741.829.381,00	582.166.364.331,00	441.435.975.349,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6.622.166.974,00	1.098.877.641,00	5.312.964.000,00	6.366.788.648,00	2.736.787.884,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.006.929,00	67.950.213.276,00	59.232.686.105,00	89.972.779.278,00	85.090.498.070,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	146.059.557.198,00	137.419.773.229,00	105.547.075.113,00	221.123.988.716,00	145.885.629.358,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.859.453.349,00	102.583.365.987,00	81.223.014.758,00	261.256.932.764,00	203.743.376.012,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.743.490.730,00	2.154.795.800,00	3.426.089.405,00	3.246.874.925,00	2.858.846.325,00
2.2.6	Aset Lainnya	-	-	-	199.000.000,00	1.120.837.700,00
2.3	Belanja Tak Terduga	22.993.974.165,00	12.543.680.861,00	17.532.691.668,00	9.280.163.000,00	13.329.208.652,48
2.3.1	Belanja Tak Terduga	22.993.974.165,00	12.543.680.861,00	17.532.691.668,00	9.280.163.000,00	13.329.208.652,48
2.4	Belanja Transfer	136.738.677.270,00	162.301.099.100,00	146.210.773.906,00	179.331.724.019,00	206.288.431.716,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil					
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	136.738.677.270,00	162.301.099.100,00	146.210.773.906,00	179.331.724.019,00	206.288.431.716,00
	JUMLAH BELANJA	1.245.348.396.132,00	1.263.922.249.786,00	1.246.697.083.850,00	1.792.164.292.498,00	1.794.386.141.386,48

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

Berdasarkan data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2020 hingga 2024, terdapat dinamika yang mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal serta respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Total belanja daerah mengalami tren peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Dari total sebesar Rp1,25 triliun pada tahun 2020, belanja meningkat menjadi Rp1,79 triliun pada tahun 2024. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2023, yang mencerminkan peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Belanja operasi konsisten mendominasi struktur belanja, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai meningkat dari Rp419,36 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp525,22 miliar pada tahun 2024, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak ASN dan keberlanjutan pelayanan birokrasi. Sementara itu, belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2023, yang menandakan peningkatan aktivitas operasional dan pelayanan publik.

Belanja hibah dan bantuan sosial menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, dengan puncaknya pada tahun 2023 untuk hibah (Rp35,07 miliar) dan tahun 2021 untuk bantuan sosial (Rp2,00 miliar). Namun, belanja hibah melonjak drastis pada 2024 menjadi Rp73,86 miliar, yang kemungkinan besar ditujukan untuk mendukung program kemasyarakatan atau kerja sama antarinstitusi/lembaga.

Belanja modal menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp582,17 miliar. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi, dan gedung-gedung publik, terutama pascapandemi. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan belanja modal menjadi Rp441,43 miliar, yang mungkin menunjukkan pergeseran prioritas atau keterbatasan pembiayaan.

Belanja tak terduga relatif kecil namun penting, karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 seiring dengan awal pandemi COVID-19. Sementara itu, belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan terus meningkat dari Rp136,73 miliar pada 2020 menjadi Rp206,29 miliar pada 2024, yang menunjukkan penguatan fungsi alokasi kepada pemerintah desa dan institusi lainnya.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Kabupaten Kolaka menunjukkan pola penganggaran yang adaptif terhadap tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Meningkatnya alokasi belanja, terutama pada aspek infrastruktur dan operasional, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Namun demikian, perlu diiringi dengan evaluasi efektivitas belanja agar tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga menghasilkan dampak pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah.

Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Kolaka terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;

- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Rincian realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2020-2024 selengkapnya disajikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2. 32 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	44.751.216.305,37	13.489.660.309,06	62.228.158.309,38	117.924.781.588,14	41.321.079.392,20
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	44.751.216.305,37	13.489.660.309,06	62.228.158.309,38	117.924.781.588,14	41.321.079.392,20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.568.565.800,00	0,00	3.000.000.000,00	15.548.449.112,00	5.000.000.000,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.568.565.800,00		3.000.000.000,00	15.548.449.112,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.182.650.505,37	13.489.660.309,06	59.228.158.309,38	102.376.332.476,14	36.321.079.392,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	13.489.660.309,06	62.251.816.666,38	118.026.395.376,14	41.314.903.992,20	25.342.731.799,61

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

Berdasarkan data realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat fluktuasi dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang berdampak pada pembiayaan netto serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Penerimaan pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) menunjukkan tren yang tidak stabil. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp44,75 miliar, mengalami penurunan signifikan menjadi Rp13,49 miliar pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup besar dengan penerimaan mencapai Rp62,23 miliar, bahkan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2023 menjadi Rp117,92 miliar. Pada tahun 2024, penerimaan kembali menurun menjadi Rp41,32 miliar.

Di sisi pengeluaran pembiayaan, alokasi anggaran untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp3,57 miliar, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada pengeluaran yang tercatat dalam kategori ini. Namun, pada tahun 2022, pengeluaran kembali muncul dengan nilai Rp3,00 miliar, kemudian meningkat tajam menjadi Rp15,55 miliar pada tahun 2023. Tahun 2024 menunjukkan penurunan pengeluaran menjadi Rp5,00 miliar.

Fluktuasi dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan mempengaruhi nilai pembiayaan netto yang menggambarkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2020, pembiayaan netto sebesar Rp41,18 miliar, menurun tajam pada tahun 2021 menjadi Rp13,49 miliar. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan menjadi Rp59,23 miliar, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan Rp102,38 miliar, sebelum akhirnya menurun kembali pada tahun 2024 menjadi Rp36,32 miliar.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang merupakan indikator efisiensi pengelolaan anggaran juga menunjukkan dinamika yang beragam. Pada tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp13,49 miliar, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi Rp62,25 miliar dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan Rp118,03 miliar. Namun, pada tahun 2023, angka ini mengalami penurunan menjadi Rp41,31 miliar, dan kembali turun menjadi Rp25,34 miliar pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Kolaka masih mengalami fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta faktor eksternal yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Stabilitas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang lebih terkendali perlu menjadi perhatian agar pengelolaan anggaran daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

2.2.2 Neraca Daerah

Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah atau disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peran penting komponen LKPD dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah sebagai keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah provinsi dalam hal aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah akan memberikan informasi berharga kepada pejabat pemerintah daerah, legislatif daerah, kreditur/debitur daerah, dan masyarakat umum tentang keadaan kekayaan dan kewajiban daerah, termasuk masalah ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca Daerah menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang timbul melalui keadaan masa lampau yang penyelesaiannya melibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Eukitas dapat dijelaskan yakni adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai sangat berperan penting untuk pemerintahan Kabupaten Kolaka dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Sehingga untuk mengetahui sebuah posisi keuangan daerah Kabupaten Kolaka, telah disajikan perkembangan data Neraca Daerah Kabupaten Kolaka pada beberapa tahun (2020-2024).

Tabel 2. 33 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	2.302.039.218.297,38	2.569.250.862.462,70	3.058.744.779.538,52	3.290.119.251.303,52	3.387.667.316.152,86
1.1	ASET LANCAR	66.761.511.004,51	133.245.141.547,64	158.719.188.845,20	103.486.626.863,87	97.582.419.142,35
1.1.1	Kas	13.888.876.720,06	62.678.441.511,38	118.027.025.285,14	41.315.961.883,20	25.417.026.366,61
1.1.2	Piutang	43.902.073.552,56	60.589.666.124,41	29.067.144.833,99	43.336.892.452,37	50.768.027.321,02
1.1.3	Persediaan	8.970.560.731,89	9.977.033.911,85	11.625.018.726,07	18.833.772.528,30	21.397.365.454,72
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	58.241.943.759,86	82.003.027.284,98	109.940.422.824,69	80.749.698.990,22	124.832.114.102,99
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	58.241.943.759,86	82.003.027.284,98	109.940.422.824,69	80.749.698.990,22	124.832.114.102,99
1.3	ASET TETAP	2.085.873.085.892,54	2.255.824.718.262,39	2.340.961.703.828,65	2.697.161.744.969,11	2.870.314.124.697,16
1.3.1	Tanah	352.003.697.070,00	394.612.444.819,00	401.383.698.519,00	408.951.083.095,28	411.305.070.979,28
1.3.2	Peralatan dan Mesin	441.135.440.814,70	501.511.511.716,67	547.863.054.463,67	620.050.121.993,96	700.264.134.129,96
1.3.3	Gedung dan Bangunan	837.134.128.155,04	1.255.177.810.160,04	1.304.696.492.364,73	1.606.387.291.143,85	1.708.326.824.828,34
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.648.860.275.142,71	1.746.455.848.592,71	1.887.873.384.144,02	2.129.678.811.622,74	2.360.833.252.500,14
1.3.5	Aset tetap Lainnya	40.826.366.131,41	42.887.789.931,41	44.625.924.518,41	46.334.408.468,41	48.952.516.599,41
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	305.451.492.838,40	43.421.667.671,40	101.338.695.410,40	35.009.899.625,02	69.520.990.835,55
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.539.538.314.259,72)	(1.728.242.354.628,84)	(1.946.819.545.591,58)	(2.149.249.870.980,15)	(2.428.888.665.175,52)
1.4	ASET LAINNYA	91.162.677.640,47	98.177.975.367,69	449.123.464.039,98	408.721.180.480,32	294.938.658.210,36
1.4.1	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	1.011.093.333,00	1.011.093.333,00	1.011.093.333,00	2.244.158.347,26
1.4.2	Aset tak berwujud	6.342.236.199,21	6.629.528.775,43	6.007.858.276,72	5.773.403.013,05	5.775.023.604,72
1.4.3	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	163.235.000,00			264.848.788,00	268.198.120,00
1.4.4	Aset Lain-lain	84.657.206.441,26	90.537.353.259,26	442.104.512.430,26	253.855.139.346,27	241.869.014.138,38

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.4.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility				147.816.696.000,00	44.782.264.000,00
1.5	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Dana Cadangan					
2	KEWAJIBAN	21.380.636.743,48	13.175.390.965,15	18.367.418.076,58	23.436.917.573,85	20.397.160.500,55
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21.380.636.743,48	13.175.390.965,15	18.367.418.076,58	23.436.917.573,85	20.397.160.500,55
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	399.216.411,00	426.624.845,00	629.909,00	1.057.891,00	655.507.316,00
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	313.028.465,01	136.633.363,68	304.055.346,11	331.728.458,84	265.987.089,08
2.1.3	Utang belanja	20.668.391.867,47	12.612.132.756,47	18.062.732.821,47	23.104.131.224,01	19.475.666.095,47
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya					
3	EKUITAS	2.280.658.581.553,90	2.556.075.471.497,55	3.040.377.361.461,94	3.266.682.333.729,67	3.367.270.155.652,31
3.1	Ekuitas	2.280.658.581.553,90	2.556.075.471.497,55	3.040.377.361.461,94	3.266.682.333.729,67	3.367.270.155.652,31
4	<u>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</u>	2.302.039.218.297,38	2.569.250.862.462,70	3.058.744.779.538,52	3.290.119.251.303,52	3.387.667.316.152,86

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kolaka 2020-2024

Secara umum, nilai total aset Pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp2,30 triliun dan meningkat menjadi Rp3,39 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan signifikan pada aset tetap, yang meningkat dari Rp2,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,87 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan investasi pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur, bangunan, dan peralatan, yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan.

Namun demikian, terdapat fluktuasi pada aset lancar. Setelah meningkat signifikan dari Rp66,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp158,72 miliar pada tahun 2022, nilai aset lancar menurun menjadi Rp97,58 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo kas. Saldo kas yang semula mencapai Rp118,03 miliar pada tahun 2022 turun drastis menjadi hanya Rp25,42 miliar pada tahun 2024, yang dapat mengindikasikan peningkatan penggunaan kas untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasi jangka panjang.

Aset lainnya mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022, mencapai Rp449,12 miliar, sebelum kemudian menurun menjadi Rp294,93 miliar pada tahun 2024. Kenaikan pada tahun 2022 tampaknya berasal dari lonjakan pada pos “aset lain-lain”, yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan manfaatnya bagi daerah.

Dari sisi kewajiban, total kewajiban daerah menunjukkan angka yang relatif kecil dibandingkan dengan total aset, dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Kewajiban jangka pendek naik dari Rp21,38 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp23,44 miliar pada tahun 2023, kemudian menurun kembali menjadi Rp20,4 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan manajemen kewajiban yang cukup konservatif

oleh pemerintah daerah, dengan tidak adanya kewajiban jangka panjang yang tercatat.

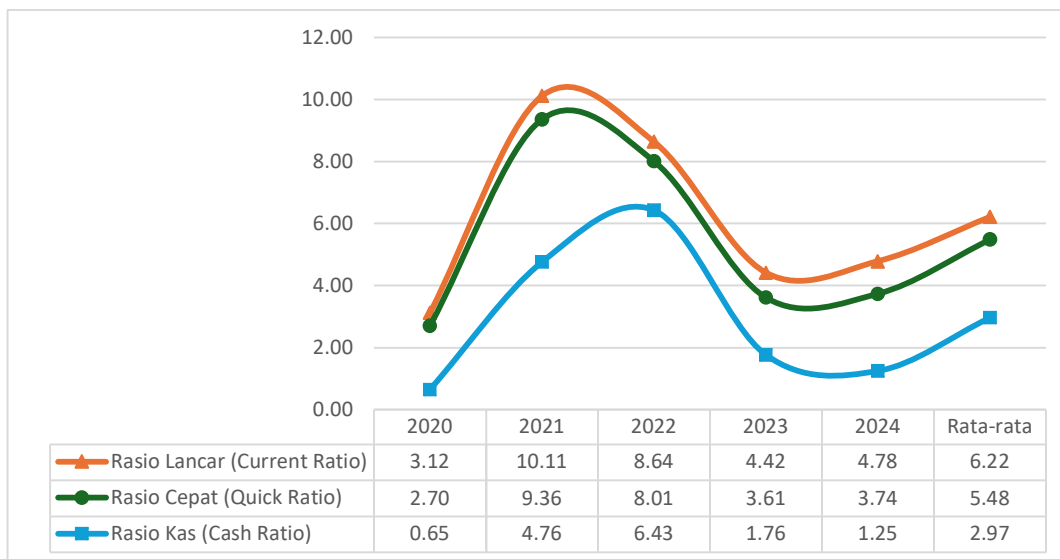
Ekuitas daerah, yang mencerminkan kekayaan bersih pemerintah, meningkat secara konsisten dari Rp2,28 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,37 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan tren peningkatan aset dan relatif stabilnya kewajiban, serta mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang positif dari perspektif neraca.

Secara keseluruhan, kinerja neraca Pemerintah Kabupaten Kolaka selama periode 2020–2024 menunjukkan arah yang positif, dengan pertumbuhan aset yang signifikan dan peningkatan nilai ekuitas. Namun, penurunan kas dan aset lancar dalam dua tahun terakhir patut dicermati sebagai indikator potensi tekanan likuiditas, yang perlu diantisipasi dengan kebijakan pengelolaan kas yang lebih hati-hati ke depan.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2.2.2.1 Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



Gambar 2. 61 Rasio Likuiditas Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar, meskipun menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rata-rata rasio lancar menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 10,11 kali dan terendah pada tahun 2020 sebesar 3,12 kali. Secara rata-rata, rasio ini berada pada angka 6,22, yang mengindikasikan bahwa aset lancar yang dimiliki lebih dari

cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Nilai 6,22 menunjukkan bahwa Kabupaten Kolaka memiliki aset lancar 6,22 kali lebih besar dari kewajiban jangka pendeknya, yang berarti likuiditasnya sangat baik.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rata-rata rasio cepat juga mencerminkan tren yang serupa, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 9,36 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 2,70. Rata-rata rasio cepat selama lima tahun sebesar 5,48 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka tetap memiliki likuiditas yang memadai tanpa harus mengandalkan persediaan dalam membayar kewajiban lancarnya.

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

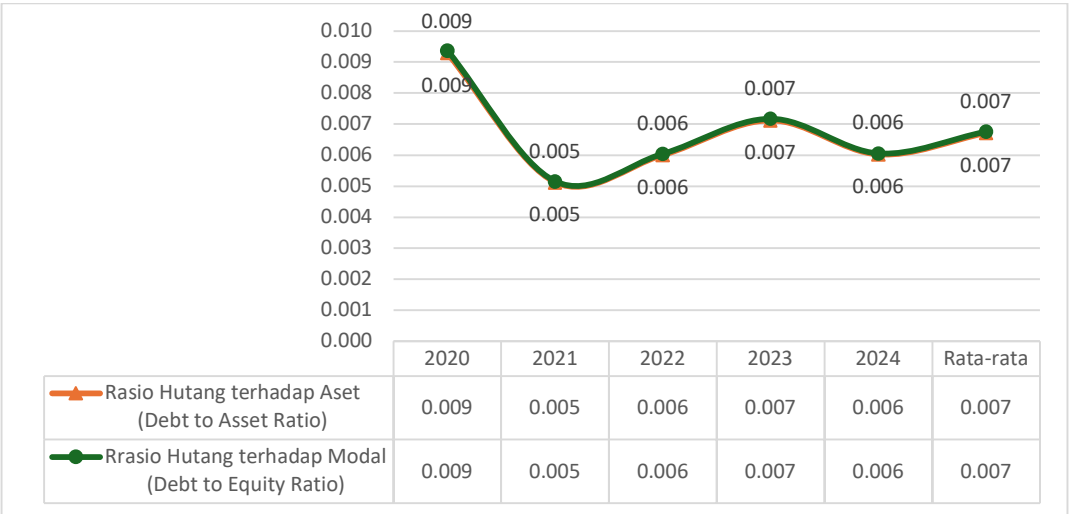
Rata-rata rasio kas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,97. Ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah memiliki cadangan kas yang cukup untuk membayar utang jangka pendek secara langsung. Ini berarti pemerintah memiliki kas 2,97 kali lipat lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya, yang mengindikasikan keuangan daerah sangat likuid. Meskipun

demikian, terdapat penurunan signifikan dalam rasio ini pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 1,76 dan 1,25, yang mengindikasikan potensi penurunan likuiditas kas pada akhir periode pengamatan.

Secara keseluruhan, rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Kolaka tergolong sehat, terutama pada awal hingga pertengahan periode 2020–2024. Namun, tren penurunan pada dua tahun terakhir memerlukan perhatian lebih lanjut agar pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan keuangan jangka pendeknya secara optimal.

2.2.2.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



Gambar 2. 62 Rasio Solvabilitas Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Kolaka selama periode tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan bahwa tingkat kewajiban jangka pendek terhadap total aset dan ekuitas berada dalam kisaran yang sangat rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan rendahnya beban utang terhadap aset dan modal.

1. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang. Nilai 0,007 (atau 0,7 persen) menunjukkan bahwa hanya 0,7 persen dari total aset yang berasal dari utang, yang berarti beban utang daerah relatif sangat kecil.

2. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

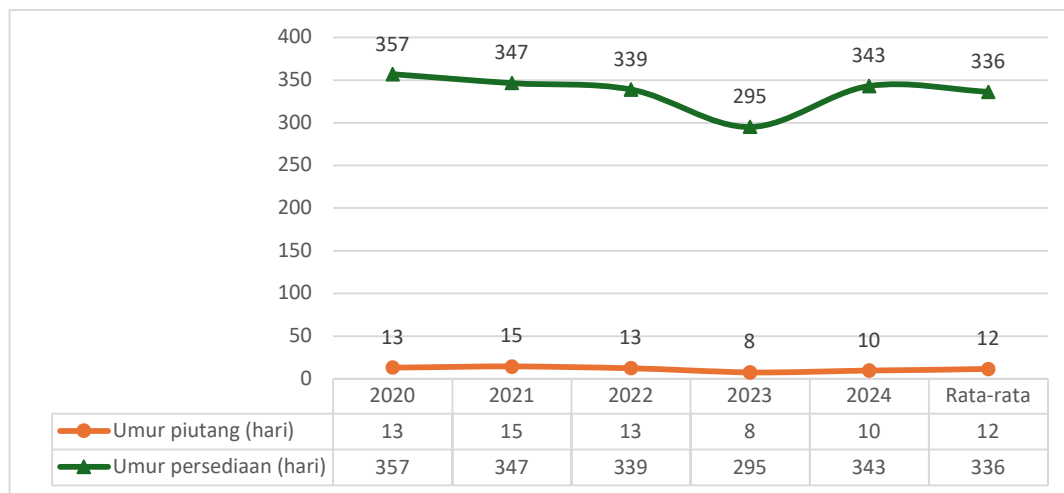
Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya. Nilai rata-rata 0,007 atau 0,7 persen, ini berarti kabupaten memiliki modal yang sangat dominan dibandingkan dengan utangnya, menunjukkan solvabilitas yang sangat baik.

Secara keseluruhan, rasio solvabilitas yang rendah tersebut menunjukkan bahwa struktur pendanaan Pemerintah Kabupaten Kolaka sangat bergantung pada modal sendiri (ekuitas) dan tidak memiliki ketergantungan signifikan terhadap kewajiban (utang). Hal ini mengindikasikan kondisi keuangan yang sangat sehat dari sisi solvabilitas, di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset atau modal yang tersedia. Selain itu, hal ini juga mencerminkan minimnya risiko fiskal jangka panjang yang ditanggung pemerintah daerah akibat beban utang.

Namun demikian, meskipun rasio yang rendah mencerminkan kehati-hatian fiskal, hal ini juga dapat menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan ruang fiskal atau kapasitas pembiayaan yang dimiliki untuk mendukung program pembangunan jangka panjang melalui sumber-sumber pembiayaan alternatif yang sah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang seimbang antara kehati-hatian fiskal dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

2.2.2.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



Gambar 2. 63 Rasio Aktivitas Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2023

Sumber: Hasil Olah Data 2025

1. Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Rata-rata umur piutang berada pada angka 12 hari. Angka ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menagih piutang dalam jangka waktu yang relatif singkat, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan piutang daerah. Umur piutang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 15 hari pada tahun 2021 menjadi hanya 10 hari pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses penagihan piutang, yang dapat berdampak positif terhadap likuiditas kas daerah.

2. Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Umur persediaan menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan rata-rata sebesar 336 hari selama periode lima tahun. Nilai ini mengindikasikan bahwa persediaan yang dimiliki pemerintah daerah cenderung beredar dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum digunakan atau dihabiskan. Meskipun terjadi sedikit penurunan umur persediaan pada tahun 2023 menjadi 295 hari, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 343 hari. Umur persediaan yang tinggi dapat menunjukkan adanya potensi inefisiensi dalam manajemen persediaan, seperti akumulasi barang yang belum terpakai dalam waktu lama, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan aset lancar secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan piutang, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan persediaan guna meningkatkan efisiensi penggunaan aset lancar dan mendukung kinerja keuangan yang lebih optimal.

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah, maka realisasi APBD pada masa lalu dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menyusun proyeksi kerangka pendanaan untuk perencanaan pembangunan daerah pada tahun selanjutnya.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dapat

meningkat setiap tahunnya melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, meliputi :

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- e. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- f. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- g. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.

(2) Pendapatan transfer:

- a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka ditampilkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2. 34 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENDAPATAN DAERAH						
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	189.281.002.127,89	310.295.710.000	325.810.495.500	342.101.020.275	359.206.071.289	377.166.374.853
1.1	Pajak Daerah	57.558.374.839,00	120.237.722.000	126.249.608.100	132.562.088.505	139.190.192.930	146.149.702.577
1.2	Retribusi Daerah	98.294.418.472,64	28.018.765.000	29.419.703.250	30.890.688.413	32.435.222.833	34.056.983.975
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.709.427.717,00	61.667.199.000	64.750.558.950	67.988.086.898	71.387.491.242	74.956.865.804
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	14.718.781.099,25	100.372.024.000	105.390.625.200	110.660.156.460	116.193.164.283	122.002.822.497
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.591.658.483.097,00	1.490.914.152.000	1.580.369.000.000	1.675.191.139.000	1.775.702.606.000	1.882.244.762.000
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.536.391.522.610,00	1.422.008.287.000	1.507.328.784.000	1.597.768.511.000	1.693.634.621.000	1.795.252.698.000
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.266.960.487,00	68.905.865.000	73.040.216.000	77.422.628.000	82.067.985.000	86.992.064.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.468.308.569,00	-	-	-	-	-
3.1	Pendapatan Hibah	2.468.308.569,00					
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.783.407.793.793,89	1.801.209.862.000,00	1.906.179.495.500,00	2.017.292.159.275,00	2.134.908.677.289	2.259.411.136.853

Sumber: Bappeda dan BKAD Kab.Kolaka, 2025

Proyeksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan daerah dalam kurun waktu 2026 hingga 2030. Secara umum, total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp1,80 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,25 triliun pada tahun 2030. Pendapatan daerah ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD ditargetkan mengalami pertumbuhan, dengan nilai tahun 2026 sebesar Rp310,29 miliar yang diproyeksikan meningkat menjadi Rp 377,1 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara khusus, retribusi daerah mencatatkan pertumbuhan yang cukup stabil, dari Rp 28.01 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 34,05 miliar pada tahun 2030. Begitu pula dengan pendapatan dari pajak daerah yang mengalami kenaikan dari Rp 120,23 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 146,14 miliar pada tahun 2030.

Pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah, dengan kontribusi rata-rata 82,77 persen pertahun terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2024, pendapatan transfer mencapai Rp1,59 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,88 triliun pada tahun 2030. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendominasi komponen ini, di mana proyeksinya menunjukkan peningkatan dari Rp1,53 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,79 triliun pada tahun 2030. Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah juga mengalami kenaikan, meskipun dalam skala yang lebih kecil, dari Rp55,26 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp86,99 miliar pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, proyeksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka mengindikasikan pertumbuhan pendapatan yang positif dalam lima tahun ke depan. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap

pendapatan transfer masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang lebih produktif perlu menjadi prioritas dalam strategi pengelolaan keuangan daerah.

2.2.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program pencapaian standar pelayanan minimal dan operasional;
3. Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
5. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 35 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BELANJA DAERAH						
1	BELANJA OPERASI	1.133.332.525.669,00	1.160.323.021.000,00	1.226.839.445.500,00	1.297.191.707.275,00	1.371.602.200.288,00	1.450.306.269.852,00
1.1	Belanja Pegawai	525.215.063.650,00	634.638.545.000,00	672.716.857.000,00	713.079.868.000,00	755.864.660.000,00	801.216.539.000,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	528.830.505.091,00	484.641.473.000,00	510.617.006.500,00	537.995.923.275,00	566.854.670.288,00	597.273.890.852,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	2.303.128.000,00	2.441.315.000,00	2.587.793.000,00	2.743.060.000,00	2.907.643.000,00
1.4	Belanja Hibah	73.868.956.928,00	20.664.875.000,00	21.904.767.000,00	23.219.053.000,00	24.612.196.000,00	26.088.927.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.418.000.000,00	18.075.000.000,00	19.159.500.000,00	20.309.070.000,00	21.527.614.000,00	22.819.270.000,00
2	BELANJA MODAL	441.435.975.349,00	429.637.092.000,00	460.075.317.000,00	487.099.836.000,00	515.805.825.000,00	546.294.177.000,00
2.1	Belanja Tanah	2.736.787.884,00	6.000.000.000,00	6.360.000.000,00	6.741.600.000,00	7.146.096.000,00	7.574.861.000,00
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	85.090.498.070,00	52.117.428.000,00	55.244.473.000,00	58.559.141.000,00	62.072.689.000,00	65.797.050.000,00
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	145.885.629.358,00	114.120.000.000,00	120.967.200.000,00	128.225.232.000,00	135.918.745.000,00	144.073.869.000,00
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	203.743.376.012,00	253.204.664.000,00	273.056.944.000,00	288.860.361.000,00	305.671.984.000,00	323.552.308.000,00
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.858.846.325,00	2.895.000.000,00	3.068.700.000,00	3.252.822.000,00	3.447.991.000,00	3.654.870.000,00
2.6	Belanja Aset Lainnya	1.120.837.700,00	1.300.000.000,00	1.378.000.000,00	1.460.680.000,00	1.548.320.000,00	1.641.219.000,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	13.329.208.652,48	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3.1	Belanja Tidak Terduga	13.329.208.652,48	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	BELANJA TRANSFER	206.288.431.716,00	200.249.749.000,00	212.264.733.000,00	225.000.616.000,00	238.500.652.000,00	252.810.690.000,00
4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	14.825.649.000,00	15.715.187.000,00	16.658.098.000,00	17.657.583.000,00	18.717.037.000,00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	206.288.431.716,00	185.424.100.000,00	196.549.546.000,00	208.342.518.000,00	220.843.069.000,00	234.093.653.000,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	1.794.386.141.386,48	1.805.209.862.000,00	1.914.179.495.500,00	2.024.292.159.275,00	2.140.908.677.288,00	2.264.411.136.852,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.978.347.592,59)	(4.000.000.000,00)	(8.000.000.000,00)	(7.000.000.000,00)	(6.000.000.000,00)	(5.000.000.000,00)

Sumber : Bappeda dan BKAD Kab. Kolaka, 2025

Proyeksi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun ke depan, dengan total belanja daerah yang meningkat dari Rp1,79 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,26 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja bantuan keuangan.

Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur anggaran, dengan proyeksi kenaikan dari Rp1,13 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,45 triliun pada tahun 2030. Komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mendominasi belanja operasi, masing-masing mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Sementara itu, belanja hibah dan bantuan sosial mengalami fluktuasi, dengan belanja hibah menurun secara signifikan pada tahun 2026 sebelum kembali meningkat secara bertahap.

Belanja modal juga mengalami pertumbuhan, dari Rp441,43 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp546,29 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini terutama terjadi pada belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang mengalami kenaikan signifikan, mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur. Selain itu, belanja gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta tanah juga mengalami kenaikan yang stabil.

Belanja tak terduga tetap dipertahankan pada angka Rp15 miliar per tahun sejak tahun 2026, menunjukkan adanya alokasi dana untuk mengantisipasi keadaan darurat atau kejadian tak terduga. Sementara itu, belanja bantuan keuangan juga mengalami kenaikan, dari Rp206,29 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp234,09 miliar pada tahun 2030.

Meskipun terdapat peningkatan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka masih mengalami defisit anggaran yang berkisar antara Rp4 miliar hingga Rp8 miliar per tahun. Meskipun defisit ini cenderung menurun pada tahun-tahun mendatang, hal ini tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui strategi peningkatan pendapatan daerah atau

efisiensi belanja. Secara keseluruhan, tren belanja daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang lebih besar, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, upaya pengelolaan keuangan yang lebih optimal tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

2.2.3.3 Proyeksi Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah berorientasi keuntungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2. 36 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PEMBIAYAAN DAERAH						
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.321.079.392,20	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.321.079.392,20	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.321.079.392,20	4.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Sumber : Bappeda dan BKAD Kab. Kolaka, 2025

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kolaka, penerimaan pembiayaan daerah didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan mencapai Rp41,32 miliar, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2026 menjadi Rp10 miliar. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya terdapat peningkatan, yakni Rp15 miliar dari tahun 2027 hingga 2030.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan menunjukkan tren kenaikan secara bertahap. Pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp5 miliar, yang kemudian tetap stabil pada tahun 2026 sebelum meningkat menjadi Rp6 miliar pada tahun 2027, Rp7 miliar pada tahun 2028, serta mencapai Rp9 miliar pada tahun 2029 dan Rp 10 miliar pada tahun 2030. Pengeluaran ini sepenuhnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam melakukan investasi jangka panjang guna mendukung pembangunan daerah.

Akibat adanya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp36,32 miliar. Namun, pada tahun 2026 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp4 miliar, sebelum kembali meningkat menjadi Rp8 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, pada tahun 2028 pembiayaan netto sedikit menurun menjadi Rp7 miliar, kemudian menembus angka Rp6 miliar pada tahun 2029 dan Rp 5 miliar pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, tren pembiayaan daerah Kabupaten Kolaka dalam proyeksi ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dalam penerimaan pembiayaan, sementara pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif guna memastikan keberlanjutan fiskal dan optimalisasi belanja daerah.

2.2.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendapatan	1.783.407.793.793,89	1.801.209.862.000,00	1.909.282.450.000,00	2.023.839.394.000,00	2.145.269.754.000,00	2.273.985.937.000,00
2	Penerimaan Pembiayaan	41.321.079.392,20	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.824.728.873.186,09	1.811.209.862.000,00	1.924.282.450.000,00	2.038.839.394.000,00	2.160.269.754.000,00	2.288.985.937.000,00
	Dikurangi:						
3	Belanja pegawai	525.215.063.650,00	634.638.545.000,00	672.716.857.000,00	713.079.868.000,00	755.864.660.000,00	801.216.539.000,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Total Pengeluaran	530.215.063.650,00	640.638.545.000,00	679.716.857.000,00	721.079.868.000,00	764.864.660.000,00	811.216.539.000,00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.294.513.809.536,09	1.170.571.317.000,00	1.244.565.593.000,00	1.317.759.526.000,00	1.395.405.094.000,00	1.477.769.398.000,00
	PRIORITAS I		585.285.658.500,00	622.282.796.500,00	658.879.763.000,00	697.702.547.000,00	738.884.699.000,00
	PRIORITAS II		468.228.526.800,00	497.826.237.200,00	527.103.810.400,00	558.162.037.600,00	591.107.759.200,00
	PRIORITAS III		117.057.131.700,00	124.456.559.300,00	131.775.952.600,00	139.540.509.400,00	147.776.939.800,00

Sumber: Bappeda dan BKAD Kab. Kolaka, 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka diproyeksikan meningkat dari tahun 2026-2030. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan;
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati mencakup:
 - a. Agama dan Budaya;
 - b. Tata Kelola Pemerintahan;
 - c. Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan;
 - d. Peningkatan Struktur Ekonomi Masyarakat;
 - e. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur;
 - f. Pemenuhan Lapangan Kerja;
 - g. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penataan Kawasan Perkotaan;
 - h. Pemberdayaan pemuda dan olahraga;
 - i. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, Lansia, dan Disabilitas.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka secara umum akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan lintas sektor dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan daerah. Kedua permasalahan ini pada umumnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi tantangan pembangunan yang perlu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka selama lima tahun mendatang. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada uraian berikut.

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Permasalahan pembangunan lintas sektor menunjukkan permasalahan yang beririsan dengan berbagai aspek dan diperlukan penanganan lintas sektor. Pemetaan masalah lintas sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Pengembangan ekonomi inklusif belum optimal	Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian	Pertumbuhan sektor unggulan dan potensial di luar pertambangan belum optimal
			Realisasi Investasi perlu ditingkatkan
		Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan	Kenaikan kelas usaha mikro menjadi kecil belum optimal
			Ketahanan pangan belum optimal
		Perluasan akses dan kesempatan	Pengangguran perlu diturunkan
			Produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan
	Belum optimalnya pengembangan	Belum optimalnya	Belum optimalnya pemenuhan jalan dalam kondisi mantap

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dan pemeliharaan infrastruktur daerah	kualitas jaringan jalan	Belum memadainya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan kawasan pariwisata
			Pemeliharaan jalan dan jembatan yang belum merata
			Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah kabupaten
		Pemenuhan air bersih yang perlu ditingkatkan	Cakupan infrastruktur SPAM belum merata sehingga jangkauan air bersih pada beberapa desa masih terbatas
			Pemeliharaan infrastruktur SPAM belum dilakukan secara rutin
			Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang belum merata
			Sumber air bersih yang masih tercemar limbah industri nikel
			Sedimentasi sumber air permukaan akibat meluasnya pembukaan lahan di hulu DAS
			Sumber air baku yang masih terbatas khususnya di wilayah selatan
			Perlindungan sumber air belum optimal
			Belum tersedianya bangunan pengendali dan pengaman abrasi sungai dan pantai

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Infrastruktur persampahan dan limbah yang belum memadai	Belum meratanya infrastruktur pengolahan limbah dan persampahan di daerah perkotaan dan pedesaan
		Keterbatasan infrastruktur TIK	Masih ada desa yang belum terlayani jaringan internet
Transformasi Sosial	Kualitas SDM masih belum optimal	Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan masih belum optimal	Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanna pendidikan dan kesehatan secara optimal
			Sarana dan prasraana penunjang layanan pendidikan dan kesehatan masih terbatas
			Sebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan masih belum merata
			Jenis layanan kesehatan masih terbatas
			Mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya upaya kesehatan lingkungan
			Belum optimalnya layanan perpustakaan
		Belum optimalnya budaya literasi masyarakat	Belum optimalnya peran seluruh stakeholder untuk meningkatkan minat baca
			Jangkauan pelayanan perpustakaan pada daerah kepulauan belum tersedia

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya peningkatan keluarga yang berkualitas	Pendampingan pada keluarga untuk pola asuh yang baik belum optimal
			Masih terbatasnya kelompok ketahanan keluarga
	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	Belum optimalnya akses terhadap fasilitas kesehatan	Belum memadainya akses fasilitas kesehatan di daerah perbukitan
		Belum optimalnya akses terhadap fasilitas sosial yang inklusif	Belum optimalnya penyediaan fasilitas publik ramah difabel, ramah lansia, dan ramah anak
		Keterbatasan infrastruktur TIK	Masih ada desa yang belum terlayani jaringan internet
			Belum meratanya pemanfaatan internet untuk layanan pendidikan
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Kualitas implementasi RB General dan Tematik belum optimal	Interoperabilitas layanan TIK untuk bidang kesehatan dan pendidikan belum optimal
			Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			Belum optimalnya SPIP
			Belum optimalnya implementasi sistem merit pegawai
			Belum optimalnya manajemen talenta/pengembangan SDM Kepegawaian
			Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dalam proses kebijakan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		Inklusifitas pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya inovasi daerah
			Belum optimalnya implementasi SPBE
			Belum optimalnya pelayanan publik
	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan lahan galian tambang
			Pengelolaan limbah lumpur tambang yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
			Banyaknya tambang ilegal
		Penurunan fungsi kawasan pesisir	Tercemarnya kawasan pesisir oleh limbah lumpur tambang
		Penurunan fungsi DAS	Pendangkalan aliran sungai
			Meluasnya alih fungsi lahan
			Kerusakan hulu DAS
		Pengelolaan sampah yang belum optimal	Fasilitas dan infrastruktur persampahan yang belum memadai
			Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3R
			Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya
	Ketahanan Sosial Budaya belum optimal	Belum optimalnya pelestarian warisan budaya daerah	Belum optimalnya pendidikan berbasis budaya
			Pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah belum terinventarisir dengan baik
		Belum optimalnya	Keberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ketahanan keluarga	Belum optimalnya pemenuhan hak anak
			Edukasi tentang pengetahuan dan keterampilan berkeluarga masih belum optimal

2.3.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dijelaskan dengan melihat urusan dan mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah. Pemetaan masalah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Belum optimalnya akses layanan pendidikan di semua jenjang	Di beberapa daerah, akses masyarakat terhadap sekolah masih cukup jauh
			Sarana dan prasarana pendukung layanan pendidikan masih terbatas
			Distribusi guru masih belum merata
			Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih kurang
			Adanya keterbatasan ekonomi masyarakat
		Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	Kompetensi dan kualifikasi guru masih perlu ditingkatkan
			Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya partisipasi pendidikan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
2	Kesehatan	Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Kualitas kesehatan ibu masih belum optimal (AKI 53/100.00 KH, cakupan K6 73%, persalinan di Faskes 80%)
			Kualitas kesehatan bayi belum optimal (Stunting 9,4%, AKB 11/1.000KH, belum semua bayi imunisasi dasar lengkap)
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS) dan tidak menular
			Distribusi tenaga kesehatan belum merata, cenderung menumpuk di puskesmas wilayah perkotaan
			Jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan
			Edukasi kesehatan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan
			Akses sanitasi aman dan saran air bersih masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu tentang kesehatan kehamilannya
			Kurangnya kesadaran ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin
			Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga tentang pentingnya persalinan di faskes dibanding melahirkan di rumah
			Kurangnya akses terhadap makanan bergizi terutama keluarga dengan ekonomi rendah
			Kurang asupan gizi selama kehamilan yang mendukung pertumbuhan janin

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Capaian Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) Rumah Tangga yaitu 66%, masih jauh dari target 85%
			Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan PHBS Rumah Tangga
			Masih rendahnya minat literasi masyarakat terhadap informasi kesehatan
			Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum maksimal
		Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa
			Belum tersedianya fasilitas kesehatan bagi pasien ODGJ
			Belum tersedianya SDM kesehatan jiwa
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan prima
			Belum optimalnya rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
			Belum adanya sistem audit mutu pelayanan secara rutin
		Belum optimalnya layanan kefarmasian	Puskesmas masih terbatas dalam menganggarkan melalui dana BLUD nya untuk pemenuhan obat dan BMHP
			Masih ditemukan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal	Sumber air bersih yang terbatas
			Kurangnya infrastruktur pengolahan air limbah dan persampahan di daerah perkotaan dan pedesaan
			Adanya sedimentasi dan penyumbatan saluran drainase oleh sampah dan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			limbah padat yang menghambat aliran air
			Kurangnya bangunan pengaman untuk daerah aliran sungai dan pantai guna mengatasi kerusakan akibat abrasi
		Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang belum optimal	Belum optimalnya pemenuhan jalan dalam kondisi mantap
			Infrastruktur jalan dan jembatan yang belum layak
			Belum berkembangnya transportasi perkotaan dan antarpulau
			Tidak berfungsinya terminal bus sebagai hub transportasi antarwilayah
			Belum berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi
		Kurangnya ketaatan penataan tata ruang wilayah	Belum memadainya dokumen perencanaan tata ruang
			Kurang optimalnya pembinaan, Sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan Ruang
		Penyediaan infrastruktur irigasi yang belum optimal	Adanya sedimentasi dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan di area hulu
			Penyediaan sumber air baku yang tidak mencukupi khususnya di wilayah selatan untuk mendukung kegiatan pertanian
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman	Kurangnya kesadaran perilaku hidup sehat
			Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi
			Belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif mengenai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			dampak kumuh pada lingkungan permukiman
			Masih adanya permukiman kumuh di beberapa wilayah perkotaan dan pesisir
			Perencanaan yang disusun dalam penanganan kawasan kumuh masih belum terintegrasi
		Keterbatasan Rumah Layak Huni	Masih banyak rumah tidak layak huni
			Program bantuan rumah belum menjangkau semua masyarakat miskin
			Data penerima manfaat belum terintegrasi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya intervensi dan pencegahan trantibumas	Belum optimalnya pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP
			Belum optimalnya pelaksanaan FKUB
		Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum Optimalnya mitigasi dan sinergitas semua elemen dalam penanganan bencana
			Pengurangan Risiko Bencana belum dilaksanakan secara menyeluruh
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan
6	Sosial	Belum optimalnya kesejahteraan kelompok rentan	Belum optimalnya bantuan sosial pada kelompok rentan (persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 62,82)
			Terbatasnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial, dll

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Pengelolaan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih perlu ditingkatkan
			Belum tersedia tempat rehabilitasi sosial yang memadai untuk pemulihan individu/ kelompok
			Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pengelolaan perlindungan sosial (pemerintah, swasta, dan masyarakat)
			Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan masih perlu dioptimalkan
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Kesempatan kerja perlu ditingkatkan	Kompetensi diarahkan sesuai permintaan pasar
			Pengembangan jaringan pemasaran tenaga kerja
			Pekerja migran semakin bertambah
			Konflik hubungan industrial perlu diselesaikan
		Kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan	Peningkatan kapasitas tenaga kerja belum memadai
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu dioptimalkan	Masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (IPG 90,23, IDG 67,85, IKG 0,464)
			Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak (Predikat KLA Madya)
			Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
9	Pangan	Ketersediaan pangan belum optimal	Ketersediaan infrastruktur belum memadai
			Lumbung pangan masyarakat belum memadai
		Akses pangan belum optimal	infrastruktur jalan dan perhubungan belum memadai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Rantai pasok pangan belum memadai
		Pemanfaatan pangan belum optimal	Diversifikasi pangan non-beras belum memadai
10	Pertanahan	Adanya sengketa pertanahan	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian sengketa lahan
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Rendahnya kualitas tutupan lahan akibat perluasan pembukaan lahan hijau oleh aktivitas tambang
			Pengelolaan limbah lumpur tambang yang belum memperhatikan keserasian lingkungan hidup
			Menurunnya kualitas air permukaan
			Menurunnya daya tampung Sungai akibat sedimentasi lumpur tambang
			Penurunan fungsi kawasan pesisir akibat pencemaran limbah lumpur tambang
			Aktivitas tambang ilegal yang masih berjalan
			Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
			Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3R
		Pengelolaan sampah dan limbah yang belum terintegrasi hulu hilir	Masih tingginya timbunan sampah domestik
			Pemilahan sampah pada level rumah tangga belum optimal
			Cakupan layanan infrastruktur persampahan dan limbah belum merata.
			Pengelolaan limbah B3 masih terbatas ditumpuk

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			dan belum mendapatkan <i>treatment</i> yang sesuai.
			Limbah padat masih dibuang ke sungai, menyebabkan penyumbatan dan pendakalan sungai
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Sebagian masyarakat belum memiliki dokumen administrasi kependudukan karena tingkat kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah
			Pelayanan jemput bola belum merata akibat rentang kendali wilayah yang luas dan keterbatasan aksesibilitas
			Pencatatan sipil belum terselenggara secara optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan kelahiran, kematian, dan pernikahan
			Masyarakat masih mengandalkan pengurusan dokumen kependudukan kepada Calo sehingga terlibat pungutan liar
			Sarana dan prasarana operasional administrasi dan pencatatan yang belum memadai
			Masih rendahnya permohonan aktivasi identitas kependudukan digital
			Belum optimalnya sinergitas pemanfaatan data antar satuan kerja lain
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar desa
			Masih ada desa yang berstatus “tertinggal”

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Administrasi pemerintahan desa belum tertib dan Kualitas aparatur desa masih rendah
			Kesenjangan dan distribusi sumber daya yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rasio TFR belum ideal. Capaian 2,34, idealnya 2,1
			Minat Masyarakat khususnya pasangan usia subur dalam ber-KB dengan berbagai pilihan alat kontrasepsi masih kurang
			Belum optimalnya pelaksanaan kampung KB. Kampung KB tidak hanya urusan KB dan Kontrasepsi, namun pada upaya membangun Kampung dari seluruh sektor baik ekonomi, Kesehatan, Pendidikan hingga pembangunan
15	Perhubungan	Belum optimalnya pengembangan transportasi darat	Transportasi angkutan antarkecamatan dalam kabupaten terus mengalami penurunan
			Transportasi angkutan antarkabupaten dalam provinsi cenderung mengalami penurunan
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya akses terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi	Masih ada desa yang belum mendapatkan layanan internet (covered desa internet masih 88%)
			Masih rendahnya literasi digital masyarakat terhadap pelayanan publik digital
			Belum optimalnya pemanfaatan internet di kecamatan untuk pelayanan publik

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya penerapan digitalisasi pemerintahan	Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas programmer
			Belum terintegrasinya aplikasi antar OPD dalam satu layanan aplikasi
			Belum optimalnya skema KPBU dalam pembiayaan pemerintahan digital
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Omzet usaha mikro perlu ditingkatkan	Kualitas kelembagaan koperasi belum optimal
			Digitalisasi UKM belum memadai
			Sarana dan prasarana UKM belum memadai
			Pusat kuliner/ UKM berbasis wisata belum memadai
			Validitas data UKM belum memadai
			Pemasaran produk UKM (Marketplace) belum memadai
			Akses bantuan permodalan belum memadai
18	Penanaman Modal	Masih rendahnya minat investasi	Validitas data potensi investasi belum memadai
			Inovasi promosi investasi belum memadai
			Luasan kawasan investasi sudah habis untuk pertambangan
			Kapasitas SDM perizinan belum memadai
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan organisasi dalam kegiatan pembangunan daerah
			Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
			Masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan kelompok pemuda terhadap akses modal dan wirausaha
		Belum optimalnya prestasi olahraga	Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Masih terbatasnya jumlah pelatih yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai standar
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang keolahragaan
20	Statistik	Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Belum adanya standar data yang seragam dari masing-masing perangkat daerah
21	Persandian	Belum optimalnya pengamanan informasi	Keterbatasan sumber daya persandian
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan	Pembinaan dan upaya pelestarian seni budaya yang masih terbatas
			Masih terbatasnya pelaksanaan festival seni kebudayaan
			Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda
			Belum optimalnya penerapan kurikulum muatan lokal terkait kebudayaan daerah
23	Perpustakaan	Belum optimalnya budaya literasi masyarakat	Sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan masih terbatas
			Jangkauan layanan perpustakaan masih terbatas
			Koleksi bahan bacaan masih terbatas
			Belum optimalnya peran stakeholders dalam meningkatkan minat baca masyarakat
24	Kearsipan	Belum optimalnya layanan kearsipan	Belum optimalnya pemeliharaan dan perlindungan arsip daerah
			Masih terbatasnya jumlah arsiparis

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Pengelolaan arsip di perangkat daerah masih belum optimal
			Digitalisasi arsip belum berjalan optimal
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Produksi pertanian dalam arti luas belum optimal	Sarana dan prasarana pertanian (pupuk, alsintan, irigasi) perlu ditingkatkan
			Kapasitas SDM petani belum memadai
			Akses bantuan permodalan belum memadai
			Metode pertanian semi modern
			Bencana pertanian dan serangan hama
			Bibit kualitas unggul belum memadai
			Luas lahan diprediksi menurun karena penambahan penambangan nikel di sekitar sawah
		Produksi perikanan tangkap belum optimal	Degradasi kualitas lingkungan pesisir akibat sedimentasi tambang dan ilegal fishing
			Manajemen usaha perikanan belum memadai
			Sarana dan prasarana belum memadai
		Produksi perikanan budidaya belum optimal	Kluster budidaya ikan perlu dikembangkan
			Serangan hama dan penyakit
			Irigasi mengalami pendangkalan
			Pakan ikan belum memadai
			Akses bantuan permodalan belum memadai
			Alih fungsi lahan ke pertambangan
		Kualitas produk perikanan belum optimal	Sarana dan prasarana belum memadai
			Pengemasan belum memadai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Perizinan belum memadai
			Standarisasi untuk masuk toko modern kurang
		Pengolahan hasil perikanan belum optimal	Hampir semua tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)
			Diversifikasi hasil perikanan masih terkendala
26	Pariwisata	Kunjungan wisatawan belum optimal	Pengembangan destinasi: Atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary belum memadai
			Pemasaran pariwisata berbasis IT belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia belum memadai
			Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
27	Pertanian	Produksi pertanian dalam arti luas belum optimal	Sarana dan prasarana pertanian (pupuk, alsintan, irigasi) perlu ditingkatkan
			Kapasitas SDM petani belum memadai
			Akses bantuan permodalan belum memadai
			Metode pertanian semi modern
			Bencana pertanian dan serangan hama
			Bibit kualitas unggul belum memadai
			Luas lahan diprediksi menurun karena penambahan penambangan nikel di sekitar sawah
28	Perdagangan	Nilai perdagangan belum optimal	Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai
			Pengawasan metrologi belum punya penyidik
			Stabilitas harga terkendali, namun saat hari besar ada lonjakan harga
29	Perindustrian		Pemanfaatan teknologi industri belum memadai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Nilai produksi industri belum optimal	Akses bantuan permodalan belum memadai
			Peralatan pengolahan dan kemasan produk belum memadai
			Sertikasi produk belum merata
			Pendataan industri belum optimal
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
30	Sekretariat Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum optimal	Belum optimalnya capaian Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi
			Peran PD dalam peningkatan SAKIP daerah belum optimal
			Pengelolaan data kinerja belum optimal terutama ketersediaan dan sinkronisasi data
		Belum optimal dan meratanya pelayanan publik yang berdampak pada masyarakat	Belum meratanya akses masyarakat terhadap seluruh pelayanan publik yang diberikan pemerintah
Inovasi daerah masih rendah			
31	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya output produk hukum dari DPRD	Pemahaman terkait perencanaan belum optimal terutama untuk memastikan sinkronisasi program antara eksekutif dan legislatif
			Belum optimalnya penyerapan suara/reses masyarakatn pada level desa-desa
			Ketimpangan antara penyerapan aspirasi masyarakat dengan output kebijakan legislatif
			Kapasitas lembaga dan anggota DPRD belum optimal
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
32	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah	Keselarasan dokumen perencanaan belum optimal
			Kurang memadainya ketersediaan data yang reliable dan realtime

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Kapasitas SDM perencana belum optimal
33	Keuangan	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	Masih kurangnya kompetensi pengelola barang milik daerah di OPD
			Masih belum optimalnya database barang milik daerah yang tersedia
			Masih belum optimalnya penyampaian informasi dan data barang milik daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi proses bisnis layanan yang lebih modern, cepat, tepat transparan dan akuntabel	Masih belum terdapat sistem prosedur yang tepat dalam menjabarkan pola penganggaran berbasis sumber dana dan data indikator syarat salur yang lebih efektif
			Masih belum optimalnya laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan sesuai
			Belum tercapainya pelaksanaan belanja yang sesuai Standar Pelayanan Minimum
			Belum optimalnya pelaksanaan anggaran kas sesuai mekanisme sumber dana realisasi belanja daerah
			Belum terciptanya SDM BKAD yang mampu melakukan analisis data keuangan yang menjadi sumber informasi yang lebih tepat dan lengkap sebagai alat penunjang kebijakan pimpinan
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalitas ASN	Belum optimalnya penataan aparatur
			Pengukuran dan penegakkan disiplin aparatur belum optimal
			Peningkatan kompetensi aparatur yang dilakukan secara holistik dan berkelanjutan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
35	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya kualitas penelitan dan pengembangan daerah	Pemanfaatan hasil riset belum optimal
			Pengembangan dan keberlanjutan inovasi daerah masih kurang
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
36	Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) belum optimal	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
			Belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap SKPD pasca pemeriksaan
Unsur Kewilayahan			
37	Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di kecamatan
			Belum terintegrasinya data antar kecamatan
			Penerapan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi pelayanan publik di level kecamatan belum optimal
Unsur Pemerintahan Umum			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rendahnya pemahaman, penghayatan dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, dan bela negara	Belum optimalnya pembinaan ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
			Belum optimalnya deteksi dini dan pengawasan konflik sosial
			Belum optimalnya penguatan dan pembinaan Ormas/ Parpol
			Belum optimalnya peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Belum optimalnya pencegahan peredaran narkoba

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat penting, berdaya ungkit, memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan Kabupaten Kolaka. Kebijakan pembangunan jangka menengah yang dimuat dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD ini sangat dipengaruhi oleh hasil rumusan isu-isu strategis daerah. Hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan daerah, telaahan terhadap isu internasional; isu/kebijakan nasional dan provinsi, serta telaahan terhadap RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2024-2045 dan RTRW Kabupaten Kolaka menghasilkan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029.

2.3.2.1 Isu Internasional

Pemerintah dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah mengidentifikasi beberapa isu internasional yang akan mempengaruhi kondisi Indonesia sampai dengan tahun 2045. Isu internasional dimaksud adalah megatren global yang terdiri dari berbagai isu besar internasional. Integrasi isu strategis internasional ini memberikan wawasan jangka panjang mengenai peluang dan tantangan baru yang akan membentuk kerangka kehidupan masyarakat di suatu daerah. Dengan mempertimbangkan isu strategis internasional ini, rencana pembangunan akan mendorong inovasi dalam mengembangkan daya saing di tengah-tengah lingkungan global yang terus berubah untuk memenuhi perubahan tuntutan yang diprediksi hadir di masa depan.

1. Perkembangan demografi global. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).

2. Geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen.
3. Perkembangan teknologi. Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. Konstelasi perdagangan global. Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.
6. Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, Central Bank Digital Currency (CBDB), dan Fintech.
7. Pertumbuhan kelas menengah (middle class). Jumlah middle dan upper class lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.
10. Pemanfaatan luar angkasa (space economy). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

2.3.2.2 Isu Nasional

Isu nasional dalam RPJMN 2025–2029 merupakan persoalan-persoalan strategis tingkat nasional yang menjadi fokus penanganan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Isu tersebut disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya, peluang dan tantangan dalam pembangunan, serta visi menuju *Indonesia Emas 2045*. Secara garis besar, berikut peluang dan tantangan dalam pembangunan di Indonesia.

A. Peluang Pembangunan

1. Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif

Ditengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menjadi salah satu contoh negara di Asia yang memiliki resiliensi positif dalam perekonomian. Kondisi tersebut didukung dengan pengelolaan fiskal yang baik, kinerja sektor eksternal yang kuat, serta permintaan konsumen yang stabil. Pertumbuhan ekonomi juga cenderung stabil pada kisaran 5,0-6,0 persen selama periode 2005-2019, dan kembali berkinerja positif pasca Covid-19 dengan pertumbuhan 5,05 persen (yoy) pada 2023. Tren inflasi dalam kurun 2012 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 0,32 persen per tahun. Inflasi yang stabil menciptakan ruang kebijakan untuk fokus pada ekspansif kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan sektor riil.

2. Keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan

Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ditingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Terdapat 22 tipe ekosistem alami, termasuk tutupan lahan berhutan seluas 95,56 juta hektar dan perairan laut seluas 325,74 juta hektar yang tersebar dalam tujuh ekoregion. Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki beberapa berperan penting, diantaranya sebagai penyedia jasa lingkungan, sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya, dan penyimpanan karbon, terutama vegetasi gambut dan mangrove. Selain itu Indonesia juga memiliki potensi EBT dan mineral. Potensi EBT mencapai 3.687 GW meliputi energi surya, hidro, panas bumi, bioenergy, bayu, dan energi laut. Sementara potensi mineral terdiri dari komoditas nikel, tembaga, bauksit, dan timah.

3. Potensi sumber daya manusia dan modal sosial

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat dunia. Populasi besar memberikan peluang untuk meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing

nasional. membuka peluang menjadi penyedia sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui dukungan pendidikan dan ketrampilan yang memadai serta pembentukan lingkungan pendukung ramah perempuan dan keluarga. Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang menjadi instrument mencegah konflik dan memperkuat kerukunan dan persatuan.

4. Pengembangan teknologi

Teknologi digital berperan sebagai enabler yang mendorong kemajuan di berbagai sektor termasuk pengembangan dan perluasan infrastruktur digital yang kokoh. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui revolusi 4.0 (otomatisasi, kecerdasan buatan, dan *internet of things*) yang akan semakin matang, industry 5.0 (kolaborasi manusia dan mesin membuka peluang efisiensi tinggi diberbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan), dan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dalam memprediksi dan mengelola risiko teknologi, serta memprediksi potensi bencana alam.

5. Sumber-sumber pertumbuhan inovatif

Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah, dibutuhkan sumber-sumber pertumbuhan produktif. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan ekonomi digital (*e-commerce, financial technology*).

B. Tantangan Pembangunan

1. Rendahnya produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah ditengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *total factor productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin. Rendahnya produktivitas disebabkan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang (terlebih perempuan); produktivitas sektor ekonomi yang rendah; kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal; serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau

2. Rendahnya kualitas SDM

Rendahnya kualitas SDM dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *programme for international student assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 (2022). Selain itu, rendahnya daya saing tenaga kerja ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Tahun 2024, angkatan kerja lulusan SMP kebawah sebesar 52,32 persen, lulusan SMA sebesar 34,82 persen, dan lulusan pendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada tingkat serapan tenaga kerja dipasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

3. Pergeseran struktur kelas masyarakat

Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat yang turun. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024). Pertumbuhan

populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler akan meningkat.

6. Geopolitik dan geoekonomi

Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat. Nilai strategis Kawasan IndoPasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional.

7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.3.2.3 Isu Regional Provinsi Sulawesi Tenggara

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Bahari. Dalam mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk melakukan beberapa intervensi, sebagaimana dimuat dalam tabel berikut

Tabel 2. 40 *Highlight* Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Transformasi	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
Sosial	1. Percepatan pengentasan stunting; 2. Percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria, tuberculosis, dan pneumonia. 3. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya; 4. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu system Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
Ekonomi	1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
	industry, termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral seperti nikel dan aspal, serta peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap dan budidaya) berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya; 2. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (<i>eco-tourism</i>) 3. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan industri sebagai wadah industri pengolahan dalam mendukung perekonomian provinsi; 4. Penuntasan daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi berkecepatan tinggi dan adopsi digital dalam seluruh layanan public dan pemerintahan; 5. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk system angkutan umum massal pada Kota Besar (Kendari) dan Kota Sedang (Bau-Bau) yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang. 6. Pembangunan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrase rantai pasok domestik (menghubungkan Kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara; 7. Interkoneksi transmisi Sistem Sultra-Raha-Bau-Bau dan penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal.
Tata Kelola	1. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan asset daerah. 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Pendidikan anti korupsi , transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
Supremasi Hukum	1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal. 2. Penguatan kerjasama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	1. Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir. 2. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan bendungan pelosika serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air.

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Sejalan dengan upaya pembangunan nasional, penelaahan dari gambaran kondisi daerah maka isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi Belum Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan inklusif menekankan pada partisipasi seluruh pihak dalam proses pembangunan, sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Konsep ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Beberapa indikator dari pertumbuhan inklusif mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

Di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonomi sejak 2009 menunjukkan fluktuasi, namun secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada 2009, pertumbuhan mencapai 7,78% dan melonjak ke 11,65% pada 2012, dipicu oleh tingginya ekspor tambang ore. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Minerba yang mewajibkan pembangunan smelter, pertumbuhan menurun menjadi

7,50% pada 2013 dan terus menurun hingga 6,26% di 2014. Dampak pandemi COVID-19 sangat signifikan, menyebabkan kontraksi ekonomi hingga -0,65% pada 2020. Meski begitu, dengan penanganan serius dari pemerintah, kondisi ekonomi pulih dan tumbuh 5,53% di 2022, serta diperkirakan stabil pada 5,40% pada 2024.

Terkait kemiskinan, presentase penduduk miskin menurun dari 21,45% pada 2005 menjadi 17,44% pada 2009. Penurunan melambat sejak 2015 (13,74%) hingga hanya 11,43% pada 2023. Pada awal 2020, angka sempat turun menjadi 11%, tetapi pandemi menaikkan kembali menjadi 11,66% pada 2021. Terkait ketimpangan, Gini Ratio Sulawesi Tenggara menunjukkan pola naik turun. Puncak ketimpangan terjadi pada 2018 (0,409), namun menurun menjadi 0,366 pada 2023 dan sedikit naik ke 0,370 di 2024. Menurut standar Bank Dunia, ketimpangan pengeluaran pada 40% penduduk terbawah berada pada 18,06%, tergolong kategori ketimpangan rendah. Laju pengangguran terbuka (TPT) juga berfluktuasi sejak 2005 (8,92%), turun drastis hingga 2,72% pada 2016, dan kembali naik akibat pandemi menjadi 4,58% pada 2020. Namun, TPT terus membaik dan pada 2024 turun menjadi 3,09%.

Meskipun pengangguran dan ketimpangan dapat dikendalikan, kemiskinan belum menurun secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat, memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang inklusif sangat penting. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan konsumsi meningkat dan menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta kesempatan kerja yang memadai. Pertumbuhan inklusif bukan hal baru. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan per kapita, peran pemerintah melalui belanja daerah, dan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan inklusif. Di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan industri pertambangan diharapkan mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.

2. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan target utama menghapus kemiskinan pada 2030. Prinsip “No One Left Behind” menekankan inklusivitas dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Di Sulawesi Tenggara, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kesulitan memperoleh modal dan pasar turut memperparah ketidakberdayaan mereka. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan, terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,19% pada 2018 menjadi 4,58% pada 2020.

Meskipun jumlah penduduk miskin bertambah 1,85 ribu orang pada Maret 2020, persentase kemiskinan di Sultra justru menurun menjadi 11%, bertolak belakang dengan tren nasional. Kenaikan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan justru menurun. Ini menunjukkan bahwa penduduk kota lebih rentan terhadap perubahan ekonomi, karena mayoritas menggantungkan hidup pada penghasilan harian yang terganggu oleh kebijakan pembatasan mobilitas selama pandemi, seperti Work From Home dan penutupan aktivitas perdagangan.

Pasca pandemi, upaya pemulihan ekonomi masyarakat masih terus berjalan. Hingga Maret 2023, angka kemiskinan di Sultra tercatat sebesar 11,43% atau 321,53 ribu jiwa, dengan dominasi penduduk miskin berada di perdesaan, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di perkotaan, angka kemiskinan mencapai 7,40%. Kemiskinan yang bersifat multidimensi ini menuntut penanganan lintas sektor dan berkelanjutan agar tidak menjadi beban pembangunan di masa mendatang.

3. Mengurangi Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah

Ketimpangan antar kelompok mencakup aspek sosial dan ekonomi, seperti distribusi akses pendidikan yang belum merata, kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, serta perbedaan kesempatan kerja dan ketidakadilan dalam pengupahan. Selain itu, distribusi infrastruktur yang tidak seimbang antar daerah turut memperbesar kesenjangan ini. Ketimpangan tersebut berpotensi menghambat perkembangan sosial dan membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor utama penyebab ketimpangan ini meliputi perbedaan kondisi demografis, ketidakmerataan kualitas pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta perbedaan status sosial di masyarakat.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengupayakan pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan melalui program bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan. Kebijakan publik juga telah digulirkan guna mengurangi kesenjangan tersebut, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan memberikan akses pendidikan yang merata, serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Seluruh program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Kendati berbagai inisiatif telah dijalankan, sejumlah tantangan masih menghambat pencapaian kesetaraan sosial dan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan antar wilayah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayahnya tersebar di berbagai pulau, sehingga menyulitkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan yang tidak disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal serta terbatasnya alokasi anggaran turut berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas program penanggulangan ketimpangan tersebut.

4. Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong peningkatan serta pemerataan pendapatan. Proses ini dilandasi oleh sistem ekonomi kerakyatan serta pengembangan sektor-sektor unggulan, terutama yang padat karya dan berorientasi ekspor. Selain itu, pembangunan harus didukung oleh penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi demi menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing yang tinggi dalam konteks global.

Untuk meningkatkan daya saing suatu daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi ekonomi lokalnya melalui riset dan inovasi. Daerah dengan daya saing tinggi umumnya memiliki sumber daya alam yang melimpah atau didukung oleh sektor industri dan jasa yang berkembang. Sebaliknya, daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor primer seperti pertanian cenderung memiliki daya saing yang lebih rendah.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, termasuk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan (nikel dan aspal Buton), serta pariwisata, seperti destinasi wisata bahari Wakatobi yang mendunia. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja secara luas. Namun, tantangan masih ada, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur, serta kualitas hidup masyarakat yang masih kurang. Oleh karena itu, peningkatan daya saing daerah dan produktivitas tenaga kerja menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan wilayah.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren positif, ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,99 pada tahun 2010 menjadi 72,94 di tahun 2023. Status pembangunan manusia naik dari kategori “sedang” ke

“tinggi” sejak 2018. Kemajuan ini terlihat dari dimensi pendidikan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,31 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,70 tahun, keduanya melampaui capaian nasional. Namun, Usia Harapan Hidup (UHH) 71,79 tahun masih di bawah rata-rata nasional sebesar 73,93 tahun.

Kemajuan di bidang pendidikan tak lepas dari semakin membaiknya fasilitas pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi individu. Akses pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa diskriminasi sangat diperlukan, begitu pula dengan penguatan nilai karakter dan budaya. Selain itu, perpustakaan memiliki peranan strategis dalam mendorong literasi dan minat baca masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, perpustakaan menjadi solusi alternatif dalam mendukung proses pembelajaran yang terbatas secara tatap muka.

Di sektor kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Meskipun fasilitas kesehatan tersedia di berbagai wilayah, namun belum semuanya memadai sesuai standar. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya kasus kekurangan gizi pada ibu hamil yang menyebabkan stunting pada anak. Stunting berdampak serius pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat menandakan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat, namun masih banyak tantangan seperti tingginya angka kesakitan dan kematian. Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kematian tertinggi secara global, terutama penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, paradigma pembangunan kesehatan perlu bergeser dari tindakan kuratif ke tindakan preventif dan promotif. Upaya ini harus disertai dengan pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan mutu layanan, serta ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan di seluruh wilayah.

6. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang Lainnya

Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan pendapatan riil per kapita, yang disertai dengan perbaikan dalam struktur sosial, perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat, serta penguatan sistem kelembagaan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak penting terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang sering menjadi pusat kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap layanan, kondisi geografis, gender, serta lingkungan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah. Untuk itu, pemerintah fokus pada empat kebijakan utama, yaitu memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; memperkuat perlindungan sosial; menangani masalah gizi buruk dan rawan pangan; serta memperluas peluang usaha.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai regulasi lainnya, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Layanan ini mencakup infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta layanan air bersih dan sanitasi yang merupakan bagian dari kebutuhan pokok warga. Berbagai kebijakan dan program infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan. Salah satu strategi penanggulangan

kemiskinan ekstrem adalah dengan meningkatkan akses masyarakat ke layanan dasar, seperti program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan sampah, program padat karya, serta program pengembangan kawasan bebas kumuh.

Infrastruktur jalan yang baik juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas yang baik antara wilayah dapat memacu aktivitas ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap pasar dan layanan penting lainnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana transportasi lainnya menjadi prioritas dalam mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, tantangan utama dalam pembangunan adalah mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan peningkatan konektivitas wilayah melalui pengembangan sistem transportasi yang mencakup jalur darat, laut, dan udara. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan sangat penting untuk memperkuat hubungan antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh provinsi.

7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif meliputi keterbukaan informasi publik, transparansi dalam setiap aktivitas pemerintahan, akuntabilitas atas hasil pembangunan, pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, serta koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan guna menyelaraskan langkah menuju visi bersama. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan aparatur pemerintahan yang profesional dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Akses terhadap

informasi dan saluran pengaduan masyarakat harus dibuat lebih terbuka dan mudah dijangkau. Pelayanan publik di berbagai sektor seperti perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kemudahan berusaha, serta hak-hak sipil lainnya harus terus ditingkatkan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, agar pelayanan menjadi lebih efisien dan ramah bagi masyarakat.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih (*good and clean governance*), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menerapkannya di seluruh tingkatan pemerintahan. Hal ini mencakup proses pembangunan yang akuntabel dimulai dari perencanaan yang partisipatif dan terukur, penyusunan anggaran, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas ini salah satunya adalah peningkatan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan target meraih nilai A. Target tersebut dapat dicapai apabila siklus manajemen kinerja dijalankan secara konsisten. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus terus dipertahankan. Untuk memperoleh WTP, pemerintah harus memenuhi kriteria seperti kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal yang efektif, pengungkapan informasi yang memadai, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh proses ini perlu ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong kinerja optimal serta mendukung sistem e-government.

Tata kelola pemerintahan yang efektif hanya akan terwujud jika ditopang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi. ASN harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkannya untuk mendukung kinerja individu maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas dan profesionalitas ASN menjadi hal yang sangat krusial, termasuk penempatan pegawai pada posisi yang

sesuai dengan kompetensinya untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Di samping itu, penataan struktur kelembagaan yang rapi dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan harus terus diperkuat. Koordinasi antarlembaga sangat penting dalam menyatukan pandangan dan tujuan melalui integrasi visi-misi masing-masing instansi guna menciptakan pemerintahan yang solid dan terarah. Koordinasi ini juga menyangkut upaya menjaga stabilitas dan keamanan wilayah dalam kerangka demokrasi yang damai dan tertib, serta memastikan penghormatan terhadap nilai sosial dan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya penanggulangan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan demikian, tercipta suasana yang harmonis, masyarakat merasa terlindungi hak-haknya, dan pembangunan di Sulawesi Tenggara dapat berjalan lancar serta mencapai sasaran yang ditetapkan

8. Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko dari bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Tujuannya mencakup identifikasi risiko, penyadaran publik, serta perencanaan dan penanganan bencana secara menyeluruh, mulai dari sebelum hingga sesudah kejadian.

Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong rawan terhadap berbagai bencana seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, abrasi, dan kecelakaan laut yang dipicu perubahan iklim dan peningkatan aktivitas pelayaran. Pandemi Covid-19 menjadi contoh bencana non-alam yang menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan dan perekonomian. Kerugian dari bencana bisa berupa korban jiwa, kerusakan fisik, kehilangan ekonomi, hingga gangguan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berkomitmen melakukan mitigasi dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi dasar kebijakan,

terutama dalam pelestarian lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. Tiga dari 17 tujuan SDGs berkaitan langsung dengan lingkungan: pengendalian perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut, dan darat.

Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air akibat degradasi lingkungan, konversi kawasan pesisir, dan eksploitasi air tanah. Daerah pesisir juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang menuntut penguatan kapasitas adaptasi masyarakat dan ketahanan sosial berbasis ekosistem laut. Masalah lain yang dihadapi mencakup pengelolaan hutan yang belum berkelanjutan, perambahan ilegal, maraknya pertambangan tanpa izin, serta minimnya pemanfaatan energi terbarukan akibat keterbatasan teknologi dan investasi. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masih rendah, tercermin dari perilaku buang sampah sembarangan, pembukaan lahan yang merusak, dan konsumsi energi yang tidak efisien. Frekuensi bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan terus meningkat karena perubahan iklim, minimnya konservasi di area rawan, keterbatasan SDM dan sarana-prasarana, serta kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan juga menjadi kendala. Oleh karena itu, perlu peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, manajemen kedaruratan, dan pemulihan pascabencana yang lebih cepat dan efektif

2.3.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Kolaka

Cita-cita jangka panjang merupakan kondisi Kabupaten Kolaka pada tahun 2045 yang perumusannya selaras dengan visi RPJPN dan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045, serta memperhatikan isu-isu strategis Kabupaten. Pembangunan jangka panjang Kabupaten Kolaka diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045. **“KOLAKA SEBAGAI KOTA PERJUANGAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”.**

Visi Kabupaten Kolaka 2025-2045 merupakan cita-cita bersama dan memiliki makna bahwa pada tahun 2045, Kabupaten Kolaka akan menjadi:

- **Kolaka Daerah Perjuangan** maknanya bahwa masyarakat senantiasa mempunyai jiwa dan semangat patriotisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Daerah Kolaka memiliki semangat atau spirit perjuangan dalam membangun yang didasari semangat heroik masyarakat Kolaka dalam peristiwa 19 November 1945 guna mempertahankan daerahnya dari keinginan penjajah kembali ke Wonua Sorume Bumi Mekongga.
- **Kolaka Maju** merupakan kondisi yang mencerminkan SDM, sosial budaya dan perekonomian yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. Masyarakat Kolaka berdaya dengan optimalisasi berbagai potensi daerah. Masyarakat memiliki modal sosial yang kuat dan berkebudayaan maju sehingga dapat adaptif dan tangguh dalam berbagai kondisi dinamis masa depan. Masyarakat yang adaptif dan daerah yang modern juga akan menempatkan inovasi sebagai budaya, baik pembudayaan inovasi dalam kebijakan, pelayanan publik dan kehidupan sosial. Perekonomian daerah yang semakin maju tetap berorientasi pada keadilan, sehingga proses dan manfaat

pembangunan ekonomi dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kondisi maju juga mencerminkan kinerja pembangunan di seluruh bidang yang semakin progresif dari periode ke periode.

- **Kolaka Sejahtera**, Masyarakat memiliki taraf hidup yang semakin baik. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup melalui akses pekerjaan yang layak, kewirausahaan dan keberdayaan. Sumber penghidupan masyarakat dapat semakin layak dan berkelanjutan. Kondisi sejahtera juga mencerminkan masyarakat yang hidup bahagia. Kebahagiaan tidak hanya ditopang dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus oleh kondisi sosial yang kondusif dan tenteram. Masyarakat tidak berada dalam tekanan hidup secara sosial maupun ekonomi.
- **Kolaka Berkelanjutan**, Kondisi berkelanjutan tercapai ketika terdapat keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemudian tidak menciptakan kesenjangan dan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup yang terjaga. Kondisi berkelanjutan didukung dengan tata kelola berkualitas dan menciptakan ruang kolaborasi. Tata kelola tidak hanya terkait perbaikan kualitas birokrasi, melainkan juga partisipasi bermakna bagi berbagai pemangku kepentingan dan pengelolaan berbagai sektor strategis di Kolaka, termasuk tata kelola tambang berkelanjutan.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 melalui Misi. Misi RPJPD menggambarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi RPJPD Kabupaten Kolaka ditetapkan dengan mempertimbangkan isu strategis kota, RTRW kota, RPJPN 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045.

Empat misi memiliki keterkaitan yang erat dan dalam perwujudannya membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan non pemerintahan. Misi RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi inklusif dijalankan dengan memperhatikan tiga pilar ekonomi inklusif, yaitu 1) pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dan 3) perluasan akses dan kesempatan. Pilar pertama diukur dengan beberapa indikator makro, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) dan PDRB per kapita. Pilar kedua diukur dengan berbagai indikator makro, seperti tingkat kemiskinan dan indeks gini. Pilar ketiga umumnya diukur dengan indikator seperti tingkat pengangguran terbuka dan beberapa indikator lain yang kontekstual.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Kolaka juga harus memperhatikan dimensi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus pada pencapaian indikator makro yang umumnya digunakan, namun pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia, lingkungan dan dukungan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan. Perhatian yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia umumnya diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Perhatian pada aspek lingkungan di sektor ekonomi diukur menggunakan indikator indeks ekonomi hijau dan berbagai indikator lainnya. Upaya transformasi ekonomi Kabupaten Kolaka sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kabupaten Kolaka satu sisi harus mengelola manfaat keberadaan sumber daya alam/pertambangan dan industri olahannya, serta di sisi lain

perlu penguatan berbagai sektor unggulan dan potensial lainnya agar tidak terjebak pada ketergantungan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Agenda transformasi ekonomi ini sangat didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan. Infrastruktur dalam hal ini termasuk akselerasi akses digital sehingga masyarakat, dunia usaha dan pemerintah semakin adaptif di tengah transformasi digital.

2. Misi 2: Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi ini memiliki agenda untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua pelayanan dasar tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Agenda pembangunan mendasar lain di dalam Misi 2, yaitu perlindungan sosial adaptif. Perlindungan sosial ini dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perlindungan bagi masyarakat rentan. Proyeksi masa depan yang dinamis, maka kerentanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, selain guncangan ekonomi, juga dari perubahan iklim yang dapat berdampak antara lain pada sektor pertanian. Perlindungan sosial adaptif oleh karena itu, diharapkan mampu mengelola kebijakan pemerintah agar lebih sensitif dan responsif terhadap berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi masyarakat.

Pembangunan SDM dan masyarakat yang komprehensif didukung dengan pembangunan yang setara gender, masyarakat inklusif, berkebudayaan maju dan keluarga yang berkualitas. Proses dan manfaat pembangunan membuka akses yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender membuka perwujudan masyarakat inklusif, yang disertai dengan penguatan peran dan manfaat pembangunan bagi masyarakat rentan dan penguatan harmoni sosial. Harmoni sosial merupakan isu penting yang semakin diperkuat, karena untuk mengelola keterbukaan Kolaka sebagai daerah industri. Masyarakat yang adaptif, harmonis, dan inovatif dilandasi dengan kebudayaan maju

dengan tetap memperkuat budaya lokal dan pengamalan nilai agama dalam kehidupan. Ketahanan suatu daerah ditopang ketahanan pada entitas kecil masyarakat. Dalam hal ini diperkuat dengan menjadikan desa sebagai basis ketahanan dan kesejahteraan, serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

Pembangunan SDM dan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera didukung oleh ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas. Agenda pembangunan dalam hal ini berupa pemerataan infrastruktur pendidikan, kesehatan serta pemukiman layak huni dan tangguh bencana. Prasarana, sarana dan utilitas wilayah semakin inklusif dan inovatif untuk mendukung perwujudan Kolaka yang layak huni berkelanjutan.

3. Misi 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Perwujudan pembangunan yang semakin maju dan sejahtera harus disertai dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Mengingat pula, kondisi eksisting Kolaka yang menjadi wilayah industri dan pertambangan, maka perlu identifikasi risiko lingkungan yang mendalam, sehingga gerak pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan serta risiko dampak lingkungan dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, yang ditopang sinergi antara kebijakan dan pelayanan publik dengan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. Agenda ini dimulai dari peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta peningkatan daya dukung lingkungan melalui reforestasi dan normalisasi aliran sungai. Sampah terkelola dari hulu ke hilir, berbasis masyarakat yang didukung sarana prasarana modern. Tingginya aktivitas pertambangan harus disertai pemulihan lingkungan di area pertambangan. Pada tahap akhir peningkatan kualitas lingkungan

hidup diwujudkan melalui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan.

4. Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Adaptif

Perwujudan transformasi tata kelola pada RPJPN. Tata kelola tidak hanya pada peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan birokrasi, sekaligus peningkatan partisipasi bermakna dan ruang kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lain. Tata kelola juga harus adaptif dalam merespons berbagai kebutuhan dan kondisi yang dinamis. Tata kelola mampu adaptif dalam berbagai situasi, baik normal maupun tidak normal karena terdapat guncangan dan perubahan.

Aspek peningkatan kualitas internal birokrasi memiliki agenda pada peningkatan kapasitas, kinerja, integritas birokrasi yang ditopang kelembagaan efektif dan efisien dengan sistem kerja yang dinamis. Birokrasi semakin kolaboratif dalam mengelola pembangunan yang bersifat cross-cutting. Birokrasi memiliki kinerja tinggi yang berbasis pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dan sistem merit. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan semakin memberikan dampak nyata pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi yang memberi dampak nyata, ditopang oleh kebijakan publik yang efektif, sesuai kebutuhan, dan berbasis bukti, serta digitalisasi pelayanan publik yang tetap menjamin inklusivitas.

Penguatan partisipasi publik yang bermakna dan sinergi dunia usaha dalam pembangunan juga menjadi prioritas dalam transformasi tata kelola. Ruang partisipasi masyarakat tidak sekedar formalitas, melainkan ruang partisipasi bermakna yang mampu mengawal kebijakan dan proses pembangunan sehingga dapat membawa manfaat pada kesejahteraan. Sumber kesejahteraan tidak hanya berasal dari pemerintah, pada konteks Kolaka, dunia usaha memiliki peran penting namun dengan

prasyarat adanya fasilitasi kebijakan yang baik dari pemerintah daerah. Tata kelola dampak tambang yang berkelanjutan oleh karena itu membutuhkan ruang kolaborasi. Peningkatan kualitas tata kelola desa juga menjadi penopang transformasi tata kelola dan perwujudan desa sebagai sumber ketahanan dan kesejahteraan.

Peningkatan kualitas tata kelola desa melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan proses pembangunan desa yang inklusif dan inovatif, serta peningkatan kolaborasi desa melalui penguatan pembangunan kawasan pedesaan.

2.3.2.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2042. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana penataan ruang wilayah bertujuan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah.

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kolaka yang berbasis pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan, serasi dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat..

Selanjutnya, dalam RTRW Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2042 ditetapkan kebijakan dan strategi tata ruang.

1. Kebijakan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup;
- b. pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman penduduk yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan kegiatan perkebunan yang disertai dengan pengembangan kegiatan industri perkebunan yang inovatif dalam rangka memberi nilai tambah bagi perekonomian wilayah;
- d. peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan berkelanjutan;
- e. pengembangan dan peningkatan kegiatan pertambangan beserta kegiatan pendukungnya yang berwawasan lingkungan berkelanjutan untuk menunjang pengembangan sektor unggulan lainnya;
- f. pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas sebagai pemicu perkembangan wilayah yang merata di seluruh kabupaten;
- g. pengembangan dan peningkatan pusat ekonomi sebagai sentra pertumbuhan wilayah;
- h. pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara;
- i. pengembangan mutu dan jangkauan pelayanan untuk sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air dan sistem pengelola lingkungan;
- j. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung;
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- l. pengembangan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

2. Strategi Penataan Ruang :

- (1) Strategi pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup:
 - a. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. melestarikan dan mengelola kawasan berfungsi lindung untuk fungsi ekologis, biologis, penelitian dan pariwisata terbatas;
 - c. menetapkan tata batas yang tegas untuk kawasan berfungsi lindung termasuk kawasan konservasi;
 - d. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - e. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak secara bertahap untuk dapat memelihara keseimbangan lingkungan; dan
 - f. melakukan pengawasan perubahan kawasan hutan memperhatikan risiko bencana yang ada.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan:
 - a. mengembangkan potensi lingkungan hunian yang telah ada secara efisien;
 - b. meningkatkan pelayanan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang telah ada;
 - c. meningkatkan keterpaduan prasarana utilitas;
 - d. mengendalikan perkembangan kawasan kumuh;
 - e. mencegah perkembangan lingkungan yang tidak teratur;
 - f. melestarikan alam dan sumber daya alam;
 - g. mengembangkan lokasi pembangunan baru kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;

- h. mengembangkan prasarana dan utilitas pada lokasi pembangunan baru kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - i. mengembangkan pelayanan pemerintahan, ekonomi dan sosial;
 - j. membangun kembali melalui rehabilitasi, rekonstruksi dan peremajaan; dan
 - k. memenuhi target kebutuhan RTH seluas 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen, dan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (3) Strategi peningkatan kegiatan perkebunan yang disertai dengan pengembangan kegiatan industri perkebunan yang inovatif dalam rangka memberi nilai tambah bagi perekonomian wilayah:
- a. menetapkan kawasan perkebunan kakao sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokal yang perlu dilindungi;
 - b. menetapkan tata batas kawasan perkebunan kakao yang dijadikan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokal;
 - c. meningkatkan produksi lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan perkebunan;
 - d. mendorong pengembangan kegiatan agroindustri perkebunan kakao yang ramah lingkungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan usaha perkebunan.
- (4) Strategi peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan berkelanjutan:
- a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka menuju ketahanan pangan daerah;

- b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, dan wisata bahari terpadu;
 - c. mengembangkan kawasan agropolitan dan produk unggulan perdesaan;
 - d. mengembangkan kawasan pesisir sebagai kawasan pantai unggulan;
 - e. menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - f. mengembangkan pelabuhan perikanan yang disertai dengan industri pengolahan perikanan; dan
 - g. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan dan kawasan perikanan.
- (5) Strategi pengembangan dan peningkatan kegiatan pertambangan dan kegiatan pendukungnya yang berwawasan lingkungan berkelanjutan untuk menunjang pengembangan sektor unggulan lainnya:
- a. mengembangkan pusat kegiatan industri pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan industri pertambangan dan industri turunan dari kegiatan pertambangan;
 - c. mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan untuk mendukung industri pertambangan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana industri pertambangan; dan
 - e. pengelolaan pertambangan dengan memperhatikan aspek resiko bencana.
- (6) Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas sebagai pemicu perkembangan wilayah yang merata di seluruh kabupaten:
- a. mengembangkan sistem transportasi multimoda;
 - b. mengembangkan pintu-pintu gerbang wilayah dari arah darat, laut, dan udara untuk mendukung perkembangan sektor unggulan wilayah;

- c. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan antar pusat kawasan di pulau;
 - d. mengembangkan pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut;
 - e. mengembangkan bandar udara untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara;
 - f. mengembangkan sistem pelayanan transportasi untuk memudahkan angkutan penumpang dan barang;
 - g. mengembangkan sistem energi listrik untuk mendukung pengembangan wilayah, baik menggunakan energi baru terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - h. mengembangkan sistem telekomunikasi yang handal untuk meningkatkan pengembangan wilayah;
 - i. mengembangkan sistem sumber daya air dengan memperhatikan aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan
 - j. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan untuk memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat.
- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan pusat-pusat ekonomi sebagai sentra pertumbuhan wilayah kabupaten:
- a. mempertahankan dan meningkatkan pusat ekonomi yang telah berkembang;
 - b. mengembangkan pusat ekonomi yang merata dan berjenjang sesuai dengan skala pelayanannya;
 - c. mengembangkan pusat ekonomi sesuai dengan karakteristik wilayah untuk terciptanya pusat agropolitan; dan
 - d. meningkatkan keterkaitan antar sistem pusat ekonomi.
- (8) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara:
- a. mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;

- b. mengembangkan jalan arteri, kolektor dan lokal sebagai penghubung antar wilayah;
 - c. mengoptimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya;
 - d. mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan; dan
 - e. mengendalikan kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan.
- (9) Strategi pengembangan mutu dan jangkauan pelayanan untuk sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem pengelola lingkungan:
- a. menambah dan memperbaiki sistem jaringan;
 - b. memperluas jangkauan listrik sampai ke pelosok desa;
 - c. menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern;
 - d. membangun teknologi telekomunikasi pada wilayah pusat pertumbuhan;
 - e. melindungi sumber mata air dan daerah resapan air;
 - f. mengembangkan jaringan drainase sesuai dengan jangkauan dan tingkat pelayanannya;
 - g. memanfaatkan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang ada;
 - h. meningkatkan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
 - i. pengelolaan sampah berkelanjutan;
 - j. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya; dan
 - k. membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah domestik terpusat.
- (10) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung:
- a. melarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung;

- b. mengembalikan fungsi pada kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 - c. memberikan ketentuan yang berlaku terhadap kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - d. mencegah perkembangan dan mengembalikan fungsi sebagai kawasan secara bertahap terhadap kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi lindung berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - e. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
 - f. menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara efektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.
- (12) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan:
- a. mengembangkan objek wisata alam, sejarah dan budaya serta buatan;

- b. mengembangkan objek wisata mangrove di sebagian wilayah pesisir pantai;
- c. memelihara, menjaga dan mengembangkan situs peninggalan sejarah dan budaya; dan
- d. meningkatkan prasarana dan sarana wisata yang ada di masing- masing objek wisata.

3. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten meliputi :

1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Kolaka;
 - b. kawasan perkotaan Pomalaa;
 - c. kawasan Industri Perikanan Mangolo Kecamatan Latambaga;
 - d. kawasan peternakan Watubangga di Kecamatan Watubangga;
 - e. kawasan strategis minapolitan di Kecamatan Kolaka, dan Kecamatan Wundulako;
 - f. kawasan strategis minapolitan Latambaga-Samaturu di Kecamatan Latambaga dan Kecamatan Samaturu;
 - g. kawasan agro industri kelapa sawit di Kecamatan Polinggona, dan Kecamatan Tanggetada; dan
 - h. kawasan pertambangan Wolo di Kecamatan Wolo
2. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - a. kawasan strategis konservasi sumber daya alam Pulau Padamarang di Kecamatan Wundulako; dan
 - b. kawasan strategis perlindungan hutan mangrove pantai Kolaka – Dawi- Dawi di Kecamatan Wundulako.

Selanjutnya, peta wilayah Kabupaten Kolaka disertai dengan peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang disajikan pada Gambar 2.63. dan 2.64.

2.3.2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kolaka

Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan didasarkan pada analisis sintesa antara isu TPB prioritas dengan isu perencanaan strategis lainnya antara lain isu hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kolaka 2005-2025, isu kondisi lingkungan hidup, isu strategis RTRW Kabupaten Kolaka, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten Kolaka serta isu dari pemangku kepentingan melalui Konsultasi publik ke-1 KLHS RPJMD.

Kebijakan *Folu Net Sink* yang masuk dalam pertimbangan adalah tentang perdagangan karbon, sedangkan arahan pembangunan wilayah untuk pembangunan wilayah Sulawesi yang terkait dengan Kabupaten Kolaka adalah mendukung pangan nasional, sedangkan arahan Sulawesi Tenggara. Pembangunan wilayah Sulawesi tidak terlepas dari posisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki. Posisi pulau Sulawesi yang terletak di antara ALKI II dan ALKI III berpotensi mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai *hub* dan pintu gerbang internasional KTI. Adapun komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung pengembangan wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala dan rempah), Perikanan tangkap (tuna, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga dan emas-perak), mineral aspal serta pariwisata. Potensi nikel dan tembaga di wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi EBT, serta potensi ekspor yang menjanjikan. Upaya pemanfaatan potensi sudah dilaksanakan, namun manfaatnya belum terwujud secara optimal. Khusus di Sulawesi Tenggara hal tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan utama yaitu infrastruktur, tata kelola (regulasi dan institusi), ekonomi makro dan fiskal, daya saing dan SDM.

Memperhatikan arahan Ekoregion Sulawesi yaitu: mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung,

khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama daerah pegunungan di pulau Sulawesi bagian tengah dan penyimpan air terutama di daerah karts dan danau; mempertahankan dan meningkatkan kondisi terumbu karang terutama pada wilayah kawasan konservasi laut; membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti karst, kawasan pesisir dan danau; memulihkan, mempertahankan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi serta wilayah di sekitar kawasan konservasi; meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan; menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan; memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3; mencegah pembuangan limbah di laut dan mengelola dampaknya serta memulihkan kualitas teluk; memulihkan ekosistem mangrove terutama di selatan pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil Sulawesi dan melindungi kelestarian flora dan fauna endemik.

Selanjutnya isu dari rentang Gap TPB, isu kajian 6 muatan dan isu KRP lain disintesis dengan isu-isu dari perencanaan strategis lain dan isu pemangku kepentingan serta isu *Folu Net Sink*, PSN dan arahan pembangunan wilayah Sulawesi dan Sulawesi Tenggara, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Pembangunan Berkelanjutan KLHS-RPJPD Kabupaten Kolaka 2025-2045, dan menjadi isu strategis dalam KLHS RPJMD 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Infrastruktur yang belum optimal
3. Transformasi tata kelola
4. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi
5. Transformasi ekonomi.

2.3.2.7 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Kolaka

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis dapat berupa masalah, potensi, maupun isu sesuai konteks. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, capaian kinerja pemerintah, laporan KLHS RPJMD 2025-2029, maupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Secara teknis, perumusan isu strategis daerah mempertimbangkan beberapa hal berikut diantaranya: potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat, permasalahan pembangunan daerah, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2. 41 Perumusan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Kolaka
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Masyarakat Kolaka, yang mayoritas berasal dari Suku Tolaki, memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti upacara adat, tarian tradisional, serta kuliner khas daerah 2. Kabupaten Kolaka, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki potensi ekonomi yang besar 3. Kabupaten Kolaka termasuk dalam Kawasan Pertumbuhan berupa Kawasan Industri	1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan 3. Perluasan akses dan kesempatan 4. Belum optimalnya kualitas jaringan jalan 5. Pemenuhan air bersih yang perlu ditingkatkan 6. Infrastruktur persampahan dan limbah yang belum memadai 7. Keterbatasan infrastruktur TIK 8. Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan masih belum optimal 9. Belum optimalnya budaya literasi masyarakat 10. Belum optimalnya peningkatan	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Infrastruktur yang belum optimal 3. Transformasi tata kelola 4. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi 5. Transformasi ekonomi	Megatren Global 2045: 1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Pertumbuhan kelas menengah 3. Persaingan sumber daya alam 4. Perubahan iklim 5. Tata kelola keuangan global 6. Luar angkasa 7. Urbanisasi dunia 8. Konstelasi perdagangan global 9. Perkembangan teknologi Demografi global	Tantangan pembangunan RPJMN: 1. Rendahnya produktivitas 2. Rendahnya kualitas SDM 3. Pergeseran struktur kelas masyarakat 4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif 5. Krisis lingkungan 6. Geopolitik dan geoekonomi 7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Isu strategis RPJMD Sulawesi Tenggara: 1. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif 2. Penurunan angka kemiskinan 3. Ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah 4. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja 5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 6. Optimalisasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang lainnya 7. Tata kelola pemerintahan	1. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 2. Pengelolaan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sektor pertambangan 3. Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman 4. Hilirisasi Sektor Pertanian serta Pengembangan Sektor Jasa dan Pariwisata 5. Penguatan SDM yang Berdaya Saing 6. Peningkatan Perlindungan Sosial yang

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Kolaka
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pengolahan Hasil Tambang dan Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap 4. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Anawua Kabupaten Kolaka	keluarga yang berkualitas 11. Belum optimalnya akses terhadap fasilitas kesehatan 12. Belum optimalnya akses terhadap fasilitas sosial yang inklusif 13. Keterbatasan infrastruktur TIK 14. Kualitas implementasi RB General dan Tematik belum optimal 15. Inklusifitas pelayanan publik belum optimal 16. Pengelolaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup belum optimal 17. Penurunan fungsi kawasan pesisir 18. Penurunan fungsi DAS 19. Pengelolaan sampah yang belum optimal				yang baik	Adaptif dan Inklusif 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 8. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Adaptif

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Kolaka
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	20. Belum optimalnya pelestarian warisan budaya daerah 21. Belum optimalnya ketahanan keluarga					

Penyusunan isu strategis Kabupaten Kolaka didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah serta persandingan antara antara isu strategis pada level internasional, nasional, dan regional, serta identifikasi isu strategis berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Rumusan isu strategis Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memperhatikan tiga pilar utama pembangunan, yaitu 1) pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2) pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dan 3) pilar perluasan akses dan kesempatan. Ketiga pilar tersebut saling menjadi penyangga bagi pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Kolaka.

Pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat dinilai menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat dinilai dengan menggunakan indikator makro ekonomi berupa indeks gini dan tingkat kemiskinan. Pilar perluasan akses dan kesempatan dapat dinilai menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka atau tingkat kesempatan kerja. Penguatan promosi investasi yang terfokus dan koordinasi lintas sektor dalam perizinan, mendorong masuknya investor, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas.

Pembangunan ekonomi inklusif juga harus memperhatikan dimensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi inklusif harus mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang mengutamakan aspek kolaboratif, responsif dan mampu beradaptasi dengan berbagai tuntutan pembangunan.

2. Pengelolaan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sektor pertambangan

Kabupaten Kolaka memiliki sektor ekonomi unggulan di bidang pertambangan. Sektor ini menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Pembangunan sektor pertambangan bukan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kolaka, namun pemanfaatan dampak ekonomi dari sektor pertambangan harus menjadi perhatian besar yang dikawal di dalam isu strategis jangka panjang dan menengah di Kabupaten Kolaka.

Pertambangan memiliki dampak bagi pengembangan ekonomi di sektor non- tambang. Dampak positif pengembangan sektor pertambangan dikenal dengan dampak berganda (multiplier effect). Dampak berganda dari sektor pertambangan kepada sektor non-tambang dapat terjadi jika linkages antara sektor tambang dan non-tambang. Berbagai kebutuhan pekerja di sektor pertambangan seperti makan- minum, wisata, perumahan, pendidikan dan kebutuhan lainnya dapat dipasok oleh sektor non-tambang. Produk-produk sektor non-tambang harus memiliki kapasitas produksi yang memadai, kualitas yang berdaya saing dan rantai pasok pemasaran yang terintegrasi. Pengembangan sektor pertambangan juga dapat menimbulkan dampak negatif, jika rantai pasok yang menghubungkan kebutuhan di sektor pertambangan dengan sektor non-tambang tidak terjaga dengan baik, maka fenomena kebocoran ekonomi akan terjadi. Potensi uang yang seharusnya beredar di dalam Kabupaten Kolaka dapat mengalir ke luar daerah karena banyaknya konsumsi barang dari luar Kabupaten Kolaka. Fenomena ini harus diantisipasi dan direspon menggunakan kebijakan ekonomi yang komprehensif.

Sektor pertambangan juga memiliki dampak bagi pembangunan di rumpun sumber daya manusia dan sosial. Pengembangan sektor pertambangan harus memiliki korelasi dengan kurikulum di dunia pendidikan. Upaya ini dijalankan agar masyarakat di Kabupaten Kolaka memiliki kompetensi di sektor pertambangan dan sektor pendukung

pembangunan pertambangan. Dampak pengembangan pertambangan juga dirasakan di sektor kesehatan. Penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan harus ditingkatkan karena banyaknya pekerja di sektor pertambangan yang diprediksi akan semakin bertambah di Kabupaten Kolaka pada masa yang akan datang.

Sektor pertambangan memiliki dampak bagi kualitas lingkungan hidup. Sektor pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran air, udara dan penurunan tutupan lahan. Kualitas air harus dijaga dari berbagai potensi pencemaran zat kimia yang digunakan di dalam pengolahan pertambangan. Kualitas udara harus dijaga dari berbagai macam potensi polusi kendaraan dan debu. Tutupan lahan juga harus dijaga karena semakin banyak pekerja di sektor pertambangan, maka potensi alih fungsi lahan menjadi lebih besar. Persampahan juga harus menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian yang besar jika pekerja sektor pertambangan semakin bertambah.

Berbagai dampak pengembangan sektor pertambangan tersebut harus dikelola dengan baik. Dampak positif harus dapat dimanfaatkan secara maksimal, sedangkan dampak negatif dari pengembangan sektor pertambangan harus ditekan dan dikurangi dengan pemetaan manajemen risiko yang baik. Kolaborasi multi-aktor, riset dan inovasi kebijakan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari pengembangan sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka yang diprediksi akan semakin meningkat secara progresif.

3. Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman

Berdasarkan hasil analisis *growth diagnostics* di dalam dokumen RPJPN 2025- 2045, infrastruktur masih menjadi faktor penghambat pembangunan di wilayah Sulawesi termasuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Kolaka yang masih

mengalami beberapa permasalahan infrastruktur baik infrastruktur pendukung konektivitas maupun infrastruktur dasar lainnya. Pemenuhan jalan dalam kondisi mantap masih belum optimal yang ditandai dengan 40 persen atau sekitar 351,61 km jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak. Di samping itu, transportasi perkotaan juga masih belum berkembang secara optimal. Akses jaringan internet juga belum merata, masih terdapat satu kecamatan yang belum terlayani jaringan internet yaitu Kecamatan Polinggona.

Akses layanan dasar air bersih masih berada pada angka 78,45 persen sedangkan akses terhadap sanitasi mencapai 86,13 persen pada tahun 2018. Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat hidup dengan layak. Di samping itu, akses terhadap rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman juga perlu mendapatkan perhatian. Pengelolaan sampah juga belum dikelola secara optimal dari hulu ke hilir, bahkan kapasitas TPA Patioso untuk menampung sampah sudah hampir penuh. Berbagai permasalahan tersebut perlu direspon dengan baik untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kolaka selama dua puluh tahun mendatang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Hilirisasi Sektor Pertanian serta Pengembangan Sektor Jasa dan Pariwisata

Sektor pertanian merupakan sektor primer yang cenderung memiliki nilai tambah rendah. Padahal, sektor pertanian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dalam 20 tahun mendatang jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka diproyeksikan bertambah, sehingga kebutuhan pangan yang bersumber dari pertanian juga akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian misalnya melalui hilirisasi pertanian yang merupakan proses pengelolaan hasil pertanian melalui industri yang disebut agroindustri.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total PDRB Kabupaten Kolaka dengan rata-rata kontribusi tiap tahun hampir mencapai 15 persen selama tahun 2010-2022. Sektor ini mengalami tren pertumbuhan fluktuatif cenderung naik pada tahun 2010-2022 dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 2,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki potensi untuk menjadi sektor penopang perekonomian Kabupaten Kolaka. Pengembangan pada sektor pertanian perlu untuk terus didorong agar perekonomian di Kabupaten Kolaka tidak hanya bertumpu kepada sektor pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, hilirisasi pertanian perlu segera dirintis dan dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan hilirisasi pertanian di Kabupaten Kolaka. Pertama, dukungan investasi dalam bentuk pemberian modal dalam negeri (PMDN) dan modal asing (PMA) yang ditujukan untuk pengembangan industri dan kegiatan hilir, memfasilitasi pengembangan UMKM, BUMDes, dan atau koperasi. Kedua, peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian. Ketiga, perluasan akses terhadap bantuan Kredit Usaha Rakyat atau pinjaman serupa lainnya. Keempat, regulasi yang melindungi para petani lokal dan menjaga stabilitas harga jual produk pertanian. Kelima, pengembangan komoditas pertanian unggulan. Hilirisasi pertanian diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di Kabupaten Kolaka.

Selain menggarap hilirisasi pertanian, Kabupaten Kolaka juga perlu mengoptimalkan pengembangan pariwisata. Beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Kolaka yang dapat dikembangkan yaitu Desa Wisata Sani-Sani, Desa Wisata Malaha, Sungai Tamborasi, dan Pulau Padamarang. Berdasarkan data Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf RI, terdapat 12 Desa Wisata di Kabupaten Kolaka, yang

Desa Wisata Sani-Sani termasuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar lokasi wisata.

Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Kolaka di antaranya yaitu peningkatan akses menuju ke lokasi wisata, peningkatan kualitas dan jumlah penginapan di lokasi wisata, peningkatan promosi wisata, inisiasi ekonomi kreatif/UMKM/IKM untuk peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi wisata, peningkatan kapasitas para pelaku wisata, optimalisasi peran kelompok sadar wisata (pokdarwis), peningkatan promosi pariwisata, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan komunitas (pokdarwis).

Pengembangan sektor jasa juga perlu menjadi perhatian mengingat sektor ini memiliki potensi menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Kolaka selama kurun waktu 20 tahun mendatang. Sektor jasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa upaya untuk mengembangkan sektor jasa di antaranya optimalisasi diversifikasi layanan jasa, pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional, optimalisasi penerapan inovasi layanan jasa, peningkatan investasi dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM di sektor jasa, optimalisasi kemitraan dengan pemangku kebijakan, pemasok, dan mitra potensial untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan jasa.

5. Penguatan SDM yang Berdaya Saing

Isu strategis penguatan SDM yang berdaya saing didasarkan pada nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kolaka yang relatif tinggi yakni 73,98. Capaian tersebut menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kota Kendari dan Kota Baubau. Namun demikian, jika dilihat dari capaian dimensi pengetahuan dan kesehatan, Kabupaten Kolaka masih sedikit tertinggal dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara.

Komponen terbesar IPM Kabupaten Kolaka disumbang oleh pengeluaran perkapita sebesar 12,639 juta rupiah, sedangkan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 9,708 juta rupiah.

Peningkatan daya saing SDM dipengaruhi oleh capaian pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, Kabupaten Kolaka memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) 9,06 atau setara kelas 3 SMP dan harapan lama sekolah (HLS) 13,02 atau setara tahun pertama pada perguruan tinggi. Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan perguruan tinggi menyebabkan kualitas SDM Kabupaten Kolaka menjadi kurang optimal. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan masih mengalami kendala yakni ketersediaan fasilitas pendidikan yang masih kurang, jumlah guru dan tenaga pendidikan yang belum optimal, serta perlunya integrasi kemampuan interpersonal, analitis, dan digital pada kurikulum pendidikan. Pada aspek kesehatan, capaian angka harapan hidup Kabupaten Kolaka cukup baik yakni 71,37. Namun dilihat dari capaian kesehatan yang lain seperti Angka Kematian Ibu (AKI) tergolong cukup tinggi yakni 222 per 100.000 kelahiran hidup (KH).

Selain itu, capaian SPM Kesehatan seperti pelayanan kesehatan kepada balita, usia sekolah, usia produktif dan lansia masih perlu ditingkatkan. Upaya promotif dan preventif terhadap penyakit menular dan tidak menular masih belum optimal. Sebaran tenaga kesehatan masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan, serta belum semua fasilitas kesehatan mendapatkan akreditasi paripurna. Dengan demikian, masih banyaknya persoalan pada pelayanan kesehatan maupun pendidikan menunjukkan bahwa upaya penguatan daya saing SDM di Kabupaten Kolaka perlu ditingkatkan pada periode pembangunan mendatang.

6. Peningkatan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

Perlindungan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata melalui upaya penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar terutama pada masyarakat rentan. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk

merespons efek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam melalui sistem perlindungan sosial adaptif. Secara umum, upaya perlindungan sosial di Kabupaten Kolaka masih mengalami kendala di antaranya belum optimalnya penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang masih di bawah 60% selama periode 2016-2020. Beberapa jenis PPKS di antaranya fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyalahgunaan NAPZA, korban kekerasan, korban bencana, dan sebagainya. Selain itu, tingkat kepesertaan jaminan ketenagakerjaan juga masih perlu menjadi perhatian, mengingat setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan sosial, termasuk jaminan ketenagakerjaan.

Selama periode 2016-2020, kemiskinan di Kabupaten Kolaka cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 10,09%. Selain melalui bantuan sosial yang diberikan, upaya penurunan kemiskinan juga dilakukan melalui upaya pemberdayaan di antaranya meningkatkan keberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Upaya tersebut masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, masih minimnya partisipasi perempuan pada ranah publik, fasilitas publik ramah difabel yang masih kurang, serta upaya perlindungan terhadap lansia yang perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan kondusivitas wilayah, beberapa masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Kolaka perlu ditekan. Salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian yakni adanya peredaran narkoba. Selain itu, perlu adanya upaya antisipasi terkait dampak negatif dari lonjakan pekerja tambang dari luar. Arus migrasi yang tinggi bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih besar jika tidak diantisipasi dan dilakukan penanganan yang komprehensif.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang perekonomiannya bergerak pada sektor pertambangan nikel. Selain memajukan perekonomian daerah, kegiatan pertambangan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup di

Kabupaten Kolaka. Pembukaan lahan tambang mengakibatkan alih fungsi lahan bervegetasi menjadi non-vegetasi yang berdampak terhadap penurunan kualitas tutupan lahan yang ditunjukkan dari nilai IKTL yang terus menurun sejak tahun 2019 hingga 2021. Limpasan permukaan bercampur sedimen lumpur tambang mengalir langsung ke sungai dan mencemarinya, sehingga berpotensi menurunkan kualitas air permukaan. Luapan air sungai bercampur sedimen lumpur mencemari lahan pertanian masyarakat dan mengancam keberlangsungan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Kolaka. Lebih lanjut, limbah lumpur tambang mengancam keberlanjutan ekosistem kawasan pesisir, lumpur yang terbawa aliran sungai terendapkan di perairan dangkal pesisir yang menyebabkan air menjadi keruh dan tercemar serta berimbas pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan intensitasnya akan semakin meningkat dan diperparah dari adanya dampak perubahan iklim. Sebagai wilayah bertipologi pesisir, dampak perubahan iklim akan sangat terasa dan mempercepat laju penurunan kualitas lingkungan hidup karena faktor variabilitas iklim yang merubah komponen lingkungan secara keseluruhan. Hal ini tentunya perlu direspon dengan cara mempersiapkan skenario mitigasi dan adaptasi melalui regulasi maupun kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Di samping dampak lingkungan oleh tambang dan perubahan iklim, Kabupaten Kolaka juga masih memiliki tantangan dalam pengelolaan sampah. Kendala pengelolaan persampahan di Kabupaten Kolaka adalah infrastruktur dan fasilitas persampahan yang belum memadai serta TPS3R yang belum optimal menangani timbunan sampah. Perilaku masyarakat yang masih menjalankan praktek membuang sampah sembarangan memperburuk kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Kolaka. Pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan adalah langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka. Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran bersama menjaga kualitas lingkungan hidup.

8. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Adaptif

Tata kelola yang akuntabel menjadi fondasi yang kuat dalam berfungsinya roda pemerintahan di Kabupaten Kolaka. Tata kelola pemerintahan perlu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas dan berbasis pada pemanfaatan teknologi digital. Secara umum, tren lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Kolaka memiliki modal yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, dan adaptif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian opini BPK yang selalu berpredikat “Wajar Tanpa Pengecualian” sejak tahun 2018 hingga 2024, nilai SAKIP sebesar 62,10 dengan predikat B, Indeks Kepuasan Masyarakat yang selalu baik selama tiga tahun terakhir dengan capaian tahun 2024 sebesar 86,60 dengan predikat baik.

Keseluruhan capaian yang baik pada aspek tata kelola pemerintahan ini tentu akan menjadi modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kolaka. Pemerintah sebagai leading sector dalam pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila juga turut memberikan ruang partisipasi pada seluruh kelompok masyarakat sipil dan juga swasta dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan hasil telaah RPJPN 2025-2045, pemerintah wajib membuka ruang partisipasi sebesar- besarnya kepada masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi pada proses perencanaan pembangunan daerah. Tidak hanya itu, negara melalui pemerintah daerah juga wajib untuk memperkuat kapasitas dan peran masyarakat sipil agar dapat menyampaikan aspirasi dan gagasan dalam berbagai forum partisipasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Penguatan partisipasi seluruh stakeholder dan penguatan seluruh aspek tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kolaka menjadi sangat penting guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang kolaboratif dan adaptif.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi dan misi dalam RPJMD memberikan arahan makro dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka selama lima tahun ke depan. Secara lebih operasional, penerjemahan visi dan misi akan diturunkan dalam bentuk tujuan dan sasaran bahkan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun.

3.1.1 Visi Daerah

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan dan diwujudkan pada akhir periode sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Berikut ini merupakan visi Kabupaten Kolaka beserta penjelasan masing-masing kata kunci visi.

“Terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Berkeadilan, Maju dan Unggul”

BERKEADILAN - mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan inklusivitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian yang layak, serta peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi, dapat semakin meningkat. Selain itu, kata kunci BERKEADILAN juga menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya daerah. Kekayaan sumber daya Kabupaten Kolaka tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan juga dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Perumusan kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan bersama dan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui mekanisme tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, masyarakat memiliki peran yang aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

MAJU – kondisi ini menggambarkan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian yang kuat, modern, tangguh, serta inovatif. Masyarakat Kolaka memiliki modal sosial yang kokoh dan budaya yang berkembang, sehingga memiliki kemampuan beradaptasi dan ketangguhan dalam menghadapi dinamika masa depan. Perekonomian daerah semakin berkembang, namun tetap memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Kemajuan daerah juga tercermin dari peningkatan kinerja pembangunan di berbagai sektor yang semakin progresif dari waktu ke waktu. Dalam konteks pemerintahan, kemajuan tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi administrasi, tetapi juga pada pembentukan tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta semakin inovatif dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik. Proses ini didukung dengan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi semua pihak.

UNGGUL – Kemajuan yang dicapai diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Kolaka semakin unggul dalam berbagai aspek, termasuk

sosial, budaya, dan ekonomi. Keunggulan ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam daya saing daerah yang semakin kuat. Unggul juga berarti bahwa pemerintah daerah mampu mencapai standar tertinggi dalam efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang unggul tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan responsif. Dengan tata kelola yang profesional dan inovatif, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan.

3.1.2 Misi Daerah

Misi daerah didefinisikan sebagai rumusan umum yang berisi tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka selama lima tahun ke depan dikerangkai dalam lima rumusan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamis, dan berbudaya berbasis kearifan lokal
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 5) Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.1.2.1 Mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamis, dan berbudaya berbasis kearifan lokal

Misi mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamis, dan berbudaya berbasis kearifan lokal diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kolaka yang dapat hidup berdampingan secara damai,

saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta melestarikan budaya lokal sebagai bentuk identitas daerah.

Masyarakat yang harmonis tercermin dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan toleransi, kebersamaan dan gotong royong. Perbedaan suku dan agama tidak menjadi pemicu perpisahan dan konflik, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk memperkuat solidaritas sosial. Kehidupan masyarakat yang harmonis ini menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan yang semakin merata.

Penguatan nilai-nilai keagamaan menjadi landasan yang sangat penting dalam membentuk karakter individu dan membangun kehidupan sosial yang lebih bermoral dan beretika. Pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif harus terus ditanamkan agar masyarakat semakin terbuka dan saling menghormati. Penguatan nilai-nilai keagamaan ini juga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang semakin harmonis.

Pelestarian budaya berbasis kearifan lokal merupakan aspek fundamental dalam menjaga identitas dan warisan leluhur. Masyarakat Kolaka, yang mayoritas berasal dari Suku Tolaki, memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti upacara adat, tarian tradisional, serta kuliner khas daerah. Upaya pelestarian budaya lokal ini sangat penting untuk mempertahankan jati diri masyarakat serta mencegah tergerusnya nilai-nilai budaya akibat modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan terhadap seni tradisional, adat istiadat, dan bahasa daerah melalui pendidikan berbasis budaya, penyelenggaraan festival budaya, serta pemberdayaan komunitas seni dan budaya.

3.1.2.2 Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel

Misi “Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel” berfokus pada tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Integritas dalam tata kelola pemerintahan diartikan bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang berpihak

pada kepentingan publik. Hal ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi kebijakan serta efektivitas implementasinya. Tanpa integritas, upaya reformasi birokrasi akan kehilangan arah dan rentan terhadap penyimpangan.

Transparansi merupakan aspek krusial dalam memastikan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah yang transparan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Implementasi *e-government* dan keterbukaan data menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengawal kebijakan publik. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol publik terhadap pemerintahan tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong inovasi dalam pelayanan publik.

Akuntabilitas dalam misi ini diartikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan profesional. Akuntabilitas yang kuat menuntut adanya sistem evaluasi dan mekanisme umpan balik yang efektif, baik secara internal melalui pengawasan birokrasi/APIP maupun secara eksternal melalui peran aktif masyarakat sipil. Dengan membangun sistem pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, tidak hanya tata kelola pemerintahan yang menjadi semakin baik, tetapi juga optimalisasi kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3.1.2.3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

Kabupaten Kolaka, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan secara lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Misi ini dapat dicapai melalui dukungan kebijakan yang terarah untuk mengoptimalkan sumber daya alam, meningkatkan daya saing industri, serta memastikan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan

masyarakat. Dengan pendekatan berbasis keberlanjutan, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Salah satu langkah utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing adalah memperkuat sektor unggulan daerah non-pertambangan, seperti, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Diversifikasi ekonomi juga perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu serta menciptakan peluang usaha baru yang inovatif. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal akan memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan pendapatan daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain daya saing, inklusivitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Kolaka. Pemerataan akses terhadap peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, harus menjadi prioritas. Program pemberdayaan usaha mikro, akses permodalan yang lebih luas, serta pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga harus memperhatikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi bagian penting dalam kebijakan daerah. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam sektor industri, peningkatan efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang baik akan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Peran pemerintah daerah, khususnya yang membidangi penanaman modal dan perizinan, sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka. Dukungan tersebut menjadi faktor penting untuk mencapai target indikator ekonomi makro secara berkelanjutan.

Keberhasilan misi ini memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. Kolaborasi yang kuat akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Kolaka dapat menjadi pusat ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam pembangunan yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

3.1.2.4 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Misi ini memiliki fokus pada upaya pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan SDM yang unggul merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di suatu daerah. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai langkah strategis perlu dilakukan, diantaranya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan kapasitas inovasi dan teknologi. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan yang inklusif juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan adanya SDM yang kompetitif, Kabupaten Kolaka dapat bersaing secara lebih efektif di tingkat regional maupun nasional.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi dan wirausaha juga menjadi aspek krusial dalam meningkatkan daya saing SDM. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk bisa memfasilitasi masyarakat pada aspek pendidikan vokasional, inkubasi bisnis, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan juga menjadi bagian penting untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar. Beberapa upaya tersebut

diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan luas dan sehat, tetapi juga memiliki keterampilan dan mentalitas yang siap bersaing di era globalisasi.

3.1.2.5 Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur wilayah memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan bagi ekonomi masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar mulai dari jalan, jembatan, sumber daya air, hingga perumahan sehat dan layak huni menjadi isu penting yang menunjang kegiatan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan kegiatan lainnya.

Pembangunan infrastruktur wilayah telah menjadi salah satu fondasi untuk menopang pembangunan pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kolaka. Misi mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan diterjemahkan melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, dan penataan kawasan perkotaan. Dimensi berkeadilan diwujudkan melalui penyediaan kebutuhan layanan infrastruktur kepada seluruh masyarakat dan terhubungnya konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kolaka, serta adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Dimensi berkelanjutan diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, menserasikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

Upaya mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan dilakukan melalui percepatan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah dan permukiman, peningkatan jaringan irigasi, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, peningkatan sarana dan prasarana

pengolahan sampah, penataan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau yang ramah anak, penataan kawasan perkotaan, dan mendorong legalisasi pengelolaan tambang galian C sebagai upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Daerah

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kolaka diterjemahkan dalam tujuan yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Masing-masing tujuan memiliki sasaran yang dirumuskan untuk memberikan gambaran dalam pencapaian tujuan tersebut. Target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka diproyeksi menggunakan metode perhitungan akademik yang baik dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan berbagai isu kontemporer dan isu jangka panjang. Target indikator makro RPJMD Kabupaten Kolaka diharapkan mampu berkontribusi terhadap target indikator makro Provinsi Sulawesi Tenggara dalam porsi yang tepat. Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Berkeadilan, Maju dan Unggul									
Misi 1 Mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamis, dan berbudaya berbasis kearifan lokal	Meningkatnya keharmonisan sosial		Indeks Harmoni Kabupaten	6,90	7,00	7,25	7,50	7,75	8,0
		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,00	80,75	81,50	82,25	83,00	83,75
		Meningkatnya kualitas kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,00	54,10	55,20	56,30	57,40	58,50
Misi 2 Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	77,23	77,80	78,38	78,95	79,53	80,10
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai SAKIP	65,31	66,85	68,39	69,92	71,46	73,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,17	89,91	91,65	93,39	95,13	96,86	
		Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,58	3,65	3,73	3,80	3,88	
Misi 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya daya saing daerah berbasis ekonomi yang inklusif		Indeks daya saing daerah	3,50	3,58	3,65	3,73	3,80	3,88
		Meningkatnya inklusifitas ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	5,30	5,50	5,90	6,20	6,50	6,80
			PDRB per kapita (Rp Juta)	168,05	180,54	193,04	205,54	218,04	230,53
			Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	20,56	20,75	20,95	21,15	21,35	21,54

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	2,43	2,26	2,10	1,94	1,77	1,61
			Tingkat kemiskinan (%)	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,25
			Indeks ekonomi hijau	80,80	81,19	81,57	81,96	82,35	82,74
			Tingkat Inflasi	2 - 1	2 - 1	2 - 1	2 - 1	2 - 1	2 - 1
			Rasio gini	0,270	0,261	0,252	0,243	0,234	0,225
Misi 4 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	76,88	77,64	78,41	79,18	79,94	80,71
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,38	9,40	9,50	9,65	9,75	9,85
			Harapan lama sekolah (tahun)	13,04	13,05	13,15	13,30	13,35	13,40
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,80	73,93	74,05	74,18	74,30	74,43
			Prevalensi Stunting (%)	27,60	24,84	21,16	18,48	15,35	13,15
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	79,15	82,15	85,15	88,15	91,15	94,15
		Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan keluarga (iBangga)	63,00	64,2	65,4	66,6	67,8	69,00
Misi 5 Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Daerah	82,50	83,97	85,45	86,93	88,41	89,89
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	84,53	84,71	84,88	85,05	85,22	85,39
		Aksesibilitas infrastruktur	Rasio permukiman layak huni	95,14	95,26	95,37	95,49	95,61	95,72

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pendukung konektivitas dan permukiman semakin meningkat	Rasio Konektivitas	75	77	79	81	83	85
		Meningkatnya ketahanan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Emisi GRK	28,93%	32,13%	36,33%	38,52%	41,72%	44,92%
			Indeks Risiko bencana	143,66	140,66	137,66	134,66	131,66	128,66

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Sub bab ini menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Upaya tersebut dirancang untuk mencapai target dalam lima tahun ke depan melalui strategi serta kebijakan pembangunan daerah. Secara garis besar, sub bab ini mencakup tiga aspek utama, yaitu tahapan pembangunan RPJMD, strategi dan kebijakan arah pembangunan, serta program prioritas pembangunan daerah.

3.2.1 Strategi

3.2.1.1 Tahapan Pembangunan RPJMD

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah perlu dirumuskan dengan memerhatikan tahapan pembangunan di setiap tahunnya. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus dan prioritas yang berbeda untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada proyeksi kebutuhan daerah yang perlu mendapat intervensi setiap tahunnya. Adanya tahapan pembangunan, akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berikut merupakan tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kolaka selama periode 2025-2029.

Tabel 3. 2 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP IV 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Fondasi Pembangunan : Daya Saing SDM,	Kolaka Berkeadilan: Pembanguna n dan Kesejahteraa	Kolaka Maju: Akselerasi Pembanguna n dan	Kolaka Unggul: Sentra Hilirisasi Ekonomi	Perwujudan : Kolaka yang Berkeadilan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP IV 2030
1	2	3	4	5
Infrastruktur Berkualitas, dan Ekonomi Inklusif	n yang Semakin Merata Berbasis Pelayanan Dasar Berkualitas, Ekonomi Inklusif dan Tata Kelola yang Bersih	Kesejahteraan Berbasis SDM Berkualitas, Ekonomi Bernilai Tambah dan Tata Kelola Kolaboratif	Berkelanjutan yang Berbasis SDM Unggul dan Tata Kelola Inovatif	, Maju dan Unggul

3.2.1.2 Lokus Pembangunan Wilayah

Rumusan strategi dalam bentuk lokus pembangunan wilayah menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan intervensi pembangunan secara spasial. Berdasarkan arah pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2025-2029, Kabupaten Kolaka termasuk dalam Kawasan Pertumbuhan berupa Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang dan Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap. Berikut merupakan rincian *highlight* indikasi intervensi lokus pembangunan prioritas untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan Kabupaten Kolaka.

Tabel 3. 3 *Highlight* Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029 untuk Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang Berkaitan dengan Kabupaten Kolaka

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang - Kabupaten Konawe - Kabupaten Kolaka	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar), melalui: - Pengembangan Industri Stainless Steel, dengan output: hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri - Pengembangan Industri Nikel Sulfat, dengan output: Industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya - Pembangunan Industri Battery Precursor Berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt), dengan output:

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	Industri battery precursor berbasis NMC yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi ▪ Pengembangan Industri Katoda Berbasis Nikel, dengan output: industri katoda nikel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi ▪ Pengembangan Industri Battery Pack Berbasis NMC, dengan output: industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri ▪ Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan output: rekomendasi keprospektan sumber daya mineral ▪ Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional ▪ Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan output: kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel ▪ Peningkatan penerapan standardisasi di industri nikel, dengan output: standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk ▪ Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan output: fasilitasi pendampingan SMK yang link and match dengan Industri, pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling, serta asesor lisensi dan asesor kompetensi ▪ Ketersediaan bahan baku industri logam dasar yang berkualitas dan kompetitif, dengan output: neraca penyediaan dan permintaan besi baja, baja paduan, dan produk turunannya nasional ▪ Kepastian pasokan dan harga energi untuk industri logam dasar, dengan output: evaluasi pemanfaatan HGBT di industri logam dasar ▪ Peningkatan utilisasi kapasitas terpasang industri besi-baja, dengan output: industri logam dalam negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN ▪ Pengembangan Industri Special Steel, dengan output: Industri Special Steel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi ▪ Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) di Industri Logam Dasar, dengan output: Fasilitasi Investasi untuk Industri Pemotongan Scrap Logam

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	▪ Optimalisasi penerapan standardisasi di Industri Logam Dasar, dengan output: Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam ▪ Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan output: pembangunan jalan akses KI Konawe ▪ Pengembangan Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industrial Park dan Kawasan Industri Virtue Dragon Nickel Industry ▪ Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas
Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara: ▪ Kota Kendari ▪ Kota Bau Bau ▪ Kabupaten Buton ▪ Kabupaten Muna ▪ Kabupaten Bombana ▪ Kabupaten Kolaka ▪ Kabupaten Muna Barat	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna Barat, melalui: ▪ Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap, dengan output: alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan – Eco Fishing Port ▪ Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk Perikanan, dengan output: sarana penyimpanan produk kelautan perikanan; sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan; gudang beku dan kelengkapannya ▪ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, dengan output: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha, wirausaha kelautan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, UMKM kelautan perikanan yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis, pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah, eksportir kelautan perikanan baru yang ditumbuhkan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan, lembaga usaha kelautan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha ▪ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, dengan output: pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan,

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur ▪ Pengembangan klaster ikan nila salin, dengan output: ikan konsumsi air tawar hasil budidaya yang diproduksi, sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat, benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat ▪ Revitalisasi tambak udang, dengan output: klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, benih udang yang disalurkan ke masyarakat, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif, sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat
Pengembangan Kawasan Transmigrasi Anawua Kabupaten Kolaka	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Anawua Kabupaten Kolaka, melalui: ▪ Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman ▪ Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian ▪ Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi ▪ Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output: perpindahan dan penempatan transmigran
Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengembangan hilirisasi rumput laut, melalui: ▪ Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output: rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut – Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas, dan klaster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat ▪ Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan output: fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan (polisakarida), Agar,

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	Kosmetik, Biofuel, dan Bioplastik) dan pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut ▪ Peningkatan rantai nilai rumput laut, dengan output: memperkuat koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut dan pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut ▪ Peningkatan kapasitas tenaga kerja di Industri Rumput Laut, dengan output: pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan ▪ Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut, dengan output: insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan dan penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut
Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui: ▪ Penguatan rantai pasok industri di dalam negeri (termasuk IKM), dengan output: hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri Electric Vehicle (EV) Nasional; fasilitasi dan pendampingan teknologi dan skill-set bagi IKM tier 2 dan tier 3 untuk transisi ke teknologi EV ▪ Pengembangan infrastruktur pengisian daya, dengan output: Insentif untuk investasi SPKLU; Insentif untuk mendorong peningkatan daya listrik rumah tangga. ▪ Pengembangan ekosistem industri EV Industri KBLBB yang terfasilitasi investasi, dengan output: penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi untuk transisi ke arah industri, perjanjian perdagangan untuk kemudahan bahan baku litium, mangan, dan kobalt. ▪ Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai, dengan output: fasilitasi investasi untuk industri baterai recycling.
Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui: ▪ Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output: pengembangan fasilitas Pelabuhan Lapuko, pengembangan fasilitas Pelabuhan Sikel, pengembangan fasilitas Pelabuhan Raha

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	▪ Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan output: pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi; pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka; Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau. ▪ Penanganan konektivitas jalan mendukung wilayah tertinggal dan perbatasan, dengan output: Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Provinsi Sulawesi Tenggara ▪ Pembangunan jalan lingkaran perkotaan, dengan output: Pembangunan Jalan Perkotaan – Provinsi Sulawesi Tenggara ▪ Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, dengan output: pembangunan sistem angkutan umum massal ▪ Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan output: peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, pembangunan jalan dengan ruas BTS. Kab. Kolaka/Kab. Bombana-Boepinang, Wolo-BTS. Kota Kolaka, Boepinang-Bambaea, pembangunan jembatan strategis, peningkatan dan preservasi jalan daerah, terminal barang dan penumpang, Pembangunan terminal barang internasional, pengembangan terminal Tipe A ▪ Pembangunan Sarana Angkutan Penyeberangan, dengan output: pembangunan kapal penyeberangan
Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui: ▪ Peningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan output: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, rumusan kebijakan pembinaan BLMNM dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi ▪ Peningkatan konektivitas ketenagalistrikan dan digitalisasi, dengan output: pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik, jaringan transmisi, gardu induk, rekomendasi kebijakan transisi energi global, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	3T dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari; ▪ Dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk terbarukan beban dasar dan variabel, dengan output: pembangunan PLTMH dan PLTS, rekomendasi pengendalian pembangkit, pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; ▪ Penguatan infrastruktur telekomunikasi, dengan output: OM Palapa Ring, kerja sama badan usaha, dibangunnya 4G oleh operator. ▪ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan output: penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM pusat monitoring telekomunikasi, pos dan penyiaran, layanan publik bidang telekomunikasi, kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama ▪ Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ▪ Perluasan layanan penyiaran digital ▪ Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik ▪ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir berbasis ekonomi sirkular, melalui: ▪ Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM kabupaten/kota, pembinaan teknis bidang air minum, dan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum ▪ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM, dengan output: pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM, daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah ▪ Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan output: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota ▪ Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif, dengan output: rehabilitasi daerah irigasi multikomoditas ▪ Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular, dengan output: persiapan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 (E-Waste), pemanfaatan teknologi recycling plastik daur ulang, fasilitas pengelolaan sampah spesifik ▪ Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah, dengan output: pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang terbangun, jumlah fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R oleh pemerintah pusat yang terbangun, sistem pengelolaan persampahan skala regional, sistem pengelolaan persampahan skala kota, sistem pengelolaan persampahan skala kawasan
Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, pencegahan dan penurunan stunting, dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita, melalui: ▪ Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan output: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, NSPK pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN ▪ Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan output: pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, UroNefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan SPA dan pengampunan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alay kesehatan layanan kanker terpadu

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	▪ Peningkatan produksi SDM kesehatan, dengan output: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan PPDS, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan ▪ Penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting, dengan output: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock, tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian stunting ▪ Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dengan output: alat, bahan, dan tenaga terlatih untuk pencegahan/pengendalian, obat dan perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria; bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan reagen, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS; tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan skrining mobile dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC; alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik Multi Drug Therapy (MDT), pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan
Provinsi Sulawesi Tenggara	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, melalui: ▪ Fasilitasi dan penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru, dengan

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	output: penyediaan rumah khusus reguler dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja, fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka, pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan ▪ Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, dengan output: Bantuan PSU Bidang Perumahan ▪ Penanganan permukiman kumuh, dengan output: pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh ▪ Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z
Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan pendidikan, pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, melalui: ▪ Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, dengan output: sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi dan prasarana perguruan tinggi yang dibangun, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah ▪ Pemagangan industri di dalam dan luar negeri, dengan output: peserta yang magang di perusahaan di luar negeri, peserta yang magang di perusahaan dalam negeri, dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri ▪ Pelatihan vokasi di sektor strategis yang didukung penjaminan mutu pendidikan, dengan output: pelatihan vokasi bidang pertanian dan perikanan, pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, , pelatihan peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling, PBK Provinsi Sulawesi Tenggara, penjaminan mutu satuan pendidikan, dokumen tracer study, rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, dan standar pelatihan berbasis kompetensi ▪ Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan output: SMK mengembangkan pusat keunggulan, mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, mendapatkan pendampingan

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	peningkatan mutu, dan mengembangkan pengajaran berbasis pabrik, SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, program kelas industri, dan fasilitasi pendampingan link and match SMK dengan industri ▪ Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan output: pelatihan kurikulum DUDI untuk guru kejuruan, upskilling dan reskilling pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja, prasarana dan sarana pendukung pembelajaran, dan siswa SMK yang tersertifikasi ▪ Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan
Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui: ▪ Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan output: bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula tematik, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan ▪ Penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan revitalisasi dana sosial keagamaan, dengan output: keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, warga masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan, dan lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang dibina dan diperkuat literasi program pengentasan kemiskinan ▪ Pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dengan output: koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan data center, penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data ▪ Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif, dengan output: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako,

Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
	dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan ▪ Pelaksanaan bantuan energi dan pangan, dengan output: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan ▪ Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara inklusif, dengan output: Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Fasilitasi Dialog Regulasi Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial, Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan ▪ Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain, dengan output: Layanan atas Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hak Anak, Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan, Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan Permakanan dan Anak YAPI yang mendapatkan Bantuan Asistensi Rehasabilitas Sosial.
Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui: ▪ Peningkatan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dengan output: Rekomendasi kebijakan PDRD, daerah dengan proporsi PDRD terhadap PAD meningkat, dan basis data potensi PDRD. ▪ Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non utang yang inovatif, dengan output: penatausahaan BMD secara wajar, proporsi kontribusi BUMD yang meningkat, dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). ▪ Pengembangan instrumen pembiayaan utang daerah, dengan output: daerah yang difasilitasi dalam menerbitkan obligasi/sukuk daerah dan memanfaatkan pinjaman daerah.

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Arahan pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kabupaten Kolaka telah dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Arahkan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kolaka dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Lokasi Pengembangan	Arah Pengembangan
Kawasan Pesisir Kendari dan sekitarnya di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka	Pengembangan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil
Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengembangan pusat pengolahan industri perikanan dan kawasan pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
Kawasan Industri Pertambangan di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Selatan	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar)
Kawasan Swasembada Pangan di Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan.	Pengembangan Kawasan Agropolitan
Kabupaten Kolaka	Pengembangan kluster ikan nila salin untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan
Kabupaten Kolaka	Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain
Kabupaten Kolaka	Percepatan pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Lokus pembangunan kewilayahan juga merujuk pada dokumen RTRW Kabupaten Kolaka. Berikut ini merupakan strategi lokus pembangunan wilayah berdasarkan indikasi program dalam dokumen RTRW Kabupaten Kolaka pada periode lima tahun pertama.

Tabel 3. 5 Lokus Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Kolaka

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah			
1. Sistem Pusat Permukiman			
1	Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan	Perkotaan Kolaka	RTRW
2	Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan	Kecamatan Pomalaa	RTRW
3	Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Watubangga, dan Kecamatan Wolo	RTRW
4	Pusat Pelayanan Lingkungan	Kecamatan Iwoimendaa, Kecamatan Polinggona, Kecamatan Samaturu, dan Kecamatan Toari	RTRW
5	Kawasan Pusat Perkotaan Ibu Kota Kabupaten	Perkotaan Kolaka	RTRW
2. Perwujudan Sistem Prasarana			
2.1. Sistem Jaringan Transportasi			
2.1.1. Sistem Jaringan Jalan Umum			
1	Pengembangan jaringan jalan arteri primer	1. Bts. Kab. Kolaka Utara/Kab. Kolaka – Wolo; 2. Jln. Abadi (Kolaka); 3. Jln. Dermaga (Kolaka); 4. Jln. Hksn (Kolaka); 5. Jln. Kartini (Kolaka); 6. Jln. Mekongga Indah (Kolaka); 7. Jln. Mekongga Indah I (Kolaka); 8. Jln. Pemuda (Kolaka); 9. Jln. Pramuka (Kolaka); 10. Kolaka – Dawi-Dawi; 11. Kolaka (Sp. Kp. Baru – Rate Rate (Bts. Kab. Kolaka Timur/Bts. Kab. Konawe); 12. Mangolo – Kampung Tua; dan 13. Wolo – Bts. Kota Kolaka	RTRW
2	Pembangunan jaringan jalan arteri primer	Tamborasi (Lasusua - Bts. Kab. Kolaka Utara/Koala - Wolo)	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
3	Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder	1. Jl. Ahmad Mustin I; 2. Jl. Ahmad Mustin; 3. Jl. Andi Jemma; 4. Jl. Garuda I; 5. Jl. Kakatua; 6. Jl. Merpati; 7. Jl. Nuri; 8. Jl. Pintu Selatan; 9. Jl. Pondui; dan 10. Jl. Usman Rencong.	RTRW
4	Pengembangan jaringan kolektor primer	1. Dawi-Dawi – Pomala; 2. Pomalaa – Wolulu; dan 3. Wolulu – Bts. Kab. Kolaka/Kab. Bombana	RTRW
5	Pengembangan jaringan kolektor sekunder	1. 19 Nopember - Km 12 Sabilambo; 2. Amamotu - Tosiba; 3. Anawoi - Popalia; 4. Anawua - Ranosangia; 5. Baula - Puulemo; 6. Desa 19 Nopember - Unaasi; 7. Donggala - Waworina; 8. Hakatutobu - Hakatutobu; 9. Hakatutobu - Kampung Baru; 10. Jl. Alam Mekongga; 11. Jl. Bandara Sangia Nibandera; 12. Jl. Chairil Anwar; 13. Jl. Dg. Pasau; 14. Jl. Dr. Sutomo; 15. Jl. Jendral Sudirman; 16. Jl. Lulo; 17. Jl. Pahlawan; 18. Jl. Pancasila; 19. Jl. Repelita; 20. Lalonggolosua - Petudua; 21. Lamekongga - By Pass; 22. Langgosipi - Mataosu; 23. Oneeha - Popalia; 24. Pelambua - By Pass; 25. Pesouha - By Pass (Kolaka - Dawi-Dawi);	

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		26. Petudua - Popalia; 27. Polinggona - Plasmajaya - Tanggeau; 28. Polinggona - Tanggeau; 29. Pomalaa Dalam Kota; 30. Puudongi - Puudongi; 31. Ranojaya - Ranojaya; 32. Ranoteta - Langgosipi; 33. Sabilambo - Kampung Maros; 34. Samaturu Dalam Kota; 35. Sp. Kampung Baru - Pomala; 36. Sumber Rejeki - Kukutio; 37. Sumber Rejeki - Langgosipi; 38. Tamboli - Ulu Tamboli; 39. Tandebura - Ranomentaa; 40. Tandebura - Sumber Rejeki; 41. Tanggeau - Kukutio; 42. Tanggetada - Tanggetada; 43. Tanggetada - Petudua; 44. Toari - Anawua; 45. Tosiba - Donggala; 46. Tosiba - Samaturu Dalam Kota; 47. Ulu Lapao Pao - Donggala; 48. Ulukalo - Iwoimendaa; 49. Unaasi - By Pass; 50. Watubangga - Tandebura; 51. Wawo Tamboli - Tosiba; 52. Wolo Dalam Kota; dan 53. Wolulu - Polinggona	
6	Peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder	1. Baula - Batas Kab. Koltim; 2. Jl. By Pass II (Pantai Berty); 3. Sakuli - Ulunggolaka	RTRW
7	Pengembangan jalan lokal primer	Jalan lokal primer di seluruh Kecamatan	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
8	Pengembangan jalan lokal sekunder	Jalan lokal sekunder di 1. Kecamatan Baula; 2. Kecamatan Kolaka; 3. Kecamatan Latambaga; 4. Kecamatan Pomalaa; 5. Kecamatan Samaturu; 6. Kecamatan Tanggetada; 7. Kecamatan Wolo.	RTRW
9	Pengembangan jalan lingkungan primer	Jalan lingkungan primer di 1. Kecamatan Baula; 2. Kecamatan Iwoimendaa; 3. Kecamatan Kolaka; 4. Kecamatan Latambaga; 5. Kecamatan Polinggona; 6. Kecamatan Pomalaa; 7. Kecamatan Samaturu; 8. Kecamatan Tanggetada; 9. Kecamatan Toari; 10. Kecamatan Watubangga; 11. Kecamatan Wolo; dan 12. Kecamatan Wundulako	RTRW
10	Pengembangan jalan lingkungan sekunder	Jalan lingkungan sekunder di: 1. Kecamatan Kolaka; 2. Kecamatan Latambaga; 3. Kecamatan Tanggetada; 4. Kecamatan Wundulako	RTRW
2.1.2. Terminal Penumpang			
1	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Penumpang Larumbalangi di Kecamatan Wundulako	RTRW
2	Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal penumpang Pasar Raya Mekongga di Kecamatan Kolaka; 2. Terminal penumpang Latambaga/Mangolo di Kecamatan Latambaga; dan 3. Terminal penumpang Watubangga di Kecamatan Watubangga.	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
3	Perencanaan dan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal penumpang tipe C Wolo di Kecamatan Wolo; dan 2. Terminal penumpang tipe C Tanggetada di Kecamatan Tanggetada.	RTRW
2.1.3. Jembatan Timbang dan Jembatan			
1	Pemeliharaan Jembatan Timbang	Jembatan timbang Sabilambo di Kecamatan Wundulako	RTRW
2	Pemeliharaan dan pengecekan rutin jembatan	Jembatan di seluruh kecamatan	RTRW
2.1.4. Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
1	Peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kolaka	Kecamatan Latambaga	RTRW
2.1.5. Jaringan Transportasi Laut			
1	Peningkatan kualitas Pelabuhan pengumpul Kolaka	Kecamatan Latambaga	RTRW
2	Peningkatan kualitas Pelabuhan Pengumpan Regional Pomalaa - Dawi-Dawi	Kecamatan Pomalaa	RTRW
3	Penetapan pelabuhan pengumpan lokal	1. Pelabuhan Pomalaa di Kecamatan Pomalaa; 2. Pelabuhan Toari di Kecamatan Toari; 3. Pelabuhan Malombo di Kecamatan Wolo; 4. Pelabuhan Wolo di Kecamatan Wolo; 5. Pelabuhan Tanggetada di Kecamatan Tanggetada	RTRW
4	Pengembangan terminal khusus	Terminal khusus BBM Mangolo di Kecamatan Latambaga	RTRW
5	Pemantauan dan Pengendalian Terminal Khusus Pertambangan	1. Terminal Khusus Pertambangan Muara Lapaopao di Kecamatan Wolo;	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		2. Terminal Khusus Pertambangan Oko-Okoko I di Kecamatan Pomalaa; 3. Terminal Khusus Pertambangan Oko-Okoko II di Kecamatan Pomalaa; 4. Terminal Khusus Pertambangan Oko- Oko III di Kecamatan Pomalaa; 5. Terminal Khusus Pertambangan Sopura di Kecamatan Pomalaa; 6. Terminal Khusus Pertambangan Sopura I di Kecamatan Pomalaa; 7. Terminal Khusus Pertambangan Sopura II di Kecamatan Pomalaa; 8. Terminal Khusus Pertambangan Tambea Hakatutobu I di Kecamatan Pomalaa; 9. Terminal Khusus Pertambangan Tambea Hakatutobu II di Kecamatan Pomalaa; 10. Terminal Khusus Pertambangan Tambea Hakatutobu III di Kecamatan Pomalaa; 11. Terminal Khusus Pertambangan Towua di Kecamatan Wundulako; dan 12. Terminal Khusus Pertambangan Wolo di Kecamatan Wolo	
6	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1. Anaiwoi di Kecamatan Tanggetada 2. Dawi-Dawi di Kecamatan Pomalaa	
7	Penetapan status PPI baru	1. Lalonggolosua di Kecamatan Tanggetada	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		2. Lawulo di Kecamatan Samaturu 3. Malaha di Kecamatan Samaturu	
2.1.6. Bandar Udara Umum dan Bandara Udara Khusus			
	Pengembangan Bandar Udara Pengumpan	Bandar Udara Sangia Nibandera di Kecamatan Tanggetada	RTRW
2.2. Sistem Jaringan Energi			
2.2.1. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi			
1	Pemeliharaan dan pengendalian keamanan infrastruktur migas	Terminal BBM Kolaka di Kecamatan Latambaga	RTRW
2.2.2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan			
1	Pengembangan PLTA Tamboli	Kecamatan Samaturu	RTRW
2	Pemeliharaan pembangkitan tenaga listrik	1. PLTU Pomalaa di Kecamatan Pomalaa 2. PLTD Antam di Kecamatan Pomalaa 3. PLTD Kolaka di Kecamatan Kolaka	RTRW
3	Pembangunan PLTG	PLTG/MG MPP Sulselbar di Kecamatan Wolo	RTRW
4	Pengembangan PLTMH	PLTMH Sabilambo di Kecamatan Kolaka	RTRW
5	Pengembangan jaringan transmisi SUTT	1. SUTT PLTG/MG MPP Sulselbar - Kolaka Smelter di Kecamatan Wolo 2. SUTT Kolaka Smelter - Incomer di Kecamatan Wolo	RTRW
6	Pemeliharaan jaringan transmisi SUTT	1. Kecamatan Iwoimendaa 2. Kecamatan Kolaka 3. Kecamatan Latambaga 4. Kecamatan Samaturu 5. Kecamatan Wolo 6. Kecamatan Wundulako	RTRW
7	Pemeliharaan jaringan distribusi SUTM	Seluruh Kecamatan	RTRW
8	Pemeliharaan Gardu Listrik	GI Kolaka di Kecamatan Kolaka	RTRW
2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
1	Pengembangan Jaringan Tetap	1. Kecamatan Baula; 2. Kecamatan Iwoimendaa; 3. Kecamatan Kolaka; 4. Kecamatan Latambaga; 5. Kecamatan Pomalaa; 6. Kecamatan Samaturu; 7. Kecamatan Tanggetada; 8. Kecamatan Toari; 9. Kecamatan Watubangga; 10. Kecamatan Wolo; dan 11. Kecamatan Wundulako	RTRW
2	Penyediaan jaringan bergerak terestrial	Kecamatan Latambaga	RTRW
3	Pengaturan jaringan bergerak seluler	1. Kecamatan Baula; 2. Kecamatan Iwoimendaa; 3. Kecamatan Kolaka; 4. Kecamatan Latambaga; 5. Kecamatan Pomalaa; 6. Kecamatan Samaturu; 7. Kecamatan Tanggetada; 8. Kecamatan Toari; 9. Kecamatan Watubangga; 10. Kecamatan Wolo; dan 11. Kecamatan Wundulako	RTRW
2.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air			
Sistem Jaringan Irigasi			
1	Pemeliharaan jaringan irigasi primer	• Kecamatan Baula; • Kecamatan Polinggona; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; - dan • Kecamatan Wundulako	RTRW
2	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	• Kecamatan Baula; • Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Kolaka; • Kecamatan Polinggona; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wundulako;	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		Kecamatan Wolo	
3	Pemeliharaan jaringan irigasi tersier	- Kecamatan Baula; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Wundulako; - Kecamatan Watubangga	RTRW
4	Pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Bangunan pengendalian banjir terdapat di: - Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga - Kecamatan Wundulako	RTRW
5	Pemeliharaan bangunan sumber daya air	- Kecamatan Baula; - Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Polinggona; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Toari; - Kecamatan Watubangga; - Kecamatan Wundulako; - dan - Kecamatan Wolo	RTRW
2.5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya			
2.5.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
1	Pengembangan bangunan unit air baku	- Intake Baula I di Kecamatan Baula; - Intake Baula II di Kecamatan Baula; - Intake Iwoimendaa di Kecamatan Iwoimendaa; - Intake Latambaga di Kecamatan Latambaga; - Intake Pomalaa di Kecamatan Pomalaa; - Intake Samaturu di Kecamatan Samaturu; - dan - Intake Wolo di Kecamatan Wolo.	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
2	Pengembangan jaringan air baku	- Jaringan air baku dari Intake Baula I - IPA Baula I di Kecamatan Baula; - Jaringan air baku dari Intake Baula II - IPA Baula II di Kecamatan Baula; - Jaringan air baku dari Intake Iwoimendaa - IPA Iwoimendaa I di Kecamatan Iwoimendaa; - Jaringan air baku dari Intake Latambaga - IPA Latambaga di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga; - Jaringan air baku dari Intake Pomalaa - IPA Pomalaa di Kecamatan Pomalaa; - Jaringan air baku dari Intake Samaturu - IPA Samaturu di Kecamatan Samaturu; dan - Jaringan air baku dari Intake Wolo - IPA Wolo di Kecamatan Wolo	RTRW
3	Pengembangan bangunan unit produksi	- IPA Baula I di Kecamatan Baula; - IPA Baula II di Kecamatan Baula; - IPA Iwoimendaa di Kecamatan Iwoimendaa; - IPA Latambaga di Kecamatan Latambaga; - IPA Pomalaa di Kecamatan Pomalaa; - IPA Samaturu di Kecamatan Samaturu; - IPA Wolo di Kecamatan Wolo	RTRW
4	Pengembangan bangunan unit distribusi	- Kecamatan Baula; - Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka;	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		- Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Wolo - Kecamatan Wundulako	
5	Pembangunan unit pelayanan	Hidran umum di: - Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Wolo; - Kecamatan Wundulako	RTRW
2.5.2. Sistem Pengolahan Air Limbah			
1	Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	- Kecamatan Latambaga - Kecamatan Wundulako	RTRW
2	Pembangunan Sistem Pengolahan Air limbah Domestik	- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pomalaa di Kecamatan Pomalaa - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tanggetada di Kecamatan Tanggetada	RTRW
2.5.3. Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			
1	Penyediaan sistem pengolahan limbah B3	RSUD Benyamin Guluh di Kecamatan Kolaka	RTRW
2.6. Sistem Jaringan Persampahan			
1	Pengembangan TPS 3R	- Bank sampah di Kecamatan Baula; - Pusat daur ulang mandiri plastik di Kecamatan Kolaka; - Pusat daur ulang Senang Ceria di Kecamatan Latambaga; - TPS3R Gelora Laombaa di Kecamatan Kolaka - TPS3R KSM Wonua Serume di Kecamatan Kolaka; - TPS3R Pasar Raya Mekongga di Kecamatan Kolaka	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
2	Pembangunan TPS 3R	• TPS3R di Kecamatan Baula; • TPS3R di Kecamatan Iwoimendaa; • TPS3R di Kecamatan Polinggona; • TPS3R di Kecamatan Pomalaa; • TPS3R di Kecamatan Samaturu; • TPS3R di Kecamatan Tanggetada; • TPS3R di Kecamatan Toari; • TPS3R di Kecamatan Watubangga; • TPS3R di Kecamatan Wolo; • TPS3R di Kecamatan Wundulako.	RTRW
3	Penyediaan dan pengembangan TPS	Seluruh kecamatan	RTRW
4	Pemeliharaan TPA	TPA Patioso di Kecamatan Latambaga	RTRW
2.7. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana			
1	Pengaturan rambu penanda jalur evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	RTRW
2	Simulasi mitigasi bencana	Ruas jalan sebagai jalur evakuasi bencana pada: 1. Kecamatan Latambaga; 2. Kecamatan Kolaka; 3. Kecamatan Samaturu; 4. Kecamatan Baula; 5. Kecamatan Pomalaa; 6. Kecamatan Tanggetada; 7. Kecamatan Polinggona; 8. Kecamatan Watubangga; 9. Kecamatan Toari	RTRW
3. Perwujudan Sistem Drainase			
1	Pemeliharaan jaringan drainase primer	• Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Kolaka • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Pomalaa;	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		- Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Wolo; dan - Kecamatan Wundulako	
2	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	- Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Wundulako	RTRW
3	Pemeliharaan jaringan drainase tersier	- Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Wundulako	RTRW
B. Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten			
1. Kawasan Lindung			
1.1. Badan Air			
1	Perlindungan, pengendalian, dan pengaturan pemanfaatan ruang di Badan Air	- Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Polinggona; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Watubangga; - Kecamatan Wolo; - Kecamatan Wundulako.	RTRW
1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya			
1	Penetapan dan perlindungan batas kawasan hutan lindung	- Kecamatan Baula; - Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Wolo; - Kecamatan Wundulako	RTRW
2	Pengendalian pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan lindung	- Kecamatan Baula; - Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Wolo; - Kecamatan Wundulako	RTRW
1.3. Kawasan Perlindungan Setempat			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
1	Pengendalian kawasan perlindungan setempat (non-terbangun)	• Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wolo; • Kecamatan Wundulako.	RTRW
2	Penetapan batas sempadan pantai dan sungai untuk kegiatan budidaya non-terbangun	• Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wolo; • Kecamatan Wundulako	RTRW
1.4. Kawasan Konservasi			
1.4.1. Kawasan Konservasi Cagar Alam			
1	Pengukuhan dan pemeliharaan kawasan	Cagar Alam Lamedai di Kecamatan Tanggetada	RTRW
2	Penataan dan pengkajian kawasan		RTRW
3	Pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang di dalam kawasan cagar alam		RTRW
1.4.2. Kawasan Konservasi Taman Nasional			
1	Pengukuhan dan pemeliharaan kawasan	Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai di Kecamatan Polinggona dan Kecamatan Watubangga	RTRW
2	Penataan dan pengkajian kawasan		RTRW
3	Pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang di dalam kawasan taman nasional		RTRW
1.4.3. Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam			
1	Pengukuhan dan pemeliharaan kawasan	• Taman Wisata Alam Mangolo di Kecamatan Latambaga dan Kecamatan Kolaka	RTRW
2	Penataan dan pengkajian kawasan		RTRW
3	Pengendalian dan		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	monitoring pemanfaatan ruang di dalam kawasan taman wisata alam	Taman Wisata Alam Pulau Padamarang di Kecamatan Wundulako	
1.5. Kawasan Ekosistem Mangrove			
1	Pelestarian dan konservasi ekosistem mangrove	- Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Watubangga; - Kecamatan Wundulako.	RTRW
2	Penetapan kawasan ekosistem mangrove yang dapat ditetapkan untuk kegiatan pariwisata	- Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Watubangga; - Kecamatan Wundulako.	RTRW
2. Kawasan Budidaya			
2.1. Kawasan Hutan Produksi			
1	Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap secara berkelanjutan	- Kecamatan Baula; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Polinggona; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Toari; - Kecamatan Watubangga; - Kecamatan Wolo; - Kecamatan Wundulako.	RTRW
2	Persetujuan usulan pemakaian/perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan peruntukan industri	Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Tanggetada	RTRW
3	Pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	- Kecamatan Baula; - Kecamatan Polinggona; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Watubangga; - Kecamatan Wundulako.	RTRW
2.2. Kawasan Pertanian			
2.2.1. Kawasan Tanaman Pangan			
1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	9.744 Ha	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	melalui peraturan daerah		
2	identifikasi kawasan lahan pertanian abadi atau Lahan Sawah Dilindungi	7.559 Ha	RTRW
3	Pengelolaan KP2B di Kawasan Pertanian (Hortikultura, dan Tanaman Pangan)	KP2B yang berada di luar kawasan tanaman pangan merupakan LPC2B seluas 2.185 Ha	RTRW
2.2.2. Kawasan Hortikultura			
1	Pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan	Seluruh kecamatan	RTRW
2.2.3. Kawasan Perkebunan			
1	Pengembangan komoditas unggulan nasional	• Kecamatan Baula; • Kecamatan Kolaka; • Kecamatan Polinggona; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wolo • Kecamatan Wundulako	RTRW
2.2.4. Kawasan Peternakan			
1	Penetapan lahan untuk penggembalaan ternak	Kecamatan Polinggona	RTRW
2	Peningkatan kualitas hasil ternak unggulan	Kecamatan Polinggona	RTRW
2.3. Kawasan Perikanan			
2.3.1. Kawasan Perikanan Tangkap			
1	Peningkatan kualitas kawasan perikanan tangkap	Kecamatan Latambaga dan Kecamatan Pomalaa	RTRW
2.3.2. Kawasan Perikanan Budidaya			
1	Peningkatan kualitas kawasan perikanan Budidaya	• Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Kolaka; • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari;	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		- Kecamatan Watubangga; - Kecamatan Wolo; - Kecamatan Wundulako	
2.4. Kawasan Pertambangan dan Energi			
2.4.1. Kawasan Pertambangan Mineral Logam			
1	Penerapan sistem pertambangan yang baik di Kawasan Pertambangan mineral logam berbasis ramah lingkungan	- Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Wolo	RTRW
2	Pengelolaan kawasan pertambangan dan energi secara berkelanjutan dan lestari selama proses eksploitasi	- Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Tanggetada; - Kecamatan Wolo	RTRW
3	Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pekerja tambang	Kabupaten Kolaka	RTRW
4	Reboisasi/reklamasi kawasan pasca tambang	Kabupaten Kolaka	RTRW
5	Peningkatan kegiatan CSR di Kabupaten	Kabupaten Kolaka	RTRW
2.4.2. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik			
1	Pengembangan, dan pengendalian kawasan pembangkit tenaga listrik	- Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Pomalaa; dan - Kecamatan Wolo	RTRW
2.4.3. Kawasan Peruntukan Industri			
1	Penetapan batas rencana pembangunan kawasan peruntukan industri dilengkapi dengan Masterplan Kawasan	- Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Tanggetada; dan - Kecamatan Wolo	RTRW
2	Perwujudan kawasan tanaman pangan menjadi kawasan peruntukan industri	Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Tanggetada	RTRW
3	Pembangunan kawasan	- Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Tanggetada; dan	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	Peruntukan Industri dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan	Kecamatan Wolo	
4	Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah	Kabupaten Kolaka	RTRW
5	Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha IKM dan pekerja industri besar	Kabupaten Kolaka	RTRW
2.6. Kawasan Pariwisata			
1	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata	- Kecamatan Iwoimendaa; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Samaturu; - Kecamatan Watubangga; dan - Kecamatan Wundulako.	RTRW
2	Pengembangan pariwisata ramah lingkungan dan beredukasi di Kawasan ekosistem <i>mangrove</i>	Kecamatan Wundulako	RTRW
3	Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi usaha wisata	Kabupaten Kolaka	RTRW
2.6. Kawasan Permukiman			
2.6.1. Kawasan Permukiman Perkotaan			
1	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Pomalaa	RTRW
2	Identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan	Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Pomalaa	RTRW
3	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dan privat di kawasan	Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Pomalaa	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
	permukiman perkotaan		
2.6.2. Kawasan Permukiman Perdesaan			
1	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kawasan permukiman	• Kecamatan Baula; • Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Polinggona; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wolo; • Kecamatan Wundulako	RTRW
2	Perbaikan kampung mengadopsi konsep pembangunan hunian layak huni	• Kecamatan Baula; • Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Polinggona; • Kecamatan Pomalaa • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wolo • Kecamatan Wundulako	RTRW
3	Pengembangan kawasan permukiman yang adaptif terhadap bencana	• Kecamatan Baula; • Kecamatan Iwoimendaa; • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Polinggona; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Samaturu; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Toari; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wolo • Kecamatan Wundulako	RTRW
2.7. Kawasan Transportasi			
1	Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi	• Kecamatan Kolaka; • Kecamatan Latambaga; • Kecamatan Pomalaa; • Kecamatan Tanggetada; • Kecamatan Watubangga; • Kecamatan Wolo; • Kecamatan Wundulako	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
2	Penataan kawasan di kawasan transportasi pelabuhan laut	Kecamatan Latambaga; dan Kecamatan Pomalaa.	RTRW
3	Pengembangan dan perluasan kawasan bandar udara Sangia Nibandera	Kecamatan Tanggetada	RTRW
4	Penyediaan mitigasi bencana untuk gelombang ekstrim dan abrasi di kawasan transportasi	- Kecamatan Wolo; - Kecamatan Pomalaa; - Kecamatan Latambaga; - Kecamatan Kolaka; - Kecamatan Tanggetada	RTRW
2.8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan			
1	Penataan dan peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan	POS TNI AL (Posal) Kolaka KODIM 1412 Kolaka Polres Kolaka Polsek Wolo Kipan B Yonif 725.	RTRW
2	Penetapan kawasan pertahanan dan keamanan skala kecamatan	Kabupaten Kolaka	RTRW
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten			
1	Penyusunan Rencana induk industri pertambangan	Kecamatan Wolo	RTRW
2	Penyusunan Rencana induk kawasan agro industri kelapa sawit	Kecamatan Polinggona dan Kecamatan Tanggetada	RTRW
3	Pengembangan dan pengendalian kawasan startegis konservasi sumber daya alam Pulau Padamarang	Kecamatan Wundulako	RTRW
4	Pengembangan dan pengendalian kawasan perlindungan ekosistem mangrove	Sepanjang Pesisir Pantai Kolaka – Dawi-Dawi	RTRW

Sumber: Perda Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Kolaka 2023-2042

3.2.2 Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi yang dirumuskan guna mendukung pencapaian setiap misi yang direncanakan oleh kepala daerah. Selain itu, rumusan strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan pemetaan permasalahan. Strategi yang dirumuskan akan memandu dalam merumuskan program prioritas dan pendukung pencapaian tujuan/sasaran pembangunan serta menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.

Sedangkan arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan secara lebih spesifik dan kontekstual pada level renstra. Perumusan arah kebijakan setiap misi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Misi (1)	Arah Kebijakan (2)
Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamis, dan berbudaya berbasis kearifan lokal	1. Penguatan kapasitas pemuka agama dalam pembangunan SDM berkarakter 2. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 3. Penguatan pelestarian budaya baik <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i> 4. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya, dan penguatan kearifan lokal 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal 6. Peningkatan masyarakat yang harmoni dan inklusif
Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas,	1. Penguatan reformasi birokrasi berdampak yang selaras antara perbaikan kinerja birokrasi dengan kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
transparan, dan akuntabel	2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang saling mendukung (cross-cutting). 3. Pemerintahan digital yang terintegrasi diperkuat melalui pengembangan SPBE yang lebih optimal dan sistem manajemen keamanan informasi yang lebih baik. 4. Pembentukan dan penguatan BRIDA sebagai penggerak ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah. 5. Peningkatan kualitas pengelolaan data pembangunan yang mutakhir dan peningkatan kapasitas dalam penyediaan statistik sektoral. 6. Penguatan sistem integritas, pengendalian internal, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan pembangunan. 7. Peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah secara digital serta peningkatan kontribusi BUMD. 8. Penggalan sumber pembiayaan pembangunan non-APBD, seperti pemanfaatan CSR secara lebih strategis. 9. Peningkatan kapasitas BUMD dalam mengelola potensi daerah, termasuk pengelolaan tambang dan sektor ekstraktif lainnya. 10. Pembentukan satuan tugas lintas sektor untuk memperbaiki manajemen kinerja dan merespons isu strategis daerah secara lebih efektif. 11. Pelibatan masyarakat secara bermakna dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan, termasuk mekanisme tindak lanjut atas masukan dan aduan. 12. Penguatan tata kelola yang mendukung pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs). 13. Pengembangan kebijakan daerah yang inklusif dan berbasis pada data dan bukti yang kuat. 14. Penguatan implementasi kebijakan pengelolaan migas dan sumber daya alam

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	lainnya secara berkelanjutan dan berkomitmen. 15. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM, termasuk manajemen talenta, promosi, mutasi, dan pemberian tunjangan berbasis kinerja. 16. Peningkatan kapasitas aparatur dan inovasi tata kelola di tingkat desa. 17. Penguatan peran kecamatan dalam hal pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas wilayah. 18. Peningkatan partisipasi publik dan transparansi data.
Misi 3: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan	1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan 2. Optimalisasi pengembangan sektor ekonomi unggulan dan potensial 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja 4. Peningkatan akses terhadap permodalan dan peluang usaha 5. Pengembangan kewirausahaan 6. Peningkatan kerjasama pemasaran produk 7. Penguatan tata kelola pemerintahan dalam perspektif ekonomi 8. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan infrastruktur pendukung perekonomian 9. Peningkatan hilirisasi produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan 10. Peningkatan pengintegrasian prinsip ekonomi hijau dalam setiap perencanaan 11. Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui diversifikasi pertanian 12. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat 13. Peningkatan transformasi digital yang inklusif 14. Pengembangan kawasan industri, kawasan industri kecil menengah dan sentra UMKM 15. Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, dan UMKM 16. Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	17. Penguatan kualitas manajerial BUMD 18. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Misi 4: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan 3. Peningkatan jumlah, kompetensi, dan distribusi guru 4. Pemberian beasiswa Beramal 5. Penguatan budaya literasi masyarakat 6. Peningkatan partisipasi pendidikan pada semua jenjang 7. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan 8. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak 9. Peningkatan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular 10. Peningkatan jumlah, kompetensi, dan distribusi tenaga kesehatan secara merata 11. Peningkatan edukasi kesehatan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat 12. Peningkatan kesehatan lingkungan melalui pemenuhan akses sanitasi aman dan air bersih 13. Program kartu Beramal sehat 14. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran 15. Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 16. Peningkatan cakupan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan 17. Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan 18. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak 19. Optimalisasi pelaksanaan kampung KB 20. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga 21. Peningkatan pelestarian budaya daerah 22. Peningkatan jumlah, kompetensi, dan distribusi tenaga kerja lokal
Misi 5: Mewujudkan infrastruktur wilayah	1. Peningkatan proporsi kemantapan jalan 2. Peningkatan cakupan akses air minum dan sanitasi aman 3. Percepatan penanganan kawasan kumuh

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
yang berkeadilan dan berkelanjutan	4. Peningkatan kualitas infrastruktur persampahan 5. Pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah regional 6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penataan ruang 7. Penguatan sistem penataan wilayah berbasis RTRW yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 8. Evaluasi dan penataan ulang sistem zonasi kawasan penyangga aktivitas tambang 9. Perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi lingkungan 10. Penguatan kebijakan perlindungan kawasan konservasi sumber daya air 11. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan DAS terintegrasi 12. Reforestasi lahan kritis dan bekas tambang pada kawasan ekologis penting 13. Penguatan kebijakan pengelolaan limbah lumpur tambang berbasis pendekatan sirkular 14. Penguatan pengawasan tambang ilegal berbasis pendekatan partisipasi masyarakat 15. Pemulihan kawasan pesisir yang tercemar berat 16. Pemantauan kualitas air secara terjadwal dan terukur 17. Naturalisasi aliran sungai utama 18. Penegakan sanksi hukum terhadap pelaku tambang ilegal dan kerusakan alam yang ditimbulkan 19. Peningkatan audit lingkungan pertambangan terhadap rencana reklamasi terukur dan terpantau 20. Penguatan Integrasi CSR tambang untuk pendanaan konservasi 21. Perluasan perhutanan sosial berbasis agroforestry rendah emisi GRK 22. Penyusunan Strategi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 2030 (RAD-GRK) 23. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana lokal

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	24. Penguatan mitigasi struktural dan non-struktural daerah 25. Pengembangan teknologi <i>early warning system</i> (EWS) kebencanaan

3.2.3 Program Prioritas Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam 9 Program Prioritas Pembangunan Beramal sebagai berikut:

1. Peningkatan Agama dan Budaya

Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penguatan kehidupan keagamaan dan pelestarian budaya lokal. Hal ini diwujudkan melalui dukungan biaya operasional rumah ibadah (masjid, gereja, vihara, pura), pemberian bantuan beasiswa tahfidz, pelaksanaan ritual budaya lokal seperti Mosehe Wonua dan Festival Budaya

Mekongga, serta pemberian insentif kepada tokoh agama dan pelaku kebudayaan di tingkat kelurahan dan desa.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Prioritas ini menitikberatkan pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi kinerja pemerintahan secara real time, peningkatan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi, penguatan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), serta peningkatan insentif kepada ketua RW dan RT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

3. Pemenuhan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah daerah mengupayakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Kolaka Beramal, peningkatan fasilitas dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan, penyediaan beasiswa dan asrama bagi mahasiswa, penguatan sistem manajemen pelayanan rumah sakit dan puskesmas, serta penyediaan layanan ambulans gratis di setiap kecamatan. Selain itu, pembangunan perpustakaan modern dan fasilitas literasi di tingkat kecamatan menjadi bagian dari prioritas ini.

4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama melalui peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dan sektor swasta, pelatihan dan akses permodalan bagi UMKM dan ekonomi kreatif, revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern, serta peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan. Pemerintah juga mendorong pertanian dan perikanan modern berbasis teknologi serta pengembangan industri pertambangan dan energi yang berkeadilan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

5. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur

Prioritas ini mencakup peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah dan permukiman, pengaspalan jalan di tingkat desa dan

kecamatan, peningkatan jaringan irigasi, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

6. Pemenuhan Lapangan Kerja

Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan kerja untuk mencetak tenaga kerja yang profesional dan bersertifikasi, penyediaan lapangan kerja yang berkeadilan bagi 2.000 tenaga kerja setiap tahun, serta pengembangan regulasi yang adil dalam proses rekrutmen dan perlindungan tenaga kerja lokal.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Kawasan Perkotaan

Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah, pembentukan unit pengelola sampah di tingkat kelurahan (TPS3R), mendorong legalisasi pengelolaan tambang batuan secara berkelanjutan, serta penataan ruang terbuka hijau yang ramah anak menjadi fokus dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan perkotaan. Penataan kawasan perkotaan juga mencakup pengembangan taman laut, sentra kuliner/UMKM, pengendalian banjir, jalur pedestrian, dan penerangan kota.

8. Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengusaha muda melalui pelatihan dan bantuan modal, pembentukan Dewan Kesenian Pemuda Kolaka, pengembangan infrastruktur olahraga dan kegiatan kepemudaan, serta peningkatan prestasi olahraga menjadi fokus prioritas ini. Selain itu, terdapat program pemberdayaan organisasi kepemudaan dan gerakan pencegahan narkoba bagi generasi muda.

9. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, Lansia, dan Disabilitas

Pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan dan akses peluang bagi perempuan, menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan dukungan psikososial, serta layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan dan eksploitasi. Bantuan sosial untuk lansia tak berdaya dan penyandang disabilitas ditingkatkan, termasuk pemberian makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil dan anak usia 0–2 tahun.

Selain itu, disediakan bantuan finansial kepada organisasi perempuan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 ditampilkan pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3. 7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Berkeadilan, Maju dan Unggul						
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamis, dan berbudaya berbasis kearifan lokal	Meningkatnya keharmonisan sosial	Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama		Indeks Harmoni Kabupaten		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti	1. Agama dan Budaya	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Meningkatnya kualitas fasilitasi produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan daerah	Efektifitas kerja sama daerah kinerja		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya kualitas kebudayaan daerah		penyelenggaraan pemerintahan		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	1. Agama dan Budaya	Program pengembangan kurikulum
			Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		Program pengembangan kebudayaan
Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Berkualitas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang		Indeks Reformasi Birokrasi		
				Nilai SAKIP		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pengendalian intern pemerintah	Hasil Penilaian SAKIP SKPD	2. Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		responsif dan akuntabel	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah)		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewengan/penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun yang bersifat proses	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				Indeks Kepuasan Masyarakat		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya kualitas fasilitasi produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan daerah	Efektifitas kerja sama daerah kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
				Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Profesionalitas ASN		
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang berjalan sesuai SOP		Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan kompetensi		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dasar, Manajerial dan Fungsional		
			Meningkatnya Layanan Pengembangan kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi		
			Meningkatnya kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN		
						Program Kepegawaian Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				sesuai dengan Kompetensinya		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD yang mendapatkan peningkatan kompetensi		Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perumusan bahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan		Program Perekonomian dan Pembangunan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				yang ditindaklanjuti		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaporan pengendalian dan evaluasi administrasi pelaksanaan pembangunan daerah		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pendapatan		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	Persentase Sarana IT yang Optimal digunakan dalam mendukung efektivitas pengelolaan Data Digital untuk mempermudah pengambilan Keputusan		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan SKPD dan PEMDA Kab. Kolaka yang tepat waktu		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran Tepat Waktu		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Tata Kelola Dana Bantuan Keuangan dan Dana Lainnya	Persentase Belanja Bantuan Keuangan, Tidak Terduga dan Bagi Hasil Daerah yang terealisasi		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase realisasi belanja berdasarkan sumber dana yang tepat waktu dan optimal		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Misi 3: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing	Meningkatnya daya saing daerah berbasis ekonomi yang inklusif			Indeks Daya Saing Daerah		
		Meningkatnya inklusifitas ekonomi daerah		Laju pertumbuhan ekonomi		
				PDRB per kapita		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dan berkelanjutan				Kontribusi PDRB Kabupaten		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
				Tingkat kemiskinan		
				Indeks ekonomi hijau		
				Tingkat Inflasi		
				Rasio Gini		
			Meningkatnya pelaku IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai	Persentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang memiliki sumber daya produksi yang memadai	4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya realisasi investasi industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pedagang yang menggunakan metode pemasaran modern	Persentase pedagang yang menerapkan metode pemasaran modern		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang berkondisi baik		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penyelesaian kasus sengketa perdagangan		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatnya produk sesuai standar ekspor	Persentase produk yang ditangani sesuai standar yang bersertifikasi		Program Pengembangan Ekspor
			Meningkatnya kualitas sarana tanaman pangan dan hortikultura	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				yang dapat berfungsi dan ber kondisi baik		
			Meningkatnya sarana perkebunan dan peternakan	Persentase sarana perkebunan yang ditingkatkan		
				Persentase sarana peternakan yang ditingkatkan		
			Meningkatnya kualitas prasarana tanaman pangan dan hortikultura	Persentase prasarana tanaman pangan dan hortikultura yang dapat berfungsi dan ber kondisi baik		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya prasarana perkebunan & peternakan	Persentase prasarana perkebunan yang dapat berfungsi dan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dalam kondisi baik		
				Persentase prasarana peternakan yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik		
			Meningkatnya kapasitas kelompok tani	Persentase kelompok tani yang meningkat kelasnya		Program Penyuluhan Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani Madya peternakan dan perkebunan		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Persentase pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sesuai dengan prosedur		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pengendalian hama dan penyakit	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang tidak terkena serangan hama penyakit		
			Meningkatnya rehabilitasi lahan akibat bencana pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang berhasil direhabilitasi karena terkena bencana pertanian		
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya Peserta Pelatihan Kerja yang lulus sertifikasi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang lulus		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				sertifikasi kompetensi		
			Meningkatnya Peserta Pelatihan Kerja yang lulus sertifikasi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang lulus sertifikasi kompetensi		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan Ditempatkan		Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase potensi investasi yang teridentifikasi		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi yang ditindaklanjuti dengan inisiasi kerjasama investasi		Program Promosi Penanaman Modal

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya penyelenggaraan data dan informasi penanaman modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Persentase perusahaan yang menyusun LKPM sesuai dengan ketentuan	Persentase perusahaan yang menyusun LKPM sesuai dengan ketentuan		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang berjalan sesuai SOP		Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perumusan bahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan	Program Perekonomian dan Pembangunan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				yang ditindaklanjuti		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaporan pengendalian dan evaluasi administrasi pelaksanaan pembangunan daerah		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya Pemasaran Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Berhasil di Pasarkan		Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Mendapatkan Perlindungan HAKI	Mendapatkan Perlindungan HAKI		Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya Sumberdaya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya monitoring harga barang pokok dan barang penting	Persentase hasil monitoring harga barang pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Meningkatnya Lumbung Pangan yang Berkondisi Baik	Persentase Lumbung Pangan yang Berkondisi Baik		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan		Program Penanganan Kerawanan Pangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Diversifikasi Pangan Lokal	Persentase Pangan Lokal yang ditingkatkan diversifikasi olahannya		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya Pengelolaan Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten	Persentase pengelolaan distribusi dan cadangan pangan kabupaten		
			Meningkatnya Rumah Tangga yang mengkonsumsi Protein Hewani, Sayuran dan Buah-buahan	Persentase rumah tangga yang meningkat konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan		
			Meningkatnya Pangan yang Lulus Uji Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Lulus Uji Keamanan Pangan		Program Pengawasan Keamanan Pangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kapasitas SDM Anggota Koperasi	Persentase anggota koperasi yang terlatih	6. Pemenuhan Lapangan Kerja	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya Kapasitas Produksi dan Pemasaran Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Persentase usaha mikro yang meningkat pemasarannya		
				Indeks Pembangunan Manusia		
				Rata-rata lama sekolah		
Misi 4: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan		Harapan Lama Sekolah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Harapan Lama Sekolah	3. Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan
				Rata-Rata Lama Sekolah		
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat		Program Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				Usia Harapan Hidup		
				Prevalensi Situnting		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	3. Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
			Meningkatnya ketercukupan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Persentase ketercukupan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Meningkatnya ketahanan keluarga		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
			meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	9. Pemberdayaan dan Perlindungan	Program Pengarusutamaan Gender Dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Perempuan, Anak, Lansia, dan Disabilitas	Pemberdayaan Perempuan
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		Program Perlindungan Perempuan
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya	persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif		Program Perlindungan Khusus Anak
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar, terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial		Program Rehabilitasi Sosial

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Lanjut Usia Terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		
				Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentas PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	8. Pemberdayaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya pembudayaan olahraga	Persentase jenis olahraga non prestasi yang dipertandingkan di tingkat provinsi		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet olahraga yang berprestasi dalam kejuaraan tingkat provinsi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 5: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Aksesibilitas infrastruktur pendukung konektivitas dan permukiman semakin meningkat		Indeks Infrastruktur Daerah		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
				Rasio permukiman layak huni		
				Rasio Konektivitas		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan RTH dan Kebun Raya	7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penataan Kawasan Perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Meningkatkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Luas Layanan Irigasi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi			
				Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dan akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Aman	5. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dan akses	Persentase rumah tangga yang menempati		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			masyarakat terhadap sanitasi baik	hunian dengan akses sanitasi aman		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani		Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Rumah Layak Huni		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	5.Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya ketahanan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang Berfungsi Baik untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Penyediaan PSU Perumahan Yang Berfungsi Dengan Baik		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Emisi GRK		
				Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Mitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan yang ditindaklanjuti	7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penataan Kawasan Perkotaan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Efektivitas Penanganan Persampahan Regional	Persentase peningkatan cakupan layanan pengelolaan persampahan regional		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan	Persentase kepatuhan Usaha dan/atau		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	
					Program Prioritas Pembangunan Beramal	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1-2580 Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH	kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH		Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan Bencana	7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penataan Kawasan Perkotaan	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		

3.2.4 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 terhadap Program Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

Dukungan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan program prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dilakukan melalui sinkronisasi program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029. Hal tersebut menjadi upaya untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dapat terjalin dengan baik. Terdapat tiga belas Kegiatan Prioritas Utama yang berindikasi lokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 8 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 terhadap Program Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 di Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029	Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kolaka 2025-2029
1	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perikanan Budidaya	Program Perikanan Budidaya
		<i>Peluncuran Roadmap Blue Economy</i>	<i>4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan</i>
2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Perikanan Tangkap	Program Perikanan Budidaya
		<i>Peluncuran Roadmap Blue Economy</i>	<i>4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan</i>
3	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		<i>Pelatihan Penyelia dan Juru Sembelih</i>	<i>4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan</i>
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		<i>Gerakan Pangan Murah</i>	<i>4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan</i>

No	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 di Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029	Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kolaka 2025-2029
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Penanaman Seribu Bibit Tanaman	4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Bantuan Benih dan Pupuk	4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan
5	Pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Laris (Layanan Ambulans Darat dan Laut Gratis)	3. Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan
		Pembangunan Tiga RS Daerah di Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Timur	
6	Penurunan kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Sultra Health Service Untuk Memperkuat Perlindungan Asuransi Kesehatan Masyarakat	3. Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan
7	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Laris (Layanan Ambulans Darat dan Laut Gratis)	3. Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan
8	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
			7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penataan Kawasan Perkotaan

No	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 di Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029	Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kolaka 2025-2029
9	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur
10	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Pengembangan Perumahan
		Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Gempa Bumi	5. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur
		Jama'ah (Jalan Mulus Antar Wilayah)	
11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	1. Agama dan Budaya
12	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Penggaris (Perlengkapan dan Seragam Sekolah Gratis)	3. Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan
		Pemberian Beasiswa Berprestasi	
13	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik
		Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II	3: Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan
		Sertifikasi Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Sub bab ini menguraikan indikasi Program Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Pada sub bab ini juga menjabarkan indikator program beserta target capaian program dan pagu indikatif tahun 2026 hingga 2030 sebagai proyeksi kebutuhan pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program. Besaran dana yang tersedia merujuk pada sub bab gambaran keuangan daerah, khususnya terkait dengan kerangka pendanaan yang meliputi kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	280.000.000	B	285.000.000	B	292.000.000	B	295.000.000	B	301.411.955	1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,04	13,05	13,15	103.617.323	13,3	105.000.000	13,35	110.000.000	13,4	115.665.930	13,5	131.000.000	1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,38	9,4	9,5		9,65		9,75		9,85		9,95		1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (%)	100	100	100	520.200	100	530.604	100	541.216	100	552.040	100	563.081	1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	70	75	80	2.000.000	85	2.100.000	90	2.200.000	95	2.400.000	95	2.578.043	1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		-		-		-		-	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	520.200	100	530.604	100	541.216	100	552.040	100	563.081	1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Bahasa dan Sastra yang dikembangkan (%)	75	80	84	800.000	86	900.000	90	1.082.432	95	1.104.081	98	1.126.162	1.01.2.22.0.00.02.0 000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		-		-		-		-	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	222.917.924	BB	250.992.062	A	271.573.284	A	295.592.931	AA	307.819.348	1.02.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan (%)	87	87	90	148.361.064	92	163.444.774	94	179.784.642	96	186.263.106	98	147.889.416	1.02.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketercukupan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Persentase ketercukupan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (%)	74	74	100	1.170.944	100	1.239.841	100	1.313.218	100	1.391.353	100	1.474.749	1.02.0.00.0.00.01.000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Ketersediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (%)	92,86	92,86	93,36	650.000	93,86	741.383	94,51	790.308	95,16	842.864	95,86	899.352	1.02.0.00.0.00.01.000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya capaian desa/Kelurahan dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase Desa / Kelurahan dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	20	20	25	2.309.481	35	2.556.153	45	2.731.706	65	2.920.811	80	3.124.623	1.02.0.00.0.00.01.000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					-		-		-		-		-	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	12.144.390	BB	12.500.000	BB	13.000.000	A	15.000.000	A	16.000.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi (%)	85,17	85,6	86,01	22.000.000	86,41	24.000.000	86,8	25.000.000	87,2	26.000.000	87,6	27.000.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	23,76	29	34		39		54		59		64		1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dan akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Aman (%)	7,14	10	13	6.000.000	16	7.500.000	19	8.000.000	22	10.000.000	25	15.000.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Efektivitas Penanganan Persampahan Regional	Persentase peningkatan cakupan layanan pengelolaan persampahan regional (%)	-	-	10	1.500.000	20	1.750.000	30	2.000.000	40	2.250.000	50	4.682.130	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dan akses masyarakat terhadap sanitasi baik	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	6,1	11	16	8.000.000	26	8.500.000	36	9.000.000	46	10.000.000	56	28.329.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Infrastruktur dan Jaringan Sistem Drainase yang Efektif	Persentase Sistem Drainase yang Berfungsi dengan Baik (%)	65	68	71	15.000.000	74	17.500.000	77	20.000.000	80	22.000.000	83	48.186.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman yang ditata (%)	-	-	10	2.000.000	15	2.500.000	20	3.000.000	25	3.500.000	30	27.140.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan pemerintah dan masyarakat	Persentase Kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG (%)	14,55	16	17	425.000	19	375.000	21	425.000	23	415.000	25	465.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					-		-		-		-		-	
Meningkatkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) (%)	-	15	16	120.000	17	250.000	18	200.000	19	200.000	20	200.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	54	57	59	100.000.000	62	111.000.000	65	120.000.000	68	140.000.000	71	145.000.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					-		-		-		-		-	
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi/Operator/Teknisi/ Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	-	10	20	1.395.000	40	1.350.000	60	1.400.000	80	1.400.000	100	1.400.000	1.03.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan tata ruang	Persentase Kepatuhan Terhadap Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR) (%)	-	100	100	1.500.000	100	1.650.000	100	1.750.000	100	3.000.000	100	3.275.000	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-		-		-		-		-	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	5.130.346	B	5.249.546	B	5.306.746	B	5.403.915	B	5.621.900	1.04.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					-		-		-		-		-	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	-	55	60	2.760.000	65	2.901.000	70	3.277.000	75	3.703.300	80	4.015.000	1.04.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani (%)	50	50	55	12.793.693	60	12.924.196	65	13.082.127	70	13.136.785	75	13.281.100	1.04.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Rumah Layak Huni (%)	90	15	25	3.776.316	45	3.842.000	50	3.909.000	55	4.150.000	60	4.402.000	1.04.0.00.0.00.01.000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang Berfungsi Baik untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Penyediaan PSU Perumahan Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	40	43	47	20.942.201	50	21.398.640	52	25.425.127	55	25.606.000	60	25.680.000	1.04.0.00.0.00.01.000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					-		-		-		-		-	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	10.472.460	A	10.974.540	A	11.194.031	A	11.417.911	A	11.646.270	1.05.0.00.0.00.03.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	5.846.089	BB	6.250.000	BB	7.451.688	BB	8.196.857	BB	9.701.333	1.05.0.00.0.00.04.000 - BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum serta penegakan hukum Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	100	100	100	1.214.897	100	1.239.195	100	1.263.979	100	1.289.268	100	1.315.044	1.05.0.00.0.00.03.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.0 000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase Penyelenggaraan TibumTranmas (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.0 000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.0 000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan Bencana (%)	100%	100%	100%	1.398.230	100%	1.450.000	100%	1.933.858	100%	2.127.244	100%	2.339.968	1.05.0.00.0.00.04.0 000 - BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100%	100%	100%	1.044.977	100%	1.250.000	100%	1.506.422	100%	1.657.065	100%	1.822.771	1.05.0.00.0.00.04.0 000 - BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100%	100%	100%	894.000	100%	983.400	100%	1.081.740	100%	1.189.914	100%	1.308.905	1.05.0.00.0.00.04.0 000 - BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran (%)	100	100	100	680.636	100	694.249	100	708.134	100	722.296	100	736.742	1.05.0.00.0.00.03.0 000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.0 000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					-		-		-		-		-	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	6.822.850	B	7.000.000	B	7.692.450	B	7.803.950	B	8.034.000	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Dibidang kesejahteraan Sosial Yang meningkat Kapasitasnya dalam memberikan Pelayanan Sosial (%)	60	65	70	365.000	75	407.500	80	426.000	85	449.000	90	468.000	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar, terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial (%)	2,4	3	3	4.252.000	3	4.252.000	3	4.252.000	3	4.252.000	3	4.252.000	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Lanjut Usia Terlantar terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial (%)	7,7	65	65		65		65		65		1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial (%)	0	2	2		2		2		2		2		1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial (%)	23	85	85		85		85		85		1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL		
	Persentas PPKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial (%)	2,9	3	3		3		3		3		1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	60	70	1.190.000	75	1.190.000	80	1.190.000	85	1.190.000	90	1.190.000	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100	1.130.000	100	1.130.000	100	1.130.000	100	1.130.000	100	1.130.000	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terkelola dengan baik (%)	90	95	95	144.300	95	104.800	95	224.300	95	134.800	95	240.300	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	BB	BB	7.000.000	BB	7.250.000	A	7.300.000	A	7.439.144	A	7.852.392	2.07.3.32.0.00.02.000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	1.000.000	BB	1.150.000	A	1.272.149	A	1.340.954	A	1.413.718	2.07.3.32.0.00.02.001 - UPTD BALAI LATIHAN DAN KETERAMPILAN
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	188.109	100	197.514	100	207.390	100	217.759	100	228.647	2.07.3.32.0.00.02.000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Peserta Pelatihan Kerja yang lulus sertifikasi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang lulus sertifikasi kompetensi (%)	75	75	75	1.000.000	75	1.250.000	75	1.767.859	75	1.856.252	75	1.949.064	2.07.3.32.0.00.02.000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya Peserta Pelatihan Kerja yang lulus sertifikasi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang lulus sertifikasi kompetensi (%)	75	75	75	3.000.000	75	3.150.000	75	3.307.500	75	3.472.875	75	3.646.519	2.07.3.32.0.00.02.001 - UPTD BALAI LATIHAN DAN KETERAMPILAN
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan Ditempatkan (%)	20	20	20	1.018.500	20	1.069.425	20	1.122.896	20	1.179.041	20	1.237.993	2.07.3.32.0.00.02.000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					-		-		-		-		-	
Menurunnya Sengketa Hubungan Industrial	Persentase sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan (%)	85	90	90	1.478.619	90	1.500.000	90	1.750.000	90	2.000.000	90	2.250.000	2.07.3.32.0.00.02.000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					-		-		-		-		-	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	4.422.071	BB	4.483.527	BB	4.628.527	BB	4.698.527	BB	4.863.527	2.08.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100				100				100		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					-		-		-		-		-	
meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	1,27	2	3	720.000	5	740.000	7	810.000	10	840.000	15	890.000	2.08.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					-		-		-		-		-	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	615.000	100	620.000	100	640.000	100	650.000	100	720.000	2.08.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PUSPAGA yang sesuai dengan standar (%)	2	3	11	300.000	22	370.000	33	420.000	45	420.000	55	440.000	2.08.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					-		-		-		-		-	
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan evaluasi penyusunan kebijakan (%)	1	5	10	350.000	15	170.000	20	170.000	25	170.000	30	170.000	2.08.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					-		-		-		-		-	
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai perolehan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Nilai)	743	750	780	231.400	800	235.000	820	275.000	850	235.000	900	285.000	2.08.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan , eksploitasi, penelantaran , perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya	persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	600.000	100	700.000	100	720.000	100	720.000	100	720.000	2.08.0.00.0.00.01.000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					-		-		-		-		-	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	3.543.500	B	3.671.675	BB	3.901.409	BB	4.322.244	BB	4.379.000	2.09.0.00.0.00.01.000 - DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Lumbung Pangan yang Berkondisi Baik	Persentase Lumbung Pangan yang Berkondisi Baik (%)	100	100	100	1.000.000	100	1.050.000	100	1.102.500	100	1.157.625	100	1.205.000	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Diversifikasi Pangan Lokal	Persentase Pangan Lokal yang ditingkatkan diversifikasi olahannya (%)	100	100	100	555.000	100	583.750	100	614.038	100	645.949	100	677.000	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya Pengelolaan Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten	Persentase pengelolaan distribusi dan cadangan pangan kabupaten (%)	77	78	79	500.000	80	525.000	81	551.250	82	578.813	83	600.000	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya Rumah Tangga yang mengkonsumsi Protein Hewani, Sayuran dan Buah-buahan	Persentase rumah tangga yang meningkat konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan (%)	100	100	100	601.500	100	632.825	100	665.841	100	700.646	100	730.000	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					-		-		-		-		-	
Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan (%)	2,22	1,48	1,48	150.000	1,48	158.750	0,74	168.063	0,74	177.978	0,74	187.000	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pangan yang Lulus Uji Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Lulus Uji Keamanan Pangan (%)	95	95,5	96	360.000	96,5	378.000	97	396.900	97,5	416.745	98	422.000	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	B	B	7.000.000	B	7.200.000	B	7.300.000	B	7.400.000	B	7.500.000	2.11.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Mitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.100.000	100	600.000	2.11.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		-	
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	66,33	67	67,5	2.610.000	68	2.660.000	68,5	3.000.000	69,5	3.100.000	70	3.288.687	2.11.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan RTH dan Kebun Raya (%)	100	100	100	2.410.000	100	2.530.500	100	2.657.025	100	2.789.775	100	2.929.000	2.11.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penanganan B3 dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	100	210.000	100	220.000	100	225.300	100	235.000	100	246.000	2.11.0.00.0.00.01.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH	Persentase kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH (%)	89,3	95	96	510.000	97	535.500	98	567.275	99	590.380	100	620.000	2.11.0.00.0.00.01.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	100	100	30.000	100	31.500	100	33.000	100	34.000	100	36.000	2.11.0.00.0.00.01.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlimdungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi masyarakat dalam PPLH (%)	100	100	100	250.000	100	262.500	100	275.000	100	289.000	100	303.000	2.11.0.00.0.00.01.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penyelesaian sengketa / Kasus Pencemaran LH	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Pencemaran LH (%)	100	100	100	75.000	100	78.700	100	82.625	100	86.381	100	90.275	2.11.0.00.0.00.01.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pengelolaan Sampah sampai tingkat akhir	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan (%)	90,93	95	96	12.500.000	97	13.000.000	98	14.000.000	99	15.000.000	100	16.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-		-		-		-		-	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	BB	BB	5.863.913	BB	5.488.912	BB	5.988.912	BB	6.188.912	BB	6.648.816	2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan E-KTP (%)	99,36	99,4	99,4	1.300.549	99,4	1.825.549	99,4	1.825.549	99,4	1.825.549	99,4	1.825.549	2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Peningkatan Kepemilikan KIA (%)	56,22	60	60		60		60		60		2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KK (%)	99,74	99,75	99,75		99,75		99,75		99,75		2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen akta perkawinan (%)	100	100	100	874.714	100	950.000	100	1.025.000	100	1.050.000	100	1.100.000	2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	Persentase kepemilikan akta perceraian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran (%)	53,7	54	54		54		54		54		54		2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	Persentase peningkatan kepemilikan akta kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dimutakhirkan (%)	100	100	100	125.284	100	125.284	100	125.284	100	125.284	100	125.284	2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					-		-		-		-		-	
Tersusunnya profil kependudukan	Persentase data profil kependudukan yang tersedia (%)	100	100	100	135.540	100	135.540	100	135.540	100	135.540	100	135.540	2.12.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	BB	BB	5.300.000	BB	6.000.000	BB	6.327.255	BB	6.643.617	BB	6.976.068	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Penataan Desa yang terselenggara (%)	100	100	100	318.181	100	399.090	100	419.044	100	439.121	100	461.828	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	40	40	45	73.689	50	77.373	55	81.242	60	85.304	65	89.569	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD yang mendapatkan peningkatan kompetensi (%)	0	0	0	1.750.000	84	1.760.000	86	1.787.854	88	1.800.000	90	3.619.746	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi (%)	80	80	82		84		86		88		90		2.13.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	75	75	77	1.609.927	79	1.690.424	81	1.774.945	83	1.863.692	85	1.956.877	2.13.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan (%)	75	75	77		79		81		83		85		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					-		-		-		-		-	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	7.136.120	BB	7.300.000	BB	7.750.000	BB	8.000.000	A	8.500.000	2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					-		-		-		-		-	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Nilai)	2,27	2,25	2,23	1.450.000	2,22	1.500.000	2,21	1.650.000	2,22	1.710.000	2,19	1.800.000	2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specifik fertilty rate/ ASFR 15-19) (Nilai)	13,1	10,6	9,6		8,7		7,8		7,7		7,5		2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Cara/Alat KB Modern (%)	67,68	70	70,5	5.421.580	71	5.692.659	71,5	5.960.990	72	5.883.679	72	6.177.863	2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kehamilan Yang Tidak Direncanakan (%)	12,3	11,9	11,5		11,3		11,1		10,7		10,7		2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	60,8	61,5	62,1		62,8		63,4		64		64,6		2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	41,5	42,5	43,6	4.933.300	44,2	5.200.000	44,7	5.500.000	45,2	6.000.000	45,2	6.500.000	2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	60,8	61,3	61,8		62,3		62,7		63,2		63,7		2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	86	86,9	87,8		88,6		89,4		90,1		90,8		2.14.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	8.774.648	BB	9.300.000	BB	9.350.000	BB	9.500.000	BB	9.750.000	2.15.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	0	95	95		95		95		95		95		2.15.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik (%)	90	90	90	6.794.356	90	7.000.000	90	7.250.000	90	7.500.000	90	7.750.000	2.15.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Konektifitas Laut (%)	0	40	40	750.000	40	1.000.000	40	1.100.000	40	1.250.000	40	1.400.000	2.15.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-		-		-		-		-	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	9.483.399	B	9.500.000	B	9.600.000	B	9.700.000	B	9.800.000	2.16.2.20.2.21.01.0 000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0 000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	0	76,62	77,71	1.700.000	78,78	1.800.000	79,78	1.900.000	87,78	2.000.000	88,79	2.100.000	2.16.2.20.2.21.01.0 000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	48,27	50	60	500.000	70	700.000	80	900.000	85	1.000.000	90	1.200.000	2.16.2.20.2.21.01.0 000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-		-		-		-		-	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	5.000.000	B	5.250.000	B	6.000.000	B	6.500.000	B	7.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Legalitas Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha (%)	43,48	43,7	44,05	100.000	48,46	105.000	52,86	120.000	57,27	125.000	59,47	130.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif secara kelembagaan dan usaha	Persentase Koperasi Aktif (%)	12,13	13,22	16,53	160.000	18,18	270.000	19,83	500.000	21,49	550.000	22,31	600.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (%)	10,87	8,81	11,01	100.000	13,22	100.000	17,62	100.000	22,03	150.000	26,43	150.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas SDM Anggota Koperasi	Persentase anggota koperasi yang terlatih (%)	6,73	6,07	7,46	200.000	9,05	200.000	11,18	500.000	13,31	500.000	15,98	500.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%)	27,17	13,21	22,03	910.000	30,84	960.000	39,65	1.095.000	44,05	1.240.000	57,27	1.390.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas Produksi dan Pemasaran Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya (%)	-	1,13	1,42	2.910.000	2,83	3.050.000	3,97	3.500.000	5,67	4.000.000	6,8	4.250.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase usaha mikro yang meningkat pemasarannya (%)	-	1,13	1,42		2,83		3,97		5,67		6,8		2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas UMKM	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	3,63	4,25	4,53	500.000	5,1	550.000	5,67	600.000	6,23	650.000	6,8	700.000	2.17.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	B	6.096.336	B	6.373.879	B	6.717.573	B	7.078.451	B	7.457.374	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase potensi investasi yang teridentifikasi (%)	100	100	100	117.645	100	118.528	100	119.454	100	120.427	100	121.448	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi yang ditindaklanjuti dengan inisiasi kerjasama investasi (%)	100	100	100	311.521	100	322.098	100	333.202	100	344.863	100	357.106	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang berjalan sesuai SOP (%)	100	100	100	312.343	100	322.960	100	329.078	100	345.813	100	358.104	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Persentase perusahaan yang menyusun LKPM sesuai dengan ketentuan	Persentase perusahaan yang menyusun LKPM sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100	157.674	100	160.558	100	163.586	100	166.765	100	170.104	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya penyelenggaraan data dan informasi penanaman modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	108.178	100	108.587	100	109.017	100	109.468	100	109.941	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					-		-		-		-		-	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	4.000.000	BB	4.110.827	BB	4.180.827	BB	4.190.827	BB	4.200.827	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda (%)	29	29	29	590.000	35	622.500	41	705.000	44	732.500	57	765.000	2.19.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pembudayaan olahraga	Persentase jenis olahraga non prestasi yang dipertandingkan di tingkat provinsi (%)	20	20	20	830.000	40	930.000	60	1.030.000	80	1.130.000	90	1.230.000	2.19.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet olahraga yang berprestasi dalam kejuaraan tingkat provinsi (%)	30	30	30	1.910.000	40	2.060.000	60	2.200.000	80	2.340.000	100	2.380.000	2.19.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase anggota organisasi kepramukaan yang berprestasi (%)	3	3	3	1.050.000	5	1.001.000	6	1.151.000	9	1.201.000	12	1.251.000	2.19.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					-		-		-		-		-	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas data pemerintah, kemudahan akses data, dan peningkatan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah	Indeks satu data Indonesia (Indeks)	27,24	30,4	53,55	350.000	56,3	500.000	70,25	650.000	80,13	850.000	90,2	1.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0 000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					-		-		-		-		-	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	455	505	250.000	583	350.000	600	450.000	620	550.000	645	700.000	2.16.2.20.2.21.01.000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					-		-		-		-		-	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	60	65	70	2.920.930	75	2.979.349	80	3.038.936	85	3.099.715	95	3.161.709	1.01.2.22.0.00.02.000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Daerah yang dikembangkan (%)	68	70	75	156.060	80	159.181	90	162.365	100	165.612	100	168.924	1.01.2.22.0.00.02.000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap informasi Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal yang dikembangkan (%)	70	75	80	1.000.000	85	1.644.872	90	1.677.770	100	1.711.325	100	1.745.552	1.01.2.22.0.00.02.000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	65	70	75	5.164.176	78	5.267.459	82	5.372.809	88	5.480.265	95	5.589.870	1.01.2.22.0.00.02.000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Sumber Daya Manusia Permuseuman yang dikelola (%)	40	50	60	156.060	70	159.181	80	162.365	90	165.612	100	168.924	1.01.2.22.0.00.02.000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					-		-		-		-		-	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	A	A	A	3.600.000	A	3.967.947	A	4.084.075	A	4.352.258	A	4.485.775	2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	45	45	45	1.715.000	55	1.800.750	60	1.890.788	65	1.985.327	70	2.084.593	2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					-		-		-		-		-	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	A	A	500.000	A	650.000	A	750.000	A	800.000	A	850.000	2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan arsip SKPD	Persentase SKPD tertib administrasi kearsipan (%)	100	100	100	770.000	100	786.700	100	790.000	100	800.000	100	825.000	2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase arsip yang mendapatkan perlindungan dan diselamatkan (%)	100	100	100	144.000	100	145.880	100	150.000	100	155.000	100	160.000	2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya perizinan penggunaan arsip					75.000		75.500		77.000		80.000		85.000	2.23.2.24.0.00.02.0 000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					-		-		-		-		-	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	CC	B	B	6.000.000	B	6.300.000	BB	6.921.800	BB	7.193.950	BB	7.262.100	3.25.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Sumberdaya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	18.627,3	19.061,5	19.251,6	2.251.561	19.347,9	2.286.526	19.464	2.325.503	19.561,3	2.364.228	19.678,7	2.403.738	3.25.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	57.845,3	56.742,3	56.787,68	1.957.650	56.850,15	2.099.500	56.929,76	2.239.000	57.026,53	2.399.500	57.140,6 1	2.557.000	3.25.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Standarisasi Produk Hasil Olahan Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	164,32	168	173	132.000	180	136.500	189	140.000	299	143.500	214	147.000	3.25.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					-		-		-		-		-	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	A	A	A	5.000.000	A	5.250.000	AA	5.250.000	AA	5.250.000	AA	5.250.000	3.26.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan (%)	2,8	2,8	3	1.500.000	4	2.000.000	5	2.500.000	6	3.000.000	7	3.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pemasaran Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Berhasil di Pasarkan (%)	96	96	95	550.000	95	620.000	95	600.000	95	700.000	95	900.000	3.26.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Perlindungan HAKI	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Perlindungan HAKI (%)	25	25	35	475.000	35	475.000	40	700.000	50	750.000	65	825.000	3.26.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya Pelaku Usaha Pada Sektor Pariwisata dan Ekraf Yang Berkompeten	Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifikat Kompetensi (%)	100	96	95	475.000	95	475.000	95	675.000	95	675.000	95	775.000	3.26.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					-		-		-		-		-	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	13.497.047	100	13.739.369	100	14.416.338	100	15.127.155	100	15.873.512	3.27.0.00.0.00.04.0 000 - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B		B		B		B		B		3.27.0.00.0.00.04.0 000 - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningktanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	5.985.000	BB	5.498.000	BB	5.368.000	A	4.965.000	AA	4.840.000	3.27.0.00.0.00.05.0 000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas sarana tanaman pangan dan hortikultura	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dapat berfungsi dan ber kondisi baik (%)	13	13,04	13,04	4.374.187	13,7	4.500.000	14,38	5.000.000	15,1	5.500.000	15,85	6.000.000	3.27.0.00.0.00.04.0 000 - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya sarana perkebunan & peternakan	Persentase sarana perkebunan yang ditingkatkan (%)	60	60	60,05	3.295.000	60,09	3.619.000	61,03	3.949.000	61,05	4.384.000	61,06	4.522.000	3.27.0.00.0.00.05.0 000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase sarana peternakan yang ditingkatkan (%)	5,3	5,3	5,6		5,7		5,8		5,9		6		3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas prasarana tanaman pangan dan hortikultura	Persentase prasarana tanaman pangan dan hortikultura yang dapat berfungsi dan berkondisi baik (%)	30	31,25	31,25	2.193.113	32,56	2.200.000	33,94	2.300.000	35,39	2.400.000	36,91	2.500.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya prasarana perkebunan & peternakan	Persentase prasarana perkebunan yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik (%)	6,4	6,4	6,5	2.915.000	6,51	3.156.000	6,52	3.501.000	6,53	3.850.000	6,54	4.207.000	3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	Persentase prasarana peternakan yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik (%)	2	2	2,2		2,3		2,4		2,5		2,6		3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	15,5	15,5	15,7	350.000	15,8	385.000	15,9	422.000	16	464.000	16,2	511.000	3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Persentase pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sesuai dengan prosedur (%)	66,6	66,6	66,8	155.000	66,9	170.000	67	187.000	67,1	206.000	7,2	226.000	3.27.0.00.0.00.05.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengendalian hama dan penyakit	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang tidak terkena serangan hama penyakit (Hektar)	60	600	600	693.000	500	658.350	400	625.433	300	594.161	200	564.453	3.27.0.00.0.00.04.000 - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya rehabilitasi lahan akibat bencana pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang berhasil direhabilitasi karena terkena bencana pertanian (Hektar)	512	512	512	166.400	500	162.500	450	146.250	400	130.000	400	130.000	3.27.0.00.0.00.04.000 - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kapasitas kelompok tani	Persentase kelompok tani yang meningkat kelasnya (%)	20	20	20	2.090.175	20	2.292.689	20	2.515.129	20	2.759.472	20	3.027.891	3.27.0.00.0.00.04.000 - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani Madya peternakan dan perkebunan (%)	9,3	9,3	9,5	475.000	9,6	522.000	9,7	573.000	9,8	631.000	9,9	694.000	3.27.0.00.0.00.05.000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-		-		-		-		-	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran Berusaha	Persentase pedagang yang Memiliki izin usaha perdagangan (%)	100	100	100	60.000	100	63.000	100	66.150	100	69.000	100	72.000	3.31.3.30.0.00.02.000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang berkondisi baik (%)	70	71	72	3.547.500	74	3.815.150	76	4.195.224	78	4.408.544	80	4.607.188	3.31.3.30.0.00.02.000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya monitoring harga barang pokok dan barang penting	Persentase hasil monitoring harga barang pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan (%)	100	100	100	1.130.000	100	1.182.600	100	1.235.628	100	1.307.784	100	1.405.269	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					-		-		-		-		-	
Meningkatnya produk sesuai standar ekspor	Persentase produk yang ditangani sesuai standar yang bersertifikasi (%)	-	80	80	3.220.000	82	3.284.400	84	3.341.008	86	3.401.828	88	3.462.864	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penyelesaian kasus sengketa perdagangan (%)	100	100	100	330.000	100	336.600	100	343.332	100	351.138	100	358.080	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pedagang yang menggunakan metode pemasaran modern	Persentase pedagang yang menerapkan metode pemasaran modern (%)	30	31	32	51.000	34	52.020	36	53.060	38	54.121	40	55.202	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-		-		-		-		-	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	7.763.500	BB	8.326.080	BB	8.282.970	A	8.382.076	A	8.491.689	3.31.3.30.0.00.02.0 000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.0.00.02.000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pelaku IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai	Persentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang memiliki sumber daya produksi yang memadai (%)	35	36	38,45	660.000	41,61	693.000	44,67	726.120	47,64	759.400	50,53	772.800	3.31.3.30.0.00.02.000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya realisasi investasi industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	60	61	62	85.000	64	89.250	66	93.690	68	98.355	70	103.200	3.31.3.30.0.00.02.000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya legalitas izin usaha industri	Persentase industri yang memiliki izin usaha industri (%)	37	39	42,24	30.000	49,06	30.600	57,53	31.212	67,55	31.836	79,08	32.472	3.31.3.30.0.00.02.000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya industri yang terdaftar diSIINas	Persentase Industri yang terdaftar di SIINas (%)	4,3	5	6	123.000	8	127.300	10	131.606	12	135.918	15	139.236	3.31.3.30.0.00.02.000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					-		-		-		-		-	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Memiliki Rencana Pengembangan berkelanjutan (%)	100	100	100	84.000	100	88.200	100	92.610	100	97.241	100	102.103	2.07.3.32.0.00.02.0 000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (%)	100	100	100	84.000	100	88.200	100	92.610	100	97.241	100	102.103	2.07.3.32.0.00.02.0 000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pembinaan transmigran	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	100	100	100	63.000	100	66.150	100	69.458	100	72.930	100	76.577	2.07.3.32.0.00.02.0 000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					-		-		-		-		-	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	42.970.033	B	45.118.535	BB	47.131.360	BB	49.487.928	A	51.962.325	4.01.0.00.0.00.01.0 000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang terkelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 000 - SEKRETARIAT DAERAH		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	553.946	B	609.341	BB	670.275	BB	737.302	A	811.032	4.01.0.00.0.00.01.0 001 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 001 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	389.162	B	408.620	BB	429.051	BB	450.504	A	473.029	4.01.0.00.0.00.01.0 002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	409.714	B	430.200	BB	451.710	BB	474.296	A	498.010	4.01.0.00.0.00.01.0 003 - BAGIAN HUKUM
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 003 - BAGIAN HUKUM
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	339.336	B	356.302	BB	374.117	BB	392.823	A	412.464	4.01.0.00.0.00.01.0 004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	491.896	B	516.490	BB	542.315	BB	569.431	A	597.902	4.01.0.00.0.00.01.0 005 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 005 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	622.604	B	653.387	BB	686.421	BB	720.742	A	756.779	4.01.0.00.0.00.01.0 006 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 006 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	12.451.600	B	13.074.180	BB	13.727.889	BB	14.414.283	A	15.134.998	4.01.0.00.0.00.01.0 007 - BAGIAN UMUM
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 007 - BAGIAN UMUM
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	839.075	B	881.029	BB	925.081	BB	971.335	A	1.019.901	4.01.0.00.0.00.01.0 008 - BAGIAN ORGANISASI
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 008 - BAGIAN ORGANISASI
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	1.402.701	B	1.472.836	BB	1.546.478	BB	1.623.802	A	1.704.992	4.01.0.00.0.00.01.0 009 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 009 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	408.364	B	428.782	BB	450.171	BB	472.732	A	496.368	4.01.0.00.0.00.01.0 010 - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang terkelola dengan baik (%)	94,41	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0 010 - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					-		-		-		-		-	
meningkatnya kualitas fasilitas produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	100	854.379	100	897.097	100	941.952	100	989.050	100	1.038.502	4.01.0.00.0.00.01.0 003 - BAGIAN HUKUM
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100	35.890.888	100	37.685.432	100	39.569.703	100	41.548.189	100	43.625.598	4.01.0.00.0.00.01.0 002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan daerah	Efektifitas kerja sama daerah kinerja penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	100	100	3.280.651	100	3.608.716	100	3.969.588	100	4.366.546	100	4.803.201	4.01.0.00.0.00.01.0 001 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perumusan bahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	374.379	100	393.097	100	412.752	100	433.390	100	455.059	4.01.0.00.0.00.01.0 004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaporan pengendalian dan evaluasi administrasi pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	300.000	100	315.000	100	330.750	100	347.288	100	364.652	4.01.0.00.0.00.01.0 005 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa (%)	100	100	100	2.200.000	100	2.310.000	100	2.425.500	100	2.546.775	100	2.674.114	4.01.0.00.0.00.01.0 006 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					-		-		-		-		-	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	31.200.000	B	31.200.000	B	31.500.000	BB	32.000.000	BB	32.250.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					-		-		-		-		-	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	96,64	100	100	8.075.656	100	9.324.158	100	9.797.016	100	9.797.016	100	9.797.016	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Ketepatan Penetapan Perda Tahun (N) (Nilai)	96,64	100	100	5.711.459	100	6.525.247	100	6.525.247	100	6.525.247	100	6.525.247	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Raperda Tahun (N) (%)	96,64	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					-		-		-		-		-	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	A	A	A	6.867.621	A	7.529.296	A	8.309.824	A	9.140.865	AA	10.054.876	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah) (%)	100	100	100	4.000.000	100	4.412.403	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	5.01.0.00.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kesesuaian program antara RKPD dan Renja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian program antara RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	800.000	100	878.227	100	966.049	100	1.062.654	100	1.168.921	5.01.0.00.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kesesuaian program antara RKPD dan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program antara RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	800.000	100	924.555	100	1.017.031	100	1.118.733	100	1.230.606	5.01.0.00.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kesesuaian program antara RKPD dan Renja pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian program antara RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	800.000	100	926.101	100	1.018.710	100	1.120.583	100	1.232.639	5.01.0.00.0.00.01.000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					-		-		-		-		-	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	18.564.841	BB	19.385.650	BB	20.548.000	BB	21.745.153	A	22.379.996	5.02.0.00.0.00.02.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.02.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Menunjang Tugas dan Fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	A	A	27.894.090	A	29.288.795	A	30.753.234	A	32.290.896	AA	33.905.441	5.02.0.00.0.00.01.000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	Persentase Sarana IT yang Optimal digunakan dalam mendukung efektivitas pengelolaan Data Digital untuk mempermudah pengambilan Keputusan (%)	50	55	60	2.750.000	65	2.800.000	70	2.850.000	75	3.566.668	80	3.745.001	5.02.0.00.0.00.01.000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan SKPD dan PEMDA Kab. Kolaka yang tepat waktu (%)	100	100	100	1.200.000	100	1.250.000	100	1.350.000	100	1.400.000	100	1.500.000	5.02.0.00.0.00.01.000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran Tepat Waktu (%)	100	100	100	1.400.000	100	1.450.000	100	1.500.000	100	1.550.000	100	1.600.000	5.02.0.00.0.00.01.000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Dana Bantuan Keuangan dan Dana Lainnya	Persentase Belanja Bantuan Keuangan, Tidak Terduga dan Bagi Hasil Daerah yang terealisasi (%)	90	90	91	210.000.000	92	220.000.000	93	226.723.961	94	241.839.965	95	253.931.964	5.02.0.00.0.00.01.000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase realisasi belanja berdasarkan sumber dana yang tepat waktu dan optimal (%)	100	100	100	1.200.000	100	1.250.000	100	1.350.000	100	1.500.000	100	1.574.325	5.02.0.00.0.00.01.000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (Indeks)	2	2	2,1	3.400.000	2,2	3.500.000	2,3	3.600.000	2,4	4.500.000	2,5	4.850.000	5.02.0.00.0.00.01.000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	100	100	100	900.000	100	935.000	100	1.000.000	100	1.250.000	100	1.300.000	5.02.0.00.0.00.02.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,6	11	11,13	5.400.000	11,69	5.700.000	12,27	6.000.000	12,88	6.225.000	13,53	6.500.000	5.02.0.00.0.00.02.000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					-		-		-		-		-	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	4.500.000	BB	4.750.000	BB	4.850.000	A	5.718.415	A	6.004.336	5.03.5.04.0.00.01.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	90	90	95	575.000	95	608.750	95	639.188	95	677.184	95	711.044	5.03.5.04.0.00.01.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	75	75	95	625.000	97	656.250	97	689.063	97	723.516	97	759.691	5.03.5.04.0.00.01.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	44	44	15	580.000	15	609.000	15	647.325	15	679.691	15	713.676	5.03.5.04.0.00.01.000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	60	60	80	450.000	85	472.500	87	496.125	90	520.931	95	546.978	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					-		-		-		-		-	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan kompetensi dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	50	50	55	1.400.000	60	1.470.000	70	1.490.000	80	1.564.500	90	1.642.725	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Pengembangan kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	-	-	10	100.000	10	105.000	15	110.250	15	115.763	20	121.551	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					-		-		-		-		-	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	A	A	3.290.128	A	3.464.490	A	3.536.750	AA	3.732.350	AA	3.890.968	5.05.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	94,45	100	100		100		100		100		100		5.05.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan hasil riset	Persentase riset tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.075.000	100	1.209.508	100	1.234.250	100	1.399.650	100	1.436.300	5.05.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase riset tentang pengembangan Program Unggulan Daerah (PUD) yang dimanfaatkan (%)	100	100	100		100		100		100		5.05.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					-		-		-		-		-	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi untuk mengembangkan produk unggulan daerah (PUD)	Persentase inovasi tentang pengembangan produk unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	0	100	100	204.872	100	235.000	100	237.000	100	270.000	100	272.233	5.05.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya pemanfaatan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan daerah	Persentase Inovasi tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan (%)	0	100	100	80.000	100	91.002	100	92.000	100	98.000	100	100.500	5.05.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					-		-		-		-		-	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	10.919.178	B	10.974.386	BB	11.139.856	BB	11.696.849	BB	12.664.941	6.01.0.00.0.00.01.0 000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					-		-		-		-		-	
Menurunnya terjadinya penyelewengan/penyimpan gan baik yang bersifat anggaran maupun yang bersifat proses	Tindakanlntut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	78	79	80	6.142.118	82	6.428.360	85	6.828.914	87	7.244.495	88	7.675.856	6.01.0.00.0.00.01.0 000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	493.400	Terintegrasi (Integrated)	515.534	Terintegrasi (Integrated)	540.774	Terintegrasi (Integrated)	567.177	Dikelola (Managed)	594.799	6.01.0.00.0.00.01.000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					-		-		-		-		-	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	BB	BB	BB	61.759.061	BB	63.712.047	BB	65.345.568	A	66.106.906	A	67.044.853	KECAMATAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	80	80	83	267.978	85	372.881	90	382.875	95	440.175	95	448.797	KECAMATAN
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	20.436.643	100	20.977.960	100	21.500.333	100	21.507.415	100	21.568.897	KECAMATAN
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		-		-		-		-	
Terlaksananya kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditindak lanjuti (%)	80	85	90	6.385	95	6.385	100	6.385	100	6.385	100	6.385	KECAMATAN
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya efektivitas koordinasi pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase Koordinasi pemerintahan umum ditindak lanjuti (%)	90	90	92	153.093	94	158.847	96	164.847	98	171.104	100	177.632	KECAMATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	80	83	85	350.137	87	364.918	90	376.715	95	389.126	100	402.054	KECAMATAN
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					-		-		-		-		-	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP SKPD (Indeks)	B	B	B	3.107.177	BB	3.262.536	BB	3.425.662	BB	3.596.946	A	3.776.793	8.01.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Persentase komponen penunjang pemerintahan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kampung Berkarakter Pancasila (%)	92	93	93	2.606.000	94	2.736.300	95	2.873.115	96	3.016.771	97	3.167.609	8.01.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	TARGET	PAGU (RIBU)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Etika Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dan demokrasi (%)	100	100	100	1.779.072	100	1.900.000	100	3.394.677	100	3.564.410	100	3.742.631	8.01.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	345.000	100	362.250	100	380.363	100	399.381	100	419.350	8.01.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomoi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan ekonomi, sosial, dan budaya (%)	92	92	93	554.000	94	581.700	95	610.785	96	641.324	97	673.390	8.01.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan (%)	100	100	100	1.408.751	100	1.824.189	100	2.315.399	100	2.781.168	100	2.620.227	8.01.0.00.0.00.01.0 000 - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TOTAL KESELURUHAN					1.805.209.8 62		1.914.179.4 96		2.024.292.1 59		2.140.908.6 77		2.264.411.1 37	

Sumber: Analisis Data, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penetapan IKU tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk lima tahun ke depan. IKU Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77,08 (BB)	77,23 (BB)	77,80 (BB)	78,38 (BB)	78,95 (BB)	79,53 (BB)	80,10 (A)
2.	Nilai SAKIP	Nilai	62,10 (B)	65,31 (B)	66,85 (B)	68,39 (B)	69,92 (B)	71,46 (BB)	73,00 (BB)
3.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,45	3,50	3,58	3,65	3,73	3,80	3,88
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06	5,30	5,50	5,90	6,20	6,50	6,80
5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,67	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,25
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,29	2,43	2,26	2,10	1,94	1,77	1,61
7.	Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia	Nilai	76,2	76,88	77,64	78,41	79,18	79,94	80,71
8.	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	80,37	82,50	83,97	85,45	86,93	88,41	89,89
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,05	84,53	84,71	84,88	85,05	85,22	85,39

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Penetapan IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	83,69	84	84,5	85	85,5	86	86,5	OPD
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	6,33	9,42	8,90	8,40	7,90	7,40	6,90	RPJPD
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1.411	1.439	1.609	1.779	1.949	2.272	2.442	ESDM
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	95,86	95,89	96,05	96,15	96,25	96,30	96,40	BPS
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	77,05	84,53	84,71	84,88	85,05	85,22	85,39	KLH
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	93,56	95,06	96,56	98,06	99,56	99,89	100	BPS
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton	23.671 ,35	28.600	32.600	37.600	42.600	47.600	52.600	OPD
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	n/a	31	35	40	45	50	55	RPJPD
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	n/a	28,93	32,13	36,33	38,52	41,72	44,92	OPD
10	Indeks Risiko Bencana	poin	146,66	143,66	140,66	137,66	134,66	131,66	128,66	OPD
11	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	OPD
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	4,06	1,64	1,75	1,80	1,85	1,90	2,01	BPS
13	Rasio Penduduk	%	105,1	104	104	104	104	104	104	BPS
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	87	88	88	89	89	90	90	BPS

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	5,30	5,50	5,90	6,20	6,50	6,80	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,67	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,25	BPS
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	168,05	180,54	193,04	205,54	218,04	230,53	243,03	BPS
4	Kontribusi PDRB Kabupaten Kolaka terhadap Provinsi	%	20,10	20,35	20,5	20,64	20,79	20,93	21,08	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,59	2,43	2,26	2,10	1,94	1,77	1,61	BPS
6	Indeks Gini	angka	0,272	0,270	0,261	0,252	0,243	0,234	0,225	BPS
7	Indeks Pembangunan Manusia	angka	76,20	76,88	77,64	78,41	79,18	79,94	80,71	BPS
8	Usia Harapan Hidup	tahun	73,68	73,80	73,93	74,05	74,18	74,30	74,43	BPS
9	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,116	0,211	0,275	0,325	0,395	0,450	0,500	OPD
10	Prevalensi Stunting	%	29,7	27,60	24,84	21,16	18,48	15,35	13,15	SSGI/ SKI
11	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,38	9,40	9,50	9,65	9,75	9,85	9,95	OPD
12	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,04	13,05	13,15	13,30	13,35	13,40	13,50	OPD
13	Angka Literasi/ Numerasi	%	25	25	30	35	40	45	50	OPD
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	48,73	49,15	50,35	51,55	52,75	53,95	54,15	BPS
15	Indeks Literasi Digital	angka	n/a	60	62	65	67	69	70	OPD
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	n/a	79,15	82,15	85,15	88,15	91,15	94,15	OPD
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	78,31	80,00	80,75	81,50	82,25	83,00	83,75	OPD
18	Indeks Pembangunan kebudayaan	angka	n/a	53,00	54,10	55,20	56,30	57,40	58,50	OPD
19	Indeks Perlindungan Anak	angka	62,810	64	66	68	70	72	74	OPD
20	Indeks Pembangunan Keluarga	0-100	n/a	70,00	70,25	70,50	70,75	71,00	71,25	OPD
21	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,383	0,375	0,365	0,355	0,345	0,335	0,325	OPD
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	56,67	58	60	62	64	66	68	OPD PROV
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Angka Ketergantungan	%	27,35	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	33,25	BPS
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5,81	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	BPS
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,310	0,320	0,330	0,340	0,350	0,360	0,370	BPS
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,658	0,708	0,762	0,816	0,870	0,924	0,978	BPS
5	Rasio Kewirausahaan	%	4,39	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	4,99	OPD
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,51	68,01	70,51	73,01	75,51	78,01	80,51	BPS
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	46,51	51,51	56,51	61,51	66,51	71,51	76,51	Menda gri
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/	n/a	80,80	81,19	81,57	81,96	82,35	82,74	
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	43,98	45,67	47,36	49,05	50,25	50,73	52,40	Bappe nas
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	n/a	15,92	20,93	25,94	30,95	35,96	40,97	RPJPD
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	n/a	5,92	5,95	5,98	6,10	6,15	6,20	RPJPD
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	36,40	36,10	35,50	35,25	34,98	34,25	33,95	RPJPD
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	33,29	41,42	42,53	43,64	44,75	45,86	46,97	RPJPD
14	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai	80,37	82,50	83,97	85,45	86,93	88,41	89,89	OPD
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	n/a	81	83	85	87	89	91	RPJPD
16	Persentase Desa Mandiri	%	21	21	22	23	24	26	28	OPD
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,030	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	OPD
18	Tingkat Inflasi	%	1,99	2 - 1	2 - 1	2 - 1	2 - 1	2 - 1	2 - 1	BPS
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	nilai	71	72	73	74	75	76	77	RPJPD
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,68	3,70	3,72	3,74	3,76	3,80	4,20	OPD
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,41	3,50	3,58	3,65	3,73	3,80	3,88	OPD

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Indeks Integritas Nasional	angka	74,11	76,26	78,41	80,56	82,71	84,86	86,95	OPD
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	OPD
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	n/a	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	OPD
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	77,89	78,25	78,50	78,75	78,85	78,90	78,95	OPD
8	Indeks Rasa Aman	angka	n/a	70,08	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	RPJPD
9	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,45	3,50	3,58	3,65	3,73	3,80	3,88	BRIN
10	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3	3	3	3	3	3	4	OPD
11	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,48	4,52	4,53	4,55	4,56	4,58	4,59	OPD
12	Indeks Zakat Nasional/Daerah	Indeks	n/a	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	BAZNAS
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	74,15	76,54	79,58	82,62	85,59	88,56	91,53	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	97,23	97,70	98,00	98,31	98,61	98,91	99,22	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	18,82	19,56	23,66	27,76	31,86	35,95	40,05	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,05	62,55	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05	
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,38	56,28	59,18	62,08	64,98	67,88	70,78	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,93	70,03	71,13	72,23	73,33	74,43	75,53	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,63	63,13	64,63	66,13	67,63	69,13	70,63	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	62,71	78,00	85,92	96,47	100	100	100	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	61,21	66,09	66,84	67,59	68,34	69,09	69,84	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	73,92	74,31	75,21	76,11	77,01	77,91	78,81	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	69,7	71,14	72,64	74,14	75,64	77,14	78,64	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	70,55	71,40	72,40	73,40	74,40	75,40	76,40	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	70,31	72,15	73,15	74,15	75,15	76,15	77,15	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	58,9	59,82	62,32	64,82	67,32	69,82	72,32	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	57,26	58,82	61,22	63,62	66,02	68,42	70,82	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Angka	109	176,2	156,3	136,5	116,7	96,8	77	
2	Jumlah Kematian Balita	Orang	57	56	56	55	54	52	50	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	95,54	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	83,0	100	100	100	100	100	100	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	82,0	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	16,0	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	93	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	89,2	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	10,77	20,20	22,57	34,37	46,17	58,97	70,0	
16	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	97,9	98	98,25	98,5	99	99,5	100	
17	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
18	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	Persen	84,2	85,1	86	88	90	90	90	
19	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	0,6	16,48	32,36	48,24	64,12	80	96	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persen	23,76	29	34	39	44	49	54	
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	28,07	30,07	32,07	34,07	36,07	38,07	40,07	
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Nilai	n/a	85,60	86,01	86,41	86,80	87,20	87,60	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	85,17	87	89	91	93	95	97	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah	Persen	63,92	66,78	69,78	72,78	75,78	78,78	81,78	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	penduduk di kabupaten/kota									
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	68,44	72	76	80	84	88	92	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	14,55	16	17	19	21	23	25	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	Persen	55,05	57	59	62	65	68	71	
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	n/a	10	20	40	60	80	100	
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	10	20	30	40	50	60	
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/ non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/ dilayani Pemerintah Daerah	Hari	n/a	40	40	40	40	40	40	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	n/a	55	60	65	70	75	80	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	50	50	55	60	65	70	75	
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	40	40	45	50	55	60	70	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	40	43	47	50	52	55	60	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	n/a	1	1	1	1	1	1	
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	80	85	90	95	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	n/a	75	80	85	90	95	100	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	1,02	12,06	13,89	15,72	17,54	19,37	21,20	
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	1,02	12,06	13,89	15,72	17,54	19,37	21,20	
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	52	60	68	76	84	92	100	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	16.7	50	67	84	100	100	100	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	23,19	85	85	85	85	85	85	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	2,4	3	3	3	3	3	3	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	7,7	65	65	65	65	65	65	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	2	2	2	2	2	2	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	n/a	50	55	60	65	70	70	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	n/a	80	80	85	85	90	90	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	n/a	70	70	75	80	85	90	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/ atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/ kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	n/a	80	82	84	86	88	90	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	80	80	80	80	80	80	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang	Persen	n/a	80	82	84	86	88	90	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar									
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	n/a	80	82	84	86	88	90	
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	n/a	5	5,2	5,4	5,6	5,8	6	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	98,6	99	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
7.	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Indeks Harmoni Kabupaten	Persen	n/a	6,90	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	
2	Persentase Kampung Berkarakter Pancasila	Persen	n/a	92	93	94	95	96	97	
3	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dan demokrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	92	92,5	93	94	95	96	97	
6	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	75	75	75	75	75	75	75	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	155.58 0.000	160.00 0.000	168.00 0.000	176.40 0.000	185.22 0.000	194.48 1.000	204.20 5.050	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	75	80	80	85	85	90	100	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	20	20	20	20	20	20	20	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	Persen	74,58	75,69	76,70	77,81	78,92	79,03	80,14	
7	Persentase Pekerja informal	Persen	65,51	66,62	67,73	68,84	69,95	70,06	71,17	
8	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	n/a	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,77	91,14	91,51	91,88	92,25	92,62	92,99	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,383	0,375	0,365	0,355	0,345	0,325	0,315	
3	Persentase ARG Daerah	Persen	1,27	2	3	5	7	10	15	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	yang mendapatkan layanan komprehensif									
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persen	79,49	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/ Kota	Nilai	89,70	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	2,22	1,48	1,48	1,48	1,48	0,74	0,74	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	40	48	56	64	72	80	88	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	77,05	84,53	85	86	87	88	89	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persen	90,93	95	96	97	98	99	100	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	89,28	100	100	100	100	100	100	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persen	97	97	97	98	98	99	99	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	60	60	60	60	60	60	60	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	30	30	30	30	30	30	30	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	21	21	22	23	24	26	28	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	40	40	45	50	55	60	65	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	75	75	77	79	81	83	85	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga	Persen	75	75	77	79	81	83	85	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Masyarakat Hukum Adat									
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	2,27	2,25	2,23	2,22	2,21	2,2	2,19	
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	13,1	10,6	9,6	8,7	7,8	7,5	7,7	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	61,9	63	64,2	65,4	66,6	67,8	69	
4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	69,1	69,2	69,3	69,5	69,7	69,9	70	
5	Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Cara/Alat KB Modern (Demand Satisfied)	Persen	67,68	70	70,5	71	71,5	72	72	
6	Persentase Kehamilan Yang Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	12,3	11,9	11,5	11,3	11,1	10,7	10,7	
7	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	60,8	61,5	62,1	62,8	63,4	64	64,6	
8	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	41,5	42,5	43,6	44,2	44,7	45,2	45,2	
9	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	60,8	61,3	61,8	62,3	62,7	63,2	63,7	
10	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86	86,9	87,8	88,6	89,4	90,1	90,8	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Konektivitas	Rasio	74,9	75	77	79	81	83	85	
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	n/a	90	91	92	93	94	95	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	23,18	25,50	28,33	30,03	32,29	34,56	36,67	
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	3,63	4,25	4,53	5,10	5,67	6,23	7,34	
12	Urusan Pemerintahan									

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bidang Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi	Persen	13	15	17	20	30	35	38	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperoleh sertifikat	Persen	40	40	55	60	65	70	75	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	30	30	40	50	60	70	80	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,68 (Baik)	3,0 (Baik)	3,25 (Baik)	3,55 (Baik)	3,74 (Baik)	3,97 (Baik)	4,20 (Baik)	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	440 (cukup)	455 (cukup)	505 (cukup)	583 (Baik)	600 (Baik)	620 (Baik)	645 (Baik)	
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	60	60	65	70	71	73	75	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	48,73	49,15	50,35	51,55	52,75	53,95	54,15	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	57	60	65	65	65	67	68	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	11	16	21	26	31	36	41	
	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persen	10	20	35	45	65	80	100	
	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	24	45	70	85	90	95	100	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.627	19.061	19.251	19.347	19.464	19.561	19.678	
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	57.845	56.742	56.787	56.850	56.929	57.026	57.140	
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata									
1	Persentase pertumbuhan PDRB Penyediaan akomodasi makan, minum	Persen	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	20,2	30,1	35,3	42,1	48,4	54,6	60,1	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	17,5	21,7	25,6	30,4	35,2	40,7	45,9	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	4	2,38	2,43	2,48	2,53	2,58	2,63	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	
3	Peningkatan Produksi	Persen	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,5	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	komoditas Peternakan									
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	Persen	5	5	5	5	5	5	5	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	3,08	5,44	5,13	4,62	4,11	4,11	4,11	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah	Nilai (Milyar Rp)	2.157, 73	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450	
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten /Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Persen	18,51	22	27	32	37	43	50	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota									
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	Persen	20	25	30	35	40	45	50	
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Persen	20	25	30	35	40	45	50	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	20	25	30	35	40	45	50	
4	Urusan Penunjang Pemerintahan									
1	Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang	Persen	80	82	84	86	88	90	92	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	didukung Program Daerah									
2	Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	26,01	30	30	30	30	30	30	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,60	11,13	11,69	12,27	12,88	13,53	14,21	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	96,06	97,02	97,41	97,49	98,12	98,75	98,99	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	6	7	8	9	10	12	12	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	33,58	40	40	40	40	40	40	
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	38,66	39,71	41,22	42,04	42,76	43,38	44,35	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	70,91	71	73	75	80	85	85	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	Indeks	n/a	78,00	88,30	88,31	90,00	95,50	95,50	
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	n/a	28,00	28,50	29,00	29,30	29,60	30,00	
4	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

IKD	Indikator	Satuan	Base line Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pembangunan daerah									
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pengawasan									
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2 - 5)	3	3	3	3	3	3	4	
2	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1- 5)	3	3	3	3	3	3	4	
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	79,5	80	82	85	86	87	89	
6	Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	75,14 (Baik)	76,65 (Baik)	77,15 (Baik)	78,55 (Baik)	79,15 (Baik)	80,65 (Baik)	81,15 (Baik)	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	16,37	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	30,00	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	35,56	35,90	36,50	37,50	38,50	39,50	40,00	
7	Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	84,43	85,28	86,13	86,98	87,83	88,68	89,53	

4.2.3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045

Indikator utama pembangunan (IUP) merupakan instrumen yang mengukur capaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Berikut ini merupakan IUP Kabupaten Kolaka yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 4. 4 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Kolaka			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1) Meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	IE-7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20) Koefisien Variasi Harga antar wilayah	7,91	5,01	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan
		21) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,4	29,7	
		22) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	41,42	67,52	
	IE-11 Stabilitas Ekonomi Makro	31) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2	4	
		32) Tingkat Inflasi (%)	2,0 + 1	2,0 + 1	
		33) Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
		a) Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%) *	21,4	73,6	
		b) Aset dana pensiun/ PDB (%)	0,19	4,91	
		c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata rata Tahunan*	754.891,36	3.949.307,90	
		d) Total Kredit/PDRB (%)	22,5	71,5	
		34) Inklusi Keuangan (%)	90,64	98,9	
	IE-16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43) Ketahanan energi, air, dan pangan			
		a) Ketahanan Energi Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	532	4.640	
		c) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	189	200	
		d) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,42	0,66	
		e) Ketahanan Air			

Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Kolaka			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		f) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,47	4	
		g) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	31,77	100	
	IE-8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23) Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan
		a) Indeks Kota Berkelanjutan	65,05	69,25	
		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	81	100	
		c) Persentase Desa Mandiri (%)	0	3,09	
	IE-4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11) Rasio PDB industry pengolahan (%)	6,5	15	Meningkatnya Produktivitas Daerah
		12) Pengembangan Pariwisata			
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,56	1,04	
		b) Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	2,36	7,08	
		13) Kontribusi sektor-sektor pembentuk Ekonomi Kreatif terhadap PDB :			
		a) Kontribusi penyedia makan minum	0,345	0,381	
		b) Kontribusi industri makanan minuman	1,869	2,065	
		c) Kontribusi industry tekstil dan pakaian jadi	0,03	0,033	
		14) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	10,5	17,5	
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	0,54	1,22	

Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Kolaka			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,32	8,68	
		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,59	3,61	
		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,83	5,51	
		15) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,3	2,1	
		16) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65,5	78,5	
		17) Indeks Inovasi Daerah			
Meningkatkan SDM yang berdaya saing dan sejahtera	IE-1 Kesehatan untuk Semua	1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73	78,34	Meningkatnya kualitas SDM
		2) Kesehatan Ibu dan Anak:			
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	125	20	
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12	5	
		3) Penanganan Tuberkulosis: (%)			
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71	95	
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	90,06	98	
		4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	
	IE-2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil pembelajaran			
		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			

Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Kolaka			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		i) Literasi Membaca	25	70,59	
		ii) Numerasi	20	60,5	
		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	9,5	12,6	
		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,9	15,5	
		6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi	16,5	20,5	
		7) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	73,54	85	
	IE-14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70	75	
		40) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,45	0,2	
	IE-13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53	75	Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju
		38) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80	95	
	IE-3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	8) Tingkat Kemiskinan (%)	10,5	5,5	
		9) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,46	78,92	
		10) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	45	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	IE-5 Penerapan Ekonomi Hijau	18) Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	80,8	88,54	

Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Kolaka			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b) Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	15,92	78,54	
	IE-15 Lingkungan Hidup Berkualitas	41) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,531	0,626	
		42) Kualitas Lingkungan Hidup			
		a) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	82,39	88,68	
		b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,5	50	
		c) Pengelolaan Sampah			
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	90	97	
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh pengumpulan sampah (% RT)	31	100	
	IE-17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44) Indeks Risiko Bencana (IRB)*	171,32	145,90-124,09	
		45) Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
		a) Kumulatif	9,73	35,11	
		b) Tahunan	16,69	73,94	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, dan adaptif.	IE-6 Transformasi Digital	19) Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,92	7,5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
	IE-9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24) Indeks Reformasi Hukum*	70	100	
		25) Indeks system pemerintahan berbasis elektronik	2,6	5	
		26) Indeks Pelayanan Publik	3,5	5	
		27) Anti Korupsi			
		Indeks Integritas Nasional	72,53	87,38	
	IE-10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28) Persentase Capain Pelaksanaan hasil Ham	65	85	

Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Kolaka			Sasaran Pokok
		Indikator	Target Daerah		
			2025	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		29) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	70,08	87,46	
		30) Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	
	IE-12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35) Jumlah Kerjasama Daerah	2	8	
		36) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90	100	

Sumber: RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati Kolaka dan Wakil Bupati Kolaka periode 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Kolaka menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai penjabaran perencanaan tahunan dan lima tahunan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2025-2029 menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Kolaka untuk lima tahun, sejak pelantikan hingga berakhirnya masa jabatan di tahun 2029. Visi pembangunan Kabupaten Kolaka 2025-2029 ditetapkan bersama tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang menjadi janji politik kepala daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Selain itu, RPJMD ini juga mencakup indikasi program dan pendanaan pada masa transisi di tahun 2030. Dengan demikian, RPJMD ini menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan di masa

transisi tersebut sebelum RPJMD baru berikutnya ditetapkan. Penyesuaian ini dilakukan agar target pembangunan jangka menengah tetap terjaga kesinambungannya sekalipun terjadi pergantian periode perencanaan, serta tetap sejalan dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka 2025–2045.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa konsistensi ini, arah pembangunan mudah terpecah dan sumber daya berpotensi terbuang pada kegiatan yang tidak mendukung sasaran strategis. Sinkronisasi dilakukan mulai dari tahap perumusan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran, hingga penerjemahan ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Setiap dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga Renstra dan Renja Perangkat Daerah harus saling menguatkan dan memuat keterkaitan yang jelas. Penganggaran menjadi instrumen untuk mewujudkan perencanaan, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan harus berorientasi pada pencapaian target kinerja yang terukur. Dalam praktiknya, konsistensi ini memerlukan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, berbasis data, serta melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap prioritas pembangunan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

5.1.2 Sinergi Pendanaan Pembangunan

Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kolaka memerlukan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan yang dikelola secara terpadu, efisien, dan selaras dengan kewenangan masing-masing pihak.

Sinergi pendanaan dimaksudkan untuk memastikan setiap program dan kegiatan strategis memperoleh dukungan keuangan yang memadai, baik dari pemerintah daerah maupun dari pemangku kepentingan lain. Dukungan tersebut dapat bersumber dari APBD Kabupaten, belanja dari kementerian/lembaga, transfer pemerintah pusat termasuk dana desa dan dana alokasi khusus, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, pinjaman atau hibah luar negeri, investasi sektor swasta, serta bentuk pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan.

Agar sinergi ini efektif, diperlukan perencanaan pendanaan yang mempertimbangkan integrasi program, penghindaran tumpang tindih pembiayaan, dan pemanfaatan setiap sumber sesuai prioritas pembangunan. Kolaborasi multipihak melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan lainnya akan memperluas dukungan, memperkuat kapasitas, dan mempercepat pencapaian sasaran.

Kerangka pendanaan yang disusun dalam RPJMD ini menjadi landasan untuk mengarahkan sumber daya finansial secara tepat sasaran, menjaga konsistensi perencanaan dengan penganggaran, dan memastikan setiap belanja daerah dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka.

5.1.3 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Nasional

RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Kolaka, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, RPJMN 2025-2029, serta RTRW Kabupaten Kolaka. Keselarasan ini mencakup periode, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja utama, sasaran pembangunan, dan program prioritas daerah yang mendukung prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan rangkaian proses sistematis sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang berlaku, yang dimulai dari pengendalian perencanaan, pengendalian pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Tujuannya adalah memastikan RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman yang aktif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

5.2.1 Pengendalian Perencanaan

Pengendalian di tahap perencanaan dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan memiliki keterkaitan yang konsisten dan saling mendukung, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Pengendalian ini meliputi:

- Konsistensi tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan antar dokumen.
- Kejelasan target yang terukur serta pendanaan indikatif yang realistis.
- Penentuan prioritas pembangunan yang sesuai kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah.
- Identifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target, analisis sumber risikonya, dan perumusan langkah mitigasi yang tepat.

Pengendalian perencanaan juga berlaku pada proses perubahan RPJMD, jika terjadi ketidaksesuaian substansi atau prosedur, atau adanya peristiwa penting yang memerlukan penyesuaian arah kebijakan.

5.2.2 Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan bertujuan memastikan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan terhadap:

- Capaian indikator prioritas pembangunan.
- Efektivitas mitigasi risiko yang telah direncanakan.

- Kemajuan pelaksanaan program strategis daerah.
- Kinerja perangkat daerah dalam memenuhi indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan indikator program.

Hasil pengendalian pelaksanaan menjadi bahan untuk tindakan korektif segera, jika ditemukan penyimpangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran.

5.2.3 Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian dokumen dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk keterkaitannya dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMN, serta kebijakan nasional lainnya. Evaluasi juga menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan program pembangunan.

Hasil evaluasi digunakan untuk:

- Menyempurnakan pelaksanaan program yang sedang berjalan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan perubahan untuk RPJMD, RKPD, dan Renstra/ Renja Perangkat Daerah.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan tahunan dan jangka menengah berikutnya.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini memuat visi, misi, strategi, serta program prioritas yang menjadi pijakan utama untuk mewujudkan Kabupaten Kolaka yang berkeadilan, maju, dan unggul.

Keberhasilan implementasi RPJMD tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan memerlukan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi erat antar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta elemen pembangunan lainnya. Keterlibatan aktif semua pihak menjadi kunci agar setiap

program dan kebijakan yang telah dirancang dapat dijalankan secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan RPJMD perlu dibangun dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas, sehingga efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dapat terjamin. Dengan tersusunnya RPJMD ini, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kolaka diharapkan berjalan lebih terencana, terukur, dan berkesinambungan, selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah yang dimiliki.

Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang bermanfaat, mendorong percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka, sekaligus menguatkan posisi daerah sebagai wilayah yang berkeadilan, maju, dan unggul di tingkat nasional maupun global.

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



Suhartini,SH.,M.AP
Nip.197208261993112001



Pemerintah
Kabupaten Kolaka

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka

Tahun 2025 - 2029